JARING

Bertumbuh • Berkembang • Berdaya Saing

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TIM PENGARAH
Irwan Lubis (OJK)
Mulya E. Siregar (OJK)
Saut P. Hutagalung (KKP)

KETUA TIM
Slamet Edy Purnomo (OJK)

WAKIL KETUA I
I Made Arthajaya (KKP)

WAKIL KETUA II
Andra Sabta (OJK)

SEKRETARIAT
Mahidin (OJK)
Dian Oktoriani (OJK)
Stephanie Febriana (OJK)
Henida Ris Rumata Pardede (OJK)

MITRA PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

MITRA KADIN
Yugi Prayanto
Erwin H. Suminto

PENYUSUN

OJK
Irnal Fiscallutfi
Antonius Hari P.
Rochma Hidayati
Arfi Fajar Ariawan
Otto Fitriandy
Indra
Rianto
Silveria Verawaty Fau
Ana Theresia S.
Mohammad Yusuf Pradhana
Reyhan Adnan Ahmad
R. Golfagusta Wicaksana

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Arif Winata
Firman S.
RA. Indah Permata S.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Siwi Peni
Tambok P. Setyawati
R. Wahyoe P.
Teddy Hariyanto

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Teten Djaka Triana
M.I. Armansyah
Dimas Nur Prasetyo

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
Herman Haryanto

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
Dolly Simatupang
Koko Widyongko

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Arief Purwanto
Djoko Yoewono
Jumadi
Rino Judhistira

PT Bank Permata, Tbk
Handy Dharma Kurniawan
Dwi Rudiman

DESAIN AND LAYOUT
Sahal Firdaus

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK 4
SAMBUTAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 5
SEKAPUR SIRIH KETUA PROGRAM JARING 6
PERNJELASAN LOGO JARING 7
SEKILAS CERITA 8
TESTIMONI 9

BAB I | PENDAHULUAN 11
1.1 Latar belakang 12
1.2 Tujuan Penulisan 14
1.3 Ruang Lingkup 15

BAB II | KELAUTAN DAN PERIKANAN DI INDONESIA 17
2.1 Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 18
2.2 Infrastruktur Negara Maritim 27
2.3 Kinerja dan Potensi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan 34
2.4 Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 36

BAB III | *VALUE CHAIN* SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 43
3.1 Aktivitas Utama 44
3.2 Aktivitas Pendukung 67
3.3 Risiko dan Mitigasi Dalam Tahapan *Value Chain* 68

BAB IV | SKEMA PEMBIAYAAN 71
4.1 Profil Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan 72
4.2 Pola Pembiayaan *Existing* Perbankan & Industri Keuangan Non Bank (Sektor Jasa Keuangan) pada Sektor Kelautan & Perikanan 73
4.3 Kendala Pembiayaan Pada Sektor Kelautan dan Perikanan 78
4.4 Rekomendasi Dukungan Untuk Akselerasi Pembiayaan di Sektor Kelautan dan Perikanan 79
4.5 Kisah Keberhasilan Pembiayaan Bank Umum Pada Debitur Sektor Kelautan dan Perikanan 80

BAB V | RUANG LINGKUP DAN REGULASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 89
5.1 Ruang Lingkup 90
5.2 Regulasi yang Mendukung Perkembangan Sektor Kelautan dan Perikanan 94
5.3 Kondisi yang Menjadi Hambatan Dalam Pengembangan Bisinis Kelautan dan Perikanan 102
5.4 Analisa Regulasi yang Dapat Mendukung Pengembangan Bisnis Kelautan dan Perikanan 103

BAB VI | DUKUNGAN UNTUK SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERTUMBUH, BERKEMBANG DAN BERDAYA SAING 105
6.1 Dukungan Regulasi 106
6.2. Produk Jasa Keuangan yang Mendukung Pengembangan Usaha Sektor Kelautan Dan Perikanan 108
6.3 *Quick Wins*, Program Lanjutan dan Kerangka Regulasi 110
6.4 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) 113

Lampiran 113
1. Data 114
2. Daftar Sandi LBU & LSMK BUS-UUS 119
3. Ilustrasi Pemanfaatan Ikan dan Ragam Olahan 120
4. Daftar Nama KKMB di Indonesia 122
5. *Website* 140

OTORITAS JASA KEUANGAN

SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbinganNya, kita semua dapat terus berkarya untuk membangun kemandirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sejalan dengan program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan menempatkan agenda perluasan akses keuangan di sektor kemaritiman sebagai salah satu agenda prioritas untuk mendorong pertumbuhan industri kemaritiman dan peningkatan kesejahteraan para nelayan.

Salah satu upaya konkrit yang telah dan akan terus dilakukan adalah mendukung upaya akselerasi kemandirian ekonomi di sektor kemaritiman. Koordinasi intensif yang dilakukan dengan beberapa instansi terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Industri Sektor Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang memiliki perhatian besar terhadap sektor kemaritiman akan menjadi suatu pondasi yang kokoh untuk mewujudkan upaya tersebut. Tujuan dari upaya bersama ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran berbagai pihak dalam mendukung pengelolaan potensi ekonomi di sektor kemaritiman yang sangat besar namun saat ini belum dikelola secara optimal.

Tahap awal dari upaya ini adalah menyediakan informasi kepada industri jasa keuangan dan pelaku usaha di sektor kemaritiman dalam bentuk buku yang berisi seluruh aspek bidang kemaritiman khususnya sektor kelautan dan perikanan yang meliputi ruang lingkup, peluang dan model usaha pada setiap sub sektor kemaritiman, model pembiayaan dari industri jasa keuangan yang saat ini sudah berjalan dan juga aspek pengaturan di sektor kemaritiman. Selain itu, Buku ini juga mengulas hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian seperti potensi usaha dan pembiayaan serta langkah-langkah mitigasi risiko yang perlu dilakukan dalam pengembangan dan pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Buku ini tidak hanya bermanfaat untuk industri jasa keuangan dan pelaku usaha, tetapi juga akan bermanfaat bagi calon investor baru di sektor kemaritiman dengan memberikan pemahaman tentang potensi usaha, risiko dan *value chain* dengan bisnis penunjangnya.

Mengingat buku ini akan membuka kesadaran semua pihak mengenai potensi ekonomi yang besar di sektor kemaritiman, maka tidak berlebihan bila buku ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk ikut serta menjaga dan melestarikan potensi ekonomi sektor kemaritiman yang harus dikelola secara baik dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu disempurnakan dari waktu ke waktu. Berbagai masukan dan pandangan yang lebih kini akan semakin melengkapi kualitas Buku ini sebagai sumber inspirasi dan acuan bagi semua pihak yang peduli dan berkepentingan terhadap sektor kemaritiman. Buku ini merupakan suatu dokumen hidup (*living document)* yang perlu terus ditingkatkan kualitas informasinya sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan, regulasi dan program nasional, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan memperkaya pemahaman seluruh pihak terhadap sektor kemaritiman.

Pada kesempatan ini, saya mengajak semua pihak yang berkepentingan terhadap sektor kemaritiman khususnya industri jasa keuangan untuk memanfaatkan dengan baik Buku ini dalam mendukung terwujudnya akselerasi kemandirian dan pertumbuhan sektor kemaritiman yang kita cita-citakan bersama.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku ini. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, KADIN Bidang Kelautan dan Perikanan, serta Industri Jasa Keuangan yang terlibat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk; PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk; PT. Bank Mandiri, Tbk; PT Bank Permata, Tbk; PT Bank Bukopin, Tbk; PT. BPD Sulselbar; Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) atas kontribusi dan kerja sama yang baik.

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan

Muliaman D. Hadad, Ph.D

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya maka Buku JARING (Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline*) Kelautan dan Perikanan dapat disusun atas kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu oleh *stakeholders* dari Tim JARING, baik asosiasi maupun perwakilan perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Salah satu misi pembangunan nasional 2015-2019 yang kita emban adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Martim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional, yang akan tercermin dalam implementasi setiap Nawa Cita oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, KKP mengusung 3 (tiga) misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Terbitnya buku JARING ini adalah pada masa yang tepat. Kebijakan pemerintah untuk melakukan pemberantasan Illegal, *Unreported*, dan *Unregulated Fishing* antara lain melalui moratorium perizinan usaha perikanan tangkap untuk kapal ikan eks asing, pelarangan *transshipment*, dan pengaturan kembali penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, telah memberikan dampak yang *signifikan*. Nelayan saat ini mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak. Sementara itu, ekspor hasil perikanan ke Amerika dan Uni Eropa yang selama ini dipasok dari negara-negara Asia menurun tajam. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi Indonesia. Indonesia akan menjadi *center of gravity* pasokan ikan regional maupun global yang tentunya mendatangkan manfaat ekonomi yang sangat besar.

Hal ini tentu perlu diikuti dengan kesiapan Indonesia untuk dapat meningkatkan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan yang berkeadilan, antara lain melalui pembangunan armada perikanan nasional, sarana prasarana sistem rantai dingin, sentra pengolahan terpadu, dan sarana prasarana logistik ikan nasional. Dengan demikian, menjadi sangat strategis bagi sektor pembiayaan untuk menumbuhkan investasi di sektor kelautan dan perikanan dan kemaritiman agar kekuatan nasional sebagai poros maritim dunia segera terwujud.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi Tim Penyusun dan *stakeholders* yang telah bekerja keras memberikan sumbangan pemikiran sehingga diselesaikannya buku JARING Kelautan dan Perikanan ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan

Susi Pudjiastuti

SEKAPUR SIRIH

Ketua Program Tim Jaring OJK KKP 2015

Puji syukur kepada Allah SWT untuk segala rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga.

Sebagai sebuah bentuk kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), program JARING (Jangkau-Sinergi-*Guideline*) merupakan refleksi sinergi dari keinginan pihak-pihak yang *concern* terhadap permasalahan kemaritiman Indonesia, khususnya kelautan dan perikanan. Visi dan Misi yang saling bersinggungan serta niat luhur yang sama, menjadikan semua pihak khususnya OJK, KKP, Industri Jasa keuangan dan KADIN membuka akses yang seluas-luasnya untuk masuk ke sektor kelautan dan perikanan. Buku ini mengajak semua orang yang berkepentingan dan ingin memajukan Indonesia dari sektor kelautan dan perikanan untuk tidak melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga enggan untuk masuk.

Sektor kelautan adalah salah satu kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk sejahtera. Saat ini, harus mulai mengupayakan untuk tidak hanya meminta hasil dari sektor kelautan dan perikanan atau sekedar menangkap ikan. Tindakan pemahaman proses bisnis, pemanfaatan sumber daya manusia, inovasi dan penggunaan teknologi, serta sinergi yang positif perlu dianggap *concern* yang perlu diarahkan kembali. Tujuannya untuk menciptakan peluang bisnis serta perbaikan yang berkesinambungan untuk bisnis ini yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bersama. Untuk itu, dukungan banyak pihak sangat dibutuhkan. Mari bergerak secara nasional! Harapan kami, peluang di sektor kelautan dan perikanan dapat ditingkatkan sampai ke taraf internasional. Tagline yang kami usung kiranya mengingatkan kita semua, bahwa program ini ditujukan untuk pertumbuhan, dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Ingatlah bahwa Indonesia punya segala kelebihan yang tidak dimiliki negara lain. Kami membuka semua kemungkinan itu. Bersama kita bisa.

Kami berharap, agar buku ini menjadi bacaan yang mengarahkan dan menarik minat siapa saja yang belum melihat peluang pada sektor kelautan dan perikanan. Penulisan buku ini mengikuti langgam awam yang populer sehingga diharapkan dapat menjangkau seluas mungkin publik, agar dengan demikian tujuan pembelajaran untuk kalangan industri sektor jasa keuangan dan para pelaku dapat tercapai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendorong dan mendukung kami dalam penerbitan buku ini baik dari OJK, KKP, Industri Jasa Keuangan baik bank dan non bank. Semoga kerelaan meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran tidak sia-sia. Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, 11 Mei 2015

Slamet Edy Purnomo

1. Pengertian Kata "JARING"

Jaring merupakan salah satu alat penting yang digunakan untuk menangkap ikan oleh nelayan. Dalam penggunaannya, nelayan akan mendorongkan jaring ke tempat yang diperkirakan memiliki banyak ikan. Pada akhirnya, ikatan-ikatan yang membentuk jaring tersebut akan menangkap ikan. JARING merupakan akronim dari **Jangkau, Sinergi dan *Guideline***. Menganalogikan filosofi penggunaan jaring, Program JARING 2015 merupakan program inisiatif jangka pendek OJK (Regulator) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP (Pemerintah) untuk menjangkau sektor kelautan dan perikanan, dengan cara bersinergi dengan Pelaku Jasa Keuangan (PJK) termasuk asosiasi, dengan sasaran akselerasi pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan melalui pembuatan *guideline* kepada sektor jasa keuangan dari hulu sampai hilir (*value chain*) serta peran serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Perpaduan dari bendera dan *icon* ikan melambangkan kerjasama yang tidak terpisahkan.

2. Pengertian Logo

- **Bendera Merah Putih**
  mewakili peran OJK sebagai fasilitator antara Pelaku Jasa Keuangan dan pihak lain yang terlibat dalam upaya akselerasi pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan.
- **Huruf G**
  diwakili dengan karakter *icon* dari KKP sebagai sektor yang dimaksud pada Program JARING.
- **Warna Biru**
  mewakili laut Indonesia.

3. Pengertian Tagline

Bertumbuh, Berkembang dan Berdaya Saing

Sesuai dengan sasaran program Jaring 2015 yakni akselerasi pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan, maka pemaparan *value chain* sektor kelautan dan perikanan serta aktivitas yang terlibat di dalamnya menimbulkan optimisme baru akan tumbuhnya minat dan komitmen pelaku jasa keuangan untuk masuk dan mengeksplorasi sektor kelautan dan perikanan sehingga memampukan sektor ini berkembang dan berdaya saing bahkan sampai dunia internasional. Pada akhirnya, perkembangan sektor kelautan dan perikanan akan berkembang secara berkelanjutan.

SEKILAS CERITA

Pengepakan ikan asin di sentra perikanan Blanakan, Subang
Fotografer : Yugi Prayanto

Proses pemindangan di Desa Cicende Utara, Kab Karawang
Fotografer : Silveria

Kapal Bersandar di Tempat Pelalangan Ikan
KUD Mandiri Mina Bahari, Subang
Fotografer : Silveria

Gambar searah jarum jam: Proses olahan bandeng pindang dengan konsep *blue economy* (*zero waste*) di Gabungan Kelompok Perikanan (GAPOKAN) Syubur Jaya, Kp. Kecemek, Desa Bayur Kidul, Cilamaya Kulon, Karawang
Fotografer : Silveria

Focus Group Discussion - Otoritas Jasa Keuangan, Menara Radius Prawiro Lt 25, - 27 November *2014*

TESTIMONI

"... buku ini bisa menjadi inspirasi sekaligus referensi bagi siapapun yang membacanya, khususnya bagi pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam aktivitas pengembangan kemaritiman di Indonesia. Dengan membaca buku ini, diharapkan perbankan mendapat pencerahan tentang bagaimana secara bersama-sama menyikapi dan melakukan inisiatif-inisiatif guna mendorong dan menjadikan sektor kemaritiman sebagai garda depan perekonomian Indonesia, ... sebagai pengejawantahan dari pidato Presiden Jokowi : "sudah terlalu lama kita bangsa Indonesia memunggungi lautan"
- Sutanto - Managing Director Business Banking 2 – PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

"Buku ini mengungkapkan fakta yang membuka wawasan kita terhadap besar dan luasnya potensi kemaritiman di Tanah Air tercinta."
- Djarot Kusumajakti – Direktur Bisnis UMKM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

"Buku JARING merupakan langkah awal yang tepat untuk meningkatkan akses finansial pelaku usaha UMKM di sektor Kelautan & Perikanan. Buku ini membantu kami mengenal lebih dekat dan lebih dalam potensi dan risiko bisnis di sektor Kelautan & Perikanan. Kami mendukung penuh upaya bersama seluruh pelaku industri keuangan yang dikoordinasikan OJK, KKP dan KADIN untuk memajukan kehidupan pelaku usaha UMKM di sektor Kelautan & Perikanan.
-Mulia Salim – Direktur PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk

"sangat menarik dan membuat saya menjadi mengenal lebih jauh tentang kekayaan laut kita dan potensi bisnis di sektor ini sangat besar"
- Muliadi Rahardja – Wakil Direktur Utama PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk

"Buku ini layak dan perlu sebagai pegangan perbankan dalam rangka sosialisasi peningkatan kredit sektor maritim dan kelautan, dan salah satu cara dalam mendukung program pemerintah, ingin menjadi poros maritim dunia dan masuk 5 besar produsen perikanan dunia"
- Yugi Prayanto – Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan

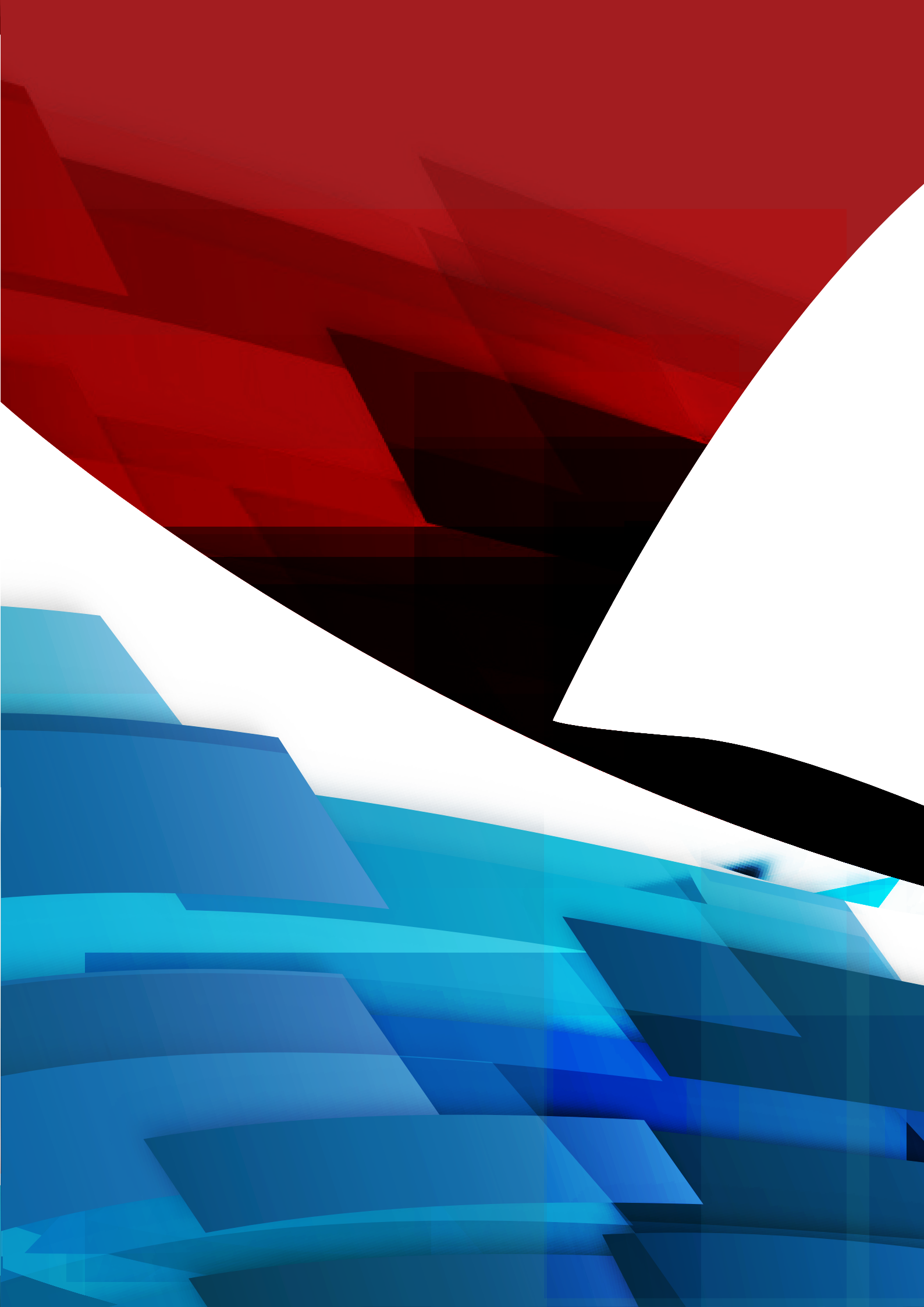

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia tercatat memiliki 13.466 pulau yang sudah dibakukan[1] dan merupakan negara maritim terbesar di dunia. Luas daratan dan lautan masing-masing sebesar 5,8 juta km^2 dan 1,9 juta km^2 menjadikan tiga per empat wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan.[2] Sampai dengan posisi September 2014, pemanfaatan isi laut yakni sektor perikanan baru berkontribusi sebesar 3,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data tersebut menunjukkan terbukanya peluang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dari sektor kelautan dan perikanan (KP), mulai dari penangkapan ikan, pengolahan dan budidaya ikan, jasa kelautan, transportasi laut, industri maritim, energi dan sumber daya mineral, bangunan kelautan dan wisata bahari.[3] Pada akhirnya, laut Indonesia diharapkan memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

> **" Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai "**

Tahun 2014 menjadi momentum bagi sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor prioritas pemerintah tercermin dari dibentuknya Kementerian Koordinator Kemaritiman. Kedaulatan maritim, pembangunan 10 pelabuhan dan renovasi pelabuhan lama, mendirikan bank nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta fasilitas pengolahan atau sentra produksi bagi nelayan menjadi agenda program Nawacita. Restorasi maritim dicapai melalui berbagai langkah/upaya antara lain (i) mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); (ii) memberantas *illegal fishing*; (iii) ekspansi budidaya laut; (iv) padat karya sektor maritim.[5]

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2015 akan melaksanakan fokus pembangunan pada pemberantasan *illegal, unreported and unregulated fishing,* dan pengembangan iklim usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berkelanjutan. Selain itu juga dilakukan pengembangan pasca panen, jaringan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, penguatan pulau-pulau kecil terluar dan kawasan konservasi, serta swasembada garam. Dari sisi pembangunan infrastruktur juga dikembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi KP. Namun demikian upaya tersebut perlu didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Potensi sektor kelautan dan perikanan tersebut masih belum menjadi prioritas pembiayaan dari bank dan non bank. Hal ini tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2014 porsi pembiayaan

[1] www.bakosurtanal.go.id, terakhir dikunjungi tanggal 3 Mei 2015. Data tersebut bersumber dari Survey LAPAN tahun 2002 dan dibahas dalam Seminar Nasional Penetapan Nama Pulau-Pulau Kecil dalam Perspektif Sejarah, tanggal 16 – 18 Juli 2008. [2] Pemaparan Kementerian Kelautan & Perikanan di Le Meridien Jakarta, tanggal 21 Januari 2014 tentang Peluang Pembiayaan Sektor Maritim di Indonesia. [3] ibid [4]. www.kpu.go.id, terakhir dikunjungi tanggal 13 Maret 2015 [5]. www.jkw4p.com/download/maritim.pdf, terakhir dikunjungi tanggal 13 Maret 2015

bank pada sektor kelautan dan perikanan hanya mencapai Rp17,9 triliun atau sebesar 0,49% dari total pembiayaan perbankan nasional. Sementara itu, pembiayaan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) kepada sektor tersebut hanya mencapai Rp1,7 triliun atau sebesar 0,7% dari total pembiayaan IKNB. Kondisi ini mendorong OJK untuk meningkatkan fungsi dan perannya guna mendukung kebijakan Pemerintah terkait pembangunan di bidang kemaritiman, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

Selaku institusi yang bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, OJK memiliki fungsi regulasi dan supervisi Sektor Jasa Keuangan (SJK). Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan SJK yang stabil dan berkesinambungan dibutuhkan capaian kondisi SJK antara lain tumbuhnya produk jasa keuangan yang terdiversifikasi, basis pengguna jasa keuangan yang semakin luas, dan SJK yang inklusif.[6] Mengingat masih banyaknya penduduk yang belum mengenal/mengakses layanan jasa keuangan, maka kebijakan inklusi keuangan diharapkan dapat mendorong terbukanya akses masyarakat kepada lembaga jasa keuangan yang lebih luas.

Inkusif

Adalah terbuka, menerima kebersamaan pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan

Dalam rangka pengembangan keuangan inklusif yang diselaraskan dengan upaya mendukung program Pemerintah di bidang Kemaritiman, OJK telah menyelenggarakan *Forum Group Discussion (FGD)* Kemaritiman pada tanggal 27 November 2014 dengan tema "Peran Strategis Sektor Jasa Keuangan (SJK) dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Kemaritiman". Kegiatan tersebut menghadirkan pihak terkait, antara lain Kementerian Kelautan & Perikanan, Sektor Jasa Keuangan (Bank, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan), TNI Angkatan Laut dan Asosiasi (Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Lembaga Pemerhati Masyarakat Bahari Indonesia) untuk menggali berbagai isu, hambatan/kendala pembiayaan, termasuk informasi mengenai potensi bisnis kelautan dan perikanan yang dapat dibiayai oleh SJK. Forum tersebut juga bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai arah, tantangan dan solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta dukungan regulasi yang diperlukan dari otoritas terkait dalam pembangunan bidang kemaritiman, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan FGD tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Muliaman D. Hadad menyampaikan bahwa potensi sumber

KEMENTERIAN DI BAWAH KOORDINATOR MENTERI KEMARITIMAN

Kelautan dan Perikanan

Pariwisata

Perhubungan

ESDM

[6] *Destination Statement OJK Tahun 2017, Departemen Manajemen Strategis OJK.*

daya alam kelautan masih cukup banyak yang belum digali. Jumlah pembiayaan perbankan pada sektor kemaritiman masih rendah, yaitu baru mencapai Rp67 trilyun atau 1,85% dari total kredit perbankan pada September 2014. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, namun dalam pencapaian hasil ekspor Indonesia hanya berada pada peringkat kelima di ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa masih besar potensi kemaritiman Indonesia yang perlu digali dan dimanfaatkan. Di samping itu, KKP telah melakukan terobosan baru dalam rangka penguatan sektor kemaritiman, antara lain melalui kebijakan moratorium kapal asing, pelarangan *transhipment* serta peningkatan disiplin kepegawaian di lingkungan KKP.[7]

Salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya pembiayaan SJK kepada sektor maritim antara lain masih terdapat persepsi dari industri jasa keuangan yang menilai bahwa sektor kemaritiman memiliki risiko relatif tinggi karena pernah menyumbang *non performing loan (NPL)* sebesar dua digit pada perbankan Indonesia. Meskipun per September 2014, NPL sektor kemaritiman telah menurun menjadi 3,99% dari total pembiayaan kemaritiman. Penyebab lainnya adalah keterbatasan informasi mengenai potensi dan *value chain* bisnis kemaritiman, sulitnya memprediksi hasil tangkapan akibat gelombang tinggi dan badai, serta penurunan hasil tangkapan akibat ekosistem laut yang rusak. Selain itu, terdapat gejala umum bagi nelayan yang bersifat struktural, yakni minimnya modal, rendahnya pendidikan dan kemampuan mengelola usaha serta penguasaan teknologi dan informasi mengakibatkan nelayan masih bergantung pada tengkulak/sistem ijon dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upaya mendorong peran SJK untuk memberikan pembiayaan ke sektor KP dimulai dengan langkah sinergi antara OJK dan KKP yang menggandeng Bank, lembaga pembiayaan/*leasing,* perusahaan asuransi, dan KADIN. Program Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* yang selanjutnya disebut JARING bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang database KP, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait. Target utama program JARING adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2015 dengan target pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, diharapkan juga meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang lebih luas, pemahaman SJK terhadap bisnis sektor KP lebih baik, sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil (peningkatan *income* per kapita), menambah jumlah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"keterbatasan informasi mengenai potensi dan *value chain* menjadi salah satu penyebab presepsi industri Jasa Keuangan menilai sektor KP memiliki risiko relatif tinggi"

Landasan utama kerja sama antara KKP dan OJK tertuang dalam Nota Kesepahaman antara KKP dan OJK tentang Peningkatan Akses Keuangan di Sektor Kelautan dan Perikanan. Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi: (i) koordinasi kebijakan dalam rangka pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan; (ii) penyediaan layanan data dan/atau informasi; (iii) Penelitian dan pengembangan; (iv) Sosialisasi dan edukasi; (v) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM; dan (vi) Kegiatan lain yang mendukung. Informasi dalam buku ini belum menguraikan rincian tindak lanjut untuk seluruh ruang lingkup yang didokumentasikan dalam Nota Kesepahaman antara KKP dan OJK, namun merupakan langkah awal dalam menyajikan data dan informasi mengenai potensi bisnis sektor Kelautan dan Perikanan yang dapat dibiayai oleh SJK. Buku ini secara bertahap akan terus disempurnakan sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat yang optimal.

[7] *Disampaikan pada FGD Kemaritiman tanggal 27 November 2014 di Otoritas Jasa Keuangan.*

1.2. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan penulisan buku ini adalah sebagai *guideline* (pedoman) dalam proses akselerasi pertumbuhan pembiayaan SJK terhadap sektor KP, yaitu:

a. Menyediakan data dan informasi secara komprehensif mengenai potensi ekonomi maritim Indonesia, khususnya sektor KP dengan tujuan agar dimanfaatkan secara optimal oleh SJK dalam mengenal dan memahami karakteristik bisnis sektor KP dari hulu sampai hilir termasuk risiko yang melekat. Cakupan rantai bisnis yang dibahas adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan serta skim pembiayaan oleh SJK.
b. Memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan, hambatan-hambatan pada saat implementasi, serta dukungan regulasi untuk meningkatkan peluang pembiayaan sektor KP. Kemajuan sektor KP tidak terlepas dari koordinasi yang sinergi dan kondusif di antara pihak yang berkepentingan (asosiasi, otoritas, SJK, dan lainnya).

1.3 Ruang Lingkup

Secara rinci, sistematika dari buku ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB II

Menguraikan Indonesia Sebagai Negara Maritim yang meliputi pengenalan terhadap potensi sumber daya kelautan dan perikanan, rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta infrastuktur kelautan dan perikanan.

BAB III

Memaparkan tentang *Value Chain* Sektor KP yang meliputi aktivitas utama dan aktivitas pendukung sektor KP di Indonesia. Aktivitas utama meliputi penangkapan ikan, budidaya perikanan, industri pengolahan, distribusi dan perdagangan, serta mekanisme perdagangan/ pembayaran dan ekspor. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, perkembangan teknologi, dan pengadaan. Selanjutnya terdapat uraian mengenai risiko-risiko dalam tahapan *value chain* berserta mitigasi risiko.

BAB IV

Menjelaskan tentang Pola Pembiayaan meliput profil pembiayaan sektor KP, pola pembiayaan yang saat ini ada di industri Perbankan & Industri Keuangan Non Bank (Sektor Jasa Keuangan), kendala pembiayaan, rekomendasi dukungan untuk percepatan pembiayaan serta kisah keberhasilan debitur Perbankan.

BAB V

Menerangkan Ruang lingkup dan Regulasi Sektor Kelautan dan Perikanan, yang meliputi ruang lingkup pihak terkait yaitu KKP, OJK dan KADIN serta regulasi KKP dan OJK terkait perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam mendukung perkembangan sektor Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya dikemukakan pula analisa kondisi yang menjadi hambatan dalam pengembangan bisnis Kelautan dan Perikanan serta analisa regulasi yang dapat mendukung pengembangan bisnis Kelautan dan Perikanan;

BAB VI

Tentang *Roadmap* sektor KP. Bab ini membahas tentang Pengembangan produk dan jasa SJK, Regulasi dan program sektor KP di masa yang akan datang melalui kerja sama OJK, KKP dan KADIN.

BAB 2

KELAUTAN DAN PERIKANAN DI INDONESIA

BAB 2
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI INDONESIA

2.1 Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Definisi Ikan Tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh Pada pasal 1 huruf (c), definisi Ikan juga termasuk *mollusca* dan *crustacea* kecuali yang termasuk dalam jenis sedenter. Definisi bebas lain tentang ikan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati perairan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntungkan sebagai makanan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Ditjen P2HP, 2010). Pedoman cara penanganan ikan yang baik (CPnIB) di unit pemasok (*Supplier*).

Sumber daya ikan

Sesuai Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, pasal 7 ayat 6 Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbaharukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor kelautan yang belum tergarap secara optimal. Dengan melihat besarnya potensi dan manfaat laut Indonesia, sudah seharusnya kelautan Indonesia menjadi penggerak baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga meningkat terus sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis, yaitu ikan kerapu, kakap dan baronang; budidaya tambak seperti udang dan bandeng; serta budidaya air tawar seperti ikan mas, gurame, patin dan lain-lain. Potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut mencapai luasan 12,55 juta hektar. Perkembangan budidaya dalam dua dekade terakhir ini lebih cepat dari penangkapan sehingga produksi budidaya melampaui produksi perikanan tangkap sejak tahun 2010. Masih luasnya lahan yang potensial untuk budidaya memberikan harapan akan meningkatnya produksi budidaya di waktu yang akan datang.

Sebagian dari produk budidaya juga sudah mulai diekspor seperti kerapu dan gurame khususnya untuk tujuan negara Asia Tenggara. Budidaya rumput laut diharapkan terus meningkat tidak hanya untuk kepentingan konsumsi tetapi juga untuk kepentingan lain seperti untuk kosmetik, dan lain-lain.

A. Potensi Perikanan Tangkap

Perikanan di Indonesia diperkirakan berpotensi sebesar 6,5 juta ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton/tahun atau ±80% dari potensi lestari. Dari JTB tersebut yang baru dimanfaatkan hanya sebesar 4 juta ton (pada tahun 2002 atau baru 78,13%). Peluang pasar hasil perikanan dapat dibagi menjadi pasar domestik dan luar negeri. Pasar domestik di Indonesia ±220 juta penduduk dan konsumsi protein per kapita ±22 kg/kapita/tahun. Sedangkan peluang pasar ekspor antara lain ke Jepang (40%), USA (15%), Eropa (20%), RRC (10%), Hongkong (5%), Singapura (5%) dan negara lainnya (5%) (DKP 2004). Letak geografis Indonesia menguntungkan pemetaan estimasi sumber daya ikan. Ikan pelagis besar dan Lobster akan banyak ditemukan di Samudera Hindia dan Selat Makassar. Sebaliknya, Ikan Pelagis Kecil akan banyak dijumpai di Selat Makassar dan Laut Arafura-Laut Timor. Sementera cumi-cumi akan banyak ditemui di Teluk Tomini.

Jenis Ikan - *Species*	Tahun						Kenaikan Rata-Rata IncreasingAverage(%)	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014*)	2009 -2014	2013 -2014
Produksi Total	4.812.235	5.039.446	5.345.729	5.435.633	5.707.013	5.779.990	3,75	1,28
Ikan - Fishes	4.327.259	4.540.145	4.713.439	4.821.574	5.085.561	5.150.330	3,56	1,27
1. tuna- Tunas	163.965	166.208	241.364	275.778	305.435	310.560.	14,66	1,68
2. Cakalang - Skipjak Tunas	355.624	348.897	372.211	429.024	481.014	464.610	6,58	0,75
3. Tongkol - Eastern Little Tunas	423.847	390.595	415.331	432.138	451.048	454.180	1,52	0,69
4. Ikan Lainnya _ OtherFishes	3.383.823	3.634.445	3.684.533	3.684.634	3.848.064	3.900.980	2,92	1,38
Binatang Berkulit Keras - Crustaceans	302.601	302.544	343.644	337.439	338.708	342.410	2,65	1,09
1. Udang - Shrimp	236.870	227.326	260.618	263.032	251.343	255.410	1,74	1,62
2. Binatang Berkulit Kera sLainnya - Other	65.731	75.218	83.026	74.407	87.365	87.000	6,29	-0,42
Crustaceans								
Lainnya - Others	182.375	196.757	288.646	276.620	282.744	287.250	10,85	1,59

Tabel 2.1 : Produksi Perikanan Tangkap di laut Menurut Komoditas Utama

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Trend pertumbuhan volume ikan tangkap di laut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan perairan umum, meskipun secara umum, terdapat peningkatan yang positif terhadap volume ikan tangkap. Besarnya volume tangkap pada ikan laut seharusnya dipengaruhi oleh jumlah nelayan yang melaut. Berdasarkan data, hal ini relatif berbanding terbalik dengan rata-rata peningkatan jumlah nelayan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yang didominasi oleh peningkatan nelayan perairan umum.

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 mencapai 6,2 juta ton atau berkontribusi sebesar 39,5% dari produksi perikanan nasional. Kontribusi menurut komoditas utama pada perikanan tangkap di laut dari mencakup penangkapan cakalang sebesar 484.610 ton, tongkol sebesar 454.180 ton, tuna sebesar 310.560 ton dan udang sebesar 255.410 ton. Nilai produksi dari perikanan tangkap pada tahun 2014 mencapai

Rp109 triliun atau meningkat sebesar 7,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian hasil tangkap tersebut seharusnya mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Data sementara tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah nelayan di Indonesia tahun 2014 mencapai 2,67 juta orang atau meningkat 1,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum Nilai Tukar Nelayan dari tahun 2009 s.d. 2014 masih diatas 100, artinya nelayan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan/budidaya ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehari-harinya. Namun, hal yang perlu dicermati adalah adanya *trend* penurunan NTN/pembudidaya ikan pada tahun 2014 sebesar 102,73 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 sebesar 105,48. Hal ini dapat merujuk pada sebuah kecenderungan penurunan tingkat kemampuan nelayan minimal untuk hidup sehari-hari.

NILAI : Rp 1.000.000,-
VALUE : Rp. 1.000.000,-

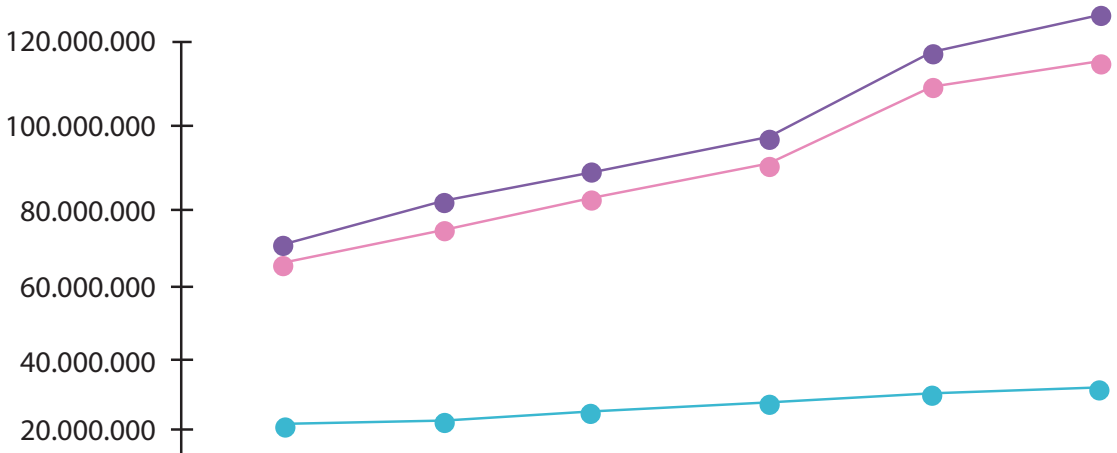

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	53.929.366	64.549.401	70.031.283	29.393.325	101.328.528	108.528.920
Laut	49.537.136	59.580.474	64.452.573	72.016.210	93.186.165	99.900.360
Umum	2.402.230	4.968.927	5.578.746	7.377.115	8.142.373	8.628.560

Keterangan- Note :
**) Angka Sementara - Preliminary Figures*
- Perikanan Tangkap : angka sementara hingga 2014 capture fishiers : update 2014

Gambar 2.1. Nilai Produksi Perikanan Tangkap, 2009 – 2014

Sumber : DJPT

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih riil mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat nelayan dapat diketahui dari Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN merupakan perbandingan total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu yang pada dasarnya merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan secara relatif. Angka yang muncul dalam perhitungan NTN adalah dengan standar skala 100, angka 100 menggambarkan pendapatan dan pengeluaran sama, di bawah 100 belum sejahtera dan di atas 100 sejahtera. Jumlah nelayan menurut sektor perikanan sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 relatif stabil dan cendrung tidak mengalami pertumbuhan jumlah nelayan didominasi oleh nelayan laut rata-rata sekitar >75% dari total nelayan. Salah satu pendukung nelayan, yakni kapal memiliki pergerakan yang perlu dicermati. Secara umum, dilihat dari sebaran jumlah perahu/kapal perikanan laut menurut kategori dan ukuran kapal, penangkapan ikan semakin banyak dilakukan dengan cara tradisional dengan menggunakan armada penangkapan yang sederhana sehingga hasil produksi atau penangkapan ikan kurang optimal. Hal tersebut tercermin dari peningkatan jumlah kapal dengan GT kurang dari 50GT. Sebaliknya, kapal dengan bobot >50GT cenderung menurun.

Katagori dan Ukuran *Catagory and Size of Boat*		TAHUN					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kapal Motor - Inboard Motor		**157.211**	**164.150**	**185.121**	**198.538**	**226.573**	**230.800**
Ukuran Kapal Motor - *Size of Boat*	<5 GT	105.121	110.163	123.748	137.587	151.939	153.960
	5 - 10 GT	32.214	31.460	35.877	37.694	46.358	48.150
	10 - 20 GT	8.842	10.988	13.201	11.583	15.208	15.810
	20 - 30 GT	7.403	7.264	8.022	7.611	8.782	8.650
	30 - 50 GT	680	857	914	917	1.074	1.070
	50 - 100 GT	1.502	1.747	1.801	1.641	1.727	1.700
	100 - 200 GT	1.135	1.290	1.204	1.167	1.127	1.110
	>200 GT	314	381	354	338	358	350

Tabel 2.2 : Katagori dan Ukuran Kapal Motor

sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

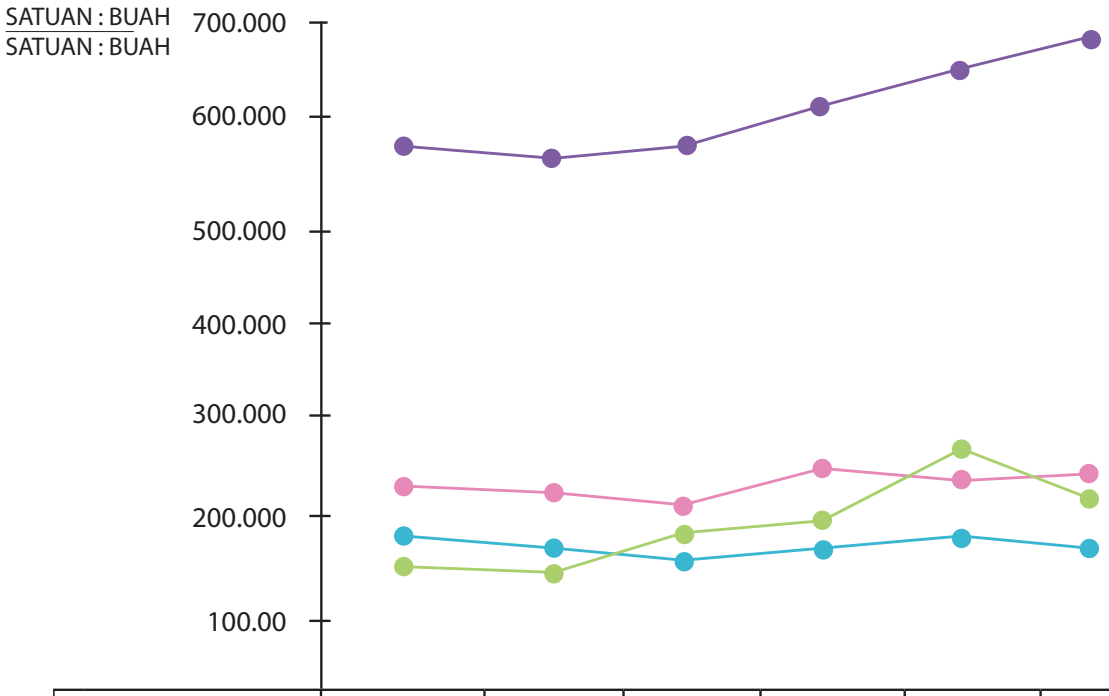

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	587.6	568.3	581.3	616.6	693.7	643.1
Perorangan	193.7	172.9	170.9	172.3	175.5	172.4
Perahu Motor Tempel	236.6	231.3	225.7	245.8	237.6	239.8
Perusahaan	157.2	164.1	185.1	198.5	226.5	220.8

Keterangan- Note :
**) Angka Sementara - Preliminary Figures*
- Perikanan Tangkap : angka sementara hingga 2014 capture fishiers : update 2014

Gambar 2.2 : Jumlah Perahu / Kapal Perikanan Laut Menurut Katagori dan Ukuran Kapal, 2009 - 2014

sumber : DJPT

Tahun 2015, target pertumbuhan pendapatan nelayan dan rumah tangga perikanan di laut diperkirakan akan mengalami peningkatan yang lebih baik sampai dengan tahun 2019. Sebaliknya, pendapatan nelayan dan rumah tangga perairan umum akan cenderung jauh berada di bawah penapatan perairan laut.

B. Potensi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya terdiri atas budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung dan budidaya sawah. Perikanan budidaya perlu dikembangkan seiring dengan beberapa areal penangkapan yang sudah mengalami *over fishing* pada beberapa wilayah perairan Indonesia yang memiliki intensitas penangkapan tinggi seperti pada perairan Selat Malaka, Pantai Utara Jawa dan Sulawesi Selatan.

Ikan yang dihasilkan dari budidaya merupakan ikan-ikan yang bernilai ekonomis tinggi seperti udang, kerapu, rumput laut, kakap, bandeng, mas, nila, lele, patin, gurame dan lain-lain. Potensi lahan perikanan budidaya di Indonesia mencapai ±17,7 juta Ha dan yang baru dimanfaatkan ± 1,13 juta Ha atau baru mencapai 6,34% dari potensi yang ada. Laut dan tambak memiliki celah untuk penetrasi pembudidayaan. Jumlah rumah tangga perikanan/perusahaan perikanan budidaya menurut jenis budidaya cukup banyak yaitu 1,68 juta, didominasi oleh sub budidaya kolam sebesar 930 ribu atau mencapai 55,42%. Namun demikian, tambak telah mencatatkan peningkatan jumlah rumah tangga budidaya yang unggul dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Dunia mencatat bahwa produksi perikanan budidaya terbesar di dunia adalah Tiongkok dengan total produksi 50 juta ton diikuti oleh Indonesia dan India masing-masing dengan total produksi 7,9 juta ton dan 4,6 juta ton. Kontribusi perikanan budidaya terhadap produksi perikanan dunia hanya mencapai 9,48%.

No	Jenis Budidaya	Potensi	Pemanfaatan	Peluang Pengembangan
1	Tambak	2.963	657.346	2.306.371
2	Kolam	541.100	131.776	409.324
3	Perairan Umum	158.125	1.798	156.327
4	Mina Padi	1.536.289	156.193	1.380.096
5	Laut	12.545.072	178.435	12.366.637
Total		17.744.303	1.125.548	16.618.755

Tabel 2.3 : Potensi dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya

sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Jenis Budidaya	2012	2013	Kenaikan
1	Laut	186.357	187.357	0,54%
2	Tambak	236.806	239.460	1,12%
3	Kolam	927.755	930.479	0,29%
4	Keramba	67.874	67.927	0,08%
5	Jaring Aping	30.411	30.590	0,59%
6	Sawah	221.244	223.251	0,91%
Total		1.670.447	1.679.064	0,52%

Tabel 2.4 : Jumlah Rumah Tangga Perikanan / Perusahaan Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya

sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rancangan sasaran produksi budidaya tahun 2015 adalah sebesar 15.599 juta ton yang terdiri dari 7,877 juta ton ikan dan 10,722 juta ton rumput laut. Peningkatan jumlah produksi tersebut dapat didukung dengan adanya peta pengembangan komoditas unggulan budidaya. Ikan Bandeng, rumput laut, ikan gurame, ikan kerapu dan udang windu telah memiliki sentra pembudidaya. Informasi sentra pembudidaya ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar dalam mengembangkan peluang-peluang baru yang belum tereksploitasi.

TAHUN	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN/KOTA
2015	11	Aceh Tenggara, Agam, Kampar, Muaro Jambi, Musi Rawas, Indramayu, Bogor, Banjar, Sumbawa, Cumba Timur dan Kota Jayapura.
2016	26	Serdang Bedagai, bintan, OKI, Oga Ilir, Banyuasin, Subang, Brebes, Pati, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Lamongan, Gresik dan Banyuwangi.
2017	50	Blitar, Kapuas, Pangkep, Pinrang, Takalar, Bireuen, Batanghari, OKU Timur, OKU Selatan, Tulang Bawang, Serang, Karawang, Pemalang, Demak, Jepara, Rembang, Boyolali, Gunung Kidul, Tuban, Sumenep, Sambas, Klungkung, Minahasa Utara dan Parigi Moutong.
2018	75	Morowali, Donggala, Maros, jeneponto, Mamuju, Bombana, Kolaka, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Rote Ndao, Kep. Sula. Kuantan Singigi, Bengkulu Selatan, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Hulu Sungai Utara, Penajam Paser Utara, Gorontalo Utara, Bone, Tulung Agung, Polewali Mandar, Pesisir Selatan dan Aceh Timur.
2019	100	Pasaman, Bengkulu Utara, Lampung Selatan, Bima, Lemata, Sikka, Kutai Kertanegara, Tojo Una Una, Muna, Konawe Selatan, Sleman, Kendal, Kota Pekalongan, Situbondo, Pidie Jaya, Limapuluh Kota, Dharmasraya, Kota Bengkulu, Belitung, Purwakarta, Singaraja, Lombok Barat, Kota Kupang dan Kota Tarakan.

Tabel 2.5 : Sentra Perikanan Budidaya Terintegrasi

sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Volume produk olahan hasil perikanan pada tahun 2014 mencapai 5,21 juta ton dengan nilai Rp3,22 triliun. Sedangkan rata-rata tingkat konsumsi ikan sebesar 37,89 kg/kapita. Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja pengolahan dan tenaga kerja pemasaran masing-masing sebesar 1.354 juta dan 4.851 juta.

Jumlah unit pengolahan ikan saat ini adalah sebesar 63.716 unit (9.000 untuk produk pindang, 36.151 unit pengasinan, 11.374 unit pengasapan dan sisanya merupakan jenis pengolahan lainnya). Dari unit-unit tersebut, 99% diantaranya adalah skala usaha mikro kecil yang tersebar parsial, yang terus memerlukan binaan dan pendampingan pemerintah baik dalam upaya meningkatkan kompetensi, kelembagaan usaha, sertifikasi, akses informasi dan teknologi, akses perluasan pasar dan akses penguatan permodalan. Jumlah unit pengolahan skala besar adalah 662 unit, yang terdiri dari 627 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan 35 unit Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL). Konsentrasi unit pengolahan ikan skala besar masih berada di kawasan Bitung (Sulut), Banyuwangi (Jatim), Benoa dan Jembrana (Bali), Makassar (Sulsel), Kendari (Sultra) dan Sorong (Papua). Selebihnya ada di kawasan Jakarta Utara, Bungus (Sumbar), Maluku dan Medan (Sumut).

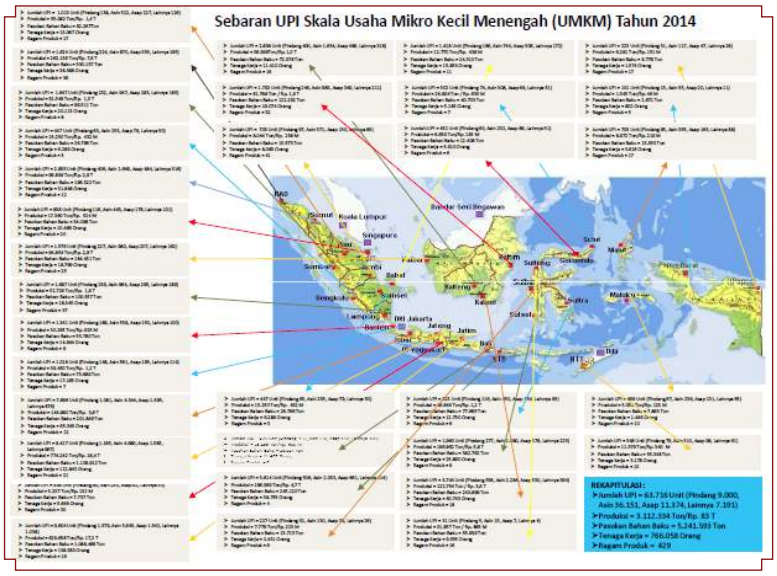

Gambar 2.3 : Sebaran UPI skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2014

sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Saat ini Ditjen P2HP Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengembangkan sentra-sentra pengolahan dengan membangun sebanyak 43 sentra. Sentra pengolahan pada dasarnya adalah sebuah kawasan dimana terdapat minimal 25 atau lebih usaha pengolahan tradisional, dimana satu sama lain memiliki hubungan fungsional horisontal dan umumnya memerlukan bahan baku yang sama dan menghasilkan produk yang relatif seragam, dengan jenis produk berupa: kerupuk/amplang, salai patin/lele, ikan asap, ikan asin kering, teri nasi/jengki, cakalang asap, ikan roa asap dan pindang. Sedangkan hasil olahan dari komoditas rumput laut dapat berupa produk *fish jelly based product*, amplang, steak rumput laut, bakso rumput laut, mi rumput laut, minuman dan manisan rumput laut, dodol dan permen rumput laut, selai rumput laut dan sebagainya. Produksi total sentra pengolahan yang ada sebesar 180.484,75 ton. Dalam rangka meningkatkan produksi budidaya perikanan, perlu diperkuat pada sisi produksi, pelatihan dan pemasaran. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program pembangunan 100 sentra perikanan budidaya terintegrasi yang akan dikembangkan pada tingkat kota maupun kabupaten. Diharapkan dengan adanya sentra perikanan budidaya terintegrasi ini, produktivitas dan pembudidayaan ikan lebih efisien. Nelayan dapat memasarkan hasil budidaya ikannya dengan harga yang lebih baik. Target pada tahun 2015 sentra perikanan mencapai 11 kota/kabupaten, tahun 2017 mencapai 50 kota/kabupaten dan tahun 2019 dapat mencapai 100 kota/kabupaten.

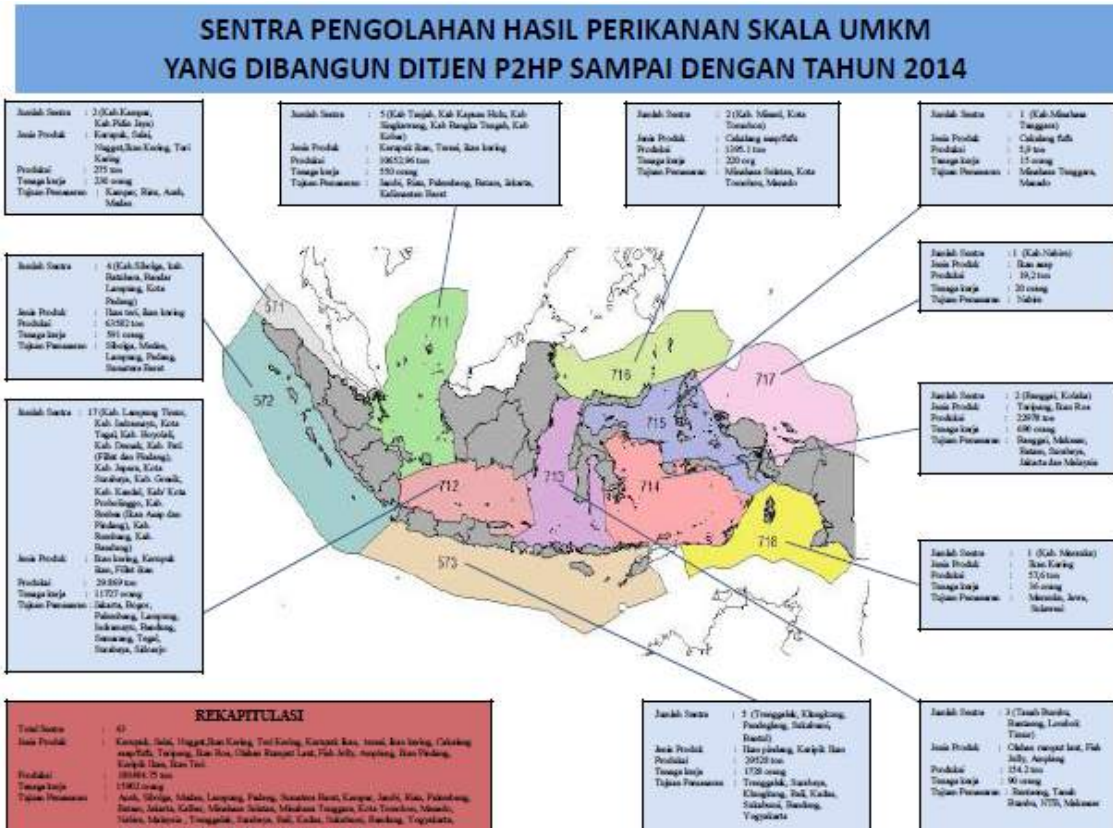

Gambar 2.4 : Dibawah ini merupakan peta sebaran sentra-sentra pengolahan:

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya menyediakan distribusi bahan baku ikan dari kawasan-kawasan produksi yang umumnya berada di kawasan timur Indonesia ke wilayah konsumen (industri dan rumah tangga) yang umumnya berada di wilayah barat, telah difasilitasi pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). SLIN pada dasarnya merupakan upaya untuk menghubungkan sisi hulu dengan sisi hilir, yang bertujuan untuk mendistribusikan bahan baku ikan dengan menjaga ketepatan baik jenis, mutu, jumlah, waktu dan keterjangkauan harga. Basis pengembangan SLIN adalah sebagai berikut:

GAMBARAN KINERJA SLIN: STABILISASI HARGA

	UPI Kendari	Distributor besar di Surabaya	Distributor kecil (Muncar, Prigi, Brondong dll)	Distributor Besar di Jakarta	Distributor kecil di Jawa Barat	Pemindang
TONGKOL						
Panen raya	3.000-4.000	6.500-7.500	7.500 – 8500	7.000-8.000	8.000-9.000	10.000-11.000
Paceklik	8.000-10.000	11.500-13.500	12.500 – 14.500	12.000-14.000	13.000-15.000	15.000-17000
Setelah SLIN	6.000-8.000	9.500-11.500	10.500 -12.500	10.000-12.000	11.000-13.000	13.000-15.000
LAYANG						
Panen raya	6.000-7.000	9.500-10.500	10.500 – 11.500	10.000-11.000	11.000-12.000	13.000-14.000
Paceklik	11.000	13.500	14.500	14.000	15.000	17.000
Setelah SLIN	8.000-9.000	11.500-12.500	12.500 – 13.500	12.000-13.000	13.000-14000	15.000-16.000
CAKALANG						
Panen raya	6.000-7.000	9.500-10.500	10.500 – 11.500	10.000-11.000	11.000-12.000	13.000-14.000
Paceklik	12.000-13.000	15.500-16.500	16.500 – 17.500	16.000-17.000	17.000-18.000	19.000-20.000
Setelah SLIN	8.000-9.000	11.500-12.500	12.500 – 13.500	12.000-13.000	13.000-14.000	15.000-16.000

Gambar 2.5: Supply Side - Tantangan konektivitas dari daerah penangkapan ke unit pengolahan Ikan

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Implementasi SLIN ke depan akan terus dikembangkan secara bertahap pada kawasan-kawasan koridor lainnya seperti pengembangan koridor Ambon-Surabaya-Jakarta, koridor Ternate-Surabaya-Jakarta dan koridor Ogotua-Surabaya.

Gambar 2.6: Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung SLIN

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya menjaga mutu dan kualitas serta keamanan pangan produk ikan, juga perlu didukung oleh Sistem Rantai Dingin (SRD), dimana pada kawasan-kawasan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya perlu didukung pengembangan sarana prasarana seperti pabrik es, *cold storage*, *air blast*, truk berinsulasi serta *freezer* dan *cool box*.

Sasaran ekspor hasil perikanan tahun 2015 adalah sebesar 6,19 juta USD, dengan tingkat konsumsi ikan rata-rata nasional sebesar 40kg/kapita, produksi hasil olahan sebesar 5,6 juta ton dan produksi nilai produk non pangan senilai Rp2,6 triliun dan diperlukan dorongan nilai investasi pengolahan dan pemasaran sebesar Rp3,5 triliun.

Upaya-upaya Perlu dilakukan untuk mendukung industrialisasi komoditas rumput laut yang saat ini baru dapat menyerap +17 – 20% dari total produksi sekitar 1 juta ton. Indonesia perlu terus mendorong tumbuhnya

Gambar 2.7: Peta Sebaran Sentra - sentra Pengolahan

sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

kawasan-kawasan industri hilir rumput laut mulai dari industri *Alkali Treated Cottonii* (ATC), *Semi Refined Carragenan* (SRC), *Refined Carragenan* (RC), pabrik agar-agar (untuk jenis gracilaria) dan pabrik formulasi hingga ke industri *end product.*

Untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian para pewirausaha budidaya rumput laut dan dalam upaya untuk membagi keuntungan secara proporsional antara industri hulu dan industri hilir, maka didorong sistem Penyangga (*buffer stock*) bahan baku rumput laut yang didukung oleh sistem resi gudang. Sistem penyangga memerlukan investasi prasarana gudang-gudang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sistem resi gudang permodalan perbankan sangat diperlukan untuk mendukung investasi prasarana tersebut

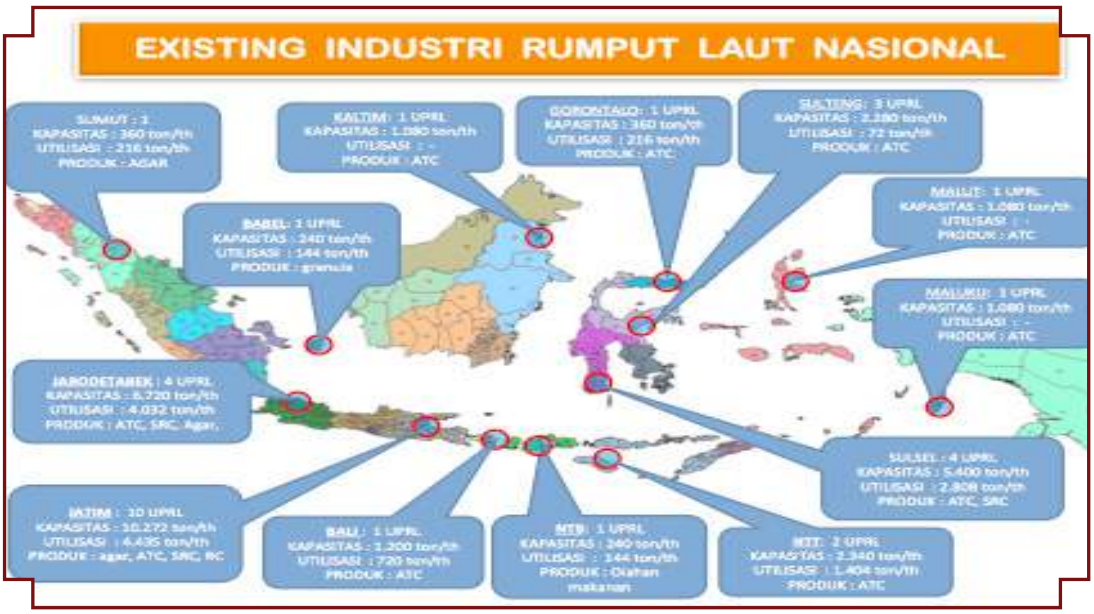

Gambar 2.8: Sebaran Industri Rumput Laut Nasional

sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

C. Potensi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indonesia memiliki jumlah pesisir dan pulau-pulau yang sangat banyak. Jumlah pulau di Indonesia ±17.504 pulau terdiri dari ±13.466 pulau bernama dan ±4.038 pulau tidak bernama. Jumlah desa tepi laut, kabupaten pesisir dan kecamatan pesisir masing-masing sejumlah 11.884 desa, 318 kabupaten dan 2.118 kecamatan. Salah satu kekayaan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah terumbu karang. Jumlah terumbu karang di Indonesia mencapai ±1.133 terumbu karang dengan kondisi sangat baik atau 75-100% tutupan karang hidup mencapai ±5% dari total terumbu karang. Terumbu Karang di Inonesia dijumpai di daerah Indonesia Barat. Total terumbu karang tahun 2010 sebanyak 1048 sempat mengalami penurunan menjadi 1.008 di tahun 2011 dan kembali meningkat di tahun 2012 menjadi 1.133 Jumlah terumbu karang di barat Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar 474 terumbu karang menjadi sebesar 504 terumbu karang di tahun 2012.

Wilayah Area	Status (%)			
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
Barat	5.86	27.48	34.01	32.66
Tengah	5.11	30.29	44.89	19.71
Timur	5.52	19.31	34.48	40.69
Indonesia	5.56	25.89	37.1	31.45

Tabel 2.6: Status Kondisi Terumbu Karang

sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kawasan konservasi laut di Indonesia terdiri dari Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Taman Wisata Perairan, Suaka Margasatwa Laut, Cagar Alam Laut, Kawasan Konservasi Perairan Daerah, Suaka Alam Perairan dan Taman Nasional Perairan dengan jumlah 116 buah dan luas kawasan ±9,6 juta Ha. Sedangkan luas *mangrove* di Indonesia mencapai 3,85 juta Ha dengan luas terbesar pada Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Utara. Potensi lain adalah Produktivitas garam di Indonesia yang cukup besar yaitu pada tahun 2014 dengan luas lahan produksi 27 ribu Ha mampu memproduksi 2,5 juta ton garam. Kontribusi produksi garam terbesar masih didominasi oleh Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 822 ribu ton dengan 3 Kabupaten penyumbang terbesar yaitu Kabupatan Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Peringkat berikutnya dalam produksi garam adalah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mewujudkan swasembada garam, saat ini sedang disusun *road map* swasembada garam 2017 yang melibatkan beberapa instansi pemerintah dimana ada beberapa strategi kegiatan yang dilaksanakan seperti *Masterplan* dan DED, PUGAR dan Korporatisasi Usaha Garam Rakyat berbasis klaster yang akan dilaksanakan oleh KKP.

No	Rincian	2011		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kabupaten	40	40	40	40	40	40	40	40
2	Jumlah Kelompok	750	1.728	3.035	3.473	3.347	3.528	898	2.268
3	Jumlah Petambak	14.400	16.399	29.746	32.610	22.422	32.447	6.289	18.802
4	Jumlah BLM (Rp. 000)	72.000.000	69.021.870	84.736.300	84.541.835	54.952.400	54.394.803.097	37.192.500	36.326.3441,1
5	Luas Lahan Produksi (Ha)	4.365,00	10.972,73	16.569,75	20.870,82	22.043,00	24.207,83	26.833,82	27.897,59
6	Produksi Garam (Ton)	349.200,00	856.356,72	1.326.017,54	2.020.109,70	1.845.000	1.041.472.55**	2.500.000	2.502.891,19

Tabel 2.7: Keragaan Garam Indonesia

sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.2 Infrastruktur Negara Maritim

Dalam mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah nusantara serta memberikan kesejahteraan bangsa, maka pada tanggal 21 Maret 1980, Pemerintah mengumumkan Deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE I). Zona ini merupakan jalur laut di luar laut wilayah Indonesia sejauh 200 mil laut dari garis pangkal atau garis dasar dan dideklarasikan dalam Perpu No 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung Konsepsi ZEE Indonesia adalahh semakin terbatasnya persediaan ikan. Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan ikan untuk bahan makan. Sedangkan hasil perikanan dunia akan berada di bawah tingkat permintaan. Sehingga melalui ZEE ini, Indonesia dapat melindungi sumber-sumber daya hayati yang ada di laut.

Pengelolaan sumber daya laut di Indonesia melibatkan Pelaku Usaha dan Infrastruktur. Pelabuhan menjadi sebuah media perantara atau pintu masuk bagi ikan di darat, yang memiliki alat-alat dengan rancangan khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. *Crane* dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula di sekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang.

Direktorat Jenderal Perikanan (1994), membagi Pelabuhan Perikanan (PP) berdasarkan fungsi, kapasitas akomodasi, distribusi dan ruang lingkup menjadi:

- Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A).
- Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B)
- Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C)

- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pelabuhan Perikanan dikaitkan dengan kapasitas dan kemampuan pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan dapat dipetakan karakteristiknya menjadi sebagai berikut:

No	Kriteria Pelabuhan Perikanan	PPS	PPN	PPP	PPI
1	Daerah operasional kapal ikan yang dilayani	Wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEEI) dan perairan internasional	Perairan ZEEI dan laut teritorial	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, wilayah ZEEI	Perairan pedalaman dan perairan kepulauan
2	Fasilitas tambat/ labuh kapal	>60 GT	30-60 GT	10-30 GT	3-10 GT
3	Panjang dermaga dan Kedalaman kolam	>300 m dan >3 m	150-300 m dan >3 m	100-150 m dan >2 m	50-100 m dan >2 m
4	Kapasitas menampung Kapal	>6000 GT (ekivalen dengan 100 buah kapal berukuran 60 GT)	>2250 GT (ekivalen dengan 75 buah kapal berukuran 30 GT)	>300 GT (ekivalen dengan 30 buah kapal berukuran 10 GT)	>60 GT (ekivalen dengan 20 buah kapal berukuran 3 GT)
5	Volume ikan yang didaratkan	rata-rata 60 ton/hari	rata-rata 30 ton/hari	-	-
6	Ekspor ikan	Ya	Ya	Tidak	Tidak
7	Luas lahan	>30 Ha	15-30 Ha	5-15 Ha	2-5 Ha
8	Fasilitas pembinaan mutu hasil perikanan	Ada	Ada/Tidak	Tidak	Tidak
9	Tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembangan industri perikanan	Ada	Ada	Ada	Tidak

Tabel 2.8: Kriteria Pelabuhan Perikanan

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2010)

A. Infrastruktur

Pelabuhan Perikanan adalah salah satu paduan dari wilayah perairan tertentu yang tertutup dan terlindung dari gangguan badai dan merupakan tempat yang aman untuk akomodasi kapal-kapal yang sedang mengisi bahan bakar, perbekalan, perbaikan dan bongkar muat barang (Guckian dalam Hudaibiah, 2007). Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian (1981) Pelabuhan Perikanan adalah Pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasarannya.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat berlabuh atau bertambahnya perahu/ kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan (*Anonimous*).

Mengacu pada fungsinya, maka dari pelabuhan perikanan, diharapkan menjadi Pusat pengembangan masyarakat nelayan yang mengakomodir kegiatan nelayan baik nelayan berdomisili maupun nelayan pendatang. Selain itu, berfungsi juga sebagai tempat berlabuh, (*landing*) dan tambat/merapat (*mouring*) kapal-kapal perikanan untuk melakukan berbagai kegiatan misalnya untuk mendaratkan ikan (*unloading*), memuat perbekalan (*loading*), istirahat (*berthing*), perbaikan apung (*floating repair*) dan naik dock (*docking*). Sehingga sarana atau fasilitas pokok pelabuhan perikanan seperti dermaga bongkar, dermaga muat, *dock/ slipway* menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut. Pelabuhan Perikanan juga menjadi tempat pendaratan ikan hasil tangkapan (*unloading activities*).

Pelabuhan Perikanan memiliki berbagai fungsi yaitu fungsi sebagai fasilitas pokok (*basic fascilities*) dan fasilitas Fungsional (*functional fascilities*). Selain memiliki fasilitas dermaga bongkar dan lantai dermaga (*apron*) yang cukup memadai, untuk menjamin penanganan ikan (*fish handling*) yang baik

maka Pelabuhan Perikanan harus bersih dan didukung pula oleh sarana/fasilitas sanitasi dan wadah pengangkat ikan.

Ikan merupakan komoditi yang mudah busuk. Sesudah diangkat dari kapal, ikan harus segera ditangani secara tepat untuk mempertahankan mutu ikan secara maksimum. Sistem pemasaran menjadi kompleks karena sifat komoditas yang mudah busuk. Beberapa cara pelayanan untuk mendistribusikan produk perikanan yang dapat dilakukan antara lain melalui tempat pelelangan ikan di pelabuhan perikanan dan pasar induk di luar kota sebelum akhirnya sampai pada konsumen. Ikan juga dapat diangkut dengan kapal langsung ke pasar di kota konsumen tanpa melewati tempat pelelangan ikan. Opsi lainnya, para pengolah membeli ikan untuk bahan mentah di tempat pelelangan atau setelah membeli ikan di pelelangan ikan, tengkulak memasok para konsumen di lingkungan perkotaan seperti restoran, pabrik, rumah sakit, pasar swalayan dan sebagainya.

TPI

Tempat Pendaratan Ikan (TPI) adalah tempat para nelayan mendaratkan hasil tangkapanya atau merupakan pelabuhan perikanan skala lebih kecil (*Anonimous*).

Hasil tangkapan tersebut selanjutnya dibongkar dari kapal ikan yang memerlukan pelayanan yang mudah dan cepat demi terlaksananya pekerjaan dalam serangkaian proses seperti sortasi, pencucian, penimbangan, penjualan dan pengepakan di tempat pelelangan ikan (TPI) tersebut. Setelah itu sebagian ikan dikirim untuk konsumsi lokal dalam bentuk segar, sebagian lainnya ke pabrik untuk *processing* dan sisanya ke tempat pembekuan ikan untuk diawetkan. Tempat ini merupakan salah satu fasilitas fungsional yang disediakan di setiap Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dengan demikian TPI merupakan bagian dari pengelolaan PPI. Fasilitas lain yang disediakan oleh PPI adalah fasilitas dasar seperti dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran serta fasilitas penunjang seperti gudang, MCK, keamanan dan lain sebagainya.

Berdasarkan tingkat teknologi alat tangkap nelayan dapat dikatagorikan sebagai berikut:

- Nelayan tradisional (*peasant-fisher*) nelayan yang mengunakan teknologi penangkapan sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.
- Nelayan semi modern (*post-fisher)* nelayan yang telah menggunakan teknologi penangkap ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor semakin membuka peluang nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih jauh dan memperoleh surplus dari hasil tangkapan tersebut karena mempunyai daya tangkap yang lebih besar. Pada jenis ini, nelayan sudah berorientasi pasar.
- Nelayan modern (*modern-fisher*) nelayan yang mengunakan teknologi penangkapan modern dan efektif dilengkapi dengan mesin bantu. Mengunakan motor laut (*marine engine*) yang memiliki kemampuan jelajah hingga perairan Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas, kemampuan lama operasional di laut hingga berbulan-bulan. Menggunakan alat penangkap ikan dengan tingkat eksploitasi produktif. Dan palkah penyimpanan ikan dilengkapi dengan mesin pendingin.
- Nelayan komersial (*commercial-fisher*) nelayan yang usaha penangkapan ikan berorientasi pada keuntungan finansial. Skala usahanya sudah besar dan dicirikan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja. Teknologi yang digunakan skala modern memerlukan kompetensi keahlian dan keterampilan dalam pengoperasiannya.
- Nelayan industri (*industrial-fisher*) nelayan atau pelaut perikanan yang berperan sebagai operator pekerja produksi penangkapan ikan dalam usaha

Menurut Suryono (2003) Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelenggaraannya.

penangkapan ikan yang terorganisasi dalam bentuk badan usaha yang produknya diolah untuk orientasi pasar domestik atau ekspor, menghasilkan pendapatan yang relatif tinggi untuk pemilik maupun nelayan.

B. Mengenal Jenis Kapal & Perlengkapannya

Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkut ikan pengolah ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan. Berdasarkan statistik perikanan tangkap Indonesia kategori dan ukuran perahu/kapal perikanan untuk setiap jenis alat tangkap dibedakan menjadi perahu tanpa motor (*non-powered boat)* dan perahu/ kapal (*powered boat).* Sesuai dengan Standar Internasio-nal Klasifikasi Statistik Kapal Per-ikanan (*International Standard Statistical Classification of Fishing Vessels*, ISSCFV – FAO 1985),kapal perikanan terbagi atas 2 (dua) jenis kapal perikanan, yakni jenis kapal penangkap ikan, dan jenis kapal bukan penangkap ikan (kapal perikanan lainya). Jenis kapal penangkap ikan terbagi atas 11 (sebelas) tipe kapal dan kapal perikanan lainya terbagi atas 7 (tujuh) tipe kapal. Klasifikasi kapal dengan menggunakan "singkatan standar" sesuai dengan Standar International Klasifikasi Statistik Kapal Perikanan, seperti terlihat pada tabel 2.10

Jenis-jenis perizinan terkait kepemilikan kapal:

- Setiap orang yang akan melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI (meliputi perairan Indonesia, ZEEI, dan Perairan Umum Daratan seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lain yang dapat diusahakan) dan laut lepas wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap.
- Kewajiban memiliki SIUP, dikecualikan bagi nelayan kecil (orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT); dan pemerintah pusat/daerah, perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian /eksplorasi perikanan.
- Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI

Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional terdiri atas berbagai fasilitas untuk melayani berbagai kebutuhan lainnya di areal pelabuhan tersebut seperti bantuan navigasi, layanan transportasi, layanan suplai kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas, tempat penanganan dan pengolahan ikan, fasilitas darat untuk perbaikan jaring, perbengkelan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal, layanan kebutuhan air bersih dan perbekalnan melaut dan lain sebagainya (Murdiyanto 2003 dalam Sulistyani, 2005).

No	Kategori Perahu/Kapal		
1	Kapal Tanpa Motor	Jukung	
		Perahu Papan	Kecil, sedang, besar
2	Perahu/Kapal	Motor tempel	
		Kapal Motor	< 5 GT, 5–10 GT, 10-20 GT, 20-30 GT, 30-50 GT, 50-100 GT, 100-200 GT, 200-300 GT, 300-500 GT, 500-1000 GT, >=1000 GT

Tabel 2.9: Kategori dan ukuran perahu /kapal

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Klasifikasi Kapal Perikanan	Singkatan Standar
Kapal penangkap ikan	
a. Kapal pukat tarik	TO
b. Kapal penggaruk	DO
d. Kapal jaring angkat	NO
e. Kapal jaring insang	GO
f. Kapal pemasang perangkap	WO
g. Kapal tali pancing	LO
h. Kapal menggunakan pompa untuk penangkapan	PO
i. Kapal serba guna/ aneka guna	MO
j. Kapal penangkapan untuk rekreasi	RO
k. apal penangkapan tidak ditetapkan	FX
Kapal perikanan lainnya	
a. Kapal induk	HO
b. Kapal pengangkut	FO
c. Kapal rumah sakit	KO
d. Kapal survei dan perbandingan	BO
e. Kapal riset perikanan	ZO
f. Kapal latih perikanan	CO
g. Kapal perikanan lainnya	VOY

Tabel 2.10: Klasifikasi Kapal Perikanan

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal meliputi:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha dibidang perikanan. SIUP diterbitkan dalam bentuk;
   a. SIUP perorangan;
   b. SIUP perusahaan; dan
   c. SIUP penanaman modal
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. SIPI diterbitkan dalam bentuk;
   a. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal
   b. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan;
   c. SIPI untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan
   d. SIPI untuk kapal latih atau penelitian/ eksplorasi perikanan
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yaitu harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan. SIKPI diterbitkan dalam bentuk ;
   a. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan.
   b. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat;
   c. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan;
   d. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;
   e. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan; dan
   f. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
4. Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (RA-PIPM) yaitu keterangan tertulis yang memuat persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal. Salah satu penentuan besaran kapal adalah menggunakan *Gross Tonnage* (GT). Pengukuran besaran volume kapal perikanan dilakukan pada bagian ruangan–ruangan yang tertutup dan dianggap kedap air yang berada di dalam kapal dan dinyatakan dalam Gross *Tonnage* kapal dengan menggunakan satuan "*Register Tonnage* (1 RT = 100 ft3 = 2,8328 m3). Sesuai ketentuan, kapal dengan volume di bawah 5 GT perlu didaftarkan sedangkan kapal dengan volume 5GT ke atas perlu diregistrasi. Volume ruangan tertutup dalam kapal terdiri dari volume ruang tertutup yang terdapat di bagian atas dan bawah dari geladak utama. Geladak utama kapal adalah geladak kapal yang menyeluruh dari haluan sampai buritan kapal, yang dianggap sebagai geladak kekuatan kapal. Sebagian besar kapal perikanan memiliki 1 (satu) geladak kapal, maka geladak utama sama dengan geladak kekuatan kapal. Bangunan di atas kapal (*super structure*) merupakan bangunan kapal yang terletakdi atas geladak utama dan mempunyai lebar bangunan atas sama dengan *moulded* kapal. Apabila lebar bangunan atas lebih kecil dari 96 % lebar moulded kapal, maka bangunan di atas geladak utama dianggap sebagai rumah geladak (*deck house*).

C. Tipe Alat Tangkap Ikan

1. Pukat Kantong (*Seine Net*)

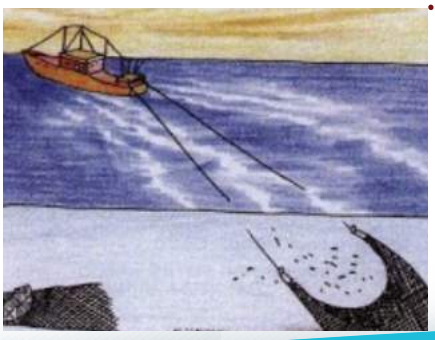

Pukat Kantong adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yg terbuat dari jaring & terdiri dari 2 (dua) bagian sayap, badan dan kantong jaring. Bagian sayap pukat kantong (*seine net*) lebih panjang dari pada bagian sayap pukat tarik (*trawl*). Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan pelagis dan demersal. Pukat Kantong terdiri dari Payang, Dogol dan Pukat Pantai.

2. Pukat Cincin (*Purse Seine*)

Pukat cincin atau jaring lingkar (*purse seine*) adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang atau trapesium, dilengkapi dengan tali elastis yang dilewatkan melalui cincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring (tali ris bawah), sehingga dengan menarik tali elastis bagian bawah jaring dapat dikuncupkan sehingga gerombolan ikan terkurung di dalam jaring.

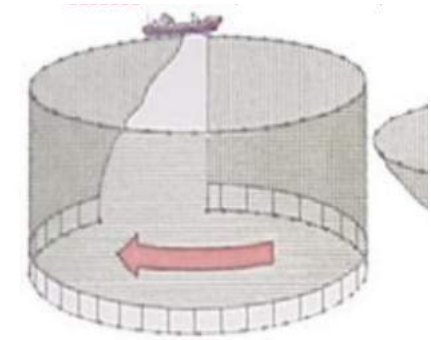

3. Jaring Insang (*Gill net*)

Jaring insang adalah alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris atas dan sejumlah pemberat pada tali ris bawah. Ada beberapa *gill net* yang mempunyai penguat bawah (*srampat/selvedge*) terbuat dari saran sebagai pengganti pemberat. Tinggi jaring insang permukaan 5-15 meter & bentuk gill net empat persegi panjang atau trapesium terbalik. Tinggi jaring insang pertengahan 5-10 meter dan bentuk *gill net* empat persegi panjang. Tinggi jaring insang dasar 1-3 meter dan bentuk *gill net* empat persegi panjang atau trapesium. Bentuk *gill net* tergantung dari panjang tali ris atas dan bawah.

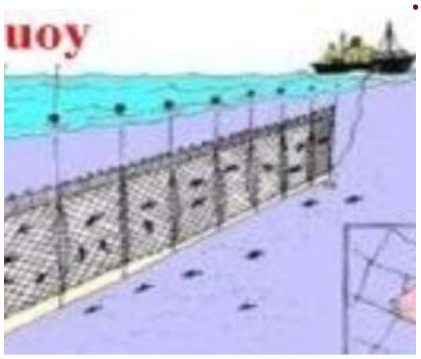

4. Jaring Angkat (*Lift Net*)

Jaring angkat adalah alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring persegi panjang atau bujur sangkar yang direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bambu (bingkai kantong jaring) sehingga jaring angkat membentuk kantong.

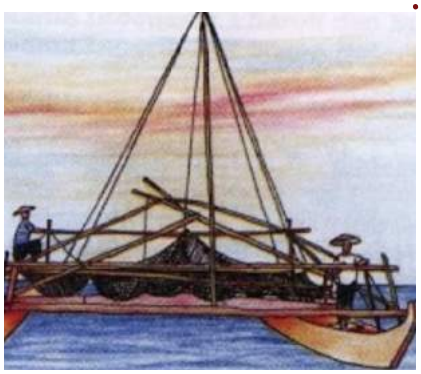

5. Pancing (Hook and Lines)

Pancing adalah alat penangkapan ikan yang terdiri dari sejumlah utas tali dan sejumlah pancing. Setiap pancing menggunakan umpan atau tanpa umpan, baik umpan alami ataupun umpan buatan. Alat penangkapan ikan yang termasuk dalam klasifikasi pancing, yaitu rawai (*long line*) dan pancing.

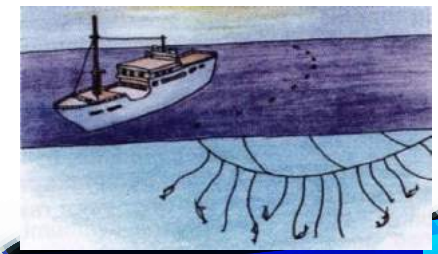

6. Perangkap

Perangkap adalah alat penangkapan ikan berbagai bentuk yang terbuat dari jaring, bambu, kayu dan besi, yangg dipasang secara tetap di dasar perairan atau secara *portable* (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu. Umumnya ikan demersal terperangkap atau tertangkap secara alami tanpa cara penangkapan khusus.

7. Alat Pengumpul Rumput Laut (*Sea Weed Colector*)

Alat pengumpul rumput laut adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan rumput laut, terdiri dari pisau, sabit dan alat penggaruk. Pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan tangan dan pisau atau sabit sebagai alat pemotong dan alat penggaruk sebagai alat pengumpul rumput laut. Hasil potongan rumput laut dimasukkan ke dalam keranjang.

8. Muroami

Muroami adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap yang panjang, badan dan kantong jaring (*cod end*). Pemasangannya dengan cara menenggelamkan muroami yang dipasang menetap menggunakan jangkar. Pada setiap ujung bagian sayap serta di sisi atas kedua bagian sayap dan mulut jaring dipasang pelampung bertali panjang. Untuk menarik jaring ke arah belakang, menggunakan sejumlah perahu/kapal yg diikatkan pada bagian badan dan kantong jaring. Muroami dipasang di daerah perairan karang untuk menangkap ikan-ikan karang.

9. Alat Tangkap Lain-Lain (*Others*)

Lain-lain adalah alat penangkap ikan lainnya yang belum termasuk dalam klasifikasi alat penangkap ikan di atas.

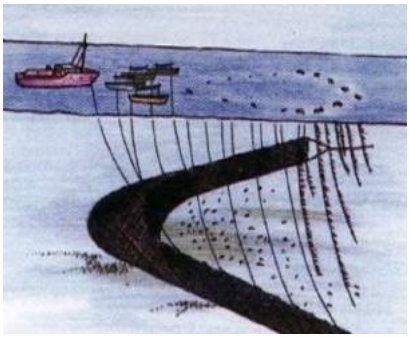

2.3 Kinerja dan Potensi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan

PDB Perikanan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,97%. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang besarnya 5,1% dan pertumbuhan PDB Pertanian dalam arti luas yang besarnya 3,3%. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun 2014 mencapai Rp. 340,3 triliun. Angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya di sektor hilir. Melihat pertumbuhan yang terus positif dan tingginya nilai PDB Perikanan serta besarnya potensi ekonomi sektor kelautan, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang prospektif untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

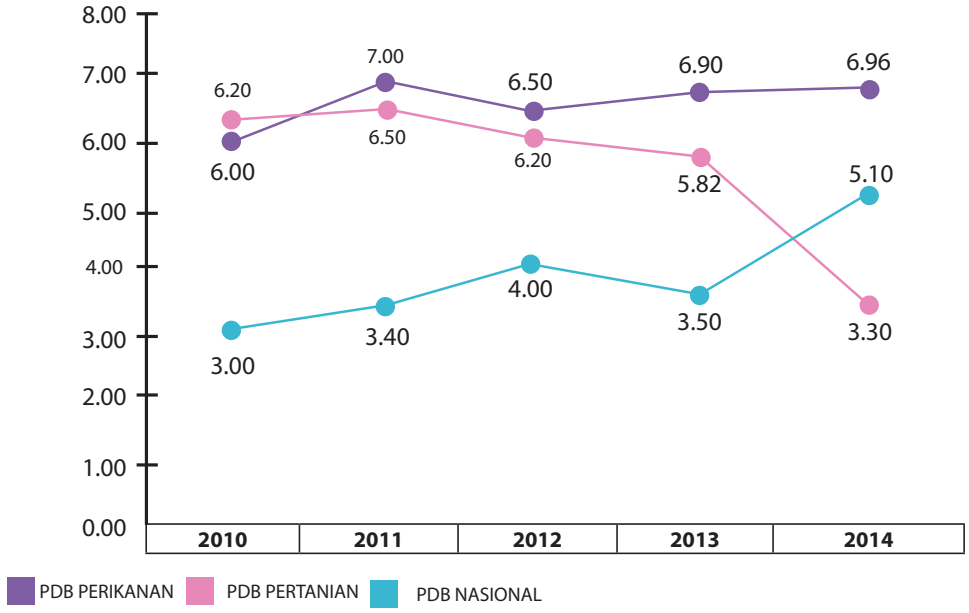

Gambar 2.9: PDB Nasional

sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

A. Produksi Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,72 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 14,52 juta ton (termasuk rumput laut).

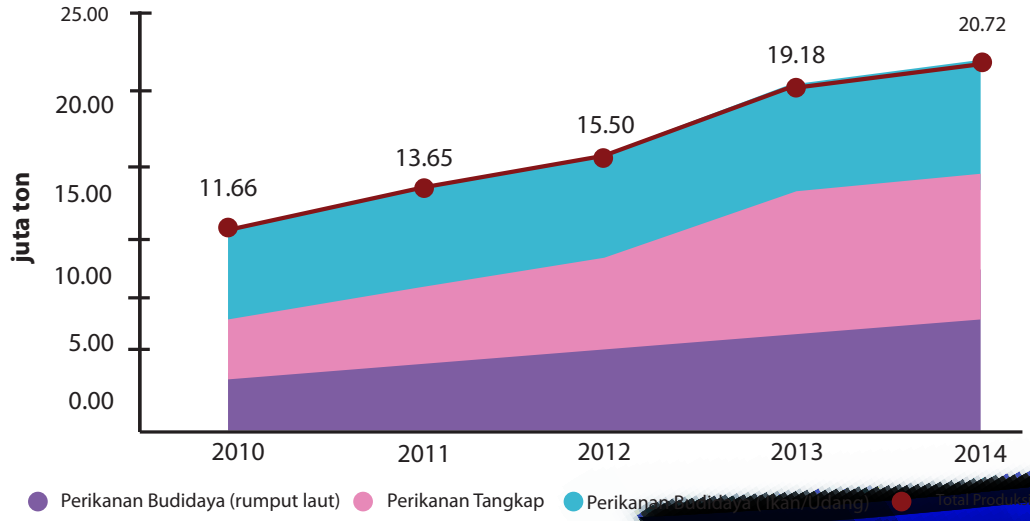

Gambar 2.10: Produksi Perikanan

sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

B. Produksi Garam

Produksi garam rakyat tahun 2014 mencapai 2,5 juta ton. Capaian tersebut didukung oleh capaian produksi garam rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 42 kabupaten/kota. Angka tersebut meningkat dari 0,8 juta ton di tahun 2011, meningkat menjadi 2,02 juta ton tahun 2012 dan kembali turun menjadi 1,04 juta ton tahun 2014.

C. Ekspor Hasil Perikanan

Ekspor hasil perikanan tahun 2014 mencapai USD 4,64 miliar. Capaian nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor komoditas udang yang mencapai USD 2,09 miliar dan diikuti oleh komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,69 miliar pada tahun 2014

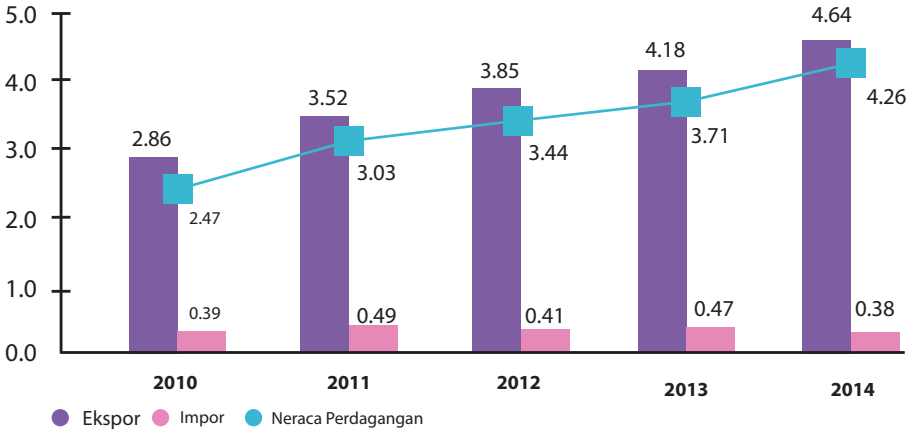

Gambar 2.11: Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan

Sumber: Kemaritiman, kelautan dan perikanan

D. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 37,89 kg/kapita. Capaian tersebut didukung oleh kampanye nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang dilaksanakan di seluruh provinsi.

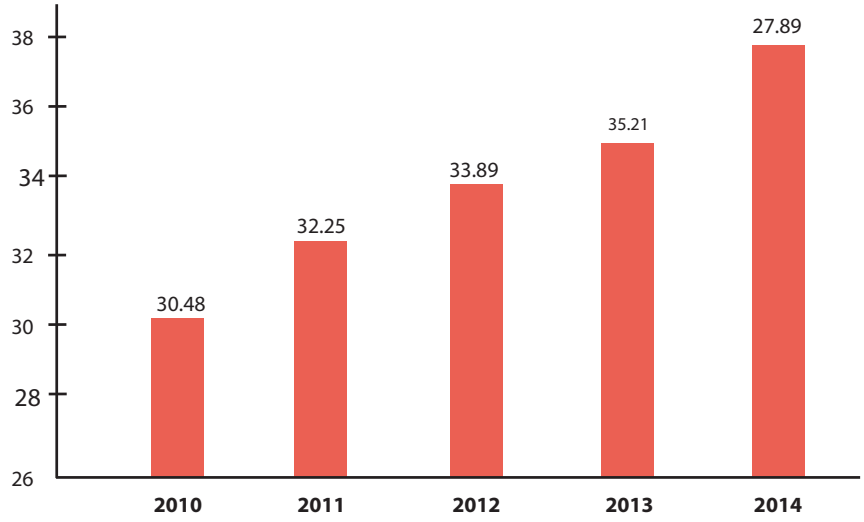

Gambar 2.12: Konsumsi Ikan

sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.4. Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

A. Visi, Misi , Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Visi :

"Mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Misi :

- Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan :

Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

B. Sasaran strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan menjabarkan 3 misi yang telah ditetapkan yakni "Kedaulatan", "Keberlanjutan" dan Kesejahteraan" yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective, customer prespective, internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

Prespective	Sasaran Strategis
Stakeholders Prespective	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Customer Perspective	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Yang Bertanggungjawab, Berdaulat, dan Berkelanjutan
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan bagi Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Internal Process *Perspective*	Tersedianya Kebijakan Pembangunan yang Mendukung Kesejahteraan
	Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berdaulat
Learning and Growth Perspective	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian
	Tersedianya Data dan Informasi yang Valid, Handal, dan Mudah Diakses
	Terwujudnya Pranata Kelembagaan Birokrasi KKP yang Berkepribadian
	Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntable

Tabel 2.10: Sasaran strategis

***sumber: Kementerian** Kelautan dan Perikanan*

C. Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan

" Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai "

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah:

- Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
- Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan
- Mengembangkan kompetensi SDM dan IPTEK inovatif yang berkepribadian
- Membangun kemandirian pemerintahan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 meliputi:

1. **Memberantas *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing*, dilaksanakan dengan strategi :**
   a. Memperkuat pelaksanaan kerangka regulasi
      Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) *review* kerangka regulasi pembangunan kelautan dan perikanan serta formulasi dan harmonisasi, termasuk peningkatan kapasitas *legal drafter,* (2) pengembangan sistem perlindungan nelayan tradisional, pembudidaya skala kecil, dan masyarakat kelautan dan perikanan dan (3) diseminasi dan evaluasi berkala atas pelaksanaan kerangka regulasi.
   b. Menata sistem perizinan usaha perikanan
      Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (i) pengkajian stok sumberdaya ikan di 11 WPPNRI, (2) penyiapan basis data potensi SDI dan perizinan usaha yang diterbitkan, (3) penerapan manajemen kuota penangkapan ikan, (4) pengelolaan sistem perizinan dan peningkatan efektivitas perizinan yang akuntabel dan transparan dengan prinsip berkelanjutan, (5) monitoring dan pengembangan sistem perizinan sesuai dengan ketentuan internasional, (6) pengembangan model dan mekanisme partisipasi publik dalam proses perencanaan, *monitoring*, dan kepatuhan dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan dan (7) pengembangan armada perikanan nasional.
   c. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
      Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) pengkajian dan penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumberdaya perikanan, (2) pengembangan sistem *monitoring* dan pelaporan kapasitas penangkapan ikan dan (3) pengkajian sumber penerimaan baru dari sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip berkelanjutan
   d. Meningkatkan kapasitas pengawasan
      Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya, (2) pengembangan sistem pengawasan dan pemantauan berbasis informasi dan teknologi, (3) pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, (4) penguatan kelembagaan Satuan Tugas Pemberantasan dan Penanggulangan IUU *Fishing*, (5) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pengawasan, (6) peningkatan kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, (7) penguatan kerjasama regional dan internasional, (8) pemberian sanksi yang tegas yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran dan (9) penguatan pengawasan di perbatasan.

2. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai berikut:

a. Memperkuat sistem pengelolaan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) penetapan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di setiap WPPNRI, (2) penguatan kelembagaan pengelola WPPNRI, termasuk revitalisasi Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (FKPPS), (3) pengaturan penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan, (4) pengembangan alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang ramah lingkungan, (5) peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan organisasi perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organization*), (6) penguatan kerjasama antar instansi terkait dan kerjasama regional dan internasional, (7) penguatan pengawasan di WPP dan (8) penguatan peran basis data termasuk penyempurnaan data statistik, pengembangan observer, penguatan *Log Book* penangkapan ikan, serta penguatan data kapal perikanan.

b. Meningkatkan perlindungan jenis ikan tertentu

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) larangan ekspor benih ikan tertentu, (2) larangan penangkapan jenis ikan tertentu, (3) perlindungan *spawning ground* dan *nursery ground*, (4) konservasi jenis ikan tertentu dan (5) pengawasan peredaran dan perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan dilarang.

c. Penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) penyusunan rencana tata ruang laut nasional, (2) penyusunan rencana zonasi kawasan laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan prioritas pada rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah dan (3) pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Rehabilitasi ekosistem dan pengelolaan kawasan konservasi

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) rehabilitasi wilayah pesisir dan di sentra produksi perikanan, (2) pengendalian pencemaran, mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim, (3) peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, (4) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim dan (5) pengawasan kawasan konservasi perairan.

e. Mendayagunakan pulau-pulau kecil

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) pengembangan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar, (2) pengembangan kawasan ekowisata maritim, (3) pengembangan kawasan pembangunan kelautan dan perikanan terintegrasi di pulau prioritas dan (4) mendorong penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB.

3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan

a. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan serta daya saing usaha kelautan dan perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan produksi perikanan yang bermutu dan bernilai tambah untuk mencapai tingkat pasar premium, (2) pengembangan usaha garam menuju swasembada garam nasional, (3) pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), (4) pengembangan Sistem Informasi Nelayan Pintar, (5) pengembangan sistem karantina ikan, (6) pengembangan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, (7) pengembangan akses pasar dan *market intellegence*, (8) pengembangan sistem penyangga harga ikan, rumput laut dan garam, (9) pengembangan sentra perikanan terpadu yang diintegrasikan dengan kawasan minapolitan, (10) pembangunan pasar ikan terintegrasi, (11) pengembangan komoditas ekspor, (12) peningkatan konsumsi ikan dan gizi masyarakat, (13)

pengembangan sentra kuliner berbasis ikan, (14) pengembangan produk kelautan dan perikanan, (15) pengembangan pelabuhan perikanan yang mendukung konektivitas tol laut, (16) penguatan sistem pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan di sentra produksi, (17) pengembangan sarana prasarana di sentra produksi, (18) peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan (19) pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional

b. Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas usaha kelautan dan perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan kapasitas dan efisiensi usaha, (2) pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) perikanan, (3) penguatan kelembagan kelompok masyarakat, (4) pengembangan pakan mandiri, (5) penerapan teknologi anjuran yang ramah lingkungan, (6) pengembangan konversi gas ke BBG untuk kapal nelayan, (7) pemberdayaan perempuan dalam pengembangan usaha, (8) peningkatan akses permodalan, (9) pengembangan mata pencaharian alternatif dan (10) penciptaan wira usaha baru

4. Mengembangkan SDM yang Kompeten dan Iptek yang Inovatif

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kelautan dan perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan kapasitas SDM KP berbasis kompetensi dan penciptaan SDM baru terampil dan ahli, (2) peningkatan keterampilan masyarakat dalam penerapan iptek dan teknologi tepat guna, (3) pemberian akses pendidikan bagi anak pelaku utama di satuan pendidikan lingkup KKP, (4) penyelenggaraan program pendidikan vokasi bidang KP dengan pendekatan Teaching Factory, (5) peningkatan jumlah dan kapasitas kelembagaan pendidikan KP sebagai pusat rujukan dan lembaga sertifikasi SDM KP, (6) peningkatan kerjasama kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengkayaan/pemanfaatan sumber belajar, (7) penguatan kelembagaan dan kerjasama untuk peningkatan kapasitas SDM KP, (8) pengembangan materi uji kompetensi keahlian bidang KP, (9) pengembangan budaya dan wawasan bahari (maritim), (10) pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan, (11) pengembangan karakter menjadi nelayan hebat dan pembudidaya ikan mandiri dan (10) pengembangan *technopark* melalui *inkubator* kewirausahaan KP.

b. Mengembangkan iptek kelautan dan perikanan yang inovatif
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) pengembangan kerjasama pemanfaatan hasil litbang KP oleh Unit Kerja Eselon I KKP, K/L terkait, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta industri, (2) pengembangan *road map* litbang KP nasional, antara lain dengan penguatan jejaring perguruan tinggi yang memiliki jurusan KP untuk pemetaan sumber daya litbang KP dan pengembangannya, (c) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis, (d) pengembangan sistem informasi induk dan benih serta penyediaan calon induk dan benih unggul untuk masyarakat, (e) peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam antara lain melalui kegiatan eksplorasi biota laut, pengembangan bioteknologi, serta pengembangan iptek untuk masyarakat (IPTEKMAS), (f) pengembangan pusat data dan informasi ilmiah kelautan nasional, (g) percepatan dan perluasan penerapan dan alih teknologi hasil inovasi dan (h) pengembangan *technopark* berbasis perikanan rakyat.

5. **Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel**
   a. Meningkatkan kinerja organisasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP
      Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) penataan kelembagaan, (2) penyiapan peraturan perundang-undangan, (3) penerapan manajemen kinerja melalui penerapan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) dan pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), (4) integrasi sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja KKP, (5) penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan profesionalisme, (6) pengembangan budaya kerja, (7) peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), (8) penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis dan (9) peningkatan efektivitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
   b. Meningkatkan kualitas data dan informasi serta kualitas pelayanan publik
      Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) transparansi dan modernisasi sistem data dan informasi perikanan (open *government policy*), (2) penguatan data statistik kelautan dan perikanan, (3) peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan manajemen pengendalian kinerja pelayanan publik dan (4) penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

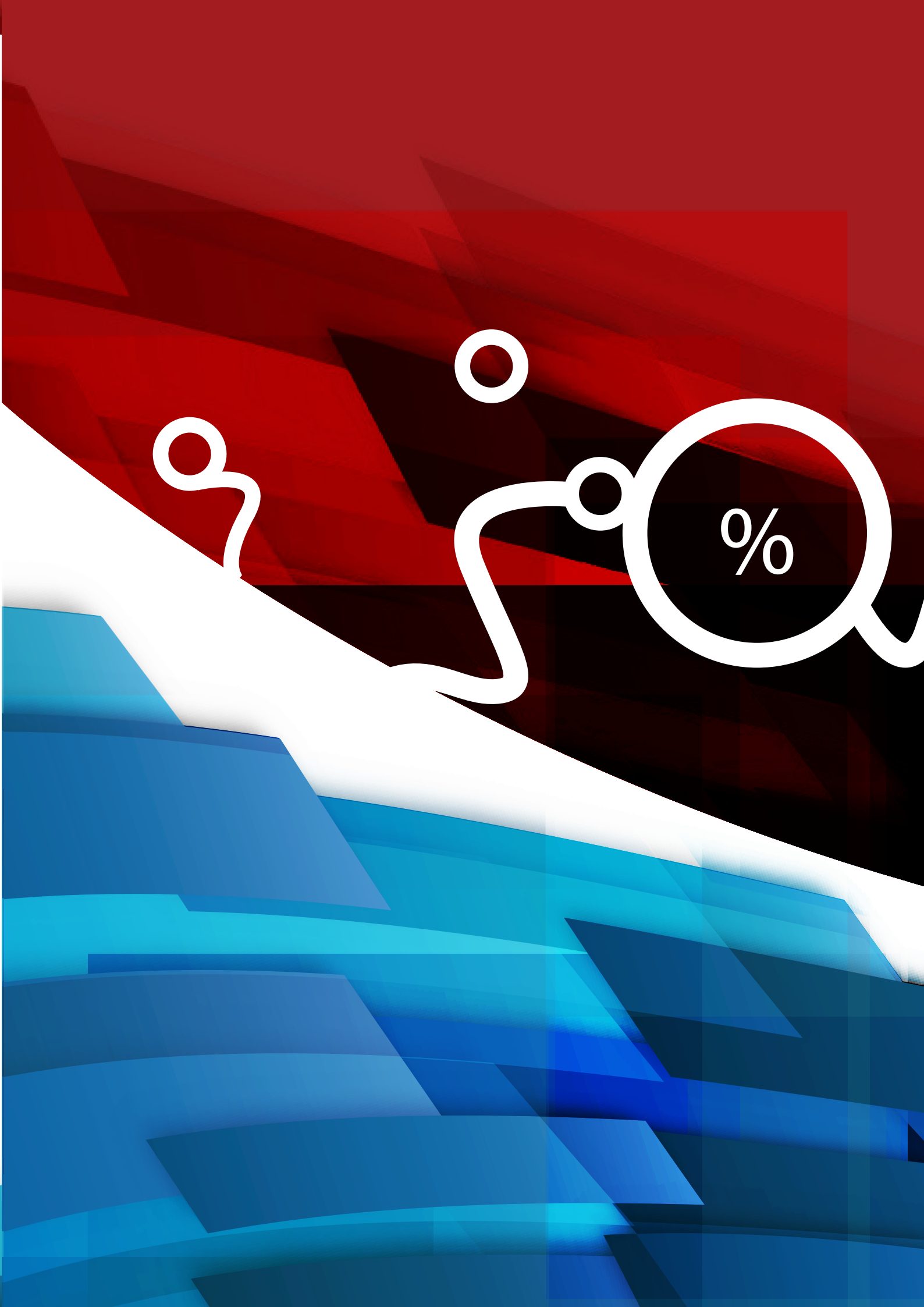

BAB 3

VALUE CHAIN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB 3

VALUE CHAIN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia memiliki *Value Chain* yang terdiri dari aktivitas Utama dan Pendukung dengan mengacu pada model Porter (1985) dan De Silva (2009) dapat digambarkan sebagai berikut :

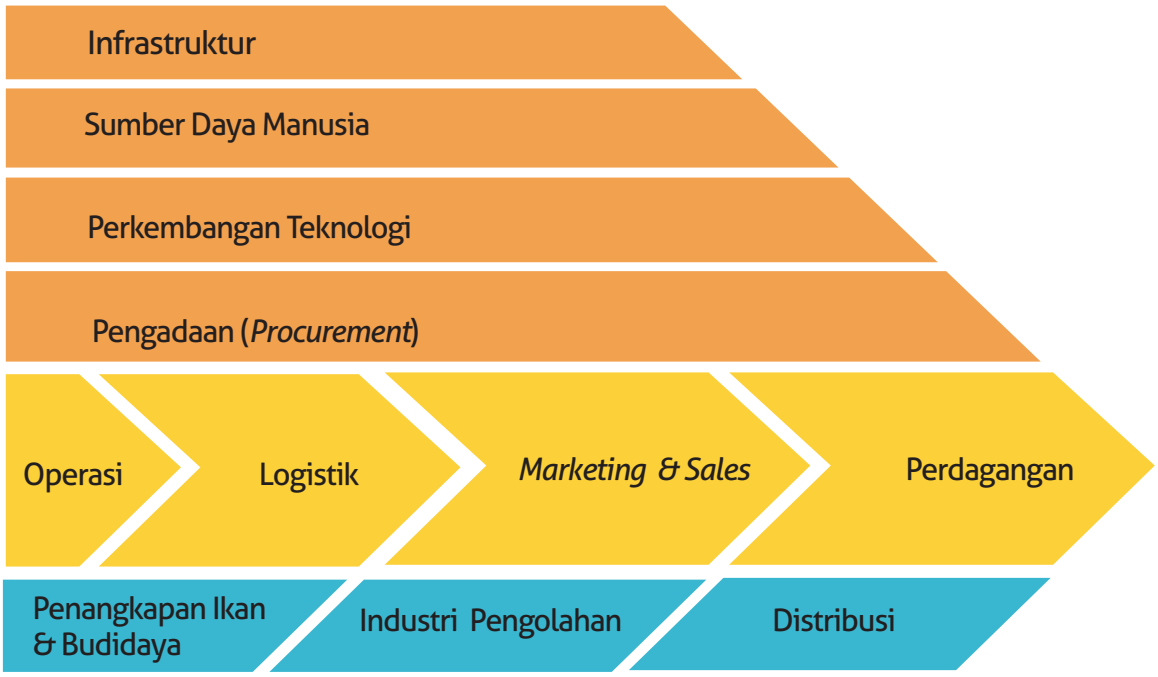

Gambar 3.1 Value Chain Tim Kerja Value Chain – JARING 2015

Sumber : Tim Kerja Value Chain – JARING 2015

3.1. Aktivitas Utama

A. Budidaya

Pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah "kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya."

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggalakkan program peningkatan kapasitas budidaya perikanan di tanah air dengan meluncurkan program sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Sampai dengan tahun 2014 sekitar 8200 pembudidaya telah bersertifikasi dan memiliki potensi untuk diberikan pembiayaan modal kerja.

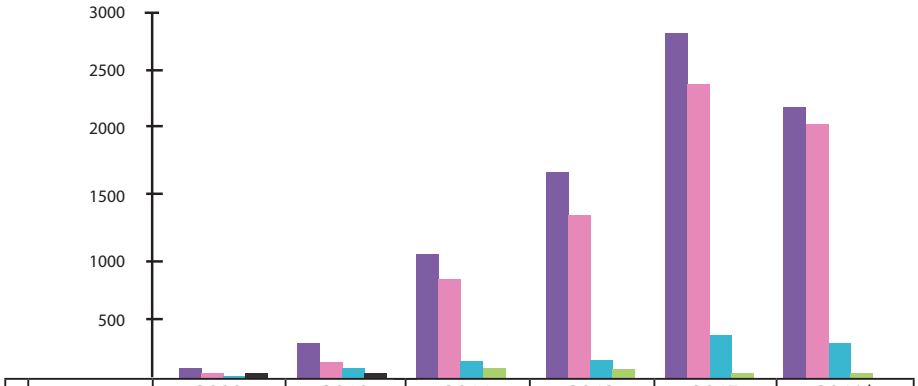

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Total	90	256	1190	1536	2794	2366
Perorangan	40	143	992	1323	2323	2043
Pokdakan	13	88	163	179	454	293
Perusahaan	37	25	35	34	17	30

*)s/dbulanNovember2014 **)Kumulatif/dNov2014

Gambar 3.2: Unit Pembudidaya Ikan Bersertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 2009 -2014

Sumber- Source : Dit. Produksi. DPJB

Berdasarkan data sementara triwulan IV Desember 2014, hasil produksi perikanan budidaya telah mencapai 9,53 juta ton, jumlah pencapaian tersebut jauh melampaui *output* perikanan tangkap yang hanya mencapai 6,20 juta ton. Data perikanan tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yakni sebesar 13,3 juta ton namun demikian sejak tahun 2009 angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 4,71 juta ton (2009), 6,28 juta ton (2010), 7,9 juta ton (2011) dan 9,67 juta ton (2012). Pengembangan budidaya di Indonesia cukup besar, Berdasarkan data, Pemanfaatan Potensi Lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan di Indonesia hingga akhir 2013 masih didominasi oleh tambak, selanjutnya di ikuti oleh laut dan kolam, dengan peluang pengembangan masing-masing sebesar 78%, 97,3% dan 67,3%. Sementara itu, peluang pengembangan perairan umum dan mina padi masing-masing tercatat 99% dan 91,9%.

● Potensi Lahan Budidaya

Pemanfaatan Potensi Lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan di Indonesia hingga akhir 2013 masih didominasi oleh
(1) Tambak
(2) Laut
(3) Kolam

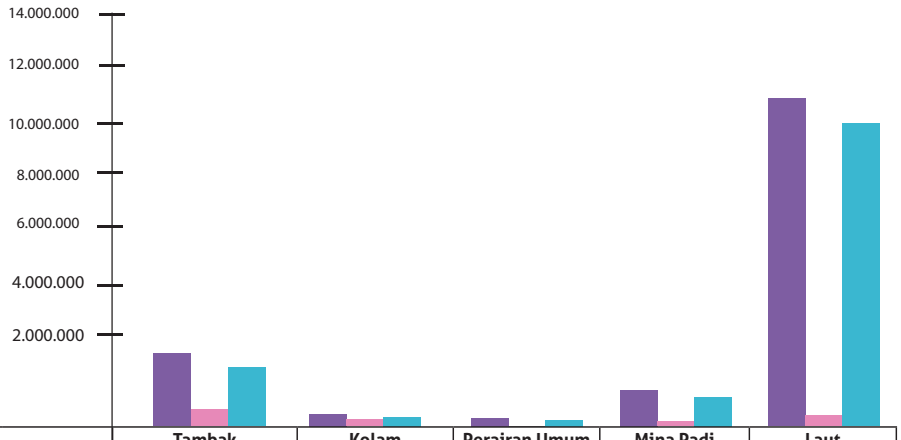

	Tambak	Kolam	Perairan Umum	Mina Padi	Laut
Total	2.964.333	541.100	158.125	1.536.289	12.123.383
Perorangan	650.509	176.500	1.564	124.057	325.825
Pokdakan	2.313.822	364.591	156.561	1.412.232	11.797.558

Keterangan
Potensi : Data berdasarkan Buku Saku Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2009 Peluang
Pengembangan : Data berdasarkan Buku Statistik Perikanan Budidaya Indonesia s.d. Tahun 2013.

Gambar 3.3: Potensi lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan di Indonesia Tahun 2013

Sumber : Dit. Produksi. DPJB

Komoditas utama produksi budidaya perikanan hingga akhir tahun 2013 didominasi oleh (1) Rumput Laut sebesar 70%, (2) Nila sebesar 3%, sedangkan urutan (3) dan (4) yaitu Bandeng dan Udang dengan persentase yang sama yaitu masing-masing sebesar 5%. Subsektor *Value Chain* Budidaya Perikanan Darat/Laut terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

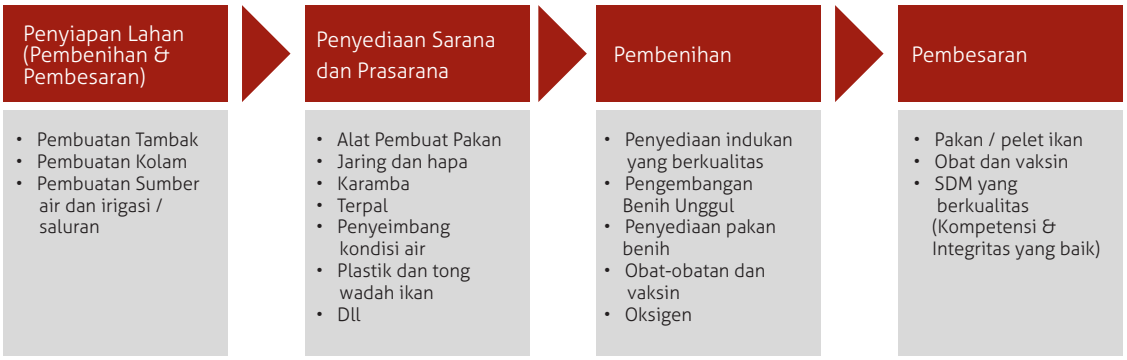

Gambar 3.4: Value Chain Budidaya Perikanan Darat, Tim Kerja JARING – 2015

Sumber: Tim Kerja Value Chain – JARING 2015

1. Penyiapan Lahan

Penyediaan lahan untuk budidaya dibedakan menjadi 2 yaitu lahan untuk pembenihan dan pembesaran. Skala ekonomis lahan yang diperlukan guna mencapai hasil optimal untuk pembenihan sekitar 1.000 – 2.000 m^2, sedangkan untuk pembesaran sekitar >5.000 m^2. Sedangkan area untuk budidaya perikanan/hasil laut untuk mencapai hasil optimal diperlukan skala area perairan kurang lebih sama dengan budidaya darat. Kendala penyiapan lahan kerapkali terkait masalah izin peruntukan dan sertifikasi, KKP di tahun 2015 sedang merintis langkah kerjasama dengan BPN untuk program sertifikasi bagi pembudidaya yang lahannya belum bersertifikat yang diberi nama Program SeHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) agar dapat dijadikan agunan pengajuan kredit ke Bank

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana,

Dalam budidaya ikan diperlukan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi a.l. Jaring dan Hapa, Karamba, Terpal, Penyeimbang kondisi air Plastik dan tong wadah ikan. Ketersediaan Sarana dan prasarana ini sangat penting dalam proses budidaya baik untuk tahapan pembibitan maupun pembesaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.03/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan, pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha pembudidayaan ikan, meliputi:

a. Sarana pembenihan:
   1) ikan air tawar, meliputi traktor kecil/penggaruk, bak plastik, alat *grading*, timbangan, *aerator/hyblower, hypophisa, freezer,* happa, kakaban, corong penetasan, akuarium, *water quality teskit*, tabung oksigen, kendaraan pengangkut dan/atau peralatan pendukung usahanya;
   2) ikan air payau dan laut, meliputi traktor kecil/penggaruk, bak plastik, alat *grading*, penetasan artemia, *genset*, pompa air laut, pompa air tawar, pompa celup, *blower, aerator* listrik, tabung oksigen, kendaraan pengangkut dan/atau peralatan pendukung usahanya;

b. Sarana pembesaran:
   1) ikan air tawar, meliputi pengadaan dan/atau perbaikan karamba jaring apung (KJA), karamba, kolam, kolam plastik, generator (*genset*), perahu ketinting, perbaikan rumah jaga, mesin pembuat pellet dan/atau peralatan pendukung usahanya;

2) ikan air payau, meliputi perbaikan tambak, kolam, kincir air, generator (*genset*), pompa, mesin pembuat pellet dan/atau peralatan pendukung usahanya;
3) ikan air laut, meliputi pengadaan dan/atau perbaikan KJA (HDPE), generator *(genset)*, perahu, mesin pembuat pellet, rumah jaga dan/atau peralatan pendukung usahanya;
4) ikan hias, yaitu pengadaan dan/atau perbaikan bak, akuarium, *aerator/hyblower, heater*, generator (*genset*) dan/atau peralatan pendukung usahanya;
5) rumput laut, yaitu perbaikan bagan apung/*long line*, perahu, gerobak, para-para, mesin pengepres dan/atau peralatan pendukung usahanya.

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan sebaiknya memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

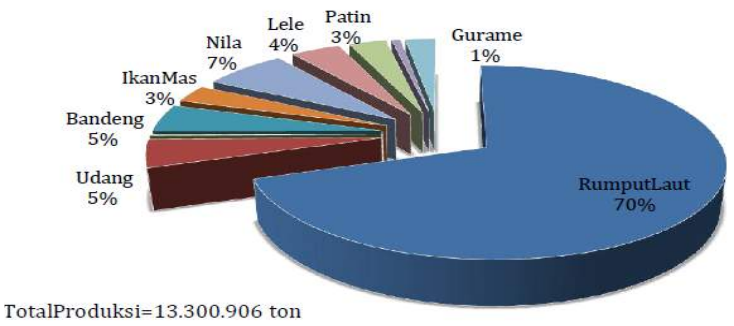

Gambar 3.5: Sebaran Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2013

Sumber: DJPB

Jumlah Balai Benih/ Budidaya Tahun 2014

55	BALAI BENIH IKAN SENTRAL
32	BALAI BENIH IKAN PANTAI
557	BALAI BENIH IKAN LOKAL
35	BALAI BENIH UDANG / UDANG GALAH

Source: DIT. Pembenihan, DJPB

3. Pembenihan

Pembenihan merupakan hal yang terpenting dalam proses budidaya karena kualitas hasil budidaya sangat tergantung dari kualitas benih (bibit). KKP memiliki beberapa program untuk meningkatkan kualitas dari benih antara lain:

a. Program sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik), yaitu program sertifikasi yang menjadi standar baku bagi pelaku usaha pembenihan.
b. Unit Pembenihan skala Besar seperti: BBIS/BBU/BBIP dan BBI lokal merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UTPD) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penghasil induk untuk memenuhi kebutuhan induk unggul bagi Unit Pembenihan Rakyat serta benih bermutu untuk pada pendeder/protokol.
c. BBI/BBU melakukan kegiatan produksi benih dengan menerapkan teknologi pembenihan yang merupakan hasil perekayasaan teknologi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perikanan dan Budidaya yang dibakukan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pembenihan.
d. BBI Sentral/lokal memperbanyak Induk Dasar menjadi Induk Pokok/PS untuk disebarkan ke Penangkar Benih/UPR.
e. BBI Sentral juga mengembangkan kawasan perikanan umum berbasis budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas perairan umum dengan memerhatikan ekosistem dan habitat ikan lokal serta meningkatkan kepedulian dan kemampuan masyarakat perikanan sekitar perairan umum dalam mengelola dan melestarikan produktivitas kawasan perairan umum di wilayahnya.

Peranan Unit Pembenihan Swasta Skala Besar dalam Upaya Pengembangan Perikanan Budidaya, sebagai berikut:

a. Menyediakan induk unggul untuk kebutuhan intern maupun ekstern.
b. Memperoduksi benih-benih kelas benih sebar yang digunakan untuk kegiatan produksi ikan konsumsi oleh pembudidaya ukuran naupli untuk konsumsi *hatchery*.

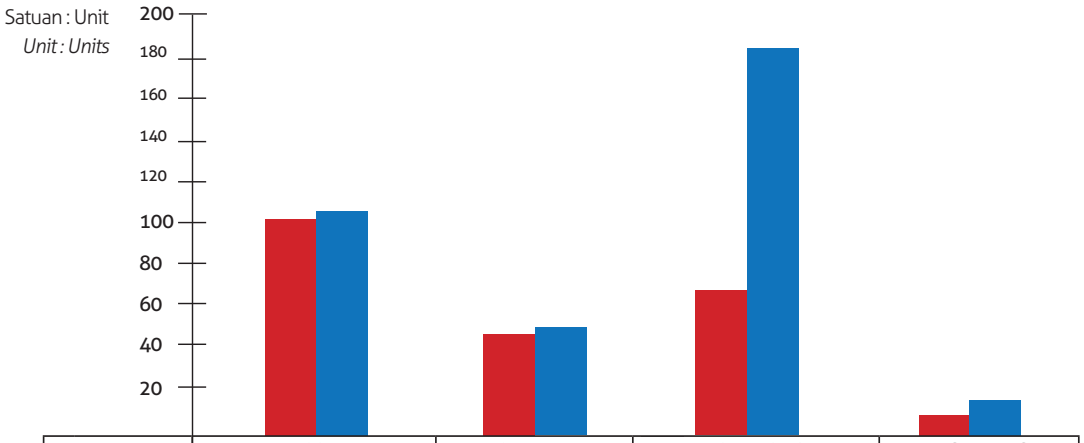

	HSRT	Swasta	UPT/UPTD	Kelompok
2013	101	50	67	10
2014*	106	57	182	15

Keterangan
*. Angka Sementara
PIB Cara Pembenihan Ikan yang baik
HSRT : Hatcery Skala Rumah Tangga
UPT : Unit Pelaksana Teknis
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

Gambar 3.6: Potensi lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan di Indonesia Tahun 2013

Sumber- Source: DIT. Perbenihan

4. Pembesaran

Kegiatan pembesaran dilakukan melalui pembelian bibit benih oleh pelaku usaha dari pembenih dengan tujuan untuk membesarkan ikan sampai dengan ukuran skala konsumsi. Beberapa faktor yang diperlukan dalam operasional pengembangan pembesaran :

1. Penyediaan pakan yang berkualitas dengan pola pemberian yang sesuai dengan kebutuhan.
2. SDM yang memiliki kompetensi/pengetahuan yang memadai.
3. Tingkat kepadatan ikan dalam lahan/area/kolam yang digunakan pembesaran.
4. Vitamin dan obat-obatan untuk mempercepat pertumbuhan dan mencegah penyakit.

Risiko Budidaya Perikanan

1. Kualitas air (air limbah, air terkontaminasi, *upwelling*/PH yang tidak sesuai).
2. Penyakit/hama yang dapat menyebabkan kematian secara masal pada lokasi yang sama.
3. Salah pengelolaan/manajemen antara lain pemberian pakan yang tidak tepat baik waktu maupun jumlah.

Perkiraan biaya investasi untuk budidaya ikan lele dan gurame, dapat dibagi dalam beberapa komponen yakni penyediaan induk, pakan induk, pakan larva, pupuk dan persiapan kolam masing-masing sebesar Rp3,8 juta, Rp1,5 juta Rp16,5 juta, Rp1,6 juta dan Rp7,6 juta. Total investasi adalah sebesar 31,1 juta. Modal kerja per individu baik usaha perorangan maupun anggota pokdakan dapat diberikan lebih dari 1 (satu) unit dengan ketentuan maksimal tidak lebih dari Rp. 100 juta

B. Penangkapan

Penangkapan ikan terdiri dari beberapa subsektor sebagai berikut

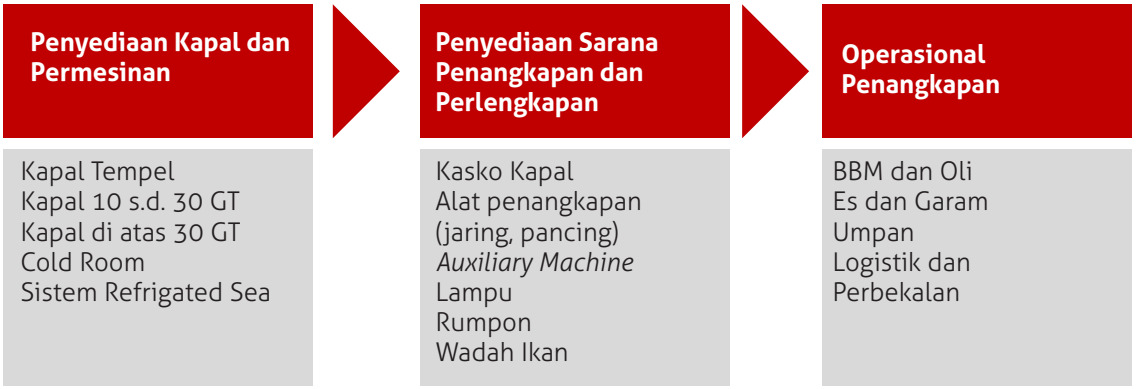

Gambar 3.7: Subsektor Value Chain Penangkapan Ikan

Sumber: Tim Kerja Value Chain – JARING 2015

Penangkapan ikan adalah aktivitas menangkap ikan. Istilah menangkap ikan tidak terbatas pada hasil tangkapan ikan semata, namun istilah tersebut juga mencakup *mollusca, cephalopoda, crustacea dan echinoderm*. Metode yang digunakan bervariasi, seperti tangkap tangan, tombak, jaring, kail dan jebakan ikan. Dalam menangkap ikan di perairan terbuka terutama laut dan samudera, diperlukan kapal penangkap ikan yang memiliki kapasitas penyimpanan serta sanggup mengarungi laut selama jangka waktu tertentu, tergantung kepada target penangkapan, ukuran porsen dari kapal yang digunakan serta ketersediaan pendukung operasional. Tantangan terbesar dalam pengembangan sektor penangkapan ikan adalah *Illegal Fishing*. Berdasarkan I*nternational Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU *Fishing*) tahun 2001, yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melakukan *illegal fishing* adalah:

- kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan;
- kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana

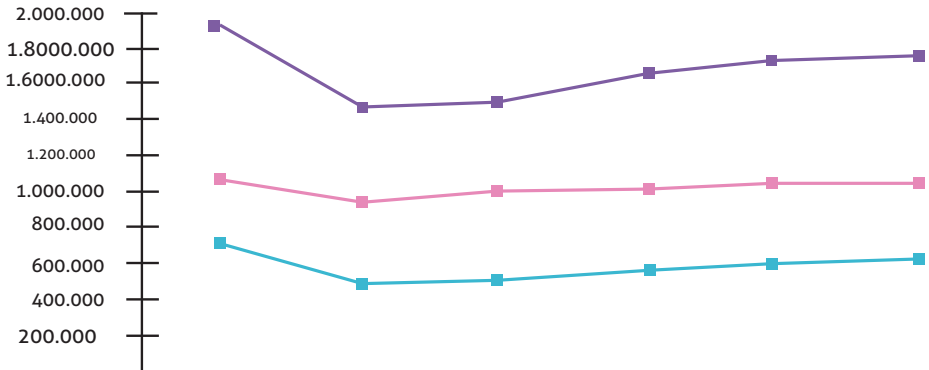

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Total	1,888,998	1,486,075	1,548340	1,660,292	1,782,898	1,797,060
Laut	1,174,274	947,220	1,001,667	1,060,449	1,177,783	1,188,340
Perairan Umum	714,724	538,855	546,673	599,843	605,315	608,720

*Keterangan- Note: *): Angka Sementara- Preliminary Figures*

Gambar 3.8: Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut SubSektor Perikanan Tangkap 2009 – 2014

Sumber: KKP

ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;

- kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negaranegara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut;
- Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan - Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

Jumlah unit penangkapan ikan menurut subsektor perikanan tangkap selama periode 2009 – 2014 masih didominasi oleh unit penangkapan ikan di laut yang mengalami rata-rata kenaikan sebesar 0,91% per tahun atau sebesar 1,1 juta unit penangkapan bila dibandingkan penangkapan ikan di perairan umum yang hanya mengalami kenaikan sebesar 0,56% atau sebesar 605 ribu unit dibandingkan tahun 2013.

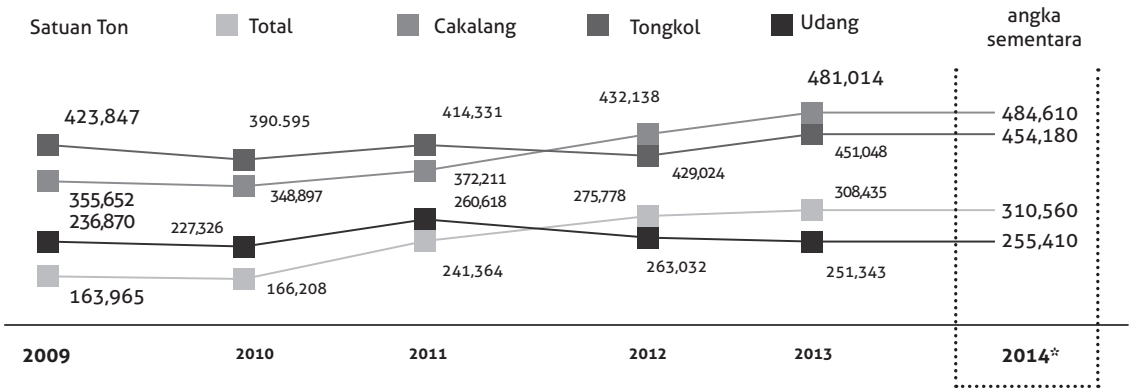

*Gambar 3.9 : Perkembangan Komoditas Utama Perikanan Tangkap Tahun 2009 – 2014**

Sumber : DJPT

Peningkatan hasil tangkapan ikan idealnya diiringi dengan penambahan fasilitas *cold storage* serta pabrik es yang mumpuni untuk memastikan tidak terdapat *wastage* dari proses peralihan hasil tangkapan ke tempat pengolahan. Subsektor *value chain* penangkapan ikan di Indonesia terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Penyediaan Kapal dan Permesinan

Penyediaan kapal sebagian besar dilakukan oleh galangan tradisional, sedangkan perbaikan permesinan di Indonesia kebanyakan masih difasilitasi oleh bengkel-bengkel kapal yang saat ini belum terdata dan rencananya di tahun 2015 akan di-data oleh KKP. Profil ukuran kapal motor (*size of boat*) di Indonesia hingga akhir 2014 masih didominasi oleh kapal ukuran (1) < 5 GT sebanyak 153.960 kapal, (2) 5 ~ 10 GT sebanyak 48.150 kapal dan (3) 10 ~ 20 GT sebanyak 15.180 kapal.

Kategori dan Ukuran *Category and Size of Boat*		TAHUN					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 *)
Kapal Motor - *Inboard Motor*		**157.211**	**164.150**	**185.121**	**198.538**	**226.573**	**230.800**
Ukuran Kapal Motor - *Size of Boat*	< 5 GT	105.121	110.163	123.748	137.587	151.939	153.960
	5 - 10 GT	32.214	31.460	35.877	37.694	46.358	48.150
	10 - 20 GT	8.842	10.988	13.201	11.583	15.208	15.810
	20 - 30 GT	7.403	7.264	8.022	7.611	8.782	8.650
	30 - 50 GT	680	857	914	917	1.074	1.070
	50 - 100 GT	1.502	1.747	1.801	1.641	1.727	1.700
	100 - 200 GT	1.135	1.290	1.204	1.167	1.127	1.110
	> 200 GT	314	381	354	338	358	350

Tabel 3.1: Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Laut Menurut Kategori dan Ukuran Kapal 2009 – 2014

Sumber : DJPT

Faktor yang mempengaruhi produktivitas kapal penangkap ikan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan a.l.:

1. Ukuran tonase kapal; semakin besar tonase, semakin besar daya angkut.
2. Jenis bahan kapal, mempengaruhi kekuatan kapal, misalkan bahan *fiber glass* tidak bisa digunakan untuk berlayar di perairan samudera yang memiliki karakteristik ombak besar dan tinggi.
3. Kekuatan mesin kapal; mempengaruhi daya jelajah kapal.
4. Jenis alat penangkap ikan yang digunakan; mempengaruhi sisi kecepatan dan kemampuan daya angkut pada saat penangkapan.
5. Jumlah trip operasi penangkapan pertahun (frekuensi dan durasi berlayar) mempengaruhi hasil penangkapan baik kualitas maupun kuantitas.
6. Wilayah penangkapan ikan. Mempengaruhi jenis ikan yang bisa ditangkap, jumlah bahan bakar yang digunakan, ketersediaan jumlah ikan di wilayah tersebut.

Rencana pengembangan KKP untuk penyediaan kapal dan kebutuhan biayanya pasca moratorium untuk periode 2014 – 2019 sekurang-kurangnya sebesar 132,582 unit kapal dengan rincian sebagai berikut:

NO	WPP	ESTIMASI POTENSI SDI (000 Ton/ Tahun)	Jumlah Kapal Penangkap Ikan										JUMLAH
			Motor Tempel	< 5 GT	5-10GT	10-20 GT	20-30 GT	30 - 50 GT	50 - 100 GT	100 - 200 GT	200 - 300 GT	300 - 500 GT	500 - 1000 GT	
1	Selat Malak	276	6,266	21,823	3,429	699	669	32	59	58	-	-	-	33,035
2	Samudera Hindia	565	20,243	7,868	2,850	787	584	27	190	72	-	-	1	32,622
3	Samudera Hindia	492	39,779	8,546	4,989	1,881	1,027	144	492	417	1	5	11	57,292
4	Laut China Selat	1059	11,435	34,466	4,734	1,124	702	414	530	242	5	-	-	53,652
5	Laut Jawa	837	43,797	16,267	7,110	2,955	2,517	94	240	18	-	-	-	72,998
6	Selat Makasar	930	34,508	34,193	8,983	2,063	922	169	393	30	-	-	-	81,261
7	Laut Banda	278	24,709	4,711	2,068	526	382	26	80	42	-	-	-	32,544
8	Teluk Tomini-Laut Seram	596	24,709	1,539	830	533	292	139	129	3	-	-	-	28,174
9	Laut Sulawesi	334	18,977	5,307	1,345	280	114	41	51	9	-	-	-	26,124
10	Samudera Pasifik	299	6,630	403	271	201	63	22	98	21	4	8	5	7,726
11	L Arafura	856	5,662	2,464	1,265	535	339	187	127	409	207	93	9	11,297
JUMLAH		6,520	236,715	137,587	37,874	11,584	7,611	1,295	2,389	1,321	217	106	26	436,725
GT			236,715	687,935	378,740	231,680	228,330	25.90	23.89	6.61	0.72	0.21	0.03	1,763,457
% GT			13%	39%	21%	13%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
BOLEH DITAMBAH			17,797	51,721	28,475	17,418	17,167	2	2	0	0	0	0	132,582
ESTIMASI KAPAL YANG BOLEH DITAMBAH (JANGKA WAKTU 5			17,797	10,344	2,847	871	572	0	0	0	0	0	0	32,431
ESTIMASI KEBUTUHAN KAPAL YANG BOLEH DI REALISASIKAN			3559	2069	569	174	114	0	0	0	0	0	0	6486
KEBUTUHAN KAPAL YANG BOLEH DI REALISASIKAN PER			2492	1448	399	122	80	0	0	0	0	0	0	4540
ESTIMASI KEBUTUHAN KREDIT			177,969,672,113											

Tabel 3.2 : Rencana pengembangan KKP untuk penyediaan kapal dan kebutuhan biayanya pasca moratorium untuk periode 2014 – 2019

Sumber : KKP

2. Proses Ijin Kapal

Dalam menjalankan usaha penangkapan ikan terdapat beberapa jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha di sub sektor penangkapan ikan. Beberapa dokumen usaha tersebut, antara lain :

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
   Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
   Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
   Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud diatur berdasarkan kewenangannya sebagai berikut :

a. Direktur Jenderal berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
b. Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
c. Bupati/Walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.

3. Penyediaan Sarana Penangkapan dan Perlengkapan

Salah satu unsur terpenting yang mempengaruhi produktivitas penangkapan ikan adalah jenis alat yang digunakan. Menurut jenisnya, alat penangkapan ikan digolongkan ke dalam 8 (delapan) kelompok:

a. Jaring lingkar (*surrounding nets*);
b. Penggaruk (*dredges*);
c. Jaring angkat (*lift nets*);
d. Alat yang dijatuhkan *(falling gears)*;
e. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
f. Perangkap (*traps*);
g. Pancing (*hook and lines*);
h. Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap target spesies menggunakan jenis alat penangkapan yang berbeda-beda sehingga produktivitasnya dapat terjaga. Saat ini terdapat kendala dalam pengadaan Kapal Penangkap Ikan untuk Kapal <10 GT adalah perusahaan asuransi belum dapat melakukan pengikatan asuransi atas kapal tersebut karena mesin kapal dapat dipindah sehingga dianggap berisiko tinggi.

NO	JENIS ALAT PENANGKAP IKAN	PRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKAN (TON/GT/Tahun)	TARGET SPESIES
1	Purse Seine Pelagis Kecil	1,19	Ikan Pelagis Kecil
2	Purse Seine Pelagis Besar	1,70	Ikan Pelagis Besar
3	Payang	0,85	Ikan Pelagis Kecil
4	Lampara Dasar	0,17	Ikan Demersall
5	Bouke ami	0,85	Cumi-Cumi
6	Jala Jatuh berkapal (Cast Nets)	1,00	Cumi-Cumi
7	Gill Net	0,85	Ikan
8	Bubu (Pots)	0,51	Ikan Demersal
9	Long Bag Set Net(Pukat labuh)	0,85	Ikan Teri
10	Long Line (Rawai Tuna)	0,51	Ikan Tuna
11	Bottom Long Line (PancingRawaiDasar)	1,02	Ikan Demersal
12	Pole and Line (Huhate)	1,28	Ikan Pelagis
13	Hand Line (Pancing Ulur)	0,60	Ikan Demersal
14	Pancing Cumi(Squid Jigging)	0,26	Cumi-Cumi

Tabel 3.5: Produktivitas Penangkapan Ikan Berdasarkan Jenis Alat Penangkap serta Kapal Penangkap Ikan

Sumber : KKP

Sifat alat penangkapan ikan dapat dibedakan berdasarkan metode pengoperasiannya:

1. Alat penangkapan ikan aktif: adalah jenis alat penangkapan ikan yang digerakan/ dioperasikan langsung dengan kapal (*trawl, payang, dogol,* dll)
2. Alat penangkapan ikan pasif: adalah jenis alat penangkapan ikan yang dipasang (*setting*) sementara di suatu perairan dan diangkat kembali setelah selang waktu tertentu (*gill net, trammel net, drift net,* dll).
3. Alat penangkapan ikan statis: adalah jenis alat penangkapan ikan yang ditempatkan secara menetap untuk jangka waktu yang lama dan dipanen secara rutin pada waktu tertentu (bagan tancap, bubu, dan lain-lain)

Pengaturan teknis pengelolaan/operasional alat penangkapan ikan di Indonesia didasarkan pada pendekatan MGT *Scheme* (*Mapping, Gear type selection, TAE management).*

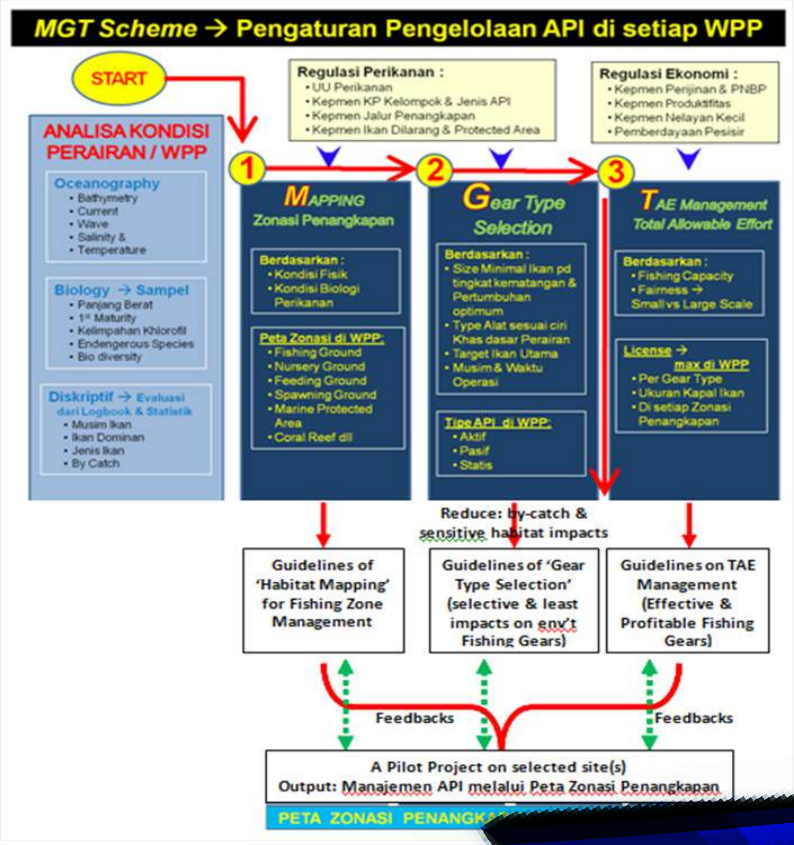

Gambar 3.10: Pengaturan Pengelolaan API di setiap WPP

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pendekatan pengaturan alat penangkapan ikan di Indonesia (*legal framework*) dilakukan secara menyeluruh dan simultan dengan memperhatikan kondisi *existing* alat penangkapan ikan serta disinergikan dengan kegiatan penyusunan Standar Nasional Indonesia.

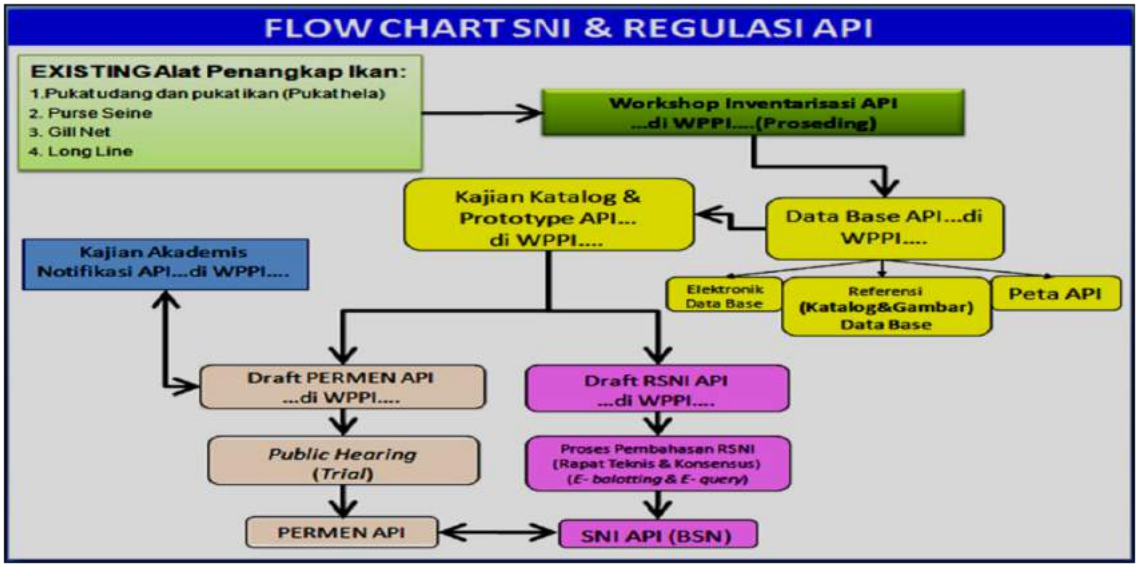

Gambar 3.11: Flow Chart SNI & Regulasi API Source: KKP
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kesempatan kepada perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa sektor kelautan dan perikanan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas bagi pelaku usaha dengan harga yang wajar dan sesuai. Peralatan dan perlengkapan yang menjadi vital pada hasil penangkapan adalah ketersediaan es yang akan digunakan untuk menjaga kesegaran produk perikanan. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

4. Operasional Penangkapan

(J. PRADO DAN P.Y. DREMIERE;1991) mengungkapkan bahwa dalam melakukan operasional penangkapan ikan, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan a.l. sebagai berikut:

a. Konsumsi bahan bakar mesin

Mesin	Densitas BBM	Konsumsi gr/HP/jam
Gasoline 2 tag	0,72	400-500
Bensin 2 tag	0,72	300-400
Bensin 2 tag	0,72	220-270
Diesel	0,84	170-200
Diesel (turbo)	0,84	155-180

kecepatan kapal Nilai konsumsi bahan bakar untuk mesin menurut tipe mesin yang digunakan.

Konsumsi bahan bakar selama waktu pemakaian dihitung sebagai berikut: dimana 0,75 adalah koefisien rata-rata; sewaktu kapal jalan antara 0,7 dan 0,8 dan sewaktu operasi penangkapan 0,5 sampai 0,8.

$$C = \frac{0{,}75 \times P(max) \times (S/d) \times t}{0{,}001}$$

Keterangan

C	=	konsumsi (dalam liter)
P (*max*)	=	daya simum mesin dalam HP
S	=	nilai spesifik konsumsi BBM dalam gr/HP/jam, d= densitas BBM
T	=	waktu selama pemakaian mesin (dalam jam)

Catatan: waktu dapat diganti dengan $\frac{\text{jarak tempuh dalam mil}}{\text{kecepatan dalam knot}}$

Perkiraan:

Konsumsi tahunan sebuah kapal *trawl* =1000 liter/hp/tahun.

Konsumsi pelumas = 1-3% (dalam liter) dari konsumsi bahan bakar .

Kecepatan ekonomis maksimum (kecepatan kritis) berhubungan dengan panjang kapal pada batas air. Untuk kapal muatan penuh, kacepatan (v) dapat dihitung sebagai berikut:

$$V\ (knot) = 2{,}4 \times \sqrt{(Lw)}$$

Untuk ke angka lambung :

$$V\ (knot) = 5{,}4 \times \sqrt{(Lw)}$$

Untuk ke angka lambung :

Lw = panjang pada garis air (m)

b. Palka dan tangki Umpan Es

Kapasitas palka dan tangki air tawar jumlah es yang diperlukan (1 meter kubik es beratnya sekitar 900 kg). Di perairan sedang: 1 ton es untuk 2 ton ikan (dapatbertahanlebihdari 1 minggu) dan 0,7 ton es untuk 2 ton ikan (bertahan kurang dari 1 minggu). Di perairan tropis: 1 ton es untuk 1 ton ikan. Jumlah ini dapat berkurang 30-50 % jika palka dilengkapi pendingin. Kapasitas palka dalam kg ikan atau udang per meter kubik. Mengingat akan bentuk palka serta pengaturan tempat penyimpanannya, kapasitas palka yang sebenarnya akan menjadi 10-20 % lebih kecil dari nilai muatan.

Bahan	Bentuk perlakuan	Nilai muatan (kg/m³)
es	curai	550
es	flake	420 - 480
ikan kecil (mis. sardine)	tanpa es	800 - 900
ikan kecil (mis.sardine)	didalam wadah dengan es	650
ikan kecil (mis. sardine)	dalam pendinginan air laut	700
rata-rata ikan berukuran besar	dal am wadah dengan es	500
rata-rata ikan berukuran besar	dalam kotak dengan es	350
rata-rata ikan berukuran besar rata-rata	pembekuan	500
ikan berukuran besar udang dengan ekor	fillet segar atau beku	900 - 950
ikan tuna	beku dalam kotak	700 - 800
	beku dalam wadah	600

c. Kapasitas bak Ikan hidup

Dalam bak atau tangki di kapal setiap satu meter kubik dapat memuat 120 –200 kg udang (catatan: perlu diperhatikan dengan sirkulasi air yang cukup). Dalam keramba di laut setiap meter kubik memuat 400 kg udang. Setiap meter kubik bak umpan hidup menampung 30/50 kg ikan umpan (penggantian air 6-8 kali per jam).

d. Cadangan konsumsi air tawar

Panjang kapal 10 m : 10-15 liter air per orang per hari
Panjang kapal 20 m : 20-25 liter air per orang per hari
Panjang kapal 30 m : 30 liter air per orang per hari.

e. Umpan: jumlah kebutuhan *Longline*

Jumlah umpan yang dibutuhkan sangat tergantung pada jenis umpan, tujuan ikan yang ditangkap dan tipe alat *longline*. Tabel berikut merupakan perhitungan kasar yang diambil berdasarkan pengalaman praktek.

Jenis umpan	Jumlah (kg per 100 mata pancing)
sandeel, sardine, mackerel, horse mackerel	2,5 - 3
julung-julung (*long line* hanyut)	5 - 6
	10

Jika *mackerel* digunakan sebagai umpan, dapat digunakan perhitungan seperti berikut:

Spesies tujuan	Berat umpan (gr per mata pancing)
whiting	20 - 25
hiu kecil,cod, pari	40 - 50
hiu besar	200 - 300
ikan pedang	100 - 450

Umpan hidup untuk tuna alam rencana hasil penangkapan ikan tuna 10 sampai 30 ton diperlukan 1 ton ikan umpan (proporsi akan terjadi sedikit bertambah, sesuai (*tonase* kapal).

Pengoperasian

Kecepatan pengoperasian

Pancing rawai (pengoperasian manual disertai dengan penggunaan l*ine hauler*).

***Prawe* dasar**

jumlah pancing per orang per hari : 500-1000
kecepatan pasang umpan : 2-4 pancing/menit/orang
kecepatan melemper di pantai : 50-150 m/menit
kecepatan melempar (perairan dalam) : 200-300 m/menit
kecepatan menarik (di pantai) : 15-40 m/menit
kecepatan menarik (perairan dalam) : 60 m/menit

Rawai tuna

kecepatan melempar : 400-600 m/menit atau 500 pancing
kecepatan menarik : 200 pancing/jam pada 3-5 knot

Gill net

Panjang jaring per orang per hari : 500-1000 m
kecepatan melempar : 6000-9000 m/jam
kecepatan menarik : 700-1500 m/jam

Purse seine

Pelemparan jaring umumya sekitar 2-5 menit Kecepatan melingkar

Panjang purse seine (m)	Lamanya(menit)
300	7 - 10
800	10 - 15
1200 - 1400	15 - 25

Kecepatan menarik dengan power blok

Panjang purse seine(m)	Lamanya (menit)
300	20 - 25
800	40 - 60
1200 - 1400	60 - 100

Heuat

pembenahan-pembenahan jaring memerlukan beberapa jam tergantung jumlah hasil tangkap.

Trawling

Jumlah waktu yang diperlukan untuk menurunkan dan menarik tali *warp* - tergantung pada kedalaman. Pelepasan alat *trawl* (*otter board, trickle chain, bridle* dan jaring) diperlukan selama 5-15 menit. Penarikan dan pengangkatan alat 15-25 menit (tidak termasuk tali *warp*).

Risiko Penangkapan Ikan

Risiko terjadinya kecelakaan kapal nelayan, baik yang diakibatkan oleh faktor cuaca atau faktor lainnya relatif rendah, tercermin dari klaim asuransi atas kecelakaan kapal pada tahun 2013 nihil.

Kendala pada operasional penangkapan, a.l.

Permasalah permodalan menjadi kendala utama dalam menjalankan operasional kapal. Nelayan yang tidak tergabung dalam kelompok Nelayan biasanya mengalami kesulitan dalam penyediaan biaya operasional dibanding yang tergabung dalam suatu kelompok nelayan.

C. Industri Pengolahan

Produk perikanan yang memiliki *grade* A dan berada dalam kondisi segar memang memiliki harga yang cukup menarik serta menjadi insentif tersendiri bagi para nelayan. Namun kadangkala produk yang dihasilkan berada pada *grade* B atau lebih rendah.

Gambar 3.12: *Value Chain* Industri Pengolahan, Tim Kerja JARING – 2015

Source: Tim Kerja *Value Chain* – JARING 2015

1. Sarana dan Prasarana

Dalam mitigasi risiko/upaya mencegah memburuknya kualitas produksi ikan, industri pengolahan ikan menerapkan strategi diversifikasi produk yang bertujuan untuk mempertahankan kesegaran dan mutu ikan melalui pengawetan/pengolahan.

Cakupan industri pengolahan ikan berdasarkan pengelompokan atau kategorisasi yang ada di dunia internasional dan di dalam negeri adalah sebagai berikut:

- KLUI 31141, Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya, seperti: Ikan akan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng dan sejenisnya
- KLUI 31142, Industri pengaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, seperti: ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin, cumi-cumi asin dan sejenis
- KLUI 31143, Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, seperti: ikan bandeng asap, ikan cakalang asap dan sejenisnya
- KLUI 31144, Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, seperti: ikan bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya
- KLUI 31145, Industri pemindangan ikan dan biota perairan lannya, seperti: pindang ikan bandeng, pindang ikan tongkol, dan sejenisnya
- KLUI 31149: Industri pengolahan pengawetan lainnya utkk ikan dan biota lainnya seperti: tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis dan sejenisnya

Dalam proses industri pengolahan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai :

a. Tanah/Bangunan yang digunakan untuk proses pengolahan

Bangunan tersebut harus memenuhi syarat sanitasi dan kelayakan pengolahan. KKP telah membuat standar dimaksud yaitu SKP (Sertifikasi Kelayakan Pengolahan) dimana pembinaannya dilakukan oleh Dinas Perikanan setempat mengacu kepada norma yang telah ditetapkan oleh KKP. Selain SKP, KKP juga mengeluarkan Standar Nasional Indonesia untuk komoditas olahan perikanan. Untuk keperluan ekspor dan impor produk kelautan dan perikanan Pemerintah mensyaratkan adanya sertifikat kesehatan ikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah negara pengimpor dan Pemerintah Republik Indonesia (untuk keperluan ekspor). Selain sertifikat kesehatan ikan, untuk ekspor juga dipersyaratkan adanya sertifikat HACCP yang dikeluarkan oleh KKP.

b. Mesin, Teknologi dan Peralatan Pengolahan

Mesin, teknologi, dan peralatan menjadi unsur utama dalam peningkatan nilai tambah untuk mengolah bahan mentah menjadi produk yang siap dikonsumsi oleh pasar tradisional, restauran, perhotelan, catering dan pasar modern (retail kecil, menengah dan hypermarket/supermarket). Salah satu hasil dari perkembangan mesin dan tekhnologi pengolahan yang cukup bernilai tinggi adalah produk bandeng tanpa duri.

c. *Packaging* dan *Branding*

Teknik *packaging* dan *branding* akan memperluas penetrasi pasar daya saing produk perikanan karena memiliki bentuk yang lebih menarik dan memiliki daya tahan yang lebih lama dari sebelumnya dijual dalam bentuk curah dan memiliki pasar yang terbatas.

d. *Cold Storage/Freezer*

Pendingin sangat diperlukan dalam seluruh proses *value chain* industri perikanan untuk mencegah penurunan kualitas bahan baku yang akan diolah.

Perkembangan sarana dan prasarana di Indonesia pada akhir 2014 didominasi oleh Pasar Ikan Tradisional, Mobil Alih Teknologi dan Informasi – GEMARIKAN, Sarana Pemasaran Bergerak (SPG) Roda 4 Bak Terbuka serta Roda 6 Berpendingin.

2. Pengadaan Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan adalah hasil/produk kelautan dan perikanan darat, sedangkan bahan pendukung adalah bahan baku dapur pada umumnya.

SaranadanPrasarana- *FacilitiesandItfrastructures*	TAHUN						
	s/d2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah- *Total*	46	4	2	842	1.144	2.718	82
PasarIkanHigienis(PIH)- *HygieneFishMarket*	24	-	-	-	-	-	-
DepoPemasaranIkan(DPI)- *FishMarketDepo*	7	-	1	1	2	-	-
RaiserIkanHias(RIH)- *OrnamentalFishRaiser*	1	-	-	-	-	-	-
SubRaiserIkanHias(SubRIH)- *OrnamentalFishSubRaiser*	2	-	-	-	-	-	-
PasarIkanTradisional(PIT)-TraditionalFishMarket	12	4	1	61	22	40	29
BangsalPengolahanRumputLaut	-	-	-	-	1	-	-
DepoPemasaranRumputLaut	-	-	-	9	6	1	-
PabrikTepungIkan	-	-	-	-	-	3	-
MobilAlihTeknologidanInformasi-GEMARIKAN	-	-	-	13	8	12	16
SaranaPemasaranBergerak(SPG)Roda3Berpendingin	-	-	-	150	180	-	-
SaranaPemasaranBergerak(SPG)Roda4Berpendingin	-	-	-	8	18	7	2
SaranaPemasaranBergerak(SPG)Roda4BakTerbuka	-	-	-	-	-	22	20
SaranaPemasaranBergerak(SPG)Roda6Berpendingin	-	-	-	-	-	17	15
SaranaPemasaranBergerak(SPG)Roda10Berpendingin	-	-	-	-	-	3	-
CoolBox100L	-	-	-	-	-	288	-
CoolBox200L	-	-	-	-	-	100	-
CoolBox210L	-	-	-	150	394	-	-
CoolBox600L				300			-
ChestFreezer	-	-	-	150	-	-	-
ChestFreezer194L					463		-
ChestFreezer492L	-	-	-	-	50	-	-
BoothPemasaran	-	-	-	-	-	50	-
TendaPemasaran	-	-	-	-	-	75	-
PerlengkapanPedagang	-	-	-	-	-	2.100	-
PusatPromosidanPemasaranIkanHias	-	-	-	-	8	3	1
PusatPromosidanPemasaranMutiara	-	-	-	-	1	-	-
PusatPromosidanPemasaranKerajinanKekerangan	-	-	-	-	-	-	1
DepoPemasaranIkanHias	-	-	-	1	-	-	-
KiosPemasaranIkanHias	-	-	-	-	-	1	-

Tabel 3.6: *Value Chain* Industri Pengolahan, Tim Kerja JARING – 2015

Sumber : DJP2HP

3. Pengolahan Sederhana

Perkembangan sentra pengolahan ikan 2008 – 2014 didominasi oleh pengolahan pindang ikan, ikan asap, ikan kering dan teri. Pengolahan Sederhana dapat dilakukan dengan cara :

a. Pengasinan

Dilakukan dengan cara memberikan garam kepada ikan agar lebih awet. Produk pengasinan antara lain teri asin, jambal roti dan ikan asin lainnya. Contoh komponen biaya untuk produksi pengasinan teri nasi (harga estimasi):

No	Jenis Biaya	Jumlah	Harga/satuan	Nilai (Rp)
1	Perijinan (HO & IMB)	1	8.500.000	8.500.000
2	Sewa tanah dan gedung	12	12.500.000	150.000.000
3	Mesin dan peralatan utama:			
	Cold storage	1	30.000.000	30.000.000
	Pompa air	6	250.000	1.500.000
	Blower	5	150.000	750.000
	Dapur/tungku	3	800.000	2.400.000
	Tong	7	200.000	1.400.000
	Pepean	60	50.000	3.000.000
	Kledet	600	4.500	2.700.000
	Keranjang plastik	40	5.000	200.000
	Centong	10	1.500	15.000
	Seser	3	1.000	3.000
	Kompor	10	65.000	650.000
	Sealer	1	75.000	75.000
	Basket	30	15.000	450.000
	Timbangan	2	450.000	900.000
	Jumlah Biaya Investasi (Rp)			**202.543.000**

Gambar penglahan pengasinan

Tabel 3.7: Biaya Investasi untuk Pengasinan Teri Nasi

Sumber: Lending Model Bank Indonesia

Dalam mitigasi risiko/upaya mencegah memburuknya kualitas produksi ikan, industri pengolahan ikan menerapkan strategi diversifikasi produk yang bertujuan untuk mempertahankan kesegaran dan mutu ikan melalui pengawetan/pengolahan.
Cakupan industri pengolahan ikan berdasarkan pengelompokan atau kategorisasi yang ada di dunia internasional dan di dalam negeri adalah sebagai berikut :

- KLUI 31141, Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya, seperti: Ikan akan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng dan sejenisnya
- KLUI 31142, Industri pengaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, seperti: ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin, cumi-cumi asin dan sejenis
- KLUI 31143, Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, seperti: ikan bandeng asap, ikan cakalang asap dan sejenisnya
- KLUI 31144, Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, seperti: ikan bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya
- KLUI 31145, Industri pemindangan ikan dan biota perairan lannya, seperti: pindang ikan bandeng, pindang ikan tongkol dan sejenisnya
- KLUI 31149, Industri pengolahan pengawetan lainnya utkk ikan dan biota lainnya, seperti: tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis dan sejenisnya

Perkembangan sarana dan prasarana di Indonesia pada akhir 2014 didominasi oleh Pasar Ikan Tradisional, Mobil Alih Teknologi dan Informasi – GEMARIKAN, Sarana Pemasaran Bergerak (SPG) Roda 4 Bak Terbuka serta Roda 6 Berpendingin.

SaranadanPrasarana- *FacilitiesandInfrastructures*	TAHUN						
	s/d2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah- *Total*	46	4	2	842	1.144	2.718	82
PasarIkanHigienis(PIH)- *HygieneFishMarket*	24	-	-	-	-	-	-
DepoPemasaranIkan(DPI)- *FishMarketDepo*	7	-	1	1	2	-	-
RaiserIkanHias(RIH)- *OrnamentalFishRaiser*	1	-	-	-	-	-	-
SubRaiserIkanHias(SubRIH)- *OrnamentalFishSubRaiser*	2	-	-	-	-	-	-
PasarIkanTradisional(PIT)-TraditionalFishMarket	12	4	1	61	22	40	29
BangsalPengolahanRumputLaut	-	-	-	-	1	-	-
DepoPemasaranRumputLaut	-	-	-	9	6	1	-
PabrikTepungIkan	-	-	-	-	-	3	-
MobilAlihTeknologidanInformasi-GEMARIKAN	-	-	-	13	8	12	16
SaranaPemasaranBergerak(SPG)Roda3Berpendingin	-	-	-	150	180	-	-
SaranaPemasaranBergerak(SPG)Roda4Berpendingin	-	-	-	8	18	7	2
SaranaPemasaranBergerak(SPG)Roda4BakTerbuka	-	-	-	-	-	22	20
SaranaPemasaranBergerak(SPG)Roda6Berpendingin	-	-	-	-	-	17	15
SaranaPemasaranBergerak(SPG)Roda10Berpendingin	-	-	-	-	-	3	-
CoolBox100L	-	-	-	-	-	288	-
CoolBox200L	-	-	-	-	-	100	-
CoolBox210L	-	-	-	150	394	-	-
CoolBox600L				300			-
ChestFreezer	-	-	-	150	-	-	-
ChestFreezer194L					463		-
ChestFreezer492L	-	-	-	-	50	-	-
BoothPemasaran	-	-	-	-	-	50	-
TendaPemasaran	-	-	-	-	-	75	-
PerlengkapanPedagang	-	-	-	-	-	2.100	-
PusatPromosidanPemasaranIkanHias	-	-	-	-	8	3	1
PusatPromosidanPemasaranMutiara	-	-	-	-	1	-	-
PusatPromosidanPemasaranKerajinanKekerangan	-	-	-	-	-	-	1
DepoPemasaranIkanHias	-	-	-	1	-	-	-
KiosPemasaranIkanHias	-	-	-	-	-	1	-

Tabel 3.8: Sarana dan Prasarana Infarasturktur

Sumber: DJP2HP

b. Pemindangan

Dilakukan dengan cara merebus ikan dalam jumlah banyak dengan suhu yang tinggi. Nilai tambah yang dihasilkan adalah ikan yang siap konsumsi, lebih awet dan sehat karena mematikan bakteri Patogen dan bebas minyak. Kebutuhan biaya investasi untuk pemindangan ikan berdasarkan lending model Bank Indonesia sebagai berikut :

[illegible] (IMO & IMB)	paket	1	8.500.000	8.500.000	3	2.833.333
[illegible] tanah dan gedung	paket	1	12.500.000	12.500.000		
[illegible] dan peralatan [illegible]:						
[illegible] air	unit	2	250.000	500.000	5	100.000
[illegible]	unit	2	150.000	300.000	5	60.000
[illegible]	unit	3	800.000	2.400.000	7	342.857
[illegible]	unit	20	200.000	4.000.000	5	800.000
[illegible] plastik	unit	40	5.000	200.000	3	66.667
[illegible]	unit	10	1.500	15.000	1	15.000
[illegible]	unit	10	1.000	10.000	1	10.000
[illegible]	unit	10	65.000	650.000	3	216.667
[illegible]	unit	30	15.000	450.000	5	90.000
[illegible]	unit	3	450.000	1.350.000	5	270.000

Tabel 3.9: Biaya Investasi untuk Pemindangan Ikan

Sumber: DJP2HP

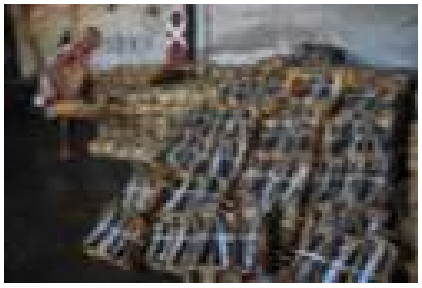

Gambar penglahan Pemindangan

c. Pengasapan

Dilakukan melalui proses mengasapi ikan sampai teksturnya berubah menjadi kering dan siap konsumsi. Nilai tambah yang didapatkan adalah hasil produk lebih awet, rasa kuat, dan lebih kering sehingga lebih mudah dipasarkan. Kebutuhan biaya investasi untuk pengasapan sebagai berikut:

No	Rincian Biaya Proyek	Total Biaya (Rp)
1	Dana investasi yang bersumber dari	
	a. Kredit	2.500.000
	b. Dana sendiri	7.500.000
	Jumlah dana investasi	**10.000.000**
2	Dana modal kerja yang bersumber dari	
	a. Kredit	10.000.000
	b. Dana sendiri	9.756.645
	Jumlah dana modal kerja	**19.756.645**
3	Total dana proyek yang bersumber dari	
	a. Kredit	12.500.000
	b. Dana sendiri	17.256.645
	Jumlah dana proyek	**29.756.645**

Tabel 3.10 Biaya Investasi untuk Pengasapan Ikan

Sumber: DJP2HP

Gambar penglahan Pengasapan

D. Peragian

Merupakan proses pengawetan ikan melalui perombakan secara *enzymatis*, *proteolitik*, *bakteriologis* dalam derajat keasaman tertentu sehingga menghasilkan produk dengan cita rasa khas. Tahap pengolahan produk berfermentasi :

Perebusan I, pengepresan/pemerasan, penyaringan,
Perebusan II, penambahan gula dan garam.
Contoh: Terasi, kecap ikan, petis, silase ikan

Kebutuhan biaya investasi untuk pembuatan kecap sebagai berikut :

No	Komponen Biaya	Satuan	Jumlah Fisik	Harga per Satuan Rp	Jumlah Biaya Rp	Umur Ekonomis (bulan)	Nilai Penyusutan Rp/bulan
1	**Alat produksi dan Pengemas**						
	a. Tungku pemasakan	unit	2	500.000	1.000.000	3	333.333
	b. Wajan perebusan	unit	8	250.000	2.000.000	1	2.000.000
	c. Baskom/ember	unit	10	100.000	1.000.000	1	1.000.000
	d. Timbangan	unit	1	150.000	150.000	3	50.000
	e. Alat pengepressl/penyaring	unit	1	1.500.000	1.500.000	3	500.000
	f. Mesin Blender	unit	1	2.000.000	2.000.000	2	1.000.000
	g. Alat penutup botol	unit	1	750.000	750.000	2	375.000
	h. Alat pencucian botol	unit	1	1.000.000	1.000.000	2	500.000
	i. Pisau	unit	10	25.000	250.000	2	125.000
	j. Kompor	unit	4	500.000	2.000.000	2	1.000.000
	k. Pengaduk	unit	8	15.000	120.000	1	120.000
2	**Lahan dan Bangunan**						
	Bangunan Produksi	m2	70	1.250.000	87.500.000	10	8.750.000
	Lahan	m2	100	200.000	20.000.000		
	Jumlah				**119.270.000**		**15.753.333**

Tabel 3.11: Biaya Investasi untuk Pembuatan Kecap

Sumber: DJP2HP

Gambar pengolahan Peragian

E. Surimi

Merupakan produk olahan perikanan setengah jadi (*intermediate product*) berupa hancuran daging ikan yang mengalami proses pencucian dengan larutan garam dingin, pengepresan dan penambahan bahan tambahan (*food additive*).

- Surimi merupakan bahan baku antara (*intermediate*) yang potensial untuk pembuatan berbagai produk makanan berbasis surimi (surimi-*based product*) seperti daging kepiting tiruan, kerupuk kamaboko berperisa, *chikuwa*, *satsuma age*/tempura, *hanpen*, bakso ikan sosis ikan, dan lain lain.
- Surimi menjadi popular dikarenakan memiliki tekstur yang unik dan juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Kebutuhan biaya investasi untuk pembuatan abon berdasarkan lending model Bank Indonesia sebagai berikut:

No	Jenis Biaya	Jumlah	Satuan	Harga/ satuan	Nilai
1	Perizinan				
	• SIUP	1	Berkas	300,000	300,000
	• SITU	1	Berkas	300,000	300,000
	• P-IRT dari Dinkes	1	Berkas	300,000	300,000
	• NPWP	1	Berkas	250,000	250,000
	• Badan Hukum KUB	1	Berkas	300,000	300,000
	• Sertifikat Halal	1	Berkas	1,000,000	1,000,000
	Sub jumlah				2,450,000
2	Sewa tanah dan bangunan	1	unit	10,000,000	10,000,000
3	Mesin/Peralatan Produksi				
	• Mesin pengepres (3 kg)	2	unit	1,000,000	2,000,000
	• Mesin parutan kelapa	1	unit	2,500,000	2,500,000
	• Mesin giling	2	unit	2,500,000	5,000,000
	• Garpu besar **)	1	unit	50,000	50,000
	• Lumpang ukuran 1 kg	1	unit	50,000	50,000
	• Lumpang ukuran 2 kg	1	unit	100,000	100,000
	• Lumpang ukuran 3 kg	1	unit	150,000	150,000
	• Batu Penumbuk	3	unit	10,000	30,000
	• Blong	7	unit	35,000	245,000
	• Tungku	4	unit	30,000	120,000
	• Wajan Penggorengan	6	unit	140,000	840,000
	• Sealer	3	unit	300,000	900,000
	• Baskom Plastik Besar	4	unit	60,000	240,000
	• Baskom Plastik Kecil	3	unit	40,000	120,000
	• Saringan Kelapa	1	unit	5,000	5,000
	• Badeng	5	unit	40,000	200,000
	• Sodet Besar	5	unit	30,000	150,000
	Sub jumlah				12,700,000
4	Peralatan lain				
	• Timbangan Duduk 5 kg	1	unit	150,000	150,000
	• Timbangan Gantung 25 kg	1	unit	300,000	300,000
	• Etalase	1	unit	500,000	500,000
	Sub jumlah				950,000
	Jumlah				26,100,000

Tabel 3.12: Biaya Investasi untuk Pembuatan Abon

Sumber: DJP2HP

Gambar pengolahan Surimi

f. *Crispy*

Cara pengolahan ini digunakan untuk diversifikasi produk guna memberikan rasa dan bentuk yang lain sehingga menarik minat konsumen, antara lain bandeng *crispy*, kerupuk udang/ikan, *fish stick* dll. Kebutuhan biaya investasi untuk pembuatan kerupuk.

No	Komponen Biaya	Satuan	Jumlah Fisik	Harga per Satuan Rp	Jumlah Biaya Rp
1	Perizinan		1	2.500.000	**2.500.000**
2	Bangunan	m^2	50	250.000	**12.500.000**
3	Tanah	m^2	100	200.000	**20.000.000**
4	Alat Produksi dan Pengemas				
	a. Mixer	unit	1	800.000	800.000
	b. Kompor	unit	3	350.000	1.050.000
	c. Wajan Besar	unit	3	250.000	750.000
	d. Kulkas	unit	1	3.500.000	3.500.000
	e. Kipas Angin	unit	1	750.000	750.000
	f. Baskom	unit	2	50.000	100.000
	g. Pisau	unit	4	15.000	60.000
	h. Rak Penjemuran	unit	8	300.000	2.400.000
	i. Sealer	unit	1	1.000.000	1.000.000
	j. Mesin Penggiling	unit	1	1.500.000	1.500.000
	k. Meja	unit	2	250.000	500.000
	l. Ember	unit	6	50.000	300.000
	m. Timbangan	unit	1	150.000	150.000
	n. Alat Transportasi - Motor	unit	1	10.000.000	10.000.000
	Jumlah				**57.860.000**

Tabel 3.13: Biaya Investasi untuk Pembuatan Kerupuk Udang

Sumber: DJP2HP

Gambar penglahan Crispy

4. Pengolahan Skala Industri

Perbedaan pengolahan skala industri dan tradisional terletak pada teknologi perlengkapan serta *volume output* yang dihasilkan, sedangkan pada dasarnya proses input dari hulu serta penyaluran *output* ke pasar adalah serupa. Pengolahan skala industri biasanya dilakukan dengan cara pengalengan, pembekuan, loin, surimi, sashimi dan saku.

a. Pengalengan

Pengolahan ikan dengan cara mengemas ikan dalam kondisi *vacum* dengan media kaleng, setelah divacum dan diberikan bumbu antara lain minyak dan saos. Prinsip pengalengan yaitu mengemas bahan pangan dalam wadah yang tertutup rapat sehingga udara dan zat-zat maupun organisme yang merusak atau membusukkan tidak dapat masuk, kemudian wadah dipanaskan sampai suhu tertentu untuk mematikan pertumbuhan mikroorganisme yang ada. Ikan yang digunakan sebagai bahan baku adalah ikan tuna dari jenis *Skipjack* tuna (*Katsuwanus pelamis*), *Yellow fin* tuna (*Thunnus albacore*), dan Albacore (*Thunnus alalunga*), sedangkan bahan tambahan yang digunakan adalah air, minyak kedelai (*soya bean oil*) dan larutan garam (*brine*).

Keuntungan utama penggunaan kaleng sebagai wadah bahan pangan adalah :

- Kaleng dapat menjaga bahan pangan yang ada di dalamnya.
- Kaleng dapat juga menjaga bahan pangan terhadap perubahan kadar air yang tidak diinginkan.
- Kaleng dapat menjaga bahan pangan terhadap penyerapan oksigen, gas-gas lain, bau-bauan, dan partikel-partikel radioaktif yang terdapat di atmosfer.
- Untuk bahan pangan berwarna yang peka terhadap reaksi fotokimia, kaleng dapat menjaga terhadap cahaya.

b. Pembekuan

Pembekuan dimaksudkan untuk mengawetkan sifat–sifat alamiah ikan. Pembekuan menggunakan suhu yang lebih rendah, yaitu jauh dibawah titik beku ikan. Tujuan pembekuan ikan adalah menerapkan metode unggul guna mempertahankan sifat–sifat mutu pada ikan dengan teknik penarikan panas secara efefktif dari ikan agar suhu ikan turun sampai pada suatu tingkat suhu rendah yang stabil, dalam arti ikan itu hanya mengalami proses perubahan yang minimum selama proses pembekuan, penyimpanan beku dan distribusi, sehingga dapat dinikmati oleh konsumen akan nilai dan faktor mutunya dalam keadaan segar atau keadaan seperti yang dimiliki produk itu sebelum dibekukan. (Nuryadin,2001).

c. Surimi

Cara pengolahan produk dengan surimi pada produk skala industri sama dengan skala rumah tangga, namun yang membedakan hanya skalanya saja.

d. *Lion*

Loin adalah model pengolahan ikan (umumnya tuna) dimana daging ikan dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan, setelah dipisahkan dari kepala, tulang dan ekornya. Umumnya Loin daging ikan tuna dipotong memanjang menjadi 4 bagian yaitu: (1) sisi kiri atas, (2) sisi kiri bawah, (3) sisi kanan atas dan sisi kanan bawah. Umumnya ikan diolah menjadi loin untuk kebutuhan ekspor, khususnya ke Jepang, China, Russia, Amerika dan Uni Eropa.

e. Saku

Saku adalah model pengolahan ikan lanjutan (umumnya tuna) dimana daging ikan yang telah dibentuk menjadi loin, dipotong-potong kembali menjadi ukuran kotak persegi (standarnya adalah panjang 20 cm, lebar 10,5 cm dan tebal 3 cm). Tuna Saku merupakan produk olahan yang akan digunakan sebagai bahan baku sushi dan sashimi. Sebagian besar ikan diolah menjadi Saku untuk kebutuhan ekspor, khususnya ke Jepang, China, Russia, Amerika dan Uni Eropa.

f. Sashimi

Sashimi adalah daging ikan (umumnya tuna) yang telah dipotong-potong menjadi lembaran-lembaran dan dikonsumsi langsung tanpa proses pemasakan (perebusan, penggorengan, dll) terlebih dahulu.

D. Distribusi dan Perdagangan

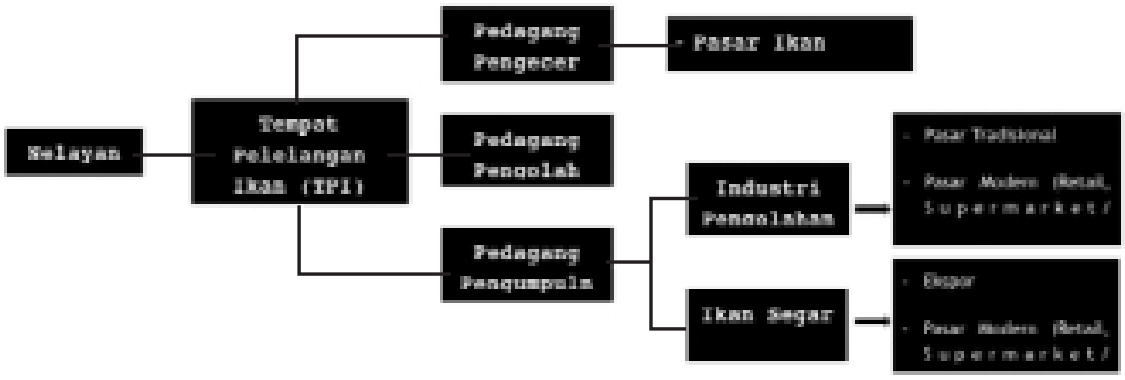

Gambar 3.13: Pemasaran Ikan menurut KKP

Sumber : KKP

1. Pemasaran/Perdagangan

Sistem pemasaran/perdagangan sektor kelautan dan perikanan meliputi kegiatan pemasaran/perdagangan produk segar dan olahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi dan perdagangan produk sektor kelautan dan perikanan adalah:

a. Sistem Rantai Dingin

Sistem ini diperlukan untuk mempertahankan kualitas hasil produk sektor kelautan dan perikanan (segar dan olahan) agar tidak turun. Dengan adanya fasilitas pembekuan dan *storage* maka ikan, udang dan hasil olahannya dapat disimpan dalam waktu yang lama untuk tujuan distribusi, pemasaran, cadangan pangan dan stabilisasi harga produk. Sistem ini mencakup *cold storage, freezer, cool box*, penyediaan es dan garam, ketersediaan air bersih dan kendaraan distribusi berpendingin (motor, *container*, mobil, truk, kapal dan pesawat).

a) gambar Sistem Rantai Dingin

b. Sistem *Packaging*

Pengepakan/pengemasan produk perikanan dengan tujuan estetika, mempertahankan kualitas dan lebih ringkas agar memudahkan untuk dipasarkan ke konsumen. Dengan pengepakan/pengemasan yang baik dan menarik maka nilai/harga dari produk tersebut menjadi meningkat.

b) gambar Packaging

c. Jasa Pengangkutan

Guna menghubungkan antara produsen hasil sektor kelautan dan perikanan dengan konsumen maka diperlukan jasa pengangkutan yang memadai. Ketiadaan/kelangkaan jasa pengangkutan akan mengakibatkan kualitas dari produk sektor kelautan dan perikanan menjadi berkurang dan harganya menjadi lebih tinggi.

c) Gambar Jasa Pengangkutan

d. Truk dan mobil berinsulasi

Selain itu, sarana pemasaran usaha kecil skala UKM dapat menggunakan unit kendaraan bermotor roda tiga dilengkapi *cool box* dengan harga terjangkau dan utilitas yang tinggi. Harga satu unit kendaraan tersebut sekitar Rp45 juta.

e. Tempat Pelelangan Ikan

Tempat pelelangan merupakan tempat terpenting dalam proses pemasaran ikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi, tempat pelelangan/pemasaran ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
- Mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang *hygiene.*
- Dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan *toilet* dalam jumlah yang mencukupi. Tempat cuci tangan harus dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai.
- Mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan.
- Kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam Tempat Pemasaran Ikan/pasar grosir.
- Dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan;
- Dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan

e) gambar pelalangan ikan

Jasa Pengangkutan yang digunakan

- *Container*
- Kapal Pengangkut Antar Pulau dan Tujuan Ekspor
- Pesawat terbang (Ekspor)
- Mobil-Mobil (*Pick Up*) untuk distribusi darat baik antar kota maupun antar provinsi.

dan minum serta diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas.

- Mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut bersih yang cukup.
- Mempunyai wadah penampungan produk yang bersih, tahan karat, kedap air dan mudah dibersihkan.
- Mempunyai penampungan pengolahan limbah.

f. Pola Perdagangan/Pembayaran

Penjualan ke pasar tradisional bersifat tunai (*cash and carry*) terutama untuk ikan air tawar dan segar, namun untuk ikan hasil olahan umumnya bersifat tunda dengan jangka waktu sekitar 1–2 hari. Penjualan ke ritel/*hypermarket*/ supermarket/hotel bersifat konsinyasi dengan pembayaran tunda dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan.

g. Ekspor

Mayoritas jenis ikan yang diekspor adalah udang, tuna, tongkol, cakalang dan kepiting. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pemberlakuan wajib standar nasional Indonesia bidang kelautan dan perikanan berisi tentang pemberlakuan secara wajib Standar Nasional Indonesia untuk produk-produk kelautan dan perikanan yang akan diekspor.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ekspor disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Belum dapat memanfaatkan secara maksimal atas terbukanya peluang pasar udang global sebagai akibat turunnya produksi di beberapa negara produsen utama dunia karena serangan EMS (*Early Mortality Syndrome*).
- Menurunnya impor TTC di pasar Jepang menyebabkan turunnya harga TTC di pasar global.
- Belum terpenuhinya bahan baku UPI TTC yang ditunjukkan dengan tingkat utilitas yang relatif masih rendah (54,79% periode Januari-Juni 2014).
- Dampak sementara moratorium penangkapan ikan dan kapal angkut ikan hidup hasil budidaya, serta pelarangan *transhipment*.
- Kasus *temporary restriction* oleh *Custom Union* Rusia baru terbuka September 2014.
- Belum optimalnya kualitas pencatatan data ekspor, seperti: ekspor tanpa PEB, ekspor di daerah perbatasan, serta ekspor dibawah harga sebenarnya.
- Semakin ketatnya persyaratan impor negara tujuan, seperti jaminan keamanan produk perikanan dan non-IUU, *sustainability* dan *tracebility*.

Rincian- Item	Tahun- Year						Kenaikan Rata-Rata(%) Increasing Average(%)	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014*)	2009-2013	2012-2013
Volume- Volume (Ton)	881.413	1.103.576	1.159.349	1.229.114	1.258.179	920.585	9.66	2.36
Udang- Shrimp	150.989	145.092	158.062	162.068	162.410	141.042	1.94	0.21
Tuna,Cakalang,Tongkol- Tuna,Skipjack,LittleTuna	131.550	122.450	141.774	201.159	209.072	155.130	13.67	3.93
IkanLainnya- OtherFish	430.513	622.932	621.632	538.723	519.293	367.498	6.89	-3.61
Kepiting- Crab	18.673	21.537	23.089	28.212	34.173	21.490	16.47	21.13
Lainnya- Others	149.688	191.564	214.793	298.952	333.232	235.425	22.69	11.47
Nilai- Value (US$1.000)	2.466.202	2.863.831	3.521.091	3.853.658	4.181.857	3.387.105	14.26	8.52
Udang- Shrimp	1.007.481	1.056.399	1.309.674	1.304.149	1.684.086	1.546.004	14.59	29.13
Tuna,Cakalang,Tongkol- Tuna,Skipjack,LittleTuna	352.300	383.230	498.591	749.992	764.791	510.832	22.82	1.97
IkanLainnya- OtherFish	723.523	898.039	1.100.576	965.062	1.056.117	549.301	10.95	9.44
Kepiting- Crab	156.993	208.424	262.321	329.724	359.304	312.855	23.32	8.97

Tabel 3.12 Kontribusi Volume Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Pasar Produktif Periode 2010 – 2014)*

Sumber : Source Badan Statistik

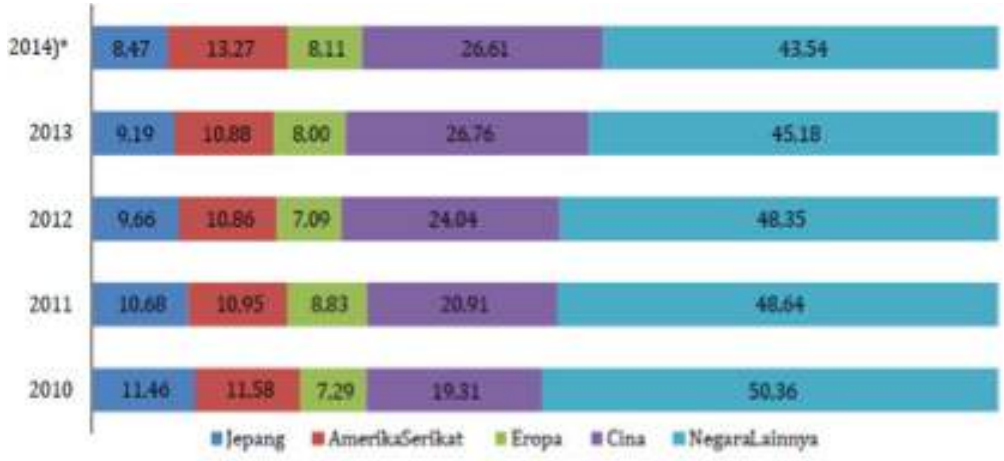

Sumber- Source: Badan Pusat Statistik- Statistics Indonesia
Keterangan- Note:)Angka sementara hingga bulan September 2014- Preliminary Figure up to September 2014.*

Gambar 3.14: Kontribusi volume Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Pasar Produktif Periode 2010 – 2014)*

Sumber : Source Badan Statistik

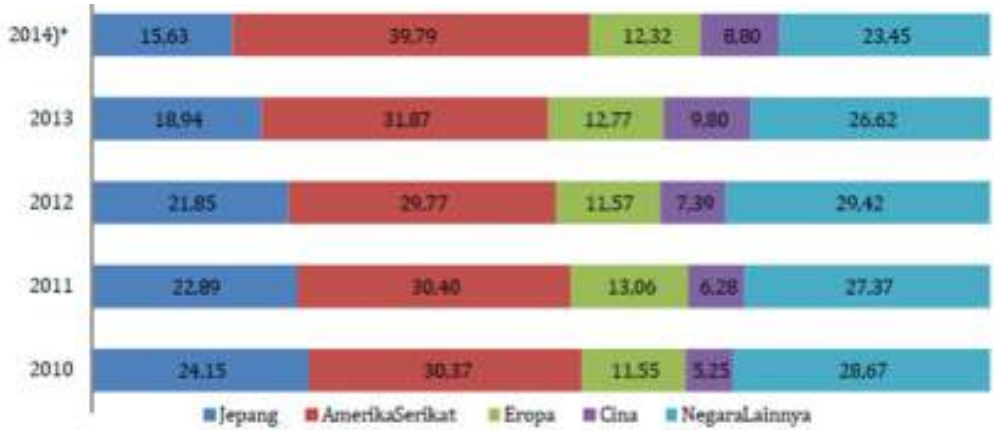

Gambar 3.15: Kontribusi Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Pasar Produktif Periode 2010 – 2014)*

Sumber : Source Badan Statistik

2. Strategi Peningkatan Ekspor 2015 – 2019

a. Pemenuhan kualitas dan kontinuitas pasokan bahan baku UPI dalam rangka ekspor.
b. Peningkatan koordinasi antar instansi dalam rangka percepatan penanganan hambatan ekspor hasil perikanan.
c. Peningkatan kualitas dan utilitas perundingan internasional melalui partisipasi aktif dalam forum kerjasama perdagangan dalam rangka menurunkan hambatan tarif dan non tarif di fora bilateral, regional dan multilateral.
d. Peningkatan kemampuan dan daya saing eksportir hasil perikanan skala UKM.
e. Pembinaan eksportir terkait persyaratan pasar yang dinamis, misalnya isu *food safety*, IUU *Fishing, sustainability*, dan *seafood fraud.*
f. Peningkatan promosi dan kerjasama pemasaran internasional dalam rangka penguatan *branding "naturally diverse"* hasil perikanan Indonesia.
g. Peningkatan *market intelligence,* serta pengembangan pemetaan potensi dan daya saing pemasaran luar negeri hasil perikanan.
h. Bekerjasama aktif dengan misi perwakilan Indonesia di luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor dan penanganan hambatan ekspor.

i. Pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri di dalam negeri.
j. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi data ekspor hasil perikanan.

3.2. Aktivitas Pendukung

a. Infrastruktur

Pelabuhan, jalan khusus pelabuhan, Bandara, Pembangkit listrik khusus daerah industri perikanan (nelayan, pelabuhan, daerah) kerjasama dengan PLN. MoU dengan PLN. PLN masuk ke lahan untuk menyediakan listrik tersebut. Pengadaan pabrik-pabrik es, pengadaan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Pasokan Listrik dan penyediaan bahan bakar menjadi faktor yang sangat krusial. Tenaga Listrik sangat diperlukan untuk menghidupkan *cold storage* ataupun mesin pendingin lainnya serta proses pengolahan ikan. Ketersediaan BBM sangat diperlukan untuk bahan bakar kapal pada saat menangkap ikan.

b. Sumber Daya Manusia

SDM sektor kelautan dan perikanan didominasi oleh nelayan, jumlah nelayan rumah tangga nelayan dan pelaku usaha.

c. Perkembangan Teknologi

Strain, kawin silang antar spesies perikanan, mesin-mesin pelet mandiri, mesin pengalengan dalam kapal (melaut ikan – kembali kaleng), pengolahan tuna dalam kapal tuna loin (*fillet*).

d. Pengadaan

Pabrik-pabrik pendukung untuk memproduksi es, alat tangkap, mesin, galangan kapal, mesin pengolahan, jenis *spinner, grinder, chest freezer* dan dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, maka KKP berencana untuk membangun rantai *value chain* tersebut dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan Minapolitan.

"Pasokan Listrik dan penyediaan bahan bakar menjadi faktor yang sangat krusial."

Gambar 3.16 : Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap

Sumber : Source Badan Statistik

3.3 Risiko dan Mitigasi dalam Tahapan *Value Chain*

Beberapa risiko dalam tahapan *value chain* sektor perikanan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Budidaya Pembesaran/Pembenihan antara lain meliputi fluktuasi harga komoditas ikan dan penyakit ikan.
b. Penangkapan Ikan antara lain meliputi *fluktuasi* harga ikan dan terbatasnya ketersediaan solar sehingga nelayan tidak bisa mendapatkan solar untuk berlayar.
c. Musim angin barat & timur (November–Februari) nelayan hanya bisa mencari ikan di wilayah sekitar pantai sehingga *cashflow* terhambat.
d. Pengolahan Ikan antara lain meliputi kontinuitas bahan baku ikan beserta harganya sehingga proses produksi dapat terhambat.
e. Penundaaan pembayaran bila penjualan dengan metode titip jual.
f. Distribusi Perdagangan antara lain meliputi penundaan pembayaran dari pembeli serta kendala jarak dan waktu tempuh ke pasar tujuan.

Dalam rangka mitigasi risiko bisnis sektor perikanan dari hulu ke hilir, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh SJK antara lain sebagai berikut :

a. Memberikan edukasi kepada nelayan tentang karakteristik produk sektor jasa keuangan.
b. Nasabah memiliki usaha sampingan (pertanian/peternakan) sebagai sumber *cashflow* bila terjadi masalah di usaha budidaya, terutama untuk nelayan/ petani ikan yang belum mencapai skala ekonomis.
c. Pembiayaan fokus ke pola kemitraan dan/ atau kelompok usaha bersama untuk nelayan/pembudidaya yang belum memenuhi skala ekonomis sedangkan nelayan/pembudidaya yang telah melebihi skala ekonomis dapat diberikan pembiayaan secara individu.
d. Pemilihan nasabah pengepul yang sudah berpengalaman
e. Informasi dari petani *supplier* pengepul terkait pola usaha yang bersangkutan.
f. Monitoring dan kunjungan secara berkala untuk memantau perkembangan usaha.
g. Adanya penyisihan berupa tabungan untuk digunakan saat nelayan tidak dapat berlayar.
h. Peran dinas/pihak terkait seperti rekomendasi, pelatihan maupun penyuluhan agar nelayan mempunyai usaha sampingan saat tidak dapat berlayar.
i. Pola iuran dari anggota pada kas kelompok yang akan digunakan bila ada anggota yang mengalami permasalahan.
j. Pola angsuran disesuaikan dengan karakteristik usaha penangkapan ikan.

Rp
Rp
Rp

BAB 4

SKEMA PEMBIAYAAN

BAB 4
SKEMA PEMBIAYAAN

4.1 Profil Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan

Peningkatan pemberdayaan sektor KP harus diimbangi dengan peningkatan dukungan pembiayaan dari SJK. Pembiayaan dengan jangkauan akses yang luas dan mudah, diharapkan dapat memicu pertumbuhan bisnis di sektor KP. Data OJK menunjukkan bahwa per Desember 2014, total pembiayaan bank pada sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari 4 (empat) rantai bisnis mencapai Rp17.958 miliar atau 0,49% dari total pembiayaan.[1] Angka tersebut menunjukkan *trend* peningkatan dibandingkan tahun 2012 dan 2013, masing-masing tercatat sebesar Rp10.566 miliar dan Rp14.115 miliar. Sementara itu, pembiayaan industri keuangan non bank (sewa guna usaha) pada posisi yang sama memiliki portofolio sebesar Rp1.700 miliar atau 0,7% dari total pembiayaan IKNB.[2]

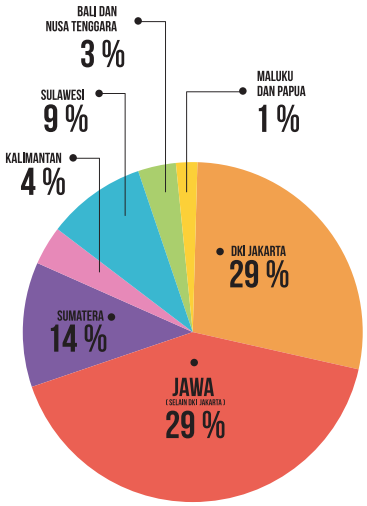

Gambar 4.1 : Sebaran Pembiayaan Bank Umum kepada Sektor Perikanan Berdasarkan Wilayah dan Rantai Bisnis Posisi Desember 2014

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Penyebaran pembiayaan bank sektor kelautan dan perikanan terbentang dari Indonesia bagian barat sampai timur, dengan konsentrasi wilayah terbesar adalah Pulau Jawa dan DKI Jakarta, dengan rasio pembiayaan masing-masing sebesar 40% dan 29%. Wilayah yang memiliki komposisi terkecil adalah Provinsi Maluku dan Papua hanya sebesar 1% dari total pembiayaan perbankan nasional.

Rasio kredit bermasalah (NPL) sektor KP menunjukkan *trend* membaik. Hal ini terlihat dari data akhir tahun 2012 NPL tercatat sebesar 4,11% kemudian turun menjadi 3,32% pada akhir tahun 2013 dan menjadi sebesar 2,81% pada akhir tahun 2014. Angka ini dinilai cukup rendah atau berada di bawah ketentuan sebesar 5%.

Rp Milyar

Kredit Bank Umum	Des 2012	Des 2013	Des 2014
Kredit Sektor Perikanan	10,566	14,115	17,958
Total Kredit	2,707,862	3,292,874	3,674,308
Resiko Kredit Perikanan terhadap total Kredit (%)	0.39	0,43	0,49
NPL Sektor Perikanan	4.1	3,32	2,81

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 4.1 : Total Kredit dan Kredit Perikanan Bank Umum

[1] *DPIP - OJK*
[2] *Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan - OJK*

PROVINSI	Total	Penangkapan	Budidaya	Pengolahan	Pemasaran
DKI Jakarta	5,270	1,519	1,243	1,436	1,072
Jawa (selain DKI Jakarta)	7,092	774	900	3,047	2,371
Sumatera	2,564	657	585	482	840
Kalimantan	729	169	161	45	353
Sulawesi	1,589	400	162	363	664
Bali dan Nusa Tenggara	512	135	85	114	178
Maluku dan Papua	202	86	17	31	68
Total Pembiayaan	17,958	3,071	2,779	2,777	9,332

Tabel 4.2 : Sebaran Pembiayaan Bank Umum kepada Sektor Perikanan Berdasarkan Wilayah dan Lini Bisnis Posisi Desember 2014

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Lini Bisnis	Jumlah Rekening Pembiayaan					
	2010	2011	2012	2013	2014	Rata - rata Pertumbuhan (%)
Penangkapan	6,698	14,132	23,125	41,370	56,653	72.62
Budidaya	22,291	23,028	27,606	36,489	45,557	20.07
Pengolahan	2,698	4,553	7,931	6,895	17,962	72.57
Pemasaran	3,191	8,106	16,980	92,914	121,096	185.26
Total Perikanan	36,888	51,830	77,644	179,681	243,302	66,302
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan						

Tabel 4.3 : Jumlah Rekening Pembiayaan Bank Umum Kepada Sektor Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Lini Bisnis

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pembiayaan pada sektor KP terus mengalami pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lini bisnis pemasaran yakni sebesar 185,26% atau 121.096 rekening dan rata-rata pertumbuhan terendah pada lini bisnis Budidaya yakni hanya sebesar 20,07% atau hanya 45.577 rekening. Sejak tahun 2013 terjadi pergeseran pertumbuhan, dari lini bisnis Budidaya menjadi Pemasaran.

Pembiayaan pada sektor perikanan masih didominasi oleh bank BUKU 4 dan 3 sebesar 72,5% dan hanya berasal dari 10 bank dari total 119 bank umum, dengan rata-rata suku bunga tertimbang sebesar 10,23%. Total pembiyaan sektor perikanan menurut kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan

Usaha (BUKU) cendrung di dominasi oleh BUKU 4 tahun 2012 pembiayaan BUKU 4 sebesar Rp5.324 Milyar dan meningkat menjadi Rp7.584 Milyar dan Rp9.263 Milyar masing-masing tahun 2013 dan 2014. Di bawah BUKU 4, BUKU 3 mencatat pebiayaan sebesar Rp4.577 Milyar diikuti dengan BUKU 2 dan BUKU 1 masing-masing sebesar Rp3.569 Milyar dan Rp569 Milyar. BUKU 4 mencatat NPL sebesar 2.28%, BUKU 3 dan BUKU 2 masing-masing sebesar 2,80%. dan BUKU 1 sebesar 3,51%. Hal ini menunjukan BUKU 4 mampu mengelola resiko gagal bayar dibandingkan BUKU lainnya. Dari data pembiayaan sektor KP di atas terlihat minat SJK terhadap sektor KP masih sangat rendah terutama disebabkan pemahaman SJK terhadap sektor KP yang masih sangat terbatas, ditambah belum efektifnya dukungan kebijakan yang sinergi dan kondusif dalam pengembangan sektor KP tersebut.

4.2 Pola Pembiayaan *Existing* Perbankan & Industri Keuangan Non Bank (Sektor Jasa Keuangan) Pada Sektor Kelautan & Perikanan

Fasilitas pembiayaan pada sektor KP, secara garis besar terdiri dari 3 fasilitas, yakni:

a. Kredit Modal Kerja (KMK), yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku, piutang dan lain-lain.
b. Kredit Investasi (KI) yaitu kredit dengan jangka waktu menengah atau panjang yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.
c. Kredit Konsumtif (KK), yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.
d. Sektor KP memiliki 5 (lima) lini bisnis produktif yang dapat dibiayai dengan fasilitas pembiayaan KMK maupun KI, dengan contoh sebagai berikut:

Rantai Bisnis	Investasi	Modal Kerja	Investasi/Modal Kerja
Penangkapan	• Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan perlengkapannya, mesin utama dan *auxiliary machines* • Pengadaan mesin dan *sparepart* untuk galangan kapal • Instalasi *coldroom, Refrigerated Sea Water* (RSW)	• Umpan, BBM, es, dan logistik penangkapan • Kebutuhan spesifik lainnya	• Pengadaan rumpon • Alat penangkapan (jaring, pancing)
Budi Daya	• Peralatan dan Permesinan pengolahan (skala kecil s.d skala industri) : *genset, spinner, mixer, mesin packing, conveyor,* pengalengan, dll • Pembelian Lahan dan Pembangunan bangunan pabrik • Pembangunan Sistem Rantai Dingin (pabrik es, *cold storage, air blast freezer, cool box*)	• Pengadaan bahan baku ikan • Produksi pengolahan	
Pengolahan Ikan	Pengadaan kendaraan pemasaran (motor, mobil, truk berpendingin)	• Modal Kerja untuk *suplier retail* • Jasa *storage & packing*	
Jasa Pendukung	Galangan		• Jasa Bengkel Kapal • Jasa penyediaan bahan bakar

Data OJK per Desember 2014, fasilitas pada lini bisnis sektor KP didominasi oleh KMK diikuti dengan KI masing-masing sebesar Rp13.488 Milyar dan Rp4.470 Milyar. Rasio NPL sebesar 3,01% dan KI sebesar 2,21%. Rasio NPL memiliki *trend* menurun pada tiga periode terakhir.

Akhir Tahun	Modal Kerja			Investasi		
	Baki Debet	NPL (%)	Suku Bunga (%)	Baki Debet	NPL	Suku Bunga (%)
2010	5,906	5.97	11.80	1,376	2.83	11.57
2011	7,556	6.43	10.52	1,614	3.78	14.79
2012	8,711	4.10	10.52	1,855	4.14	13.49
2013	11,052	3.48	11.48	3,063	2.74	12.01
2014	13,488	3.01	11.33	4,470	2.21	12.08

Tabel 4.4 *: Pembiayaan Bank Umum Sektor Perikaanan Berdasarkan Jenis Penggunaan*

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

[7] Disampaikan pada FGD Kemaritiman tanggal 27 November 2014 di Otoritas Jasa Keuangan.

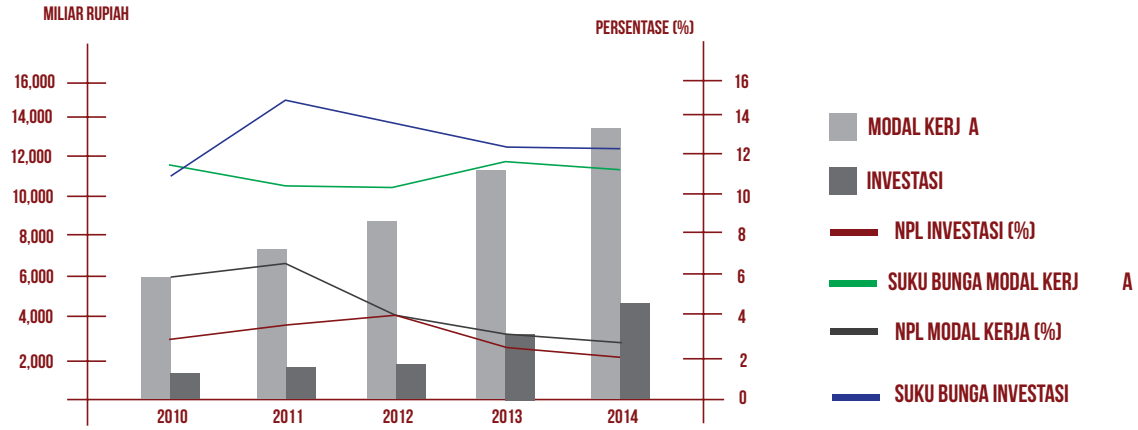

Gambar 4.2 : *Pembiayaan Bank Umum Sektor Perikanan Berdasarkan Jenis Penggunaan*

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Fasilitas pembaiayaan kepada pelaku usaha sektor KP, penggolongan debitur disesuaikan dengan segmen usaha. Penggolongan debitur terdiri dari segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Rantai Bisnis	Investasi
Usaha Mikro	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: • memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau • memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Usaha Kecil	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: • memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau • memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Usaha Menengah	Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: • memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau • memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tabel 4.5: *Kreteria UMKM*

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan total kredit Perbankan per Desember 2014 pada sektor KP, baki debet kredit segmen mikro, kecil dan menengah masing-masing dibawah 18% dari total kredit sektor KP, jauh lebih rendah dibandingkan baki debet kredit segmen Non UMKM sebesar 52% dari total kredit sektor KP. Sedangkan total kredit Non Bank, pembiayaan UMKM sektor KP sebesar Rp42,14 trilyun (11,03%) dan selebihnya berupa pembiayaan produktif non UMKM dan pembiayaan konsumtif perseorangan. Rendahnya baki debet tersebut dikarenakan pelaku usaha sektor KP segmen UMKM masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari SJK. Dilihat dari sisi NPL dan suku bunga, penyumbang NPL terbesar dari segmen Kecil sebesar 4,39% dan rata-rata suku bunga tertinggi dari segen Mikro sebesar 14,97%.

Akhir Tahun	Mikro		Kecil		Menengah		Non UMKM		Total Perikanan	
	Baki debet	Rekening	Baki debet	Rekening	Baki debet	Rekening	Baki debet	Rekening	Baki debet	Rekening
2010	243	12,135	1,640	17,375	1,269	1,646	4,131	3,722	7,282	34,878
2011	374	23,982	1,992	21,270	1,791	2,087	5,013	2,477	9,170	49,816
2012	760	49,383	2,132	21,155	1,810	2,703	5,864	2,391	10,566	75,632
2013	2,255	154,940	2,385	17,594	2,453	2,124	7,023	2,010	14,115	177,668
2014	3,071	218,709	2,779	17,238	2,777	3,258	9,332	2,083	17,958	241,288

Tabel 4.6: *Pembiayaan Sektor Perikanan Berdasarkan Golongan Debitur*

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Akhir Tahun	NPL (%)				Suku Bunga (%)			
	Mikro	Kecil	Menengah	Non UMKM	Mikro	Kecil	Menengah	Non UMKM
2010	3.88	2.93	4.24	6.79	16.34	15.68	12.09	9.33
2011	2.93	2.78	7.42	6.93	19.55	15.85	12.10	8.53
2012	3.02	5.45	3.08	4.08	18.70	14.80	12.47	8.25
2013	2.41	3.85	5.85	2.56	15.87	14.08	12.83	8.95
2014	2.33	4.39	2.78	2.52	14.97	14.14	13.08	9.56

Tabel 4.7 : *NPL dan Suku Bunga Pembiayaan Sektor Perikanan Berdasarkan Golongan Debitur*

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Pebiayaan perikanan	Rata-rata Pertumbuhan 5 tahun terakhir (%)	
	Nominal Pembiayaan	Jumlah Rekening
Mikro	97.53	114.61
Kecil	14.22	0.76
Menengah	22.73	19.04
Non UMKM	22.74	-12.31
Total	25.49	66.34
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan		

Tabel 4.8.
Pertumbuhan Nominal dan Jumlah Rekening Pembiayaan Sektor Perikanan Berdasarkan Golongan Debitur

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan total kredit Perbankan per Desember 2014 pada sektor KP, baki debet kredit segmen mikro, kecil dan menengah masing-masing dibawah 18% dari total kredit sektor KP, jauh lebih rendah dibandingkan baki debet kredit segmen Non UMKM sebesar 52% dari total kredit sektor KP. Sedangkan total kredit Non Bank, pembiayaan UMKM sektor KP sebesar Rp42,14 trilyun (11,03%) dan selebihnya berupa pembiayaan produktif non UMKM dan pembiayaan konsumtif perseorangan. Rendahnya baki debet tersebut dikarenakan pelaku usaha sektor KP segmen UMKM masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari SJK. Dilihat dari sisi NPL dan suku bunga, penyumbang NPL terbesar dari segmen Kecil sebesar 4,39% dan rata-rata suku bunga tertinggi dari segen Mikro sebesar 14,97%.

Fasilitas pembiayaan Perbankan kepada sektor KP berdasarkan pola hubungan antara pemberi fasilitas dan debitur terdiri dari pembiayaan Individual, Kelompok dan Kemitraan. Cakupan pembiayaan tersebut dapat diberikan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir yang mencakup penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran, penunjang maupun secara mandiri/tidak terintegrasi per masing-masing lini bisnis produktif. Sedangkan fasilitas pembiayaan Non Bank (Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura) bersifat Individual, berupa fasilitas KI dan KMK untuk tujuan produktif pengadaan barang yang mendukung sektor KP, antara lain pengadaan kapal, coldstorage, mesin dan lain-lain.

Pola Pembiayaan	Hulu-Hilir	Terintegrasi/ Tidak Terintegrasi
Individual Jumlah & sebaran debitur cenderung tinggi dengan total pembiayaan rendah Bank langsung berhubungan dengan debitur secara individual Perlu jaringan kantor, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih banyak.	v	Tidak Terintegrasi
Kelompok/Koperasi Usaha Sejenis, dikenal dengan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), Hubungan kelompok dengan bank diwakili oleh Pengurus Kelompok/Koperasi, Kelompok yang telah dikukuhkan/ditetapkan dan koperasi yang berbadan hukum.	v	Terintegrasi sebagian
Kemitraan Kelompok yang berada di satu kawasan tertentu, Usaha terintegrasi dari hulu ke hilir, Pola hubungan mitra dengan nelayan/pembudidaya, Didasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk formal/ informal.	v	Terintegrasi

POLA PEMBIAYAAN

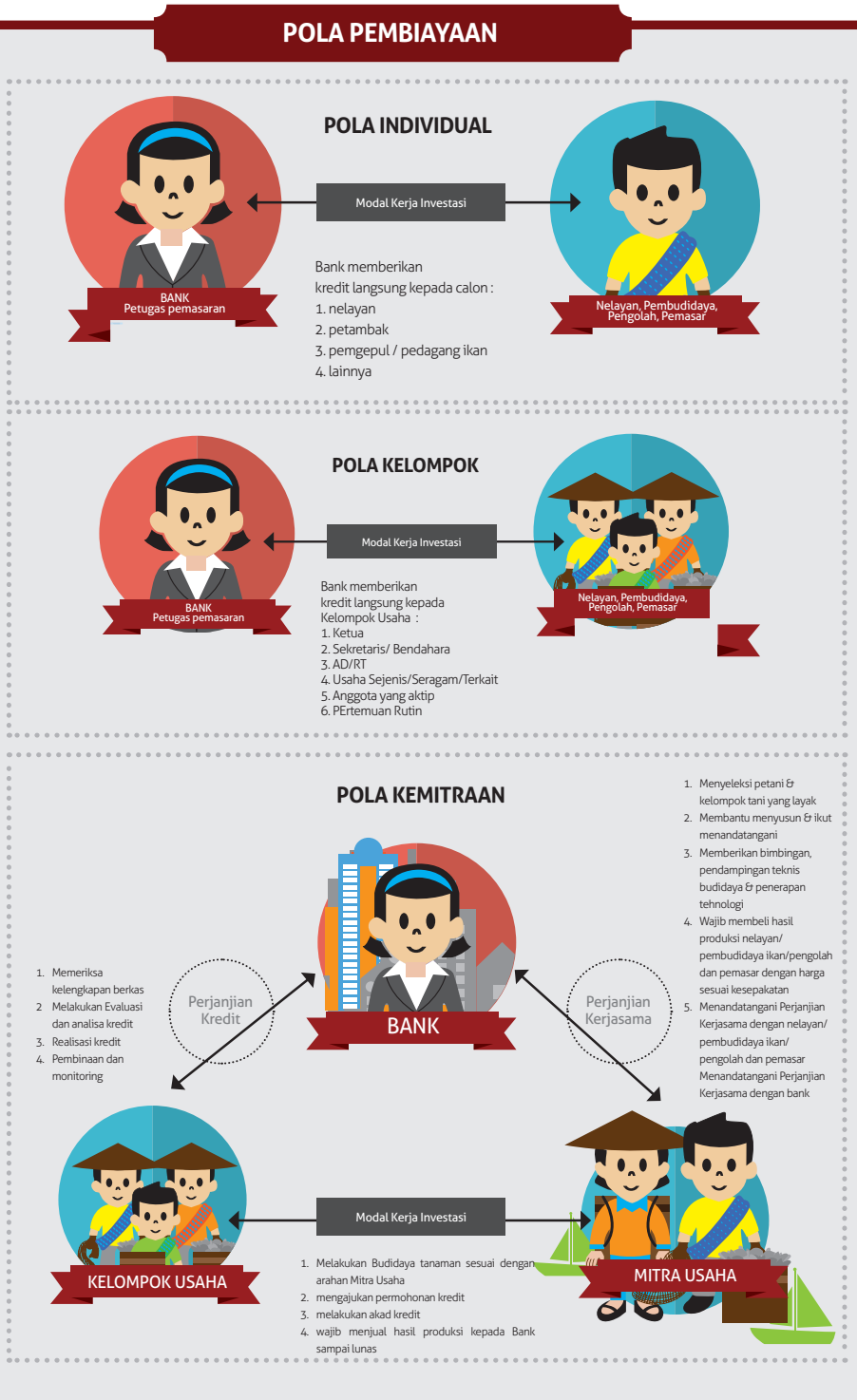

4.3 Kendala Pembiayaan pada Sektor Kelautan dan Perikanan

Identifikasi risiko dan mitigasi yang tepat diharapkan mampu menjembatani *gap* pemahaman bisnis di sektor KP antara pelaku usaha sektor KP dan SJK. Secara umum risiko di sektor KP adalah sebagai berikut:

Risiko	Pelaku Jasa Keuangan	Debitur
Risiko Strategis	• Masih sedikit jumlah usaha perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir • Mekanisme transaksi keuangan di hulu khususnya di TPI/PPI masih bersifat tunai dan belum tersentuh layanan perbankan.	• Rendahnya *bargaining* power penjual dalam pemasaran produk (sangat tergantung standar pembeli luar negeri) • Pelaku usaha sektor hulu sebagian besar belum memahami layanan perbankan dan strategi pemasaran.
Risiko Operasional	Karakteristik sektor KP adalah produknya bersifat mudah rusak (perishable) dan Siklus usaha bergantung pada faktor alam (cenderung musiman)	• Rendahnya teknologi kapal nelayan saat ini dan diperlukan investasi yang tinggi untuk menyediakan teknologi *cold chain* yang diperlukan dalam *storage* dan pengolahan • Terdapat masalah alat tangkap dan transportasi terkait isu *sustainability* • Rendahnya pemanfaatan nelayan terhadap teknologi
Risiko Kredit & Permasalahan Legalitas	• Siklus usaha bergantung pada faktor alam sehingga mempengaruhi pembayaran • Belum optimalnya pemanfaatan asuransi (kredit, kerugian, dan jiwa) pembiayaan sektor KP • Pemenuhan persyaratan formal perbankan (aspek agunan) [asuransi kredit dan kerugian • Belum optimalnya monitoring pencatatan transaksi keuangan [perangkat kebijakan yang mewajibkan pencatatan transaksi keuangan dan ekspor] • Potensi s*ide streaming* dan *mark up*	• Terbatasnya akses informasi • Terbatasnya akses pembiayaan ke lembaga jasa keuangan • Proses dan jenis perizinan di sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap dinilai cukup kompleks • Potensi terjadinya kejadian yang tidak terduga sehingga perlu dana cadangan
Mitigasi: Edukasi dan Sosialisasi Layanan Perbankan yang berkelanjutan kepada pelaku usaha kelautan perikanan. Revitalisasi mekanisme transaksi keuangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan layanan perbankan terpadu dan bersifat *online system* sehingga pelaku usaha di hulu dapat bertransaksi di mana saja dan mendapat layanan perbankan secara mudah. Revitalisasi Kawasan Minapolitan yang terintegrasi, Sentra Perikanan Terpadu. Pengembangan industri asuransi jiwa, asuransi kredit, asuransi atas agunan kredit/pembiayaan Peningkatan Program Sertifikasi untuk mendukung industri asuransi		

Pemetaan Risiko dan Mitigasinya

a. Risiko strategis

Risiko strategis dapat dimitigasi dengan beberapa cara antara lain Edukasi dan sosialisasi layanan perbankan secara berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman tentang layanan perbankan dan mendukung *strategy* pemasaran. Selanjutnya, *Revitalisasi* mekanisme transaksi di TPI menjadi layanan perbankan terpadu akan memperkecil resiko uang tunai termasuk mendukung budaya menabung dan pelaku usaha hulu bebas bertransaksi dimana saja, meningkatkan kemudahan pelaku usaha mendapat fasilitas pembiayaan perbankan dan layanan tabungan, asuransi dan mendukung program pemerintah kepada pelaku usaha di hulu seperti: subsidi BBM, kesehatan dan sertifikat lahan.

b. Risiko Kredit

Aspek karakter: lembaga jasa keuangan perlu memperkuat tahapan penelitian karakter (*character checking*) calon debitur. Penelitian karakter dapat dilakukan melalui komunikasi dengan pihak ketiga terdekat (tetangga, RT, antar nelayan dan ketua kelompok, Ketua TPI, dll). Aspek kemampuan membayar: perlu tenaga pendamping lapangan guna memastikan produktivitas dan pemasaran terjaga guna menunjang sumber pembayaran pembiayaan debitur.

c. Risiko Operasional

Sistem pembayaran atau transaksi keuangan di TPI saat ini dilakukan secara tunai karena masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki akses ke lembaga jasa keuangan. Selain itu, transaksi tunai cukup berisiko dari sisi keamanan dan hilangnya kesempatan memperoleh layanan perbankan. Untuk itu perlu diatur agar transaksi keuangan pelaku usaha dilakukan melalui layanan perbankan secara terpadu. Hal ini juga dapat mengantisipasi risiko uang hasil panen

sebagai sumber pembayaran kredit digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Keuntungan lain adanya layanan perbankan terpadu adalah mempermudah pelaksanaan dan monitoring program-program pemerintah dan pihak terkait, misalnya penyaluran kredit perbankan, budaya menabung, penyaluran bantuan mesin motor dan subsidi pemerintah.

Salah satu isu yang perlu menjadi perhatian adalah kebutuhan dana tidak terduga yang dianggarkan dalam setiap proses perhitungan kebutuhan modal kerja maupun investasi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Kebutuhan yang tidak terdeteksi dari awal memungkinkan pelaku usaha/debitur melakukan *mark up* terhadap kebutuhan modal kerja maupun investasi sementara bank menilai bahwa pencadangan dana tersebut rentan untuk *side streaming* atau penyalahgunaan yang akhirnya cenderung meningkatkan NPL.

4.4 Rekomendasi Dukungan Untuk Akselerasi Pembiayaan di Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung akselerasi pembiayaan sektor KP serta memperhatikan potensi risiko yang ada, selanjutnya SJK akan melakukan upaya sinergi dengan berbagai pihak termasuk asosiasi. Pembiayaan sektor KP akan lebih difokuskan pada pengembangan pembiayaan Kemitraan tanpa mengabaikan pendekatan pembiayaan Individual maupun Kelompok. Hal ini mempertimbangkan jangkauan pembiayaan Kemitraan yang lebih luas dan komprehensif, kemudahan akses pembiayaan terutama oleh pelaku usaha sektor KP segmen UMKM serta proses monitoring yang efektif dan efisien.

Sejalan dengan sembilan program prioritas Pemerintah (Nawa Cita) dalam mendukung pengembangan maritim Indonesia, Pemerintah bersama berbagai pihak bersinergi untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur, meliputi: pelabuhan, transportasi/angkutan, sistem informasi terpadu, pengembangan sistem *cold chain* perikanan besar, ketersediaan BBM, listrik dan air bersih serta utilitas lainnya. Selanjutnya diperlukan koordinasi regulasi dan perencanaan anggaran antara *stakeholders* bersama pihak yang berwenang secara berkelanjutan, seperti pembentukan unit kerja khusus untuk akselerasi pertumbuhan pembiayaan sektor KP. Ketersediaan *database* informasi potensi industri KP yang lengkap dan mudah diakses, pemanfaatan *echo sounder* untuk penginderaan jarak jauh yang terintegrasi dengan kapal/perahu, serta dukungan proses perizinan yang cepat (satu pintu) di pelabuhan-pelabuhan terdekat diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis di sektor KP. Selain itu, dengan pelayanan terintegrasi di dalam sistem Perbankan dapat dibentuk *database* yang *real time* dari data layanan di sektor KP. Selanjutnya database Perbankan khusus nelayan dan pembudidaya diintegrasikan dengan *database* KKP sehingga mampu memberikan *output* data yang lengkap, antara lain hasil produksi nelayan dan pembudidaya, transaksi, sistem pengajuan kuota, pengendalian dan monitoring BBM bersubsidi. Dari *database* terintegrasi tersebut dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan potensi bisnis sektor KP, seperti penetrasi pembiayaan dalam rangka *revitalisasi*, penambahan kawasan minapolitan dan TPI serta usulan pengikatan agunan SKMHT ditingkatkan dari Rp50 juta menjadi <Rp500 juta.

Selain Perbankan, industri keuangan non bank dan asosiasi (asuransi dan KADIN) turut serta berperan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan pada sektor KP. Dukungan yang diharapkan dari perusahaan asuransi antara lain peningkatan *coverage* jaminan serta produk asuransi yang disesuaikan dengan *nature* bisnis di sektor KP. Sementara itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dapat mendorong dan merekomendasikan para pengusaha di bidang perikanan untuk menjadi mitra bisnis termasuk memunculkan pengusaha baru di sektor KP. Ke depan diharapkan peran KADIN dapat ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan terhadap nelayan yang belum *bankable* untuk dibina menjadi *bankable* sehingga

selanjutnya dapat direkomendasikan kepada SJK untuk memperoleh pembiayaan. Selain itu, perlu dilakukan inisiasi pengembangan bisnis sektor KP melalui peningkatan kompetensi SDM yang bekerja sama dengan instansi terkait (KKP), pemanfaatan teknologi bersama, peluang investasi dan pemasaran baik dalam dan luar negeri dengan menjalin hubungan dengan Kamar Dagang Negara lain, serta revitalisasi peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia (beranggotakan +1300 orang) dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha guna meningkatkan dan mengembangkan potensi sektor KP di seluruh wilayah Indonesia.

4.5 Kisah Keberhasilan Pembiayaan Bank Umum pada Debitur Sektor Kelautan dan Perikanan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk (BRI)

Cirebon memiliki potensi lele dan orang seperti Suganda. Pria berumur 44 tahun ini mengawali kesuksesannya dalam budidaya lele dengan catatan kegagalan. Sebelumnya, sekitar tahun 2000, ia bersemangat menjalankan budidaya ikan emas yang berujung mangkraknya roda bisnis akibat kesulitan pakan dan terserang wabah penyakit. Suganda tergolong usahawan yang tidak pantang menyerah. Dengan memutar otak, Suganda melirik budidaya lele dan sukses. Tahun 2009, Suganda baru memiliki lahan untuk budidaya seluas 1 hektar atau 5 kolam. Ia tidak berpikir untuk dirinya sendiri dan timbul pikiran pria yang memiliki 2 pegawai itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan membentuk kelompok budidaya ikan lele. Tahun 2005, cita-cita Suganda akhirnya terwujud, terbentuklah kelompok pembudidaya ikan lele "Kersa Mulia Bakti" beralamat di Desa Kertasura Blok 3, Jalan Sunan Gunungjati, Kapetakan, Cirebon. Saat ini, anggota kelompok telah berjumlah 29 orang dengan jumlah kolam 383 buah di lahan seluas 35 hektare. Sebuah lompatan besar bagi Suganda dan pembudidaya di desanya. Untuk mengembangkan skala usaha para anggotanya, pada tahun 2013, kelompok yang dipimpin Suganda tersebut tersebut mengajukan pinjaman KUR Ritel kepada BRI dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp95.000.000,00/anggota sehingga total pembiayaan BRI kepada kelompok mencapai Rp2,4 Milyar. Dukungan yang diberikan BRI kepada kelompok tidak sebatas fasilitas pembiayaan, tetapi mencakup bantuan konsultasi manajemen keuangan sehingga usaha budidaya ikan lele kelompok "Kersa Mulia Bakti" dapat berkembang pesat.

Parameter Keberhasilan	Sebelum Pembiayaan BRI	Sesudah Pem-biayaan BRI
Kolam	215	383
Jumlah Panen Per Hari	1,8 sd 2 ton/ hari	4 – 5 ton/ hari
Omzet Per Hari		

Hasil panen yang meningkat tersebut ternyata belum memenuhi permintaan yang semakin tinggi. Saat ini, hasil panen diserap oleh pelanggan yang berasal dari Jakarta, Bandung, Semarang dan Tegal. Suganda mengatakan sering kali kelompoknya tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan rata-rata permintaan mencapai 6 ton/hari sehingga potensi usaha di budidaya lele sebenarnya masih sangat besar. Omzet harian saat ini rata-rata mencapai Rp39 juta/hari sehingga setiap pembudidaya bisa memperoleh keuntungan bersih Rp6 juta hingga Rp10 juta/bulan.

Ketika ditanya mengenai target beberapa tahun ke depan, Suganda berharap kelompok pembudidaya ikan lele "Kersa Mulia Bakti" dapat menampung anggota lebih banyak lagi, yaitu 2 atau 3 kali lipat dari jumlah anggota saat ini. Harapannya, semakin banyak anggota yang merasakan manfaat dari keberadaan kelompok dan dukungan BRI berarti taraf hidup masyarakat Kapetakan, Cirebon akan semakin baik. Dengan kondisi kesejahteraan para

anggota kelompok yang semakin meningkat, timbul keinginan dari para anggota untuk mulai merencanakan masa depan bagi keluarga. Sebagian penghasilan yang didapat kemudian disisihkan untuk menabung, membayar premi produk asuransi pendidikan maupun kesehatan serta berinvestasi untuk mengembangkan usaha sebagai jaminan hari tua bagi keluarga dan anak-anak. Dengan demikian, penyaluran pembiayaan kepada kelompok terbukti telah membuka pengetahuan dan pemahaman anggota terhadap produk jasa keuangan lainnya.

Gambar A.1 : Budidaya lele kelompok Kersa Mulia Bakti, Cirebon

Gambar A.2 : Budidaya lele Kelompok Kersa Mulia Bakti, Cirebon

Gambar A.3. Panen Lele Kelompok

Gambar A.3. Pengiriman Hasil Proses Produksi Budidaya lele

sumber : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk (BRI)

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk (BNI)

Bapak Haji W, salah satu nasabah BNI yang sukses dalam menjalankan usahanya dengan dukungan pembiayaan dari BNI. Beliau merupakan nelayan yang sudah menekuni usaha penangkapan dan perdagangan ikan sejak masih muda. Dimulai dengan menjadi ABK meningkat menjadi Juru Mudi dan akhirnya berhasil memiliki kapal sendiri. Pada tahun 2013 saat awal memperoleh pembiayaan dari BNI, Bapak Haji W hanya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp3,2 Milyar dari BNI UKC Tegal. Kredit tersebut dibagi dalam 2 skema kredit yaitu skema modal kerja *aflopend* untuk pembiayaan perbekalan kapal yang saat itu jumlahnya 5 unit dan kredit modal kerja rekening koran sebesar Rp1,5 Milyar untuk perdagangan ikan. Skema pembiayaan tersebut dinilai BNI sebagai skema yang paling sesuai dengan kebutuhan debitur karena ketika kapal berangkat melaut untuk rentang waktu 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan dibutuhkan modal yang cukup besar untuk perbekalan yang berupa jaring, lampu, BBM, sembako, *spare part* mesin dan lain-lain. Namun ketika kapal bersandar hasil yang didapatkan dinilai cukup sehingga ybs mampu untuk mengangsur sebagian kredit modal kerja BNI. Omzet atau produktivitas Bapak Haji W sebelum memperoleh pembiayaan adalahRp754,75 juta/bulan yang bersumber dari hasil tangkap ikan dan cumi sebanyak lebih kurang 50 ton/bulan. Baiknya kinerja Bapak Haji W sebagai debitur telah membuka peluang adanya pembiayaan baru dari BNIberupa tambahan kredit modal kerja pada tahun 2015 sebesar Rp2,5 Milyar. Pada akhir 2014, setelah memperoleh dukungan pembiayaan dari BNI UKC Tegal selama 2 tahun, Bapak Haji W mampu meningkatkan produktivitasnya menjadi 65 ton/bulan terdiri dari aneka ikan dan cumi dengan rata-rata omzet Rp976.62/bulan atau meningkat sebesar 29,40%. Keuntungan usaha yang didapat dalam 2 tahun selain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan memenuhi kewajiban kepada BNI, juga telah digunakan untuk menambah jumlah kapal. Sampai dengan akhir tahun 2014 jumlah kapal ybs telah bertambah menjadi 8 unit. Kinerjanya sebagai debitur juga sangat baik, terbukti dari kualitas pembiayaan yang selalu dalam kondisi Lancar. BNI telah sejak lama memberikan dukungan kepada pengembangan ekonomi masyarakat terutama di sektor perikanan dan kelautan. Salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial yang dilakukan BNI adalah dengan pembentukan

Kampoeng BNI yang berbasis pendekatan *value chain*. Pada saat ini salah satu program yang telah di rintis BNI sejak tahun 2007 adalah **"Kampoeng BNI"**, yaitu *partnership* program berbasis *value chain* dengan konsep *one village one* product. Khusus yang berbasis kelautan, BNI memiliki Enam **Kampoeng BNI** yang khusus di sektor perikanan dan budidaya ikan. Enam kampoeng BNI tersebut adalah **Kampoeng BNI Nelayan Lamongan Jawa Timur, Kampoeng BNI Angke Jakarta, BNI Ikan Nila Timur, Kampoeng Karawang Kampoeng BNI P. Nian Minahasa Kampoeng BNI Dufa Ternate** ini perpaduan komersial kepada menengah

Nelayan Muara Kampoeng Ponorogo Jawa BNI Bandeng Jawa Barat, Rumput Laut Utara, Nelayan Dufa-Utara. Program dari kredit perusahaan sebagai *off-taker*/inti/pembina dengan nelayan binaannya melalui pemberian kredit usaha rakyat/ kredit program kemitraan bina lingkungan. Pada bulan September 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan penghargaan "Adibakti Mina Bahari" kepada BNI Cabang Tegal untuk kategori "Perbankan Teladan" karena dinilai telah mendukung pembiayaan di sektor perikanan dan kelautan. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti kepada Irwansyah Kusuma Putera, Pemimpin BNI Sentra Kredit Kecil Pekalongan.

Pembiayaan kepada Galangan Kapal

Pembiayaan kepada SPBN

Pembiayaan kepada Pabrik Balok Es

Pembiaayaan kepada Perdagangan Garam

Pembiayaan kepada Perdagangan Bahan Pokok

Pembiayaan kepada Perdagangan Ikan dan TPI

Pembiayaan kepada Kapal Tangkap Ikan

Asosiasi nelayan

KUD

Pembiayaan kepada Cold storage

Pembiayaan kepada Perusahaan fillet ikan

Pembiayaan kepada Perdagangan ikan

sumber :Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK :

Namanya Tursinih, 41 tahun. Ibu dari tiga orang anak tersebut ialah salah satu juragan pengumpul ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Eretan, Indramayu. Oleh tetangga sekitarnya, ia dikenal dengan panggilan 'Wadag', sementara oleh rekan bisnisnya ia biasa dipanggil 'Ibu Dewi'.

"Ibu Dewi orangnya lumayan sibuk. Biasanya kalau ada orang selain nelayan pengen berurusan dengannya di luar persoalan jual beli ikan, dia jarang meladeni karena saking sibuknya," kata salah satu pegawainya menggambarkan sosok Ibu Dewi yang kini menjadi pengusaha sukses.

Ibu Dewi mengisahkan awal mula ia mulai memilih menekuni jenis usaha jual beli hasil laut. Usaha ini mudah dipelajari dan dipahami, demikian alasannya. Maklum, kedua orangtua Turnisih dulunya juga pedagang ikan dan udang kecil-kecilan sehingga ia cepat akrab dengan dunia perikanan. Lahir dari keluarga kurang mampu, Ibu Dewi kecil memutuskan berhenti sekolah pada usia 12 tahun untuk membantu orangtuanya mencari nafkah. Semula, ia hanya menjual ikan dan udang yang didapatkan dari anak-anak di sekitar TPI Eretan. Tanpa canggung, jemari mungil Ibu Dewi muda mulai terampil memilih dan memilah ikan petek dan peperek yang biasanya diolah menjadi ikan asin. Ikan jenis kuniran, tiga waja, raja gantang, cumi-cumi, dan jenis ikan lainya, juga menjadi ladang pengharapannya mengais uang. "Anak-anak kecil di sini suka membantu para nelayan merapihkan ikan, dan anak-anak kecil itu dikasih upah berupa ikan atau udang, bahkan kadang cumi. Kemudian dari mereka saya beli untuk menjadi barang dagangan saya," tuturnya.

Data Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat tahun 2008 menyebutkan Indramayu sebagai daerah dengan potensi ikan laut tangkap terbesar di wilayah pesisir utara, mengungguli daerah lain seperti Bekasi, Kabupaten dan Kota Cirebon, Karawang, dan Subang. Oleh sebab itu, tidak heran jika beberapa perusahan besar memilih menanamkan investasinya di bidang perikanan di Indramayu dan sekitarnya. Profesi nelayan dan kegiatan penjualan ikan sudah menjadi tradisi turun temurun bagi masyarakat pesisir Indramayu.

Usahanya berjualan ikan terus ia dalami hingga kemudian makin berkembang setelah ia menikah dengan Karim, suaminya yang kini telah almarhum. "Almarhum suami saya seorang nelayan. Dia yang mendorong saya untuk mengembangkan usaha ini. Dari almarhum suami sayalah saya tahu tentang berbagai jenis ikan berikut kegunaannya."

sumber : BANK MANDIRI (PERSERO), TBK :

Perlahan namun pasti, Ibu Dewi menjadi pemasok bagi beberapa perusahaan lokal pengolahan ikan di sekitar Indramayu seperti Cirebon, Tegal, Pemalang, dan Kudus. Seperti kebanyakan pengusaha kecil lainnya, pada awalnya dia terhambat oleh persoalan modal. Akibatnya lumayan fatal, dia kesulitan dalam mendistribusikan ikan. "Padahal persediaan ikan dari nelayan sangat banyak. Apalagi mereka mintanya dibayar langsung, sementara pembayaran kadang macet dari pihak yang saya suplai," terang Ibu Dewi.

Alih-alih mendapat bantuan permodalan dari pemerintah daerah setempat, pelatihan manajemen pun tak sempat dia dapat. Alhasil, sembari belajar berwirausaha sendiri, dia pun berikhtiar mengatasi permasalahan kekurangan modal dengan cara mengajukan kredit pinjaman pada Bank Mandiri, melalui Kantor Cabang Pembantu setempat pada tahun 2005. Cukup berani, Ibu Dewi menjadikan sertifikat rumah tinggalnya sebagai jaminan. "Pada waktu itu saya sedang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha. Kemudian ada *Sales* dari Bank Mandiri menawarkan pinjaman modal usaha kepada saya," katanya mengenang saat pertama kali 'berkenalan' dengan Bank Mandiri.

Saat itu, dia mendapat pinjaman Rp50 juta. Namun seiring pesatnya usaha yang ia jalankan, kini ia bisa meminjam hingga Rp100 juta. Berbekal pengetahuannya di bidang perikanan dan suntikan modal pinjaman dari Bank Mandiri, sekarang dia tidak lagi kesulitan menjalankan usahanya, baik untuk membayar nelayan maupun dalam mendistribusikan ikan.

Ia bahkan mulai merambah pasokan ikannya ke perusahaan-perusahaan besar bertaraf internasional seperti PT. Maya Food dan PT. Java Seafood. Keduanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengalengan ikan milik investor luar negeri. PT. Maya Food yang berlokasi di Pekalongan memiliki basis perusahaan di Singapura, sementara PT. Java Seafood ialah perusahaan Korea Selatan yang mengekspor produknya ke negara-negara Asia Tenggara, Jepang dan Uni Eropa.

Khusus dengan PT. Java Seafood, Ibu Dewi menceritakan bahwa kerjasama yang dilakukannya dengan perusahaan tersebut baru dimulai beberapa bulan terakhir ketika perusahaan tersebut resmi berdiri pada Maret 2014. Namun hubungan antara pihak perusahaan dengan almarhum suaminya telah berjalan beberapa bulan sebelumnya. "Awalnya pendiri perusahaan tersebut, Mr. Liem, belajar selama tiga bulan secara rutin pada almarhum suami saya tentang berbagai jenis ikan berikut kegunaannya sebelum mendiirkan perusahaan itu. Kemudian setelah berdiri, perusahaan Java Seafood meminta supply ikannya dari saya. Sampai kini kami terus menjalin kerjasama," tuturnya.

Lalu berapa omset yang dimiliki oleh Ibu Dewi melalui usaha pemasok ikan tersebut? "Kalau omset sih saya gak pernah hitung, diperkirakan bisa sampai ratusan juta bahkan milyaran per bulannya kalau lagi banyak ikan," katanya lugas. Satu hal yang menjadi catatan Ibu Dewi, bahwa sejak menjadi mitra Bank Mandiri keuntungan bersih yang ia dapatkan meningkat. "Sebelum jadi mitra Bank Mandiri dalam satu bulan saya cuma mendapatkan 10-15 juta/bulan, namun setelah menjadi mitra Bank Mandiri keuntungan bersihnya menjadi 17-20 juta/bulan. Jumlah tersebut sudah dipotong kewajiban upah kepada dua belas pegawainya yang dibayar harian dengan kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000/hari".

Dibantu dengan dua anaknya, Turnisih berencana untuk terus mengembangkan usahanya di bidang penjualan ikan. Entah kebetulan atau tidak, sekilas jalan hidup Turnisih alias Ibu Dewi ini mirip dengan Ibu Susi Pudjiastuti yang kini dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, Ibu Dewi memutuskan berhenti sekolah, memfokuskan pada usahanya hingga menjadi juragan ikan di daerahnya, dan kini menjadi pengusaha sukses dan menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk (BTPN)

Sumber : BTPN, Tbk

Pak Kusrin demikian panggilan akrab beliau, merupakan salah seorang nelayan dan juragan kapal sukses di kota Juwana, Pati, Jawa Tengah. Namun awalnya beliau memilih karir lain karena tuntutan ekonomi. Semenjak tamat sekolah dasar beliau bekerja di atas kapal pencari ikan. Walaupun penghasilan awalnya tidak seberapa, namun karena ketekunan dan keteguhan hatinya, karir beliau terus meningkat sampai menjadi nahkoda kapal pada usia 25 tahun. Selama menjadi nahkoda kapal nelayan, Pak Kusrin beserta istrinya, Siti Mudayanah, menyisihkan sebagian penghasilannya sedikit demi sedikit. Uang simpanannya pun diinvestasikan pada usaha sang kakak yang telah memiliki kapal nelayan sendiri, sementara Pak Kusrin terus belajar mengenai usaha perkapalan nelayan. Salah satu tujuannya adalah agar ia mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi keluarganya. Mengingat masa lalunya yang hanya lulus SD serta semakin tingginya persaingan kerja dan dunia usaha, Pak Kusrin bertekad menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi.

Genap di usia 34 tahun, Pak Kusrin memutuskan pensiun sebagai nahkoda dan membulatkan niat membangun usaha sendiri. Modal awal usahanya digunakan untuk membeli 4 buah kapal nelayan. Upayanya membuahkan hasil. Menggunakan keempat kapal nelayannya, Pak Kusrin dapat mempeoroleh ikan tangkapan lebih dari >100 ton/ bulan atau setara dengan omzet usaha sebesar >Rp900 juta/bulan. Saat itu, jumlah pegawai Pak Kusrin sebanyak 80 orang.

Pada tahun 2009, Pak Kusrin berkenalan dengan BTPN sebagai lembaga jasa keuangan perbankan. Pak Kusrin memberanikan diri memperoleh pembiayaan sebesar Rp50 juta. Awalnya, pinjaman tersebut akan digunakan untuk memperbarui peralatan kapal. Namun setelah mengikuti pelatihan materi pengelolaan keuangan dan penjualan yang dilakukan di kantor BTPN Cabang Juwana, Pak Kusrin memutuskan menggunakan modal pinjaman BTPN untuk membuka usaha bengkel perbaikan kapal.

Sumber : BTPN, Tbk

Selain hobi membaca serta menjalin pertemanan, Pak Kusrin pun selalu mengusahakan untuk hadir dalam pelatihan yang diselenggarakan di Kantor Cabang BTPN. Beliau mencoba menerapkan materi pelatihan yang diterimanya, antara lain pengelolaan dan pemisahan uang usaha dengan uang pribadti. Hasilnya beliau telah dipercaya untuk mendapatkan 3 (tiga) kali *top-up* pinjaman di BTPN dengan total sebesar 150 juta rupiah, yang kemudian digunakan merintis bengkel pembuatan kapal.

Pak Kusrin juga aktif dalam berorganisasi, hal itu membuatnya terpilih menjabat sebagai Ketua Paguyuban Nelayan Mina Santosa serta menjadi bendahara HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Cabang Juwana. Dedikasi dan keberhasilan Pak Kusrin menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk para nelayan lainnya bahwa beliau bermetamorfosa dari seorang sosok yang hanya lulusan sekolah dasar menjadi pengusaha yang berwawasan luas dan mendapat kepercayaan dari banyak pihak.

Saat ini, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap omzetnya, yang semula Rp600 juta menjadi Rp987 juta. Kehadiran BPTN untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan usaha dan pribadi bagi pengusaha mikro dan kecil melalui program-program yang tersedia terbukti telah mendukung Pak Kusrin untuk mengembangkan usahanya. Berbekal identifikasi potensi dan persiapan yang memadai, BTPN akan terus melakukan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil hingga mencetak pengusaha yang handal dan mampu memanfaatkan peluang, khususnya di sektor kelautan dan perikanan yang merupakan sumber pendapatan utama di kota Juwana, Pati.

BAB 5

RUANG LINGKUP DAN REGULASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB 5

RUANG LINGKUP DAN REGULASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.1 Ruang Lingkup

Dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor Kelautan dan Perikanan, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung proses seluruh lini bisnis pada sektor tersebut. Bagi pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan, penyediaan sarana dan prasarana tersebut membutuhkan dukungan permodalan yang memadai. Salah satu cara untuk memperoleh dukungan permodalan adalah melalui pembiayaan yang diberikan oleh Sektor Jasa Keuangan (SJK), antara lain perbankan dan lembaga pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh SJK harus dapat menjangkau seluruh elemen atau lini dalam proses bisnis pada sektor Kelautan dan Perikanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya dukungan kebijakan pengaturan di bidang SJK yang sesuai dengan karakter bisnis sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam mewujudkan dukungan kebijakan dan pengaturan SJK yang sesuai dengan karakter bisnis sektor Kelautan dan Perikanan, maka diperlukan adanya pemetaan ruang lingkup pihak-pihak yang terkait dalam sektor dimaksud, regulasi yang mendukung perkembangan sektor saat ini, dan analisa regulasi yang menjadi hambatan dalam pengembangan bisnis kelautan dan perikanan, serta analisa regulasi yang dapat mendukung pengembangan bisnis kelautan dan perikanan. Identifikasi ruang lingkup masing-masing *stakeholders* perlu dilakukan untuk memperjelas dukungan kebijakan atau regulasi yang sesuai dengan kewenangan berbagai pihak dengan tetap memperhatikan kekhasan karakter bisnis kelautan dan perikanan. Secara umum, ruang lingkup tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa domain antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

A. Ruang Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, KKP menyelenggarakan semua urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Urusan pemerintahan di bidang kelautan meliputi segala hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut, yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan di bidang perikanan meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Hal tersebut merupakan esensi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan digambarkan pada visi KKP, yaitu "Terwujudnya pengelolaan

sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat".

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seharusnya laut Indonesia dikelola, dijaga, dimanfaatkan dan dilestarikan dengan baik dan terencana oleh masyarakat Indonesia. Potensi sumber daya alam di wilayah laut mengandung berbagai sumber daya hayati ataupun non hayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh baik dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, maupun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga ekonomi kelautan dapat dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara.

" sudah seharusnya laut Indonesia dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan dengan baik dan terencana oleh masyarakat Indonesia "

Pengaturan penyelenggaraan kelautan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, meliputi wilayah laut; pembangunan kelautan; pengelolaan kelautan; pengembangan kelautan; pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut; pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di Laut; serta tata kelola dan kelembagaan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas di bidang perikanan juga diperlukan dukungan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan. Adapun kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, antara lain perencanaan pengelolaan perikanan; identifikasi potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; identifikasi potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; identifikasi potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; penetapan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; penetapan jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; identifikasi daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; penetapan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; pelabuhan perikanan; implementasi sistem pemantauan kapal perikanan; identifikasi jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; identifikasi jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya; standarisasi pembudidayaan ikan dan perlindungannya; tata laksana pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; penetapan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; penetapan kawasan konservasi perairan; identifikasi wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan penetapan jenis ikan yang dilindungi.

Salah satu regulasi terkait yang dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha sektor Kelautan dan Perikanan adalah UU RI No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam UU tersebut diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan terkait dukungan kelembagaan dalam rangka menumbuhkan iklim usaha bagi UMKM. Salah satu lembaga pendukung pengembangan UMKM adalah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). KKMB bertugas melakukan konsultasi dan pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan kepada UMKM agar mampu mengembangkan usahanya termasuk memfasilitasi atau menjadi mediasi bagi UMKM dalam mengakses jasa keuangan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan selain bank, berupa pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

B. Ruang Lingkup Otoritas Jasa Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan memastikan keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK) terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Selain itu, keberadaan OJK ditujukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mendukung kepentingan SJK Nasional dan program Pemerintah Republik Indonesia sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional.

Agar dapat mendukung program ekonomi maritim yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebijakan di SJK perlu diselaraskan dengan karakter bisnis sektor Kelautan dan Perikanan. Dukungan kebijakan di SJK harus diarahkan untuk memberikan kemudahan dan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan. Kemudahan dan akses yang lebih luas tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan permodalan seluruh elemen dalam sektor Kelautan dan Perikanan, yang mencakup kebutuhan pembiayaan, asuransi, dan layanan sistem pembayaran bagi nelayan yang akan digunakan sebagai modal bagi petani budidaya perikanan, kelancaran transaksi, pengadaan kapal berbagai ukuran dan kapasitas, pengadaan *cold storage* dan pembangunan pelabuhan.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, regulasi yang diterbitkan OJK diharapkan mampu mendukung program ekonomi maritim yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.

C. Ruang Lingkup Kamar Dagang & Industri (KADIN) Indonesia

Sesuai dengan amanat dan semangat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, maka pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras. Kerja sama dimaksud yang mencakup sektoral dan lintas-sektoral, antar-skala daerah, nasional maupun internasional bertujuan mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah di berbagai bidang ekonomi, khususnya sektor Kelautan dan Perikanan. Selain itu pembinaan dunia usaha nasional diarahkan untuk menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Kadin sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

"sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras."

Berdasarkan amanat Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, KADIN memiliki fungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha

Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian dan jasa. Selain itu untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, KADIN melakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;
2. Penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;
3. Penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
4. Penyelenggaraan pendidikan, latihan dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;
5. Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar pengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antar bidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
6. Penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;
7. Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;
8. Penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik dan pusat informasi usaha;
9. Pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;
10. Penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.

"diharapkan semakin banyak pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan yang dapat mengakses sumber pembiayaan dan memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangandari SJK."

Dalam prakteknya, peran serta KADIN tidak sebatas pada kegiatan- kegiatan tersebut di atas. Dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, KADIN dapat pula melakukan:

a. Penyediaan jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, maupun legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.
b. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh KADIN dalam mendukung program ekonomi maritim pemerintah adalah menjadi pihak yang merekomendasikan pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya rekomendasi dari KADIN, diharapkan semakin banyak pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan yang dapat mengakses sumber pembiayaan dan memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan dari SJK.

5.2 Regulasi yang Mendukung Perkembangan Sektor Kelautan dan Perikanan

Identifikasi regulasi yang mendukung upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan menjadi titik awal perumusan dan analisa kesenjangan antara kondisi yang ingin dicapai dengan kondisi saat ini. Penyempurnaan atau penerapan regulasi dari berbagai otoritas diharapkan berdampak signifikan untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor Kelautan dan Perikanan.

A. Regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Buku Kapal Perikanan (BKP)

Bukti kepemilikan kapal

Beberapa informasi yang tercatat dalam BKP, antara lain: nama kapal;

1. nomor register;
2. tempat pembangunan kapal;
3. tipe kapal;
4. jenis alat tangkap;
5. *tonnage*;
6. panjang kapal;
7. lebar kapal;
8. kekuatan mesin;
9. foto kapal;
10. nama dan alamat pemilik;
11. nama pemilik sebelumnya; dan perubahan–perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan.

Dalam rangka melaksanakan penguatan basis data dan meningkatkan legalitas kepemilikan kapal perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan telah mengembangkan penerbitan Buku Kapal Perikanan (BKP) sebagai tanda bukti kepemilikan kapal.

BKP disusun secara sistematis untuk menyajikan data terkait kapal perikanan dan identitas pemilik secara spesifik. Berdasarkan wewenang penerbitan, BKP digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, untuk kapal berukuran >30 GT (warna sampul merah);
b. Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan oleh Gubernur, untuk kapal berukuran >10 - 30 GT (warna sampul kuning);
c. Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, untuk kapal berukuran <10 GT (warna sampul hijau).

Buku Kapal Perikanan (BKP) sebagai dokumen legal dari kepemilikan kapal perikanan diharapkan dapat menjadi aset usaha penangkapan ikan yang berfungsi sebagai agunan setelah kapal perikanan diasuransikan.

2. Kapal Perikanan

Sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi perbankan, maka perlu adanya upaya untuk mengasuransikan kapal perikanan yang akan digunakan sebagai agunan. Beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dalam mekanisme asuransi kapal perikanan adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Kapal Perikanan
   Ukuran : minimum 20 GT
   Umur teknis : maksimum 10(sepuluh) tahun
   Jenis bahan : kayu dan bahan lain
   Yang ditanggung : rangka Kapal (Kasko) dan mesin
   Maksimal harga pertanggungan : Rp 1 (satu) Milyar
b. Rencana Depresiasi Nilai Pertanggungan dan Tarif Premi
   Deskripsi nilai pertanggungan dan tarif premi berdasarkan jangka waktu pertanggungan yang ditetapkan pihak asuransi adalah sebagai berikut:

URAIAN	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN				
	1 THN	2 THN	3 THN	4 THN	5 THN
Harga/Nilai Pertanggungan	100%	80%	60%	50%	45%
Tarif Premi	3,5%	6,3%	8,4%	10,15%	11,7%

Keterangan : Harga pertanggungan dan tarif premi di atas dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara perbankan dan asuransi.

Tabel 5.1 : Nilai Pertanggungan dan Tarif Premi Asuransi Kapal

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

c. Jaminan Asuransi

- Pertanggungan asuransi menjamin kerugian atau kerusakan total *(total loss)* yang disebabkan oleh:
- bahaya laut, sungai, dan/atau perairan lain yang dapat dilayari;
- kebakaran/ledakan;
- pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang diluar kapal;
- *jettison* (pembuangan barang ke laut guna keselamatan kapal beserta isinya);
- ambruknya atau kecelakaan pada instalasi nuklir;
- bersentuhan dengan pesawat-pesawat udara atau objek-objek yang serupa;
- gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir;
- meledaknya katel uap, patahnya as atau sesuatu latent defect pada mesin atau rangka kapal;
- Kelalaian nahkoda, perwira kapal, anak buah dan pemandu;
- kelalaian bengkel atau penchater asalkan bengkel tersebut bukan bengkel tertanggung di bawah pertanggungan ini;
- *barratry* (tindakan yang dilakukan untuk merugikan pemilik kapal oleh nahkoda, perwira kapal atau anak buah kapal dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut terjadi karena bukan keinginan tertanggung, pemilik, atau manager kapal tersebut.

3. KEP.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan

Keputusan Menteri (KepMen) ini mengatur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bidang usaha yang dibiayai, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Tujuan penerbitan KepMen ini adalah:

a. Meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat,
b. Meningkatkan pengembangan usaha, dan
c. Meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditujukan untuk pelaku UMKM yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan untuk membiayai usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan usaha garam.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan KUR, Menteri, gubernur dan buapti/walikota melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan oleh dinas kabupaten/kota atau KKMB. Selain itu, dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KUR.

4. PER.03/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan (KKPE)

Peraturan Menteri mengatur mengenai kegiatan usaha, subyek penerima, dan tingkat plafon yang dapat didanai melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) di bidang kelautan dan perikanan. KKPE merupakan kredit investasi dan/atau modal kerja untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan yang menghasilkan pangan ikan.

a Kegiatan usaha yang dibiayai yaitu pengadaan pangan di bidang perikanan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengadaan/peremajaan peralatan. Dalam pemanfaatan KKPE dapat dilakukan pendampingan oleh tenaga pendamping yang ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota. Pendamping tersebut bertugas untuk membimbing secara teknis nelayan dan pembudidaya ikan serta menyampaikan laporan bulanan perkembangan pemanfaatan KKPE kepada dinas kabupaten/kota.

b Calon peserta KKPE terdiri dari perorangan yaitu nelayan atau pembudidaya ikan, serta kelompok yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) dan Koperasi.

c Besarnya plafon KKPE untuk perorangaan paling banyak sebesar Rp100 juta dan untuk kelompok sebesar Rp500 juta.

5. Perjanjian Kerja Sama antara KKP dan BPN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dan BPN dilaksanakan berdasarkan PKS No.04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan No.01/DPT/Dep.KP/PKS/XI/2007 tentang Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Perikanan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT). Tujuan pelaksanaan sertifikasi tanah nelayan adalah:

a Memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan (aset) milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil;

b Memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang layak, permanen dan sehat;

c Meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan aset berupa tanah yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mengakses sumber-sumber permodalan; dan

d Meningkatkan minat (*interest*) dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, selama periode Oktober-Desember 2014 KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama terkait dengan upaya pemberantasan IUU *Fishing*. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (yang melarang transshipment), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Ikan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Di samping itu untuk memperkuat kinerja dalam rangka pemberantasan IUU *fishing*, pada tahun 2014 juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, alih Muatan (*Transshipment*) di Laut, dan Penggunaan Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) asing.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan, serta mempertimbangkan Lobster, Kepiting dan Rajungan telah mengalami penurunan populasi sehingga perlu menjamin keberadaan dan ketersediaan stok, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*panulirus spp*), Kepiting (*scylla spp*) dan Rajungan (*portunus pelagicus spp*), yang melarang penangkapan species tersebut dalam kondisi bertelur dan mengatur ukuran yang boleh ditangkap.

Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang sebagian dirubah sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 dan penjelasannya yang mengamanahkan bahwa dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau kompressor. Diharapkan melalui penerapan peraturan tersebut, dapat dilakukan penataan kembali pengelolaan perikanan untuk kelestarian sumber daya ikan, pengurangan tekanan terhadap sumberdaya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan

Perikanan - Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), pengaturan selektifitas alat penangkapan ikan, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan Negara kepulauan yang berdaulatdan sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

B. Regulasi Perbankan dari OJK

Secara umum belum terdapat pengaturan atau kebijakan yang khusus diperuntukkan pada sektor Kelautan dan Perikanan, namun terdapat beberapa pengaturan di bidang Perbankan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas sektor Kelautan dan Perikanan.

1. Kewajiban Porsi Penyaluran Pembiayaan Produktif

Bank memiliki kewajiban memenuhi porsi penyaluran pembiayaan produktif perbankan berdasarkan klasifikasi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) sebagaimana diatur dalam PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 12 diatur bahwa Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan ketentuan paling rendah:
   1) 55% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1 (Bank dengan modal inti kurang dari Rp1 Triliun).
   2) 60% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2(Bank dengan modal inti Rp1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp5 Triliun).
   3) 65% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3 (Bank dengan modal inti Rp5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp30 Triliun).
   4) 70% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4 (Bank dengan modal inti di atas Rp30 Triliun).
b. Dalam Pasal 20 diatur bahwa bagi Bank yang telah memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan memiliki ketersediaan alokasi modal inti dapat memperoleh insentif tambahan jumlah pembukaan jaringan kantor apabila menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada:
   1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total portofolio kredit atau pembiayaan.
   2) Usaha Mikro dan Kecil (UMK) paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total portofolio kredit atau pembiayaan.
c. Dalam Pasal 32 juga diatur bahwa kewajiban Bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipenuhi paling lambat akhir bulan Juni 2016.

2. Kewajiban Penyaluran Pembiayaan pada UMKM

Bank memiliki kewajiban menyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM sebagaimana diatur dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 2 diatur bahwa kewajiban bagi Bank umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM secara bertahap, dengan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit paling rendah sebagai berikut:
   1) 5% (lima persen) pada tahun 2015;
   2) 10% (sepuluh persen) pada tahun 2016;
   3) 15% (lima belas persen) pada tahun 2017, dan
   4) 20% (dua puluh persen) pada tahun 2018.

b. Dalam Pasal 3 diatur bahwa pemberian kredit atau pembiayaan UMKM oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara:
   1) Langsung kepada usaha UMKM dan/atau
   2) Tidak langsung melalui kerja sama pola *executing*, pola *channeling* dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi). Yang dimaksud tidak langsung adalah pemberian kredit atau pembiayaan UMKM oleh bank umum kepada BPR, BPRS dan/atau lembaga keuangan lainnya.

3. Pengenaan Bobot Risiko pada Perhitungan ATMR

Bank diwajibkan menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Kredit UMKM yang berbeda dengan kredit non UMKM sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.11/1/DPNP perihal Perhitugan ATMR untuk Kredit UMKM sebagai berikut:

a. Kredit UMKM dikenakan bobot risiko sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
b. Kredit UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN sepanjang memenuhi syarat tertentu, dikenakan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).
c. Kredit UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit bukan BUMN yang memenuhi syarat tertentu, maka dikenakan bobot risiko sesuai dengan peringkat lembaga penjaminan/asuransi kredit tersebut sebagaimana Tabel 5.2

4 . Kualitas Aset Produktif Dikaitkan dengan Penjaminan Pemerintah

Penilaian kualitas pembiayaan saat ini dapat didasarkan pada ketersediaan agunan tunai dan dapat pula hanya dilakukan berdasarkan 1 pilar (ketepatan membayar). Adapun resi gudang dan kapal laut diperhitungkan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Kualitas Aset Bank Umum (PBI Kualitas Aset). Uraian ketentuan adalah sebagai berikut:

a) Dalam Pasal 30 diatur bahwa pemberian kredit yang dijamin dengan agunan tunai berupa jaminan dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dinilai sebagai kredit dengan kualitas Lancar dan bank tidak perlu membentuk cadangan penyisihan atas kredit tersebut, sehingga indikator kinerja keuangan bank dapat menjadi lebih baik.
b) Dalam Pasal 32 diatur bahwa penilaian kualitas kredit dapat hanya berdasarkan 1 pilar (ketepatan membayar pokok dan/atau bunga) dan khusus untuk kredit debitur UMKM dengan plafon tertentu, yaitu:
   1) Lebih dari Rp1 Milyar sampai dengan Rp20 Milyar berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria kualitas penerapan manajamen risiko (KPMR) untuk risiko kredit sangat memadai atau Strong, rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku, dan memiliki peringkat komposit paling kurang PK-3.
   2) Lebih dari Rp1 milyar sampai dengan Rp10 Milyar berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria KPMR untuk risiko kredit memadai atau *satisfactory*, rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku, dan memiliki peringkat komposit paling kurang PK-3.

Peringkat	Bobot Risiko
AAA s.d AA- atau Aaa s.d AA3	20%
A+ s.d BBB- atau A1 s.d Baa3	50%
BB+ s.d B- atau Ba1 s.d B3	75%

Tabel 5.2. Bobot Risiko Sesuai Peringkat Lembaga Penjamin/ Asuransi Kredit

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

c). Dalam Pasal 43 huruf d dan huruf f diatur bahwa Kapal Laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek dan resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA sepanjang agunan tersebut dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah, diikat dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preeferensi bagi bank, dan dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yang memiliki jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu pengikatan agunan.

5. **Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Bank dapat memberikan jumlah kredit sampai dengan 30% dari modal bank kepada BUMN dalam hal kredit tersebut ditujukan untuk tujuan pembangunan, misalnya untuk pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut dan udara, komoditi ekspor, dan pangatn sebagaimana diatur dalam PBI No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

6. **Komitmen Pemegang Saham Untuk Mendukung Sektor Prioritas**

Bank dapat memiliki saham bank lain dengan jumlah kepemilikan di atas 40%, sepanjang bank tersebut memenuhi persyaratan, yang salah satunya adalah adanya komitmen pemegang saham untuk mendukung pengembangan perekonomian pada sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Republik Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

C. Regulasi Industri Keuangan Non Bank (INKB) dari OJK

Seperti halnya pengaturan di sektor Perbankan, pada sektor IKNB juga belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pembiayaan pada sektor Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, beberapa regulasi yang berlaku telah mengakomodasi kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha pada sektor Kelautan dan Perikanan.

Perusahaan Pembiayaan sangat dimungkinkan untuk dapat berpartisipasi dalam mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, serta pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan masyarakat yang berusaha di sektor Kelautan dan Perikanan. Skema kerjasama pembiayaan dapat berupa *direct financing, channeling, joint financing,* maupun sindikasi. Di samping itu, industri pembiayaan memiliki potensi yang besar untuk dapat mendukung pembiayaan pada sektor hulu dan sektor hilir di sektor Kelautan dan Perikanan. Terdapat beberapa pengaturan pada industri keuangan non bank yang mendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang diharapkan dapat dipahami dan diterapkan oleh industri keuangan non bank.

1. **Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan Perusahaan Pembiayaan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan selanjutnya disebut POJK No.29/2014, mengenai jenis-jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, yaitu Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal kerja dan Pembiayaan Multiguna. Di samping itu, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha yang bersifat *fee based income* yang diperoleh dari hasil penjualan produk-produk keuangan yang diterbitkan atau dijual oleh lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, serta dapat pula melakukan kegiatan sewa operasi (*operating lease*). Selanjutnya, Perusahaan Pembiayaan juga dapat melakukan kegiatan usaha lain selain yang telah diatur dalam POJK No.29/2014 sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

a. Dalam Pasal 1 ayat (2) POJK No. 29/2014 diatur bahwa Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
Beberapa cara pembiayaan yang dapat dilakukan dalam pembiayaan investasi yaitu: sewa pembiayaan (*finance lease*), jual dan sewa-balik (*sale and finance leaseback*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran (*installment financing*),

pembiayaan proyek dan pembiayaan infrastruktur.

Contoh pembiayaan investasi dalam rangka mendukung Program Pemerintah di stektor Kelautan dan Perikanan adalah pembiayaan pengadaan kapal laut dan mesin-mesin kapal yang dibutuhkan oleh pelaku pelayaran. Potensi pembiayaan lainnya adalah pembiayaan infrastruktur untuk pengembangan infrastruktur kelautan, seperti pembuatan dan revitalisasi pelabuhan, pembangunan galangan kapal dan sarana transportasi laut.

b. Dalam Pasal 1 ayat (3) POJK No. 29/2014 diatur bahwa Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

   Beberapa cara pembiayaan sesuai cara yang diwajibkan dalam pembiayaan modal kerja, yaitu: jual dan sewa-balik (*sale and finance leaseback*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), serta fasilitas Modal Usaha.

   Contoh pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan kepada perusahaan di bidang pelayaran untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan dan pembiayaan fasilitas modal kerja yang kepada nelayan dan usaha-usaha kecil dan menengah yang mendukung pemberdayaan bidang kelautan dan perikanan.

c. Dalam Pasal 1 ayat (4) POJK No.29/2014 diatur bahwa Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Beberapa cara yang diwajibkan dalam Pembiayaan Multiguna yaitu: sewa pembiayaan (*finance lease*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran *(installment financing*).

   Contoh pembiayaan multiguna adalah pembiayaan kepada usaha-usaha kecil dan menengah di bidang pelayaran untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor yang dibutuhkan.

d. Dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 POJK No.29/2014 yang mengatur prinsip kehati-hatian (*prudential*) disebutkan bahwa, Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan bagi individu/ kelompok debitur. Dalam POJK No.29/2014 tersebut telah dibuka pengecualian ketentuan BMPP bagi penyaluran pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka program Pemerintah.

2. Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan Perusahaan Modal Ventura

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Berdasarkan PMK di atas, beberapa metode pembiayaan yang dapat dilaksanakan PMV adalah penyertaan saham (*equity participation)*, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing).

Salah satu kelebihan pembiayaan PMV dibanding sumber pembiayaan atau permodalan lainnya antara lain adalah tersedianya pembiayaan bagi perusahaan berupa Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang sedang dalam tahap awal usaha, PPU yang mengalami kesulitan dana, maupun PPU yang sedang dalam tahap pengembangan untuk dapat memulai usahanya dan mempercepat perkembangannya (*start-up* atau *very early stage of product development*). PMV juga dapat memberikan pendampingan kepada PPU dalam bentuk pemberian masukan mengenai arahan visi dan misi bisnis strategis, strategi pemasaran, pencatatan keuangan, atau strategi peningkatan efisiensi bisnis dan operasional perusahaan. Selain itu, PMV juga dapat memfasilitasi perluasan jaringan untuk memperoleh bahan baku atau pemasaran produk.

Selain keuntungan di atas, manfaat yang dapat diberikan oleh PMV dalam mendorong pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan dari segi operasional dan keuangan PPU di

Sektor Kelautan dan Perikanan, antara lain:

1) Keberhasilan usaha dan distribusi produk.
2) Peningkatan status dan akses pada bank.
3) Peningkatan likuiditas dan profitabilitas.
4) Memperbaiki struktur keuangan agar lebih sehat.

3. Jenis Kegiatan Perasuransian yang Dilakukan Perusahaan Asuransi

Untuk industri perasuransian, diatur mengenai kewajiban bagi pemilik kapal untuk mengasuransikan kapal yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam:

1) Pasal 203 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2) Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; dan
3) Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

Namun demikian, kewajiban dimaksud hanya diperuntukkan bagi kapal-kapal dengan berat tonase lebih dari 35 GT (tiga puluh lima *Gross Tonnage*). Sementara untuk kapal-kapal dengan berat di bawah 35 GT, pemilik kapal tidak memiliki kewajiban untuk mengasuransikan kapalnya.

5.3. Kondisi yang Menjadi Hambatan dalam Pengembangan Bisnis Kelautan dan Perikanan

Untuk menggali potensi solusi atas permasalahan dan hambatan dalam pengembangan bisnis kelautan dan perikanan, perlu dilakukan identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan saat ini. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha Sektor Kelautan dan Perikanan dapat dikategorikan sesuai dengan lembaga yang berwenang menangani atau mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Seluruh lembaga yang berperan besar dalam diharapkan mampu menawarkan solusi nyata bagi sektor Kelautan dan Perikanan agar sektor tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan.

A. Pemerintah

1. Harga BBM solar yang relatif tinggi berpotensi menurunkan marjin karena biaya BBM merupakan komponen tertinggi dalam struktur biaya, yaitu sebesar 55% dari total komposisi biaya perikanan tangkap. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan kerjasama dengan Kementerian Teknis terkait sevperti Kementerian ESDM.
2. Pasokan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan tidak optimal karena terbatasnya armada tangkap berskala industri.
3. Pasokan listrik yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sektor pengolahan perikanan.
4. Dukungan permodalan dari perbankan belum optimal, belum tersedianya skim/pola khusus kredit yang sesuai dengan karakteristik sektor kelautan dan perikanan
5. Pencurian ikan lewat alih muatan (*transhipment*) antar kapal di atas perairan, mengakibatkan pasokan ikan dalam negeri berkurang.
6. Produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya belum secara konsisten mampu menyuplai kebutuhan industri pengalengan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya ikan hasil produksi dalam negeri yang diekspor secara gelondongan.
7. Prosedur perizinan terkait dengan operasional penangkapan ikan yang belum terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Mekanisme dan struktur pasar yang masih belum tertata dengan baik.

B. Otoritas Jasa Keuangan

1. Belum tersedia *database* kondisi/kinerja debitur nelayan yang detil dari OJK serta *database* kondisi nelayan dan pelaku usaha di sektor KP dari KKP yang rinci dan memadai, sehingga belum bisa disusun perencanaan pembiayaan bagi SJK dalam meningkatkan produktivitas sektor KP.
2. Pemenuhan persyaratan formal perbankan sulit dipenuhi oleh nelayan dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil di sektor KP.
3. Belum ada perusahaan penjamin khusus bidang perikanan.
4. Skim kredit yang umum tersedia sebagian besar adalah skim dengan angsuran merata setiap bulan yang belum mengakomodasi karakteristik bisnis kelautan dan perikanan.
5. Penyaluran pembiayaan kepada lini bisnis penangkapan ikan, budidaya, dan jasa produksi perikanan masih rendah, yaitu sebesar Rp7,6 Trilyun atau sebesar 0,21 % dari total kredit perbankan posisi Desember 2014. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh persepsi bahwa sektor KP memiliki tingkat risiko yang tinggi karena bisnis yang tergantung pada faktor alam.
6. Belum terdapat aturan yang jelas mengenai batasan kapasitas kapal yang dapat diterima oleh asuransi.
7. Belum terdapat perusahaan asuransi yang dapat menutup pertanggungan atas kapal-kapal kecil dengan berat tonase lebih kecil dari 10 GT.
8. Belum terselenggaranya pengawasan yang baik atas kewajiban kepemilikan asuransi bagi kapal-kapal dengan berat tonase lebih besar dari 35 GT.

C. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

1. Keterbatasan jumlah dan kapasitas pengusaha perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
2. Rendahnya bargaining *power* penjual dalam pemasaran produk ekspor karena sangat bergantung pada standar pembeli di luar negeri.
3. Pemenuhan persyaratan formal perbankan yang sulit dipenuhi oleh nelayan.
4. Sulitnya untuk melakukan monitoring kegiatan dan komitmen nelayan karena transaksi dilakukan secara tunai.
5. Keterbatasan akses pasar, manajemen usaha dan sarana usaha bagi nelayan.

5.4. Analisa Regulasi yang dapat Mendukung Pengembangan Bisnis Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan dan regulasi yang berlaku saat ini serta informasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha maupun SJK dapat diyakini bahwa tambahan kebijakan lain sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pengembangan bisnis kelautan dan perikanan melalui akses dan pemanfaatan produk dan jasa keuangan dengan lebih optimal.

Kebijakan-kebijakan yang perlu dikaji dan dapat dipertimbangkan antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan di perbankan yang mencakup penyaluran pembiayaan produktif kepada sektor yang menjadi prioritas pemerintah, pengecualian BMPK sampai kepada pihak-pihak yang menangani proyek pada sektor prioritas Pemerintah dan kejelasan penilaian kualitas aset dalam hal periode angsuran dan pemberian grace period sesuai siklus produksi.
2. Kebijakan di industri keuangan non bank yang mencakup penilaian kualitas pembiayaan, perhitungan

dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang, nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo piutang, pelaporan kolektibilitas, dan jenis penjaminan atau asuransi.

3. Regulasi terkait kelautan dan perikanan, antara lain mengatur penegakan hukum di bidang perikanan, pengelolaan sumber daya ikan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sistem jaminan mutu dan keamanan serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan, serta penyusunan rencana aksi nasional pemberantasan penangkapan ikan ilegal.

BAB 6

DUKUNGAN UNTUK SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKAWNAN YANG BERTUMBUH, BERKEMBANG DAN BERDAYA SAING

BAB 6

DUKUNGAN UNTUK SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERTUMBUH, BERKEMBANG DAN BERDAYA SAING

"Pelaksanaan kegiatan usaha di sektor KP saat ini telah didukung dengan berbagai kebijakan dan pengaturan parsial dari instansi terkait. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan karena kurangnya koordinasi, yang menyulitkan tumbuhnya sektor KP secara berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan sinergi intensif antar berbagai pihak, terutama koordinasi dan penyelarasan kebijakan dan peraturan demi iklim pembiayaan yang kondusif."

6.1 Dukungan Regulasi

A Pemerintah

Pengaturan dan bauran kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk program untuk mendukung peningkatan kontribusi SJK dalam pengembangan kegiatan usaha di sektor KP, antara lain:

1. Pembuatan *database* berisi kondisi dan kinerja pelaku usaha di sektor KP sebagai input dalam merencanakan program dan pembiayaan bagi debitur.
2. Pengaturan dan kebijakan keringanan pajak ekspor dan penyederhanaan pungutan yang dikenakan kepada pelaku kegiatan usaha di sektor KP serta pembenahan kebijakan ekspor ikan yang bernilai tambah.
3. Pengaturan dan kebijakan untuk pembenahan mekanisme dan struktur pasar, antara lain pengaturan standar harga ikan di pasar yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, peningkatan kemudahan angkutan hasil tangkap dan budidaya ikan.
4. Penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal fishing* dan *transhipment*
5. Pengaturan terkait kemudahan dan kesinambungan penyediaan dan distribusi BBM.
6. Kebijakan untuk lebih mengefektifkan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dengan dukungan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah.
7. Pengembangan *cold storage* perikanan besar yang mampu menampung ikan lebih banyak untuk menjaga keberlangsungan suplai bahan baku.
8. Kebijakan dan pengaturan terkait pengadaan kapal dan perangkat penangkapan ikan bagi nelayan

B Otoritas Jasa Keuangan

Akselerasi pengembangan sektor KP melalui peningkatan pembiayaan SJK memerlukan tambahan dan penguatan kebijakan di SJK. Kebijakan yang perlu dikaji dan dapat dipertimbangkan untuk direview antara lain:

1. Kewajiban dan komitmen bank dalam rencana bisnis untuk menyalurkan pembiayaan produktif sebesar persentase tertentu yang difokuskan kepada sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah, termasuk sektor KP.
2. Pengaturan pengecualian BMPK sampai dengan 30% diusulkan tidak hanya kepada BUMN namun juga kepada pihak-pihak yang menangani proyek-proyek pada sektor-sektor prioritas Pemerintah, termasuk sektor KP.
3. Pengaturan bagi bank dan perusahaan pembiayaan dalam penilaian kualitas kredit dan *grace period* yang memperhitungkan faktor alam.
4. Pengaturan tentang pencadangan penyisihan piutang dan penilaian jaminan yang mengakomodir sektor usaha khusus
5. Kebijakan dan pengaturan mengenai program penjaminan kredit dan asuransi yang sesuai bagi pelaku usaha di sektor KP
6. Kebijakan dan pengaturan terkait perusahaan penjamin khusus di bidang perikanan, batasan kapasitas kapal yang dapat diterima asuransi, skim asuransi yang dapat mengakomodir kapal-kapal kecil dengan berat tonase <10GT, serta pengawasan yang memadai atas pemenuhan kewajiban kepemilikan asuransi bagi kapal dengan berat tonase > 35GT. Kewajiban dan komitmen bank dalam rencana bisnis untuk menyalurkan pembiayaan produktif sebesar persentase tertentu yang difokuskan kepada sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah, termasuk sektor KP.
7. Pengaturan pengecualian BMPK sampai dengan 30% diusulkan tidak hanya kepada BUMN namun juga kepada pihak-pihak yang menangani proyek-proyek pada sektor-sektor prioritas Pemerintah, termasuk sektor KP.
8. Pengaturan bagi bank dan perusahaan pembiayaan dalam penilaian kualitas kredit dan *grace period* yang memperhitungkan faktor alam.
9. Pengaturan tentang pencadangan penyisihan piutang dan penilaian jaminan yang mengakomodir sektor usaha khusus
10. Kebijakan dan pengaturan mengenai program penjaminan kredit dan asuransi yang sesuai bagi pelaku usaha di sektor KP
11. Kebijakan dan pengaturan terkait perusahaan penjamin khusus di bidang perikanan, batasan kapasitas kapal yang dapat diterima asuransi, skim asuransi yang dapat mengakomodir kapal-kapal kecil dengan berat tonase < 10GT, serta pengawasan yang memadai atas pemenuhan kewajiban kepemilikan asuransi bagi kapal dengan berat tonase > 35GT.

C Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Untuk meningkatkan akselerasi peningkatan kegiatan usaha di sektor KP, diperlukan dukungan program dan kebijakan dari KADIN antara lain mencakup:

1. Program dan kebijakan untuk mendorong integrasi usaha perikanan tangkap dari hulu ke hilir.
2. Program dan kebijakan untuk menstimulus peningkatan *bargaining power* penjual.
3. Program untuk meningkatkan akses pasar, manajemen usaha dan sarana usaha bagi nelayan.

6.2. Produk Jasa Keuangan yang Mendukung Pengembangan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan usaha di sektor KP, SJK saat ini telah berkontribusi melalui berbagai produk jasa keuangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai hal baru, baik berupa peluang maupun hambatan yang menjadi tantangan SJK untuk terus melakukan inovasi produk jasa keuangan. Berbagai konsep atau model bisnis produk jasa keuangan yang dikembangkan oleh SJK yang kemberupa integrasi layanan pembiayaan dan penyimpanan, penyederhanaan prosedur penyaluran pembiayaan tanpa melanggar prinsip kehati-hatian dan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyesuaian agunan dan penjaminan pembiayaan.

IntegrasiPolaPembiayaandanPenyimpanan dapat menjadi alternatif pendekatan dalam rangka akselerasi pertumbuhan di sektor KP. Perbaikan dan pengembangan pola pembiayaan dan penyimpanan dengan persyaratan tertentu antara lain berupa layanan dengan karakteristik produk yang disesuaikan dengan kondisi bisnis dan pelaku usaha sektor KP. Beberapa layanan yang dapat dikembangkan meliputi implementasi layanan terpadu, penyediaan fitur tambahan pada tabungan nelayan dan penyediaan skema pembiayaan yang semakin beragam untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sektor KP.

Pembukaan Layanan Terpadu dan *Online* di PPI-TPI

Bentuk layanan dan produk terpadu yang dapat dikembangkan tergambar pada diagram berikut:

INDIKATOR	Jumlah Minimum	Layanan Bank
PPI-TPI Skala Besar		
Jumlah Nelayan Aktip	1000 Org	Buku Capem : Trx Oline Kredit Tabungan asuransi
Rata Volume Transaksi	20 ton/hr	
Jumlah Pedagang Ikan	100 org	
PPI-TPI Skala Menengah		
Jumlah Nelayan Aktip	500 org	Buku Unit: Trx Online Kredit Tabungan
Rata Volume Transaksi	10 ton/hr	
Jumlah Pedagang Ikan	30 org	
PPI-TPI Skala Kecil		
Jumlah Nelayan Aktip	300 org	Bank Mobil Keliling: Tabungan Trx Online
Rata Volume Transaksi	5 ton/hr	
Jumlah Pedagang Ikan	10 org	

- EDC / *e-CashWork*
- Tabungan Mikro Nelayan
- Kredit Produktif
- *Mobile Branch Banking*
- *Insurance*

Fitur Tabungan Nelayan dan Asuransi Jiwa dengan "Kartu Pintar"

Untuk mengakomodir karakteristik pelaku usaha dan memberikan manfaat optimal bagi pihak-pihak di sektor KP, dapat dikembangkan produk tabungan dengan spesifikasi sebagaimana diagram berikut:

Persyaratan Kartu PINTAR:

- Setiap Peserta Lelang di PPI-TPI wajib membuka rekening Kartu Pintar.
- Kartu Pintar digunakan sebagai syarat melakukan Transaksi lelang ikan di PPI-TPI.
- Kartu Pintar menunjuk Data Identitas Nelayan Perorangan Terintegerasi dengan Data Peserta Lelang di PPI-TPI kkp

Khusus untuk Nelayan

Khusus untuk Nelayan

Manfaat untuk Nelayan

- Nelayan dapat layanan perbankan secara *Online* & Terpadu.
- Nelayan dapat akses Tabungan dan Pinjaman secara langsung, mudah, cepat dan bunga bersaing.
- Pencarian Dana Subsidi Pemerintah dan Bantuan Program Kementerian kelautan Perikanan.
- Undian/insentip serat program tabungan Ibadah Naik Haji.

Manfaat Untuk Pemerintah & KADIN

- Sarana Pencarian Dana Subsidi Program Pemerintah (BBm dll)
- Penyaluran Langsung dan Tepat Sasaran Program Bantuan Kelautan Perikanan.
- Dukungan Akses untuk KADIN dalam Pola Kemitraan Hulu Hilir.
- Sarana Pemotongan Retribusi Pemda.

Kartu JARING Maritim

Untuk Pedagang/ Pengusaha ikan

Manfaat Untuk Perbankan & Asuransi

- Merupakan rekening tabungan di Perbankan yang *Online* Antar Bank via ATM/ Net Banking.
- Program Asuransi Umum untuk layanan Jiwa, Kredit, Kerugian.
- Perluasan Target Market Nasabah Tabungan dan Pinjaman.
- Sarana Pemotongan Kewajiban Kredit.

Skim Kredit

Untuk mengakomodir kondisi bisnis dan pelaku usaha di sektor KP, SJK akan mengembangkan berbagai skim kredit antara lain: Kredit Kepada Nelayan Melalui PPI-TPI, Kredit Pembiayaan Rumah SEHAT Jaring, Kredit kepada Anggota Kemitraan Kelautan Perikanan, Kredit Pola Kelompok Kelautan Perikanan, Kredit Kepada Anggota Koperasi Mina, dan Kredit Penunjang Kelautan Perikanan, dengan spesifikasi masing-masing sebagaimana diagram berikut:

Kredit Kepala Nelayan Melalui PPI-TPI	Kredit PEmbiayaan Rumah Sehat JARING:	Kredit Kepada Anggota Kemitraan Kelautan Perikanan	Kredit Pola Kelompok Kelautan Perikanan	Kredit Kepada Anggota Koperasi Mina	Kredit Penunjang Kelanjutan Perikan
Modal Kerja: Modal Tangkap. p 150jt - 1 milyar	Plafon Rp.50.500 juta	Syarat ada Perjanjian Kemitraan	Ada AD/RT Kelompok.	Koperasi Klasifikasi Sehat Kemenkop RAT Min 1 thn terakhir	Kredit Penunjang dalam rangka Pola Kemitraan
Investasi: Perahu Motor & Mesin Model KKP. Jaring & Alat Tangkap. Plafon??	Tenor 1 - 15 tahun	Syarat Bapak MItra: Pembeli Hasil. Pembinaan. Penjamin./	Simpanan Rutin	Pengurus Pemberi Rekomendasi	Tujuan disesuaikan Kebutuhan Pola hulu hilir
Jenis & harga Perahu Motor Sesuai GT. Model dari KKP? Perizinan. Asuransi	Untuk Bangun & Rehab	Syarat Anggota Mitra: Wajib Menjual Hasil kepada Bapak Mitra.	Tanggung Renteng	Koperasi Berhak atas intensip Rekomendasi danPemotongan Kewajiban Anggota	Wajib Memiliki Perjanjian Kemitraan
	Disarankan Rumah usaha olah ikan sesuai program KKP		Tujuan & Plafon sesuai kebutuhan	Tujuan disesuaikan dengan kebutuhan	Plafon Minimal Rp. 1 Bio

Prosedur Penyaluran Kredit

Untuk mengakomodir kondisi khusus pelaku usaha di sektor KP, dapat dilakukan penyesuaian prosedur penyaluran pembiayaan yang mencakup persyaratan bagi calon debitur peminjam yang berniat mengajukan pembiayaan dan pemenuhan dokumentasi pengajuan pembiayaan dengan tetap memperhatikan azas-azas pembiayaan yang sehat. Dalam rangka mengoptimalkan utilisasi peluang usaha di sektor KP serta mempertimbangkan kondisi khusus bagi pelaku usaha, maka SJK dapat melakukan penyesuaian terkait agunan dan penjaminan pembiayaan, antara lain mencakup penetapan besarnya risiko penjaminan dan cakupan risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan.

6.3. *Quick Wins*, Program Lanjutan dan Kerangka Regulasi

Peningkatan kegiatan usaha di sektor KP tentu saja tidak lepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui berbagai kebijakan dan program yang telah gencar diimplementasikan sampai dengan saat ini, KKP telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kemajuan sektor KP dalam berbagai sisi. KKP telah merumuskan kebijakan dan program (*quick wins* dan program lanjutan) sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut:

QUICK WINS	PROGRAM LANJUTAN
1. Membangun Gerakan Nelayan Hebat 2. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan 3. Gerakan Cinta laut dan Rehabilitasi Kawasan (Prioritas pantura Jawa) 4. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut 5. Pencanangan Pembangunan *Techno Park* Berbasis Perikanan Rakyat 6. Mendukung Operasi Keamanan Laut di Perairan Perbatasan 7. Pengembangan Kawasan Ekowisata Martim 8. Realokasi Subsidi Solar Menjadi LPG ke Nelayan	1. Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada Tahun 2019 2. Pembangunan 100 Sentra Perikanan terpadu 3. Penerapan *Best Agriculture Practice* 4. Pemberantasan IUU *Fishing* 5. Rehabilitasi Kerusakan Pesisir 6. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 7. Penataan Ruang Laut, Pesisirn dan Pulau-Pulau Kecil 8. Peningkatan Kesejahteraan di Pulau-Pulau Terdepan

Tabel 6.1 : Quick Wins dan Program LanjutanKementerian Kelautan dan Perikanan 2015-201

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Untuk akselerasi peningkatan kontribusi kegiatan usaha sektor KP secara komprehensif, KKP juga akan menyelesaikan beberapa ketentuan baik dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), maupun Rancangan Peraturan Presiden (R.Perpres) dan Rancangan Keputusan Presiden (R.Keppres). Adapun yang akan di selesaikan adalah RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, RUU tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan RUU Tentang Zona Tambahan. Sementara itu untuk RPP adalah RPP tentang Kapal Perikanan, RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, RPP tentang Pembudidayaan Ikan, RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan dan RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara. Dukungan kebijakan, program dan pengaturan dari berbagai pihak tersebut di atas diharapkan dapat mengurangi hambatan yang dihadapi para pelaku usaha dan kendala bagi SJK dalam meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi kegiatan usaha di sektor KP. Dengan demikian, peningkatan kegiatan usaha dari sisi volume dan mutu dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung program Nawa Cita Pemerintah Indonesia, khususnya untuk mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

6.4 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni adalah sarat mutlak bagi pelaku sektor jasa keuangan. Sektor keuangan yang tahan banting masih menjadi andalan banyak bank untuk dikucuri kredit. Bagaimana membangun SDM yang membangun bisnis keuangan mikro? Membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tengah gejolak perekonomian saat ini menuntut sikap pro-aktif dan penerapan strategi dengan disiplin tinggi. Apalagi dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang pada akhir tahun 2015 akan masuk ke Indonesia, Indonesia yang kita cintai ini tak luput dari terpaan pengaruh ini.

Sejarah selalu mencatat bahwa tiap krisis selalu mendorong timbulnya kepemimpinan yang sanggup menggalang solidaritas untuk bertahan sukses melewati "ujian". Bahkan sanggup menciptakan *opportunity* yang lebih besar yang pada saatnya akan mendorong dunia industri jasa keuangan lebih sehat dan lebih tangguh dengan berbagai produk unggulan yang tahan uji. Produk Kelautan dan Perikanan adalah salah satu produk yang menjanjikan di tahun-tahun mendatang.

Persaingan bisnis yang kian ketat dan produk yang sejenis menuntut bank-bank untuk secara cerdas membanting setir menciptakan kinerja yang optimal. Tentunya bersandar pada kompetensi, inovasi dan *extra effort* agar menang dalam medan perjuangan *business* dewasa ini.

Dalam keadaan seperti ini diperlukan seorang *leader* yang tangguh, yang memiliki visi kepemimpinan yang jernih, sehingga dapat "menetapkan dan menjalankan" berbagai penyesuaian. Atau, bahkan secara fundamental melakukan perubahan visi dan misi organisasi untuk menggarap sektor atau segmen pasar baru yang secara realistis lebih menjanjikan untuk digarap. Sang *Leader* harus didukung manajemen yang solid dan mumpuni serta memiliki daya terobos yang kuat dalam membangun organisasi dan kompetensi baru dari perangkat SDM-nya sesegera mungkin. Tahap berikutnya (sebagai satu kesatuan mutlak) adalah membangun satu tindak lanjut berupa penyesuaian *attitude*, peningkatan *skill knowledge* SDM yang standard dan terukur.

Tantangan seluruh sektor industri jasa keuangan pada 2015 akan bertambah berat, namun bisa disiasati dengan identifikasi dan konsep penyelesaian yang struktural dan integral. Hal ini pada akhirnya akan bermuara pada kompetensi SDM sebagai *smart executor* yang berkesesuaian. Bahkan idealnya mendahului dari kompleksitas perubahan yang terjadi akibat tekanan krisis sekarang ini. Sektor pembiayaan mikro akan lebih tahan banting terhadap gejolak ini. Bagaimana menyiasatinya?

Sektor pembiayaan mikro bukan merupakan target bidikan bisnis yang baru. Karena itu organisasi dari bisnis unit yang baru harus dipersiapkan. Proses rekruitment ataupun pengembangan SDM yang telah tersedia adalah kunci sukses penggarapan lahan bisnis ini.

Pengembangan SDM bukanlah sebuah Expenses melainkan *Investment* bagi industri sektor jasa keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, prosesnya tidak seketika (*instant*) tetapi melalui proses yang *gradual*, sehat dan bertanggung jawab.

Salah satu bentuk pengembangan dapat dilakukan melalui program pelatihan dan standarisasi kompetensi yang diklasifikasikan dan disesuaikan dengan kurikulum yang komprehensif, yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis saat ini. Ibarat sebuah *procces* memasak. OJK Institut bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan KADIN juga Industri Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta para pihak yang terkait sebagai sang juru masaknya, Bahan boleh sama tapi cara memasaknya dapat dibedakan dan penyajiannya bergantung pada sang juru masaknya.

Dalam era inilah akan dituntut pembuktian tingkat keandalan setiap profesional pengelola SDM selaku *business partners* untuk mampu bersaing secara global untuk menghadapi MEA. Hal ini merupakan tantangan dan daya tarik tersendiri bagi para profesional.

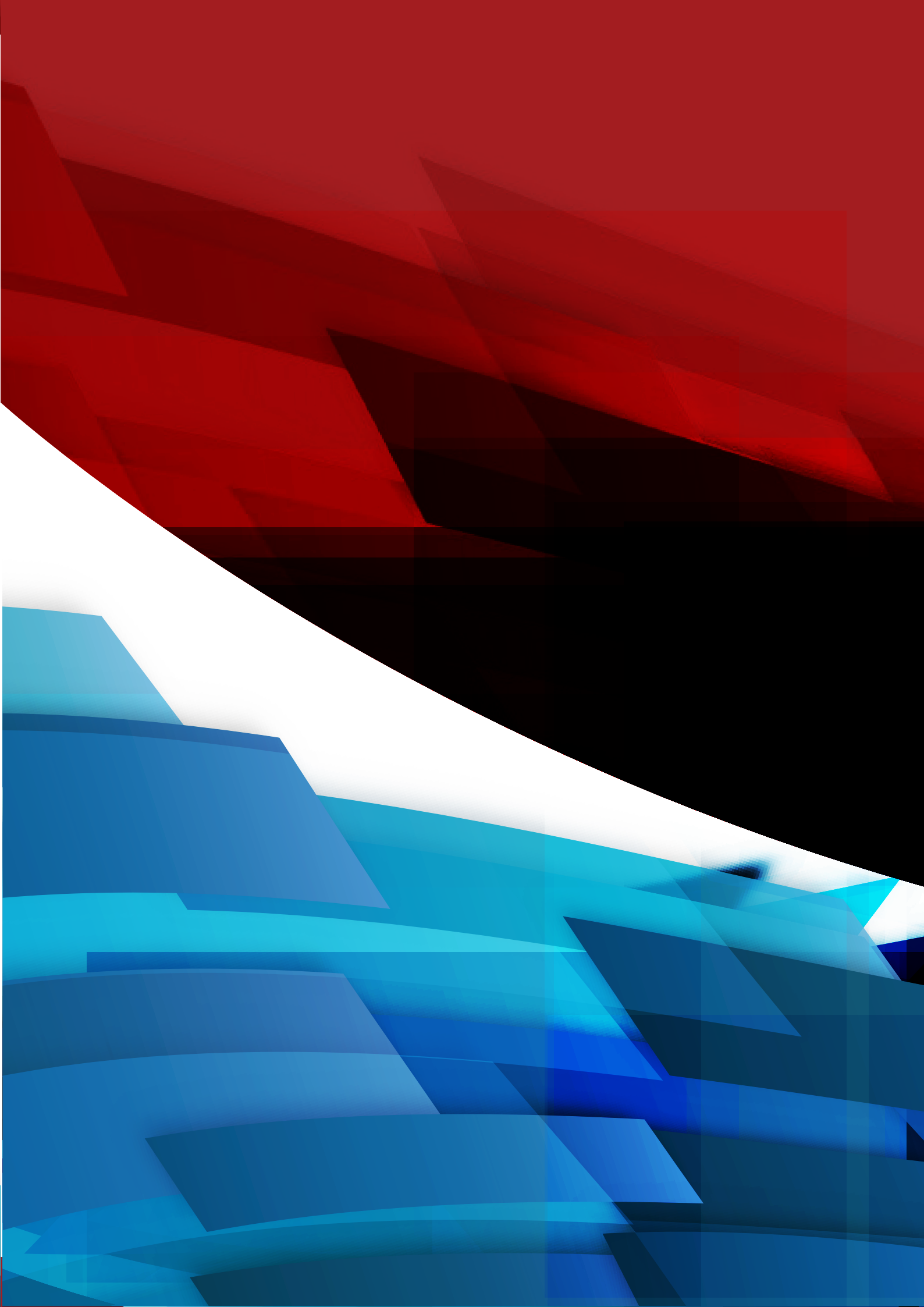

LAMPIRAN

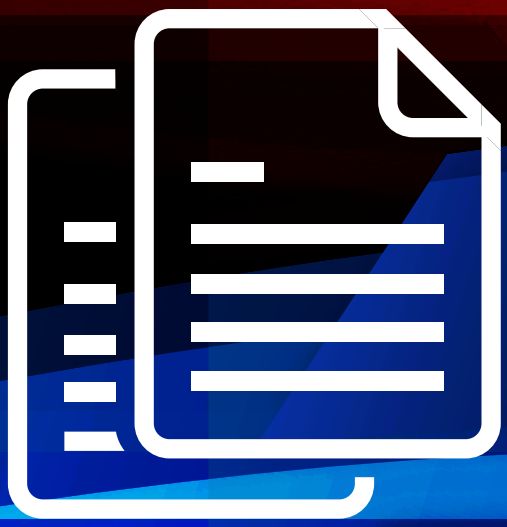

Lampiran 1 : Data

Potensi Perikanan
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

kelompok Sumber Daya Ikan	Selat Malaka	Samudera Hindia	Samudera Hindia	Laut Cina Selatan	Laut Jawa	Selat Makasar	Laut Banda	Teluk Tomini	Laut Sulawesi	Samudera Pasifik	Laut Arafuru Laut Timor	Total
Ikan Pelagis Besar	27,7	164,8	201,4	66,1	55,0	193,6	104,1	106,5	70,1	105,2	50,9	3.645,6
Ikan Pelagis Kecil	147,3	315,9	210,6	621,5	380,0	605,4	132,0	379,4	230,9	153,9	468,7	1.452,4
Ikan Demersal	82,4	68,9	66,2	334,8	375,2	87,2	9,3	88,8	24,7	30,2	284,7	98,3
Udang Penaeid	11,4	4,8	334,8	11,9	11,4	4,8	-	0,9	1,1	1,4	44,7	145,3
Ikan Karang Konsumsi	5,0	8,4	11,9	21,6	9,5	34,1	32,1	12,5	6,5	8,0	3,1	98,3
lobster	0,4	0,6	21,6	0,5	0,5	0,7	0,4	0,37	0,2	0,2	0,1	4,9
Cumi-cumi	1,9	1,7	0,5	2,7	5,0	3,9	0,1	7,1	0,2	0,3	3,4	28,4
Total Potensi (1.000 ton/tahun)	276,1	565,1	2,7	1059	836,6	929,7	278,0	595,5	333,7	299,2	855,6	6.520,3

Jumlah Nelayan Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap, 2009 - 2014
sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

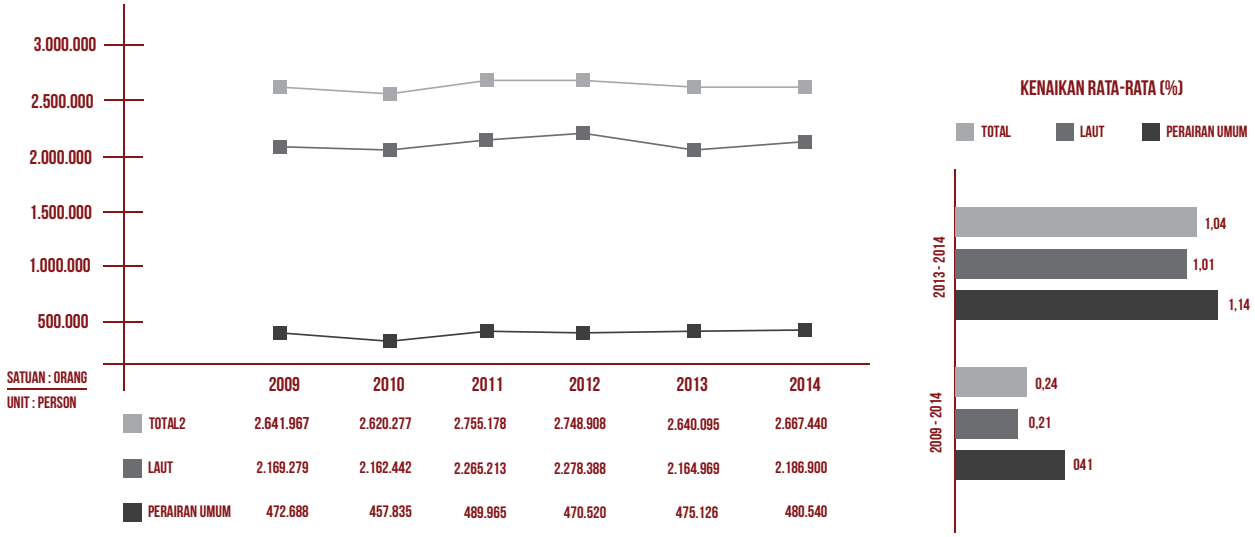

Keterangan- Note : :
**) Angka Sementara - Preliminary Figures*

Target Pendapatan Nelayan Tahun 2015 - 2019
sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

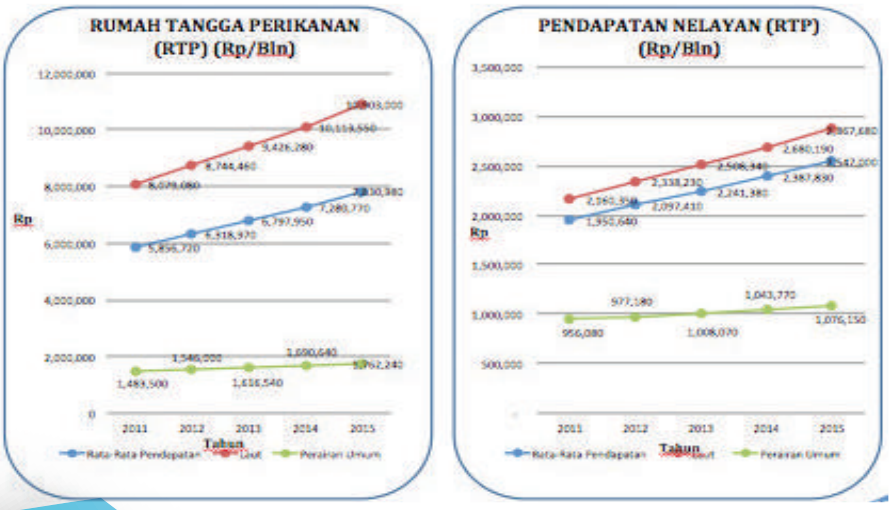

SENTRA PRODUKSI IKAN BANDENG INDONESIA, 2013

SENTRA PRODUKSI IKAN KAKAP INDONESIA, 2013

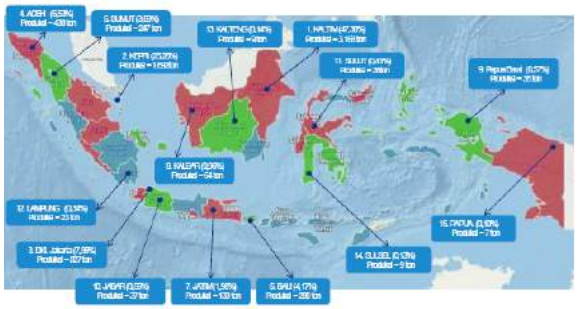

SENTRA PRODUKSI TOTAL RUMPUT LAUT COTTONII INDONESIA, 2013

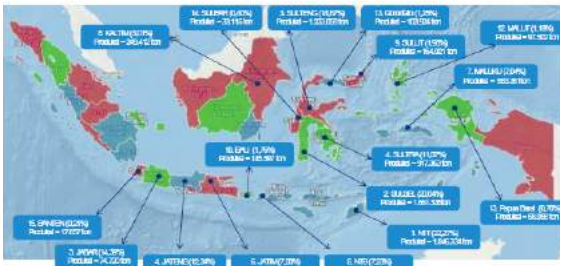

SENTRA PRODUKSI IKAN KERAPU INDONESIA, 2013

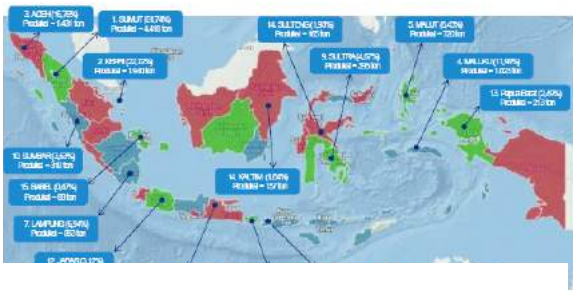

SENTRA PRODUKSI TOTAL RUMPUT LAUT GRACILARIA INDONESIA, 2013

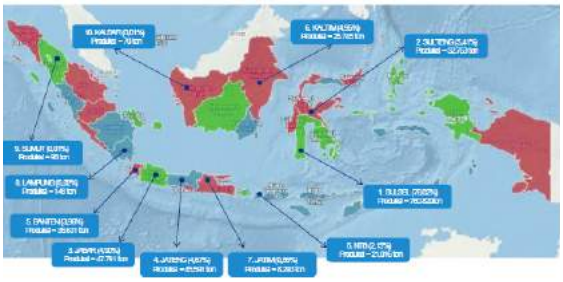

SENTRA PRODUKSI IKAN LELE INDONESIA, 2013

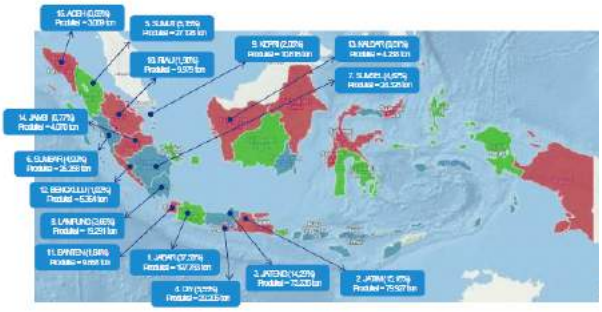

SENTRA PRODUKSI IKAN GURAME INDONESIA, 2013

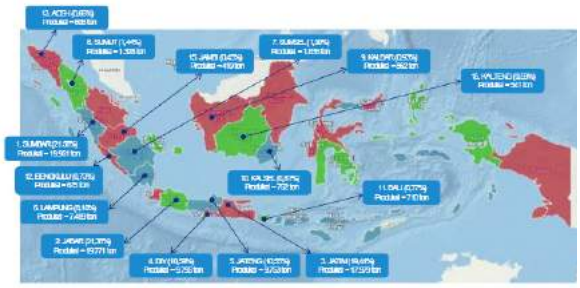

SENTRA PRODUKSI LOBSTER BUDIDAYA AIR LAUT DI INDONESIA, 2013

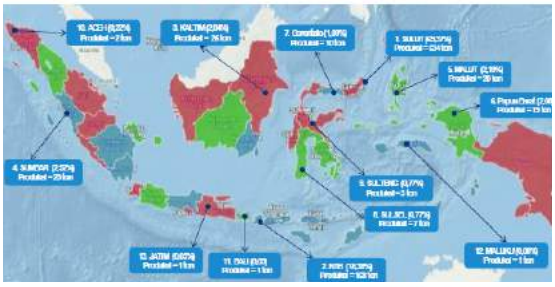

SENTRA PRODUKSI IKAN LAINNYA INDONESIA, 2013

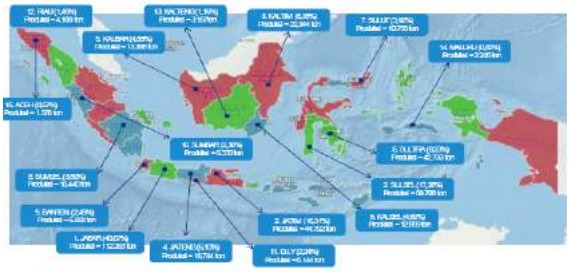

SENTRA PRODUKSI IKAN MAS INDONESIA, 2013

SENTRA PRODUKSI IKAN NILA INDONESIA, 2013

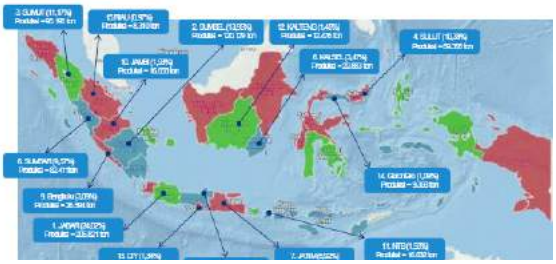

SENTRA PRODUKSI UDANG LAINNYA INDONESIA, 2013

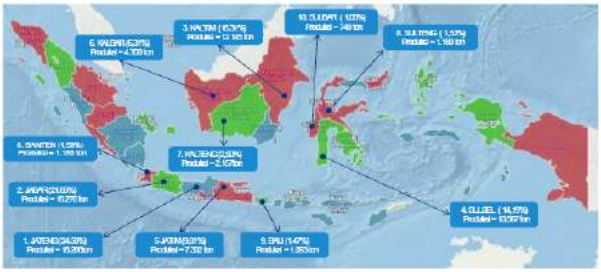

SENTRA PRODUKSI IKAN PATIN INDONESIA, 2013

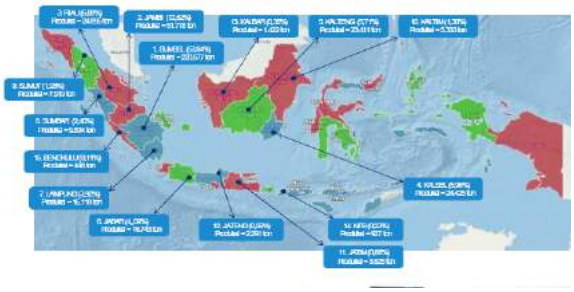

SENTRA PRODUKSI UDANG WINDU INDONESIA, 2013

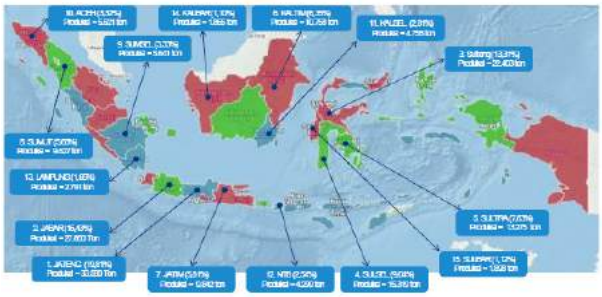

SENTRA PRODUKSI UDANG GALAH BUDIDAYA DI INDONESIA, 2013

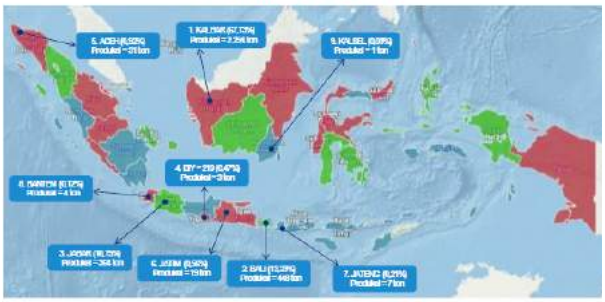

Sebaran UPI Skala Industri di Indonesia

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Potensi Lahan Budidaya Rumput Laut
sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

FASILITASI INVESTASI	LUAS PULAU (ha)	JENIS USAHA	JENIS INVESTASI	NILAI INVESTASI (Rp)	PNBP DARATAN (Rp)	PNBP PERAIRAN (Rp)	PNBP (Rp)
P. Nipa, Kota Batam	49	Oil Storage	Pemancangan dermaga, Penimbunan tanah, dan Membangun 7 tangki Oil Storage (Kerjasama Pemanfaatan BMN)	1,273,000,000,000	1,241,625,000	0	1,241,625,000
Gugus P. Bawah, Kab. Anambas	100	Penyewaan cottage & wisata bahari (diving, snorkling, fishing)	1. Persiapan (Perencanaan, pengurusan izin, pembebasan lahan)	12,000,000,000	35,000,000	120,000,000	155,000,000
			2. Pembangunan cottage	10,000,000,000			
			3. Pembangunan dramaga	7,000,000,000			
Gili Gede, Lombok Barat	317	Resort Wisata Bahari	Membangun resort, villa dan bungalow di tepi pantai	50,000,000,000	187,500,000	90,000,000	27,500,000
Gugus P. Pari	0	Reseort Wisata Bahari Bintang 5	Membangun Resort/Cottage/ Bungalow beserta fasilitas pendukung dan dermaga tamat/labuh kapal	500,000,000,000	0	3,200,000,000	3,200,000,000
Gugus P. Keramat, P. Bedil, P. Temudong, Kab. Sumbawa, NTB	66	Resort Wisata Bahari	Membangun resort, restoran, kebun organik dan fasilitas pendukungnya	95.000,000,000	4,620,000,000	0	4,620,000,000
TOTAL				1,947,000,000,000			9,494,125,000

Perhitungan Biaya Investasi Pulau Kecil
sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Satuan/Unit
Unit/Units

PROVINSI	BalaiBenih IkanSentral	BalaiBenih IkanLokal	BalaiBenih IkanPantai	BalaiBenih Udang	UPT
JUMLAH-TOTAL	55	557	32	35	15
SUMATERA	10	193	9	6	4
Aceh	1	18	1	1	1
SumateraUtara	1	45	2	1	
SumateraBarat	1	30	2	0	
Riau	1	13	0	1	0
KepulauanRiau	1	1	1	1	1
Jambi	1	15	0	0	1
SumateraSelatan	1	27	1	1	0
BangkaBelitung	1	7	2	1	0
Bengkulu	1	24	0	0	0
Lampung	1	13	0	0	1
JAWA	18	167	5	7	5
DKIJakarta	1	2	1	0	0
Banten	1	7	1	0	1
JawaBarat	2	33	0	2	2
JawaTengah	4	67	0	2	1
D.I.Yogyakarta	4	16	1	1	
JawaTimur	6	42	2	2	1
BALI-NUSATENGGARA	8	53	4	1	2
Bali	1	19	0	1	1
NusaTenggaraBarat	6	21	2	0	1
NusaTenggaraTimur	1	15	2	0	0

Satuan/Unit
Unit/Units

PROVINSI	BalaiBenih IkanSentral	BalaiBenih IkanLokal	BalaiBenih IkanPantai	BalaiBenih Udang	UPT
KALIMANTAN	4	57	5	9	1
KalimantanBarat	1	15	1	0	
KalimantanTengah	1	24	1	2	0
KalimantanSelatan	1	12	2	1	1
KalimantanTimur	1	6	1	6	0
SULAWESI	11	65	6	11	2
SulawesiUtara	1	10	1	0	1
Gorontalo	1	2	1	2	0
SulawesiTengah	7	12	1	2	0
SulawesiBarat	0	2	1	2	0
SulawesiSelatan	1	34	0	2	1
SulawesiTenggara	1	5	2	3	0
MALUKU-PAPUA	4	20	3	1	1
Maluku	1	2	1	0	1
MalukuUtara	1	1	1	0	0
Papua	1	15	1	1	0
PapuaBarat	1	2	0	0	0

Sebaran Balai Benih/Budiday Menurut Provinsi Tahun 2014
Sumber - Source : Dit. Produksi, DJPB

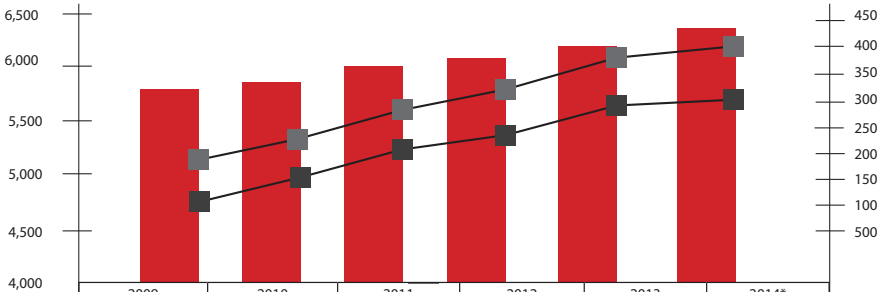

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Total	1,888,998	1,486,075	1,548340	1,660,292	1,782,898	1,797,060
Laut	1,174,274	947,220	1,001,667	1,060,449	1,177,783	1,188,340
Perairan Umum	714,724	538,855	546,673	599,843	605,315	608,720

Keterangan- Note:
**): Angka Sementara:- Preliminary Figures*
-.Perikanan Tangkap: Angka Sementara hingga 2014- Capture Fisheries: Update to 2014.
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Volume Produksi Perikanan Tangkap 2009 – 2014
Sumber - Source : Dit. Produksi, DJPB

Lampiran 2 : Daftar Sandi LBU & LSMK BUS-UUS

NO	SANDI	NAMA LAPANGAN USAHA
1	050111	Penangkapan Ikan Tuna
2	050119	Penangkapan Ikan Lainnya
3	050121	Penangkapan Udang Laut
4	050122	Penangkapan Crustacea Lainnya di Laut
5	050190	Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lainnya di Perairan Umum
6	050211	Budidaya Biota Laut Udang
7	050212	Budidaya Biota Laut Tuna
8	050213	Budidaya Biota Laut Rumput Laut
9	050219	Budidaya Biota Laut Lainnya
10	050220	Pembenihan Biota Laut
11	050310	Penangkapan Ikan di Perairan Umum
12	050320	Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lainnya di Perairan Umum
13	050411	Budidaya Biota Air Tawar Udang
14	050419	Budidaya Biota Air Tawar Lainnya
15	050421	Budidaya Biota Air Payau Udang
16	050429	Budidaya Biota Air Payau Lainnya
17	050490	Pembenihan Biota Air Tawar dan Air Payau
18	050510	Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut
19	050580	jasa Sarana Produksi Perikanan Darat
20	050590	Jasa Perikanan Lainnya
21	142200	Ekstraksi Garam
22	151200	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
23	512119	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lainnya
24	512130	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan
25	512205	Perdagangan Dalam Negeri Garam
26	532130	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan
27	532201	Perdagangan Ekspor Udang Olahan
28	631000	Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang
29	632000	Pergudangan, Jasa Cold Storage, dan Jasa Wilayah Berikat
30	711200	Persewaan Alat Transportasi Air
31	351000	Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu
32	452270	Bangunan Dermaga (Pelabuhan)
33	611100	Angkutan Laut Domestik
34	611200	Angkutan Laut Internasional
35	612100	Angkutan Sungai dan Danau
36	612200	Angkutan Penyeberangan Domestik

Lampiran 3 : Ilustrasi Pemanfaatan Ikan dan Ragam Olahan

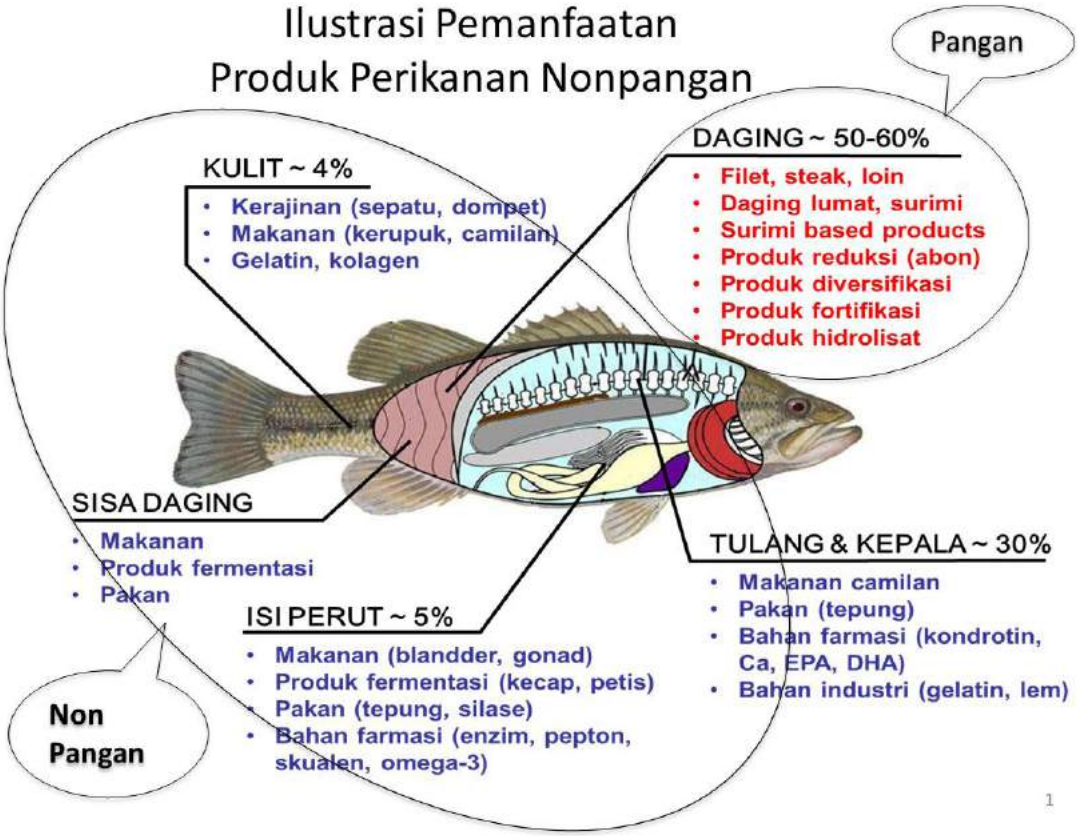

TUNA & NILAI TAMBAHNYA

Tuna Loin Segar (35.71%)
Tuna Loin Beku (39.40%)

Tuna Stripmeat Beku (26.54%)

Canned Tuna Solid (44.42%)
Canned Tuna Chuck (43.05%)

Tuna Groundmeat Beku (39.04%)

Tuna Loin Cooked Beku (35.60%)

Tuna Utuh

Tuna Sashimi (33.55%)

Tuna saku Beku
(35.60%)

Tuna Cube Beku (26.54%)

Tuna Steak CO Beku (22.03%)

1

Lampiran 4: Daftar Nama KKMB di Indonesia

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
NAD			
1	Nawawi, SP	Jl. Tgk Dikandang No.43A Gp. Pande Banda Aceh	081360563851
2	Marzuki, SP	Jl. Lambaro Angan Ds. Klieng Cat Aron	0811689621
3	Husni, S.St.Pi	Jl. Pramuka No. 18 A Hagu Tengah LSM	081318917423
4	Lia Safiatuddin, S.St.Pi	Jl. BTN BSP Jl. Merak No.1 Langsa	085213000732
5	T Muammar Indra	Jl. Aceh Barat Daya Susah	08126921871
6	Ari Muladi	Jl. Jangka Masjid Kec. Jangka Bireuen	085213000732
7	Sri Murni, S.Kel	Jl. Simpang 3 Bak Atu	081325103076
8	Musthafa, A.Md	Jl. Banda Aceh - Meulaboh Calang	08126941975
9	Yasir Ammy, S.St.Pi	Jl. Teuku Umar Kt Subulussalam	08126911956
10	Aliman, S.Pi, M.Si	Jl. Tungggai IV Lamgugap Banda Aceh	0811680919
11	Firmansyah, S.St.Pi	Jl. Laks. Malahantan Lambada Lhok	08126911956
12	Reza Alfarisi	Jl. Tgk Chik Dipineung III	085260469008
13	Murdiana, S.Si	Jl. Ujang Kareung Kota Sabang	081360136246
14	Ridwan Usman	Jl. Asir asir Takengon	081331736061
15	Hasyimi, S.Pi	Jl. Blower Blang Karoren	085260559274
16	Rahmat Hidayat, S.St.Pi	Jl. SM Yamin No.8 Peunayang	081317564060
17	Nuril Hadi, S.St.Pi	Jl. Alue Blang Lamlagang	081389629533
18	Muhammad Reza, A.Md	Jl. Banda Aceh-Medan Kecamatan Peukan Baro	085220759209
19	Afdhalul Rizqi, S.St.Pi	Jl. Prapat Hilir Kutacane	085260043815
20	Zulfahmi, S.Pi	Jl. Teuku Chik Ditunong Pantan Labu	081395681298
21	Junaidi, SE	Jl. Kp. Lamreung Kec. Krueng Barona Jaya	-
22	SA Alamsyah, SE	Jl. Meulaboh Simp. Mns. Baro No.1 Lhoknga	-
23	Hamdani, A.Md	Jl. Teuku Nyak Arief Lr.Bl.Seukee No.4 Darussalam	-
24	Bobby S	Jl. Drien Rampak Susah Abdya	-
25	Nukman Hasan	Jl. Chik Lampaloh No.6 Lueng Bata Bna	-
26	Isfanir, SE.Ak	Jl. Medan, Banda Aceh, Kec. Peudada, Kab. Bireun	-
27	Cut Fachriana Dewi, SE	Jl. Sudirman Lr. Karya No.16 Matang Seulimeng Langsa	0813 6040 8970
28	Elhazir	Jl. Sp Uyak Sungai Lueng Kec. Lgs Timur	-
29	Mudrikah, SE	Jl. T. Umar, No. 04, KeudeAceh, Ini Reyeuk, Aceh Timur	08260 - 421483
30	Syarifuddin, ST	Jl. Kd. Seumot Kec. Beutang Nagam Raya	-
31	Banta Puteh	Jl. Ds. Mns Krueng Kec. Beutong Nagan Raya	-
32	Hamdani, SE	Jl. Datuk Balimo No.51 Drien Rampak Kec. Susah Abdya	-
33	Syamsani, B.Sc	Jl. Sawang Ba'U Aceh Selatan	-
34	Salman Farisi, SE	Jl. Ds. Lhok Pawah Aceh Selatan	-
35	Ferizal, SE.Ak	Jl. Ds. Meuligo Sawang Aceh Selatan	-
36	Muslidar	Jl. Merdeka, No.10, Singkil, Aceh Singkil	0815 3379 8087
37	Ir. Kanisullah	Jl. T. Iskandar KM. 6,5 Desa Cot Cut Kuta Baro, kab. Aceh Besar	0811689622 0651229522
38	Achmad Hanel,SH	Jl. Mayjend. Sutoyo,No.03, Kualasimpan, Aceh Tamiang	0641-332609
39	Mustafa,SE	Jl. Tek. Cot. Plieng, No,14, Kotabaru, Lampineng	0852 6012 8539
40	Hamdani,A.Md	Jln. T.Nyak Arief,Lr.Seukee,No,1, Darussalam, Banda Aceh	0813 6032 9710
41	Roviana,S.Pi	Jl. Mataie Lr. Rahmat, Ketapang II.Aceh Besar	0813 6056 7044
42	Hadijah,SE	Jl. Pang Akop, No.2, Lhokseumawe	0813 6003 7177
43	Cut Rahmawati,SE	Blanggalang Ds.Leubue, Kec. Pidie, kab. Pidie	0813 6064 1004
44	Cut Anita	Kp. Sentosa, Calung , Aceh Jaya	0815 9223 780
45	Lahmuddinsyah,S.Pi	Jl. Kolonel Yusup,Glp. Payong Bireun	0852 6121 6777
46	Syarifudin,ST	Desa Keude Seumot, Kec. Beulong, Nayan Raya	0852 7703 1675
47	Aliman, S.Pi, M.Si	Lr. Tunggai IV Lamgugop B.Aceh	0811680919
48	Firmansyah, S.St.Pi	Jl. Laks. Malahayati Lambada Lhok	08126911956
49	Reza Alfarisi	Jl. Tgk. Chik Dipineung III	085260469008
50	Nawawi, SP	Jl. Tgk. Dikandang No. 43A Gp.Pande	081360563851
51	Rahmat Hidayat, S.St.Pi	Jl. SM Yamin No. 8 Peunayong	081317564060
52	Nuril Hadi, S.St.Pi	Jl. Alue Blang Lamlagang	081389629533
53	Marzuki, S. Pi	Jl. Lambaro Angan Ds.Klieng Cot. Aron	0811689621
54	Muhammad Reza, A.Md	Jl. B.Aceh-Medan Kec. Peukan Baro	085220759209
55	Lia Safiatuddin, S.St.Pi	BTN BSP Jl. Merak No.1 Langsa	085213000732
56	Musthafa, A.Md	Jl. B.Aceh-Meulaboh, Calang	08126941975
57	T. Muammar Indra	Aceh Barat Daya, Susoh	08126921871
58	Husni, S.St.Pi	Jl. Pramuka No.18A Hagu Tengoh	081318917423
59	Ari Muladi	Jangka Mesjid Kec. Jangka Bireuen	085277302000
60	Sri Murni, S.Kel	Jl. Simpang 3 Bak Atu	081325103076
61	Yasir Amny, S.St.Pi	Jl. Teuku Umar Kt. Subulussalam	08126911956
62	Murdiana, S.Si	Ujong Kareung Kota Sabang	081360136246
63	Ridwan Usman	Asir-asir Takengon	081331736061
64	Hasyimi, S.Pi	Blower Blang Kejeren	085260559274
65	Afdhalul Rizqi, S.St.Pi	Prapat Hilir Kutacane	085260043815
66	Zulfahmi, S.Pi	Jl. Tgk. Chik Di Tunong Panton Labu	081395681298
Sumatera Barat			
1	Rika Permata Sarim, S.Si	Jl. Berlian Raya No. N/12 Perumnas Pegambiran Lubuk Begalung Padang	08197575304
2	Yeni Handayani, SH	Jl. Palembang No. 57 Gaung Teluk Bayur Lubuk Begalung Padang	081266157141
3	M Syafril, S.Pi	Jl. Handayani IV/124 Nanggalo Padang	08126773725
4	Ricky Martin, S.Pi	Jl. Pinangsari III/16 ATT Padang Utara Kota Padang	081266285175
5	Febri Mulyanto Anwar	Jl. Adinegoro No. 24 Koto Tangah Padang	081374376268
6	Metrianto, SH	Jl. Persatuan 05/I Bungus Teluk Kabung Padang	081267625879
7	Eka Suryati, S.Pi	Jl. Siak No. 54 Rt 003/003 Kel. Rimbo Kaluang Padang Barat	081363120004
8	Didi Putra, S.Pi	Komplek Kamela Permai Blok A No. 4 Koto Tangah Padang	081374204700
9	Suhartati, A.Md	Jl. Painan KM 17 Rt 002/II Lubuk Tarok Bungus Teluk Kabung Padang	081374136156 - 085263243631
10	Tiara Hanum	Jl. Jeruk I/15 Kuranji Padang	-
11	Virgadios Arfaros, S.Pi	Komplek Buana Indah II B/8 Rt 001/007 Balai Baru Kuranji Padang	8126783949
12	Meilastri Ilana Harefa, SE	Skeep Kamp. Baru Rt 003/Rw XI Kel. Mata Air Padang Selatan	081266728804 - 081267838902
13	Hadi Kurniawan, S.Pd	Jl. Pekanbaru F.15 Rt 005/015 Nanggalo Padang	08126645479
14	Irwandi, S.Pi, MM	Perum Pasir Indah No. 27 Jl. Pasir Nan Tigo Koto Tangah Padang	0811763909
15	Hefriyanto, S.Pi	Jl. Teknologi Raya No. 24 Rt 002/ XXI Gadang Nanggolo Padang	0751-9769389
16	Elka Mustika	Jl. Adinegoro Komplek Kharismatama Permai H/II Padang	08126791247
17	Henaldi, S.Pi	Jl. Jati VI No. 40 A Rt 002/006 Jati Baru Padang Timur	081363901263
18	Darmayantos, S,Pi	Lumpo, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan	-
19	Zulfadri Candra Bakti, S.Pi	Kampung Empang Teras Lumpo Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	08126870685
20	Syaifudin Islami, S,Tp	Jl. M.Hatta No. 58 Rt/Rw 01 Kel. Andung, Padang	(0751)840931 085669087965
21	Netti Yunita	Jl. Bgd Tulabiah No. 57 Desa Simpang Pariaman Selatan	(0751)7875308 08126738792
22	Erizon, S.Pi	Korong Mangur, Nagari Batu Kalang, Kec. Padang Sago, Kab. Padang Pariaman	(0751)676652 081363436114

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
23	Julia Novita	Jl. SM. Abidin No. 27 Pariaman	(0751)7878140 081374645244
24	Novika Sri Rahayu, A.Md	Ds.1 No. 70 Balai Kurai Taji	(0751)7682044 08126746551
25	Deddy Irawan, S.E	Jl. Gajah Mada Lansano 223, Lubuk Basung-Agam	0815 3523 3931
26	Ir. Safenly Afif	Asrama Polres Agam	-
27	Iwan Gusriadi	Jl. Kp. Jawa No. 11 Air Bungis, Pasaman Barat	(0753)475113
28	Heldi Yarwan	Jurong, Kp. Padang, Air Bungis	(0753)475220 081977543002
29	Martisa Ilna Putra	Padang Halaban Sasak, Kec. Sasak Ramah Pasisie, Kab. Pasaman Barat	081535410045
30	Handi Lala, SE	Jl. Mungka Tengah-Kenae Mungka, Kec. Mungka, Kab. Lima Puluh Kota,	081374515401
31	Rasmildi	Sariek Laweh, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	(0753)73577 085263550445
32	Rahmi Hayati	Jl. Sawah 14 No. 17 Pd. Belimbing Koto Sani Kec. X, Kota Singkarak, Kab. Solok	081374520588
33	Sri Hartati, SE	Padang Datar Pagaruyung, Batu Sangkar	(0752)71258 08126748703
34	Drs. Baharuddin Esardi	Jl. Syeh Ismail Alkalibi No. 76 Kel. Tanah Garam Kota Solok	(0755)23152
35	Jonnedi, S.Pi	Jl. Pasie Nan Tigo No.27 Perum Pasir Indan No.27 Padang	-
36	Faisal, A.Md	Sitombol, Jorong Selamat. Kec. Padang Gelugur, Pasaman	-
37	Mayantori, S.Pi	Kel. Mata Air, Kp Baru Rt 03/Rw XI Padang Selatan	-
38	Lilfauza	Jl. Kalumbuk No.9 Kuranji, Padang	-
39	Riri Anggika, A.Md	Jl. Simpang KpTangah, Kec. VII Koto, Sei Sarik, Barangan, Padang Pariaman	-
40	Emlan Heriadi	DKP Solok Selatan, Sei Lambai, Lb. Gadang Selatan, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan	-
41	Nova Yulia , S.Pt	Simpang IV Pulau Punjung, Jl. Lb. Bulang No.19 Kab Dharmasraya	-
42	Nina febria, S.Pi	Jorong Kampung Pindang, Mundam Sakti, Kec. IV Nagari, Kab Sijunjung	-
43	Hamidah Elwir, S.St.Pi	Komp Taruko I Blok HH/2. Kec. Kuranji, Padang	-
44	Riri Irawan, S.Pi	Jl. Denpasar No.5 Wisma Indah IV, Siteba padang	-
45	Mitro Hazni Putra, S.Pi	Jl. Bagindo Aziz Chan, No.26 Bukittinggi	-
46	Gustina Elka Mellia, SE	Jl. Simpang 3 Kumpulan No.2 Kec. Bonjol Kab. Pasaman	-
47	Rifanos Syarli	Lubuk Sikaping, kab. Pasaman	-
48	Dame Natalia	Sioban, Kec. Sipora Kab.Kep Mentawai	-
49	Mangihut M	Jl. Klenteng No.299 Padang	-
50	Khairun Najmi	Jorong Ambacang Nagari, Koto Malintang, Kec Tanjung Raya, Kab Agam	-
51	Edwar, S.Pd	Jorong Pandan KampungTanjung Sani, Kec. Tj Raya Kab Agam	-
52	Zeswita, SP	Jl. Guguak singkek no. 7A Bandar Parung	-
53	Muhammad Suhardi, S.Pi	Nagari Mungo, Kec. Luak, Kab 50 kota	-
54	Elza Rusma Yeni, S.Pi	Jl. MH Thamrin, Painan, Kab. Pesisir Selatan	-
55	Romi Sandra, S.Pi	Jl. Flamboyan 41 A Rt 02/Rw 03, Payolansek, Payakumbuh	-
56	Rof Charlie	Jl. Siti Manggopoh No.91 Padang Panjang barat	-
57	Piorida Tamba BA	Perumahan Taruko Permai LL-4 Padang	-
58	Melvia Astuti, S.Pi	Koto Baru, Kab Solok	-
SUMUT			
1	Asril Suheri, SE	Jl. Langkat No. 60 Tg. Pura, Kab. Langkat	061-8961114
2	Widodo Budhi Darmo, SP	Desa Tapak Kuda Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat	081362452596
3	Imran, S.Ag	Jl. Pulau Banyak No. 2 Baja Kuning Tg. Pura Kab. Langkat	08126386400
4	Saiful Amri, S.Pi	Jl. A. Yani Kisaran Kab. Asahan	085261711314
5	Yasir Arafat, A.Md	Jl. Sumbawa I No. 217, Komp. Marelan Indah Medan	061-6853445 /081370167706
6	Feri Budiman, SE	Jl. Mahkamah Gg. Selamat No. 41 / 14 B	061-7323921, /081533416428
7	Sulaiman, SE	Jl. Tembakau Raya No. 88 Simalingkar	085262103695
8	Iwana Swaka Putri, S.St.Pi	Jl. Brigjend Zein Hamid Gg. Ridho No. 10	061-7030243, 081361532488
9	Halimah Sari, S.Pi	Perumnas Kalangan No. 19 C Desa Hajoran Pandan	081370078927
10	Hesty Juita Napitupulu, SE	Jl. S.M. Raja No. 85 Sibolga	0631-24959, /081370499100
11	Rosanita Tambunan	Jl. Gerilya Gg. Merdeka Rumah Petak 10 No. 10 Tg. Morawa, Kab. Deli Serdang	08126086965
12	Ahmad Arfani, SH	Jl. Pantai Labu Komp. PAB No. 4 Sekip Lubuk Pakam	061-7954058 /08535915728
13	Doan Suci Wahyuni	Desa Silau Rakyat Ds V Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai	085261791770
14	Suliyan, SE	Jl. Syech Ismail Gg. Sri N0. 7 Kisaran Kab. Asahan	0623-43007, /081361159471
15	Drs. M. Noor Nasution	Perumnas Martubung Blok XII No. 7	08126430546
16	Dodi Asrizal, S.Pi	Jl. WR. Supratman No. 48 Lubuk Pakam Deli Serdang	081362485445
17	Mahadi Andy Sujarwo	Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	081361432189
18	Faisal	Medan	085206032708
19	marito Hapni Siregar	Medan	085298599622
20	adianse tarigan	Medan	081260365008
21	gerry yulfa Damanik	Medan	-
22	umar husin	Medan	08126459297
23	Aslam M Raziq	Medan	0811656572
24	Tirmizi Hutasuhut	Medan	-
25	wini lasfika	Medan	081370191136
26	nasran siregar	simalungun	-
27	Irwanto P	Sibolga	085261351970
28	Sulaiman	tanjung balai	-
29	rinaldy chair	serdang bedagai	-
30	netti	serdang bedagai	-
RIAU			
1	Nefrizal, S.Pi	Jl. Persatuan No. 18 Luba Hulu Pasir Pangarayaan, Kab. Rokan Hulu,	0761 - 7050829
2	Tengku Indra Syahlela, S.Sos	Dinas perikanan dan kelautan, kab. Pelalawan, Komp. Bhakti Praja Pkl. Kerinci,	0761 - 7050829
3	Yoyon Yordi Saputra, S.Pi	Dinas perikanan dan kelautan, kab. Pelalawan, Komp. Bhakti Praja Pkl. Kerinci,	08126817656 0765 - 32793
4	Syahframbuan Syah, SP	Jl. Tega Lega, Gg. Lega Jaya No.31, Kota Dumai	0852 659 95333 / 0767 – 24236
5	Widya Rumondang S.	Jl. Siak No. 69	0812 688 8811
6	Hj. T. Devi E., SE	Jl. Pembangunan No.6, Simpang 3, pekanbaru 28284	08137102[illegible]
7	[illegible]rman, S.Pi	Jl. Ujung Batu Kota Lama No. 103, Rt. 03/Rw 03, Ngasu, Kab. Rokan Hulu,	08127688593
8	Hasan basri, S.Pi	Dusun II Kota Godang Rt. 02/Rw01, Kec. XII Koto kampar	081977692247 / 0813659448493

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
9	Puji Sutriani, ST	Kota Lama No.12, Rengat,Riau	0813 1781 21
10	Heri triyanto, SH	Toko Bangunan Simpang Kota lama,	0811750686 / 0765 – 440014
11	Andi Novel,S.Pi	Jl. Padat Karya, No. 02, kel. Bagan Besar Kota Dumai	0812 764 5309 / 0767 – 22327
12	Roby Reynaldi	Jl. Pahlawan No. 107, Teluk Kuantan	08126871701
13	Muhammad Mu-zamil,SE	Jl. Jend. Sudirman, Komplek CWC No.2, Rt.02, Rw.04, teluk pambang, Bengkalis	-
14	R. Mas'al, A.md	Desa Muara Tombang, Kec. Kawat Mudik	085265384730
15	Dedi Erisandi, S.Pi	Jl. Jend. Sudirman, No. 159, Beringin Taluk	0813 72294001
16	Zulherman, SE	Jl. Kembang , Gg. Cahaya, No.09, kab. Tembilahan	081365525475
17	David Akmal	Jl. Sukajadi No. 13, pekanbaru	081365552690
18	Syarifudin, S.Pi	Jl. Mesjid, Desa Sialang pasung	-
19	Chadi Saputra, S.Pi	Jl. Pembangunan No. 01, Lubuk dalam, kab. Siak	08127666570 / 0767–7079578
20	Evol Rodrigo, SE	Jl. Kembang harapan II, No. 16, Gobah, P. Baru	0812–680 3612/ 0761 – 46120
21	Ir. Irsyat Hasan	Jl. Bintara No. 16 A, pekanbaru	085265225875
22	David hendra N, S.Pi	Jl. A. Rahman Saleh, No. 23, B. Bangkinang	-
23	Ir. Haris	Dinas Kelautan dan perikanan Prop. Riau, Jl. Pattimura, No. 6,	082171284679
24	Agus Mulyana	siak	85375266611
25	Suardi	Siak	081268358721
26	Feriadi	Siak	08127632995
27	vivian	Pekanbaru	085271356615
28	Awaldi	Pekanbaru	085271042767
29	feny	Pekanbaru	082327404796
30	Kasmaran	Indragiri Hilir	082389346117
31	lili	Indragiri hulu	081378229737
32	Jayadi	Rokan hulu	082168928910
33	Subani	Rokan hulu	-
KEPRI			
1	Asnawi	Jl. Perum GMP II Blok B1 No.8 Rt 2 Rw 4 T 9 Sengkwang, Batu Ampar	-
2	Mulyono	Jl. Komp. Vila Mukakuning, Blok C1/21 RT 009 RW 010, Kel. Tembesi	081372788857
3	Adhar Karnain, S.Kel	Jl. Pulau Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga Rt 02 Rw 03, Natuna	081326659719
4	Wiwik Sudarsih	Jl. Teluk Air Rt 04 Rw 01 Karimun	085271107826
5	Ervina, S.Pi	Jl. Parit Baru Rt 01 Rw 01 No.3 Kundur	-
6	Muhamad Yusri, A.Md	Jl. Kp. Batu Ampar Rt 002 Rw 002 Moro	081270855606
7	Asrel, S.St.Pi	Jl. Simpang Ayam Rt 03 Rw 07 Meskom	085272033611
8	Bastian Siregar	Jl. Sultan Mahmud Rt 02 RW IV	081991271324
9	Zulkifli, S.Sos	Jl. Lembah Purnama No.18 Rt I Rw VII	085272018884
10	Raja Muhamar Qadafi	Jl. Ir. Juanda No.19 (Belakang Puskesmas)	081372867346
11	Zaili, SA	Jl. Antang Terempa Rt 002 Rw 001	08127644297
12	Wahidin	Jl. Lumba-lumba Rt 001 Rw 023	085272680668
13	Novariady, S.Pi	Jl. Pramuka No.13 Batu Hitam	-
14	Pangsan Sibungsu Harahap, S.St.Pi	Jl. Wisata Bahari Rt 04 Rw 01 Kanal Pantai Gunung Kijang	085216320011
15	Reandy Kurnata	Jl. Samudra Rt 01 Rw 01 Senayang	081364413145
16	Ir. Riduanto	Jl. KH. Ahmad Dahlan Tj. Riau Barat	0778-381001 /08566589770
17	Syamsu Rizal, S.Pi	Dusun III Mata air Tj. Balai karimun	08566817257
18	Ahmad Hidayat, S.Pi	Jl. Dipenogoro Km. 4 Tj. Balai karimun	08127089318
19	Hari Purwoko, S.Pi	Jl. Bahari No. 24 Tj. Pinang	085264024993
20	Ir. Ridvanto	Jl. Kampung Baru Rt 02 RW 03 Sekupangbatan	08566589770
21	Sarinah, SE	Mantang baru kec. Bintan timur	08180274772
22	Triyuli Purnamawati	Jl. Kampung Jati RT 01 Rw 01 Kijang Bintan	081372442229
23	Fahmi Yandra Basri	Perumahan Taman Harapan Indah Blok A1, No. 21 KM. 9 Tanjung Pinang	-
24	M. Fazidi, S.Pi	Jl. Anggrek Merah No. 6 M Tanjung Pinang,	08192621414
25	Ery Yusrialdy, SE	Jl. Sumatera, Tanjung Pinang	081364172456-085264807654
JAMBI			
1	M Juli, S.Pi, ME	Komplek Permata Kenali Blok K 6 Kenali Jambi	081927523088 081366651784
2	Besse Tanri Abeng, S.Ag	Desa Tangkit Baru Kec. Kumpeh Ulu, Kab Muaro Jambi	081366546995
3	Baso Patolai, S.Pt, MP	Jl. Syech Muh. Said Rt. 03 / 02 No. 74 Ds. Tangkit Baru, Kec. Kumpeh Ulu Kab. Jambi	08127403997
4	Syafrudin, SE	Jl. Bawal Rt. 09 / 00 Kampung Nelayan Ka. Tungkal	(0742) 323253 / 08127452500
5	M. Zainul Ikhsan, S.Pi	Desa Senaning, Kec. Pemayung, Kab Batang Hari	-
6	KMS, Hendra Surya Wahyu, SP	Kabupaten Muaro Jambi	(0741)60118 / 081539825580
7	Jefni Raharja, S.Pi	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Tanjung Jabung Barat	-
8	Raden Suhaimi, A.Md	Desa Senaning, Kec. Pemayung, Kab Batang Hari	-
9	Zulkifli	Desa Pematang Jering Rt 02 / 01	08127842779
10	Syahrulriadi, SE	Dinas Kelautan & Perikanan Nim-bun Putih Ma. Sabak, Kab Tanjung Jabung Timur	-
11	Dahniar, S.Ag	Desa Sinaning Kec. Pemayung	-
12	Rika Putri	Rt. 02 / 02 Kel. Bajubang Kec. Bajubang	-
13	Edi Mahendra	Koto Baru Rawang, Kerinci	-
14	Aldi Madmir	Jl. SMUN 1 Bangko	-
15	Muhammad Said	Jl. Syeh Muhammad Said Li Rt 08 / 04 Tangkit Baru, Kec. Kumpeh Ulu Kota, Kab Muaro Jambi	0811743775
16	Alamsyah, S.St.Pi	Dinas Pertanian, Peternakan & Perikanan Kab. Bungo	-
17	Deddy Suryadi	Lebai Hasan No. 09 Rt. IX / IV Kec. Bungo Barat	085216028177
18	Lastika Sari	Rt. 22 / 07 Kel. Legok SEB. Danau Sipin Jambi	08192576762
19	Hajrawati, SE	Desa Tangkit Baru Rt.04 / 02 Kec. Kumpeh Ulu, Kab Muaro Jambi	0813 6678 2496
20	Refdi Elyusmin, S.pi	Dinas Peternakan & Perikanan Kab. Tebo Km 12	-
21	Andy Afrizal, S.St.Pi	Jl. Jend. A. Talib Rt.18 No. 81 Kec. Telanaipura, Jambi	(0741) 668081/ 0812 7488 239
22	Hendri Gultom, A.Md	Jl. H.M. Kamil Rt.11 No.30 Kel. Wijaya Pura	(0741) 62016 / 081366389331
23	Muhammad Arfah, SH	Jl. Ki Hajar Dewantara Rt. 31 No. 04 Kel. Tungkal Ilir III Ka. Tungkal	-
24	Muhammad Halim, S.St.Pi	Dinas Peternakan & Perikanan Kab. Tebo Km 12	-
25	Muhammad Syakwan, A.Md	Desa Pulau Pandan, Kab. Sarolangun	(0745) 92193 081366074148
26	Petril Ismail, S.Pi	Jl. Yos Sudarso Rt.01 No.46 Renah Surian Desa Gedang Sungai Penuh	(0748) 323958 0813 6647551
27	Rojendra, A.Md	Desa Punai Merindu Kec. Danau Danau	(0741) 22968 081366024545

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
28	Sudirman, SE	Jl. Bawal Rt. 09 / 00 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir	(0742) 323253
29	Ir. Hj. Yen Hartati Musa	Jl. Kapten Pattimura Lr. Riska Tani No. 5 Rt 19 Kel. Simpang IV Sipin	08537890 6500
30	Ir. Ade Rusli Yulidar, M.Si	Jl. MT Haryono 9 Jambi	082181218545
31	Asri Arti Elfita		-
32	Hj. Nuraini		-
33	Nopi Alpian		-
34	Besse Aisyah		-
35	Purna Dewi		-
36	permadi		-
37	moebrok syam		-
38	Khaiurl Anwar		-
BABEL			
1	Andi Gustomi	Jl. Singayudha No. 8 E Sungailiat Bangka	085268866963
2	Eko Candra	Jl. Raya Gadung Toboali Basel RT 06 Toboali	085273447009/ 081918913743
3	Supardi, S.Pi	Jl. Sungai Gelam Rt 01 Rw 01 Bernas Simpang Katis	081918950811
4	Antonius Aribowo, A.MD	Jl. Kartini II Gg. Wisnu No.5 Kp. Jawa - Sungailiat	085268949974
5	Suarman, SP	Jl. Menara Air Muntok Bangka Barat	081377567225
6	Imam Nopriansah, S.Pi	Jl. Keranggan Tengah Rt 09 Rw 02 Kampung Baru Kel. Tanjung Muntok	081271777233 / 081532666545
7	Roziandi, S.Pi	Jl. Kampung Melayu No. 395 Rt 06 Rw 02 Natunu Indah Gerunggang	085664820624
8	Rizma Olvina, S.Pi	Jl. Kampung Melayu No. 395 Rt 06 Rw 02 Natunu Indah	085664377602
9	Irda Rencana	Jl. Kartini No.26 Rt 37 Rw 15 Air Pancur Tanjung Pandan	081929145272 /085669575359
10	Kris Purwanto	Jl. Veteran Rt 01 Rw 02 Simpang Rimba	085310342527
11	Ismail	Jl. Jend. Sudirman No.373 Manggar	085299398650
12	Windo Sastra, S.Pi	Jl. Bambang Utoyo Rt 14 Rw 05 Paal Satu Tanjung Pandan	085697807909
13	Radianta Alfiditri	Jl. Pelabuhan Saman Rt 01 Rw 01 Dusun Saman Manggar	081977780075
14	Junaidi	Jl. Solihin GP Rt 07 Rw 02 Kel. Melintang Rangkus	085268342881
15	Amirul Muslimin, S.St.Pi	Jl. Raya Pangkal Pinang Koba Desa Kurau Koba	081914236014 / 081247261654
16	Eti Rosanti	Jl. Dipati Amir RT 12 RW 3 Air Hitam Bukit Intan	081373920101
17	Marlina Safitri, SE	Jl. Jend. Sudirman No.10 Rt 03 Rw 03 Selindung Baru Pangkal Balam	0717438790 0813685271775
18	Hasmawty Fitri, SE	Jl. Gg. Yos Sudarso II Gabek II Pangkal Pinang No.66 RT 001 Rw 01Pangkal Balam	081367708312
19	Muhammad Amir	Gang Merica RT.08/03 No.56 Kel.Pintu Air Kec.Rangkui Pangkal Pinang	085268303568
20	Muhammad Noor	Desa Baru Tengah Rt.10/Rw.05 desa Baru Manggar Kab. Belitung Timur	081933397377
21	Asnawi	Jln. Jenderal Sudirman No.400 Tanjung Pandan	081532184000
22	Taufik, Amd	Ds. Daya Baru Pal IV Rt.008/003 Kel.Air Belo Kec. Mentok Kab. Bangka Barat	081373073071
23	Andy Irawan, SE	Jl. Ahmad Yani Sungailiat	081377895939
24	Bendy Delpany, SP	RSS. Block III.B No.5 Sungailiat	081929140357
25	Atika Anggraini, S.Pi	Jl. Raya Berok Koba Kab. Bangka Tengah	081532773677
26	Vinia Anggraini, S.Si	Jl. Bay Pass Koba Kab.Bangka Tengah	081273450959

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
27	Restu Puji Astari, SE	Jl. Semabung nama No.196 Pangkal. Pinang	-
28	Nur Usni, SE	Jl. Ekor kuning No. 4 RT 2 RW 3 Air salemba Pangkalan. Balam, Pangkal. Pinang	081372252536, 0717-436783,
29	Ferawati, SS	Komp. Timah rangkui J. 15 Pangkal. Pinang	-
30	Sukma afriyani, SE	kel. Ampui RT. 1RW. 3 No. 116 Pangkal. Balam	0771- 431493/ 085664649069
31	Yan Eskarti, SE	Jl. Kejaksaan no. 30 RT.1 RW. 1 Pangkal. Pinang	0771-439147, 7001523, 081367775689
32	Fatiah, A.Md	Jl. Raya sungailiat no. 2 selindung lama , Pangkal. Baru	081373288121
33	Maryadi, ST	Jl. Nelayan 2, no. 50, sungailiat	
34	Mas'ud M Saad	Jl. Ahmad Yani, Gg, Sahabat No. 21	071-7424203, 08127397403
35	Afrizal. Z, Amd	Jl. Bakti bawal no. 227 rt. 1 rw. 7 kel. Ambui	0717-43921 081373801600
36	Hundani, SE	Dusun II petaling mendo barat	085267133571
37	Dewi Hastuti, SE	Desa petaling mendo barat,	085267133571
38	Erwandi Umar	Jl. Martadinata, Gg. Nusantara, Sungai Liat, Bangka,	085268228271
39	Drs. Hendra Yana	Jl. Imam Bonjol No 29 Matak, Bangka Barat	(0716)-21186, 08127859106
40	H. M. Andi Nurdin	JL. RE. Martadinata, No. 36 Sungai Liat , Bangka.	(0717) 7010176- 08127172346
41	Bima Wahyudi, S.Pi	Jl. Sriwijaya 99 Wijaya Kusuma, Pangkal Pinang	-
42	Nofizar Dwi Purnama, S.Pd,MM	Jl. Srimenanti IV, Sungai Liat, bangka ,	0811 7171 356
43	Hari Koestiawan, S.Pi	Jl. Kampung Melayu Rt/Rw 04/01 No.385 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	08127173707
44	Isdora Salman Parisi, S.Pi	Jl. Mesjid Jamik Pangkalpinang	081901535055
45	Ira Puspita Sari	Jl. Depati Hamzah Gang Merah Delima 7 Rt/Rw 08/02 Kel. Air Itam, Kec. Bukit Itam	058267631103
46	M. Azhar, S.St.Pi	Jl. Soekarno Hatta II. GG.Kelapa Rt.02 Kel. Simpang Perlang Koba, Kab. Bangka Tengah	081273730988
47	Baiq Lisyi Agustina KD, S.kel	Bangka Tengah	085239919425
48	Jemi Ferizal, S.Pi	Jalan Teladan AMD Kec Toboali Kab. Bangka Selatan	081995580085
49	Samsu, A.Md	Bangka Selatan	0819 9574 0645
50	Rommy Setyawan, S.St.Pi	Bangka Barat	0856 6489 6819
51	Fitriyah, S.Pi	Bangka Barat	085267190139
52	Muhammad Dafrul, S.Pi	Jl. Sijuk, Desa Air Merbau No.26 Rt.33/Rw.10 Tanjung Pandan, Belitung	0819 2950 4628
53	Linda Aryani, S.Pi	Jl. Tebat Permai, Air Saga Rt.13 / Rw.06 Tanjungpandan, Belitung	0856 7996 373
54	Asmawan Anggreka, S.Pi	Dsn. Taruna Mulya, desa Lalang, Kec. Manggar, Kab.Belitung Timur	0859 3700 8059
55	Siti Karmila, S.Pi	Dsn. Cemara I Rt 05/03 No.33 Desa. Kurnia Jaya Manggar, Belitung Timur	0813 8141 6836
56	Andi Irawan	Bangka	-
BENGKULU			
1	Suwarno, S.PI	Jln. Merapi 7B RT.29/02 No.45 Kel.Panorama Kota Bengkulu	-
2	Tarzan Sani,S.STPi	Jln.Puri 6B No.23 Puri Lestari Kota Bengkulu	-
3	Siti Absoh, S.Pi	Jln. Irian Kota Bkl	-
4	Dadang Rahmad,SP	Kota Curup	-
5	Syahatman, SP	Kota Kepahyang	-
6	Arna Hollandari, SE	Jl. Enggano Kec. Teluk Segara	081367560851

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
7	Bambang K., SE	Jl. Sulawesi No. 08 Rt. 10 \Pengantungan Kodya Bengkulu	(0736) 20126
8	Cici Dewi Sari M., SE	Jl. Enggano Rt. 05 No. 111 B, Kel. Pasar Bengkulu, Bengkulu 38119	(0736) 28198
9	Dally Eka Putri, SE	Jl. Cempaka X No. 523 Rt. X, Kel. Kb. Beler Bengkulu	(0736) 2564/ 081539228493
10	Devi Yanto, SE	Jl. Sukarno Hatta III Rt. 04 No. 174 Bengkulu 38222	(0736) 20582
11	Eka Maryanti, SE	Rawa Makmur Rt. XV No. 49 Bengkulu	-
12	Endang Mayasari, SE	Jl. Sumatera V Rt. IV / 04 No. 30 Kel. Sukamerindu - Bengkulu	(0736) 346754
13	Esi Seftiana, SE	Jl. Kebun Veteran No. 14 Rt. 07 Nusa Indah Bengkulu	(0736) 346152
14	Evie Afrianita, SE	Jl. Musi No. 54 Rt. 08 Padang Harapan Bengkulu	(0736) 23219
15	Mardhatillah, S.Pd	Jl. Sumatera III No. 32 Rt. II Sukamerindu – Bengkulu	0816390112
16	Marsianty Utami, S.Pi	Jl. Fatmawati No. 46 Rt. X / Rw. III Bengkulu	08157648931
17	Mashuri, S.Sos	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Rt. I Kel. Teratai Bengkulu	(0736) 24920
18	May Susanti, SE	Jl. Jawa No. 05 Rt. XI sukamerindu Bengkulu	(0736) 24700
19	M. Taufik, S.Sos	Rt. 04 / Rw. 08 Kel. Kandang Bengkulu.	(0736) 52070
20	Rahmawati, SE	Jl. Lestari I Rt 49 No. 12A Kel. Desa Kandang.	081367687493
21	Rofi Ely Masita, SE	Jl. Hibrida 15 No. 10 Rt. 14 / 04 Kel. Sidomulyo Bengkulu	08157977440
22	Surya Mawardi, SE	Jl. Kalimantan II No. 18 Rt. 08 Kel. Kampung Kelawi Kec. Teluk Segara	(0736) 28218
23	Syurya Budhi, SE	Jl. Fatmawati No. 43 / X Kel. Penurunan, Bengkulu 38223	(0736) 23322
24	Yeri Firdaus, SE	Jl. Puri Lestari Blok A2 No. 09 Rt. 48 / Rw. 01 Kel. Kandang Bengkulu	-
25	Sri Hartati, S.Pi	Jl. Seruni 1 No. 37 Rt. 08 Kel. Nusa Indah Bengkulu	-
26	SYAIFUL ANWAR,SST	KOTA BENGKULU	085268542999
27	MEDY SUPRIADI,S.Pi	KOTA BENGKULU	085267823637
28	ADI SUSANTO,SE	KOTA BENGKULU	085273040212
29	DIMAS FAJAR BAYU,SSTPi	KOTA BENGKULU	081384947307
30	FAHROZI A.,SSTPi	KOTA BENGKULU	087770123041
31	VENNY YULIASTRI,S Pi	KOTA BENGKULU	081368294545
32	NURUL K., S. Pi	KOTA BENGKULU	085267455625
33	SITI ABSOH, S.Pi	KOTA BENGKULU	085273180909
34	ENDAH, S.Pi	KOTA BENGKULU	085268203334
35	PURNAMA, SSTPi	KAB. BENTENG	081289149121
36	MULYAN S., S. Pi	KAB. BENTENG	081278687548
37	TUMI IRAWANDI,	MOKO MOKO	085267194262
38	A. HERMANTO, A.Pi	BKL. UTARA	085281158888
39	ARIF YOGA A, SSTPi	BKL. UTARA	087883137848
40	UDIN SITUMEANG, S. Pi	KAUR	082178278424
41	MUH. SURO, SP	SELUMA	085307360296
42	YESTI HINARDI, A.Md	SELUMA	085267609288
43	SUHATMAN, SPKP	KEPAHYANG	081273582769
44	NENGSI RULISMI, SP	KEPAHYANG	081271337108
45	ARISTA MUSTAJI, S.Pi	KAB. LEBONG	081328682419
46	DWIMAWAN GONDANG,S.Pi	KAB LEBONG	085357779490
47	IR BATARA	MANNA	081278454094
48	SYAHRUL R, S.Pi	MANNA	081368293661
49	DADANG RAHMAD, S.Pi	REJANG LEBONG	085367333054

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
SUMSEL			
1	Heryadi, S.St.Pi	Kota Palembang	-
2	Roni Abriyansyah, S.St.Pi	Kota Palembang	-
3	Dwi Yolanda, S.Pi	Kota Palembang	-
4	Eirine Rupalesta, ST, M.Si	Kota Palembang	-
5	Abdul Kadir, A.Md	Kab. Musi Rawas	-
6	Ir. H. Mahnizar	Kab Musi Banyuasin	-
7	Hosidin	Kab Musi Banyuasin	081367481533
8	Hasanatul Marjiyah, S.Pi	Kab Ogan Ilir	-
9	Sunario, SE	Kab Muara Enim	-
10	Zwesty Apriyanti	Kab Muara Enim	-
11	Fauzan Ansori, S.Pi	Kab Oki	-
12	S. Parman, SE	Kota Lubuk Linggau	-
13	Tarmizi, A.Md	Kab Oku	-
14	Abdul Kadir Lubis	Kab Musi Rawas	-
15	Minan Riyanto	Kab Oku Timur	-
16	Soejiman, S.Pi	Kab Empat Lawang	-
17	Rusda Ulfa, A.Md	Kab Oku Selatan	-
18	Sanderson, S.T.PP	Kab Lahat	08197877677 081532776136
19	M. Alim H. M.Si	Kota Prabumulih	-
20	Ferry Kurniawan	Kab Banyuasin	-
21	Vieka Delan	Kota Pagaralam	-
22	Letizia Mursri, S.Pi	Kota Lubuk Linggau	(0733) 324862
23	Rini Arika, S.Pi	Kota Lubuk Linggau	(0733) 324949
24	Aspuda Ferdiansie, SP	Kota Lubuk Linggau	(0733) 324024 / 08127349567
25	Rudianto, SP	Kota Pagar Alam	085267443740
26	Sisca Wiendarty, SP	Kota Palembang	(0711)822060 081369024038
27	Edi Iskandar, S.Pi	Prabumulih	081532491346
28	Zulaika, A.Md	Kab. Musi Banyuasin	(0714) 322521
29	Eti Rosanti, S.kel	Kota Palembang	(0711) 415088
30	Munawar Cholil, A.Md	Kota Palembang	(0711) 417063 /085267519008
31	Joni Haryanto, SP	Kab. OKU	(0735) 320070-320178
32	Aria Tabing, SP	Kab. OKU timur	(0735) 450154
33	Al Amin, S.Pi	Kab. Okan Hilir	(0712) 321279
34	Sheila, S.Pi	Kab. Ogan Ilir	(0711) 581052
35	Muthmainnah, S.Si	Kota Palembang	(0711) 441551
36	Rustono, S.Pi	Kota Palembang	081532929282
37	M. Yusuf, S.St.Pi	Kab. Banyuasin	(0711) 897039 /08127857537
38	Deny Eka Chandra		085283442781
39	Roni Apriansyah		081319588358
40	Devi Andriani		081271411131
41	Zwesty Aprianti		08136718995
42	Yudiantari		081272537999
43	Lidia Fitriani		085273293769
44	Rusydi		081373003821
45	Fauzan		-
LAMPUNG			
1	Bambang Kusnadi	Bandar Lampung	-
2	Hendri Gunawan	Lampung Selatan	-
3	Joko Asmoro	Tanggamus	-

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
4	Sudaryanto	Bandar Lampung	-
5	Imelda Soraya	Bandar Lampung	-
6	Dwi Setiawati	Bandar Lampung	-
7	Ignatius	Lampung Barat	-
8	Oktarina	Lampung Selatan	-
9	Herleni Yanti	Bandar Lampung	-
10	Devi Evrica Afrianti	Bandar Lampung	-
11	Suseto	Tanggamus	-
12	Yunani	Lampung Utara	-
13	Irwandi	Bandar Lampung	-
14	Bambang Susilo	Lampung Selatan	-
15	Susanti	Lampung Selatan	-
16	Indri Susilowati	Tulang Bawang	-
17	Dasuki	Bandar Lampung	-
18	Hardy Romansyah	Tanggamus	-
19	Mansta F	Lampung Utara	-
20	Arif Gunawan	Lampung Timur	-
21	Roganda C	Lampung Utara	-
22	Adi Irawan	Bandar Lampung	-
23	Dewi Apriyanti	Tulang Bawang	-
24	Nur Aziz	Way Kanan	-
25	Doni Aprika	Lampung Barat	-
26	Jamil	Lampung Barat	-
27	M Arif Setiawan	Metro	-
28	Rian Jaya Eka	Bandar Lampung	-
29	Yasir Arafat	Lampung Selatan	-
30	Wiwi Ikastian, SE	Kab. Way Kanan	-
BANTEN			
1	M.S Fatoni, S.St.Pi	Kab. Tangerang	085715220919
2	Satiri, A.Md	Kab. Serang	085888820003
3	Heny Safari, S.St.Pi	Jl. Raya Labuan Km. 8 Cikedal	(0253) 805017, 081316858710
4	M. Hafidz Furqon, SE	Jl. Balong Rancalentah No. 30 L	(0252) 207387, 08138615950
5	Trisno Sunandar	Komp. Taman Asri Blok J8 No. 10B Kreo Ciledug – Tangerang	(021) 7308366, 08128893818
6	R. Bagus Erry S., A.Pi	Ciceri Serang	081310599777
7	Dedi Rohadi, SE	Kp. Kadukancas Rt 01/01 Banjasari Anyar – Serang	085217472763
8	Wawan Hermawan, SE	Komp. Depag Blok B3 No. 4 Rangkasbitung	081380114076
9	Muhammad Umar Arif	Kota Sari I Rt 03/01 Grogol – Cilegon	(0254) 382690, 085216699996
10	Ali Imron, S.Ag	Komp. YPI Daarul Hikmah Jl. Raya Sentul Jingjing Km. 15 Bolang Ragas Masigit Carenang	(0254) 7011041/ 081310355763
11	Yoyo Aprilliyanto, SP	Kp. Naggela Rt 02/03 Ds. Sukasari Kec. Cipanas	081318769146
12	Sakka, SH	Kp. Bugis III 02/07 Karangantu – Kasemen	085218087283
13	Mulyadi, S.St.Pi	Jl. Raya Pandeglang, Gg. Cangkudu Rt 02/05, Ds. Sukamanah Kec. Baros	08568420726/ 08567123226
14	Imron Maulana	Komp. Duta Bintaro Tampak Siring D 14/01 Rt 06/08 Kunciran Pinang – Tangerang	(021) 53123420 / 081315134272
15	Defina, SE	Jl. Iko Djatmiko No. 12 Rt 1/8 Rangkasbitung – Banten	(0252) 201667 / 081573745465
16	Lia Nurmalia, S.Pi	Cihideung 115 Rt 21/08 Utama Cijeungjing Ciamis	(0265) 773096, 085691508430
17	Neni Marsul, S.Pi	Jl. Agnatis Raya No. 142, Rt 04/013 Blok 29 Depok	778333049, 081318946746
18	Lelono Prasetyo	Jl. Ciliwung IV No. 143 Karawaci Tangerang	(021) 5586691, 70487088
19	M. Syam Umar Bara	Jl. Gajah Mungkur IV No. 13 Karawaci – Tangerang	(021) 5916122, 08155936388
20	m. ruslani		081911195007
21	hasan musana		087773730003
22	margaret ratih		081997406639
23	TB Ismu		087772658000
24	heru purnama		087773796414
25	hendra		087773900490
26	yaya mulyana		081917307905
27	nana		087774879717
28	sulis		081911101412
29	M. riski		087773666081
JAKARTA			
1	Syamsoeddin AK	Jl. Kalibaru Barat VIII No. 26, RT 011/05, Kec. Kalibaru, kec. Cilincing, Jakarta Utara,	4416047, 081585015419
2	Sa'ari	Jl. Sungai Tiram Rt.003/09, No. 01, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara,	44852324
3	Tedy Surahman	Jl. Aslih Rt.00/01, No. 71, Cipedak-jagakarsa, jakarta Selatan	78888422
4	Lilis Purbayanti, SH	Jl. Pisangan Raya No. 23, RT 03/04, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat	7407322 081511180434, 0888145 3046
5	Sukardi	Jl. Kalibaru Barat IX, No. 11, RT 005/05, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara	44834319, 081381582818
6	Gunawan	Jl. Jankes, Munjul Rt.01/01, No. 40, Cipayung, Jakarta Timur	8445621, 0856 898 5811
7	Yayat Suyana, SE	Jl. Kobangdiklat II, No. 28A, Rt.001/05. Cijantung III, kel. Baru, kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur	8411747, 081584168355
8	Ir. Sri Astuti	Jl. Bojong Indah I, Blok D4/No. 3-4 Taman Narogong Indah, Bekasi,	82434202
9	Mike Silvia Yudianti	Jl. Taruna Jaya I, No. 23,Rt.007/02, Kel. Serdang, kel. Kemayoran, Jakarta, Jakarta Pusat, 10650	4252820, 081284948780
10	Chairil Anwar	Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, jakarta	-
11	Diah Kurniasih, S.Pt	Jl. Rusun Apron II D, No. 104,Rt.02/010, jakpus, 10630	085691041828
12	Hasyim Adnan	Pulau Tidung, kec. Kepulauan Seribu Selatan, kab. Adin. Kepulauan Seribu	68503195
13	Nurhasanah	Jl. Kalibaru Timur IV E, Rt. 10/01, No. 37, kel. Kalibaru, kec. Cilincing, Jakarta Utara	4417661
14	Ir. Yuli Absari	Jl. Katelia Blok A5 22, No. 31, Kranggan Permai – Bekasi	8440769
15	Ahmad Sofyan	Pulau Tidung, kec. Kepulauan Seribu Selatan, kab. Adin. Kepulauan Seribu	68576440 / 0856 896 2198
16	Bahtari	Pulau Tidung, kec. Kepulauan Seribu Selatan, kab. Adin. Kepulauan Seribu	68593195
17	Teddy Bahtiar	Pulau Tidung, Kepulauan Seribu	081585995190 / 70611401
18	Dinah	Jl. B. Wulung Rt.003/05, No. 36, Bambu Apus-Cipayung, Jakarta Timur	8444524
19	Moh. Yasir Arafat	Jl. Madrasah, Rt.01/04, No. 09, Pulau Tidung, Kab. Adm Kepulaaun Seribu, 14520,	70612403
20	Siti Amalia	Jl. Kalibaru Timur VIII Rt. 001/01, No. 01, kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara14410	4418065
21	Juremi	Jl. Sungai Tiram Rt.002/09 No. 18, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara,	44852577
22	Usman	Jl. Manunggal VII, Gang II, Rt.04/11, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara	0813 1757 5715

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
23	Bachtiar Rivai	Jl. Raya Bogor, No. 40, Rt.04/02, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jak-Tim	08128534394, 87790070
24	sayunra		08138046480
25	bambang suharto		081314909087
26	asmarajaya		0812962315
27	emil arifin		0811872369
28	teguh		08175468977
JAWA BARAT			
1	Arie Wibowo, S.Pi	Jl. Tambak Raya Rt 01/ Rw 05 Kel. Paoman Kec. Indramayu	081324328411
2	Liliek Fauziah, A.Md	Cirebon	081324016258 085797570615
3	Seni Susanto	Kota. Bogor	081315275964
4	Tri Rizki Legina	Kab. Bandung	02291915321 08561620027
5	Denny Rianto, S.Pi, M.Si	Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Rt 04/RwII Lebak Kardin Kuningan	-
6	Eric Ronaldo	kuningan	-
7	Dora Naomi, A.Pi	Purwakarta	-
8	Budri Kustriawan, SE	Mariuk Rt. 02/01 Ds. Cidadap, Sukabumi	-
9	Lekman Sobur	Sukabumi	-
10	Al Kautsar Niaji, S.Pd	Sukabumi	-
11	Resti A Fatmawati	Sukabumi	-
12	Surya Bagja Gandana, S.Pi	Sukabumi	-
13	Sunarto, S.Pi	Blok Teluk Naya Rt. 07 Rw. 04 Kel. Pangkalan Indramayu	-
14	Eva Rafela Novianti	Tasikmalaya	-
15	Arsim	Perum Sukarindik Rt. 06/07 Blok F. 40, Tasikmalaya	-
16	Sri Purwati (yulianti yusuf)	Gg. Pemandangan No. 131 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Mekarsari Banjar	08164669150
17	Yayan Taryana, SE	Cianjur	-
18	Yan Suryana	Cianjur	-
19	Agus Muhammad Y	Cianjur	-
20	Hendra Gunawan, S.Pi	Jl. Pejuang No. 33 Rt 02/ Rw 04 Cigembor Ciamis	-
21	Ummu Kulsum, S.Ag	Bandung Barat	-
22	Oce Junjunan	Subang	-
23	Dadang Darmin	Subang	-
24	Muhadi	Sumedang	-
25	Tatang Tisna Sanjaya	Kab. Bogor	-
26	Ir. Hani Hasanah, MM	Kab. Bogor	-
27	Desi Sartika, SA, S.Pi	Blok 1 No. 41 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Cikoneng, Sukahaji Majalengka	0233 283010
28	Suwandi Juhud, SE	Kab. Majalengka	-
29	Dadan Ramdani Nugraha,SP	Blok Pon Rt 12/ Rw 04 Ds./Kec. Sindangwangi Majalengka	-
30	Lilik Fauziah	Kab. Cirebon	-
31	Sunaryo Saripudin	Kab. Bekasi	-
32	Euis Sari Syamulyani Sudirman	kota Cimahi	-
33	Lely Siti Awalyah, S.hut	Kota Bandung	-
34	Ir. Maya Dewi	Kota Bogor	-
35	Linlin Sinliani	Jl.Raya Sulukuning Rt. II / Rw. 07 Desa Mekargalih-Jatiluhur, Kab. Purwakarta	-
36	Gustiawan, SE	Jl. Anggur Raya No.21 Blok IV ,Rt. 77 / 21 Subang	-
37	Drs. Uup Supena	Cirebon	-
38	Adi Hidayat, A.Md	Jl. Samoja No. 115 Rt. 04 / 1, Kadugede, Kuningan	-

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
39	Adriyani Saputra, S.Pi	Ds. Wanasigra No. 45, Cikoneng - Ciamis	-
40	Didit Rahardian, S.Pi	Ds. Sukamahi Kec. Sukaratu – Tasikmalaya,Tasikmalaya	-
41	Reza Mahendra, S.Pi	Perumahan Reni Jaya M6 / 2 Pamulang	(021)7433829 / 081310038805
42	Intan RahimaS. S,St.Pi	Kp. Girang Rt. 001 / 003 Desa Cidamar Kec. Cidaun, Cianjur	-
43	Johanudin, A.Md	Jl. Letnan Wargana No. 85 E Indramayu	-
44	Yenti R., S.Pi	Bogor	-
45	Fahmi Arief N, S.Pi	Jl. Dalem Lumaju No. 3 Majaselatan, Majalengka	-
46	Nur Kholik	Jl. Mahoni No. 62 Laladon Ciomas	0251 – 421116 / 0813 11072030
47	Syaiful Bakhri S, A.Md	Jl. Kalidam Utara No. 80 Rt. 02/08 Cimahi.	6644424
48	Eka Sutriana, SP	Dsn. Citali Rt. 01/07 Ds. Ciptasari Kec. Pamulihan, Sumedang	-
49	Ida Nurlaela	Ds. Budiharja Kec. Cililin Kab. bandung	-
50	Andi Nugraha	Jl. Buanasari VI No. 2 Buah Batu, Kota Bandung	-
51	Ade Nugroho R, SP	No. 65 Rt. 04/04 Ds. Mancagahar Pameungpeuk, Garut	-
52	Eka Jatnika Suningrat, SP	Jl. Sersan Idris No. 46 B, Bekasi 17141	-
53	husen	Jl. Siliwangi Gang Lodaya I No. 2B Tasikmalaya	-
54	Ucup Suryani, A.Md.Pi	Jl. Sisingamangaraja No. 27 Cirebon	-
55	Irma Dwi A. A.Md.Pi	Kp. Cijambe Rt 04/ Rw 02 Ds. Cijambe Cikelet Garut	-
56	Didin Saepudin	Jl. Pelabuhan Jayanti Cidaun Cianjur	-
57	Astri Aprilani	Kp. Pamayang Sari Rt 08/ Rw 01 Ds. Cikawungading, Kec.Cipatujah, Kab.Tasikmalaya	-
58	Surman Romansyah	Kp. Karang Jaya Rt 01/ Rw 04 Kec. Blanakan Subang	-
59	Elis Halimah, A.Md.Pi	Pananjung Rt 12/ Rw 10 Ds. Mulyasari Kec. Pataruman Banjar	-
60	Fajar Taufik	Jl. Sirna Sari I No. 4 Sindang Barang Bogor	-
61	Dede Mulyana	Cisalak Rt 02/ Rw 022 Ds. Kertajaya Padalarang Kab. Bandung	-
62	Dwi Putri Wigiani	Jl. Sakura No. 11 Sindang Barang – Loji Bogor	-
63	Retno Dewanti	Komp. Griya Cempaka Arum Blok D5 No. 22 Bandung	-
64	Nurhayati	Jl. Raya Bandengan No. 270 Kec. Mundu Kab. Cirebon	-
65	Enung Salehati, S.Pi	Perum Griya Abdi Negara A – 42 Sukatani Purwakarta	-
66	Uus Saeful zaman, S.Pi	Jl. Panday Rt 01/ Rw 02 Ds. Kutamandiri Tanjungsari Sumedang	-
67	Lina Sutiani S., S.Pt	Jl. Pluto Utara III No. 21 Mar-gahayu Raya Rt. 02 Rw. 10 Kel. Margasari	7560207 08122435862
68	Wanty Rahayu, A.Md	Jl. Bara IV No. 118 Wisma Kiliman-jaro Kab. Bogor	081318136977
69	dadan Armadani	Blok Pon Rt 12/ Rw 04 Ds./Kec. Sindangwangi Majalengka	-
70	pipih P.R Soemadinata	-	-
71	Yayan Sopyan, A.Md	Ranca Seel Rt. 003 Rw. 002 Kel. Majasari Kec. Cibogo Kab. Subang	0260-417724 081320470048
72	Neni Gatmini, SP	Jl. Rumah Sakit No. 39 A Kab. Ciamis	0265-771280
73	Yayan Bastian G. S.Kom	Jl. Karanganyar No. 16 Rt. 03 Rw. 27 Kel. Nagasari, Kab.Karawang	

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
74	Fani Agustina, A.Md	Jl. Ir. H. Juanda No. 104 Rt. 01 Rw. 18 Kab. Ciamis	
75	Sumitro, A.Md	Ds. Mundupesisir No. 30 Rt. 02 Rw. 06 Ds. Mundupesisir, Kab. Cirebon	
76	Yana Taryana, SE	Kab. Tasikmalaya	08122353887
77	Firman G Abdurrahman, A.Md	Kab. Sukabumi	0231-510882
78	Dedi Herianto, A.Md. Kom	Jl. Pahlawan No. 22 Rt. 02 Rw. 05 Ds. Kiangroke Kab. Bandung	0265-328945
79	Edi Kusnadi, S.Sos	Batukarut Rt. 02 Rw. 05 Ds. Cibeureum Wetan Cimalaka – Sumedang	0266-213501, 08156327716
80	Herwan Hermawandi,SE	Kp. Cibangban 01/01 Ds. Pasir Baru Kc. Cisolok, Pelabuhan Ratu - Sukabumi	5943068, 081572050679
81	Rismanto	Jalan Cipatuguran RT.02/RW.21 Kec.Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat	0261-212589 081809043839
82	Agus Nugraha Akbar,S. St.Pi	Jalan Baranangsiang No. 17 RT.01 RW.13 Kec. Bogor Timur, Bogor Jawa Barat	081322899116
83	Ferrida Wdyastuty, S.Pi MM	Kebonsari Elveka I/2 Injoko RT.04 RW.03 Kec. Jambangan, Surabaya Jawa Timur	085721086108
84	Ir. Hanura Nursyamsi, M.Si	Jalan Raya Cimaja KM. 11 Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Jawa Barat	085624716856
85	Al Kausar N, Spd.i	Jl. Pasir Badak KM.1 RT.03 RW.06 Tenjo Laut Sukamaju Kec. Cikakak Kab. Sukabumi	08170809155
86	Dra. Sri Widaningsih M.Si	Perum Bukit Randu Asri Blok E.20 Kec. Cibadak, Sukabumi Jawa Barat	-
87	Evi Nuravianti, SE	Kp. Cibangban 01/01 Kec. Cisolok, Sukabumi Jaw Barat	085722695562
88	Uus Saepudin	Kp. Ciwaru RT.02 RW.12 Banten Cibangban Ds. Cikahuripan Kec. Cisolok, sukabumi	085659502430
89	Budi Mohamad Ihsan	Jl. Banten RT.01 RW.01 Kec. Cisolok Sukabumi Jawa Barat	081316900853/ 081573711251
90	Ir. Ayom Budi Prbowo, M.Si	Perum Cigunung Indah C3/9 RT.09 RW.04 Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Jawa Barat	085723078066
91	Andi, A.Md	Jl. Cipatuguran RT.02 RW.21 Pelabuhan Ratu, Sukabumi Jawa Barat	081912040170
92	Suhebot Ginting	Jl. Gandam RT.02 RW.08 Kec. Cibeurem Kab. Sukabumi Jawa Barat	0266 216367
93	Deri Wage Harjo	Kp. Babakan Peundeuy, Desa Citarik RT 004 RW 003 Kec. Palabuhan Ratu, Kab. Sukabumi	081932363697
94	Sobur Lekman	Jl. Mariuk RT 02 RW 01, Kec.Simpenan, Kab. Sukabumi Prop. Jawa Barat	08156304231
95	Asep Padlulloh	Kp. Cibangban, RT01 RW 01, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat	085624551118
96	Euis Diana	Kp. Rinyocok RT 01 RW 05 Cihurang, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi	085624874616
97	Elly Rojali	Kp. Bakti, RT 052 RW 01 Desa Cimahi, Kec. Cicantayan, Kab. Sukabumi	
98	NAM Supriatna	Jl. Selawi-Cigayung Desa Cisaaat, RT 02 RW 01 Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi	081563551966
99	Resti A Famawati	Kp. Mariuk-Cidadap Sukabumi RT 03 RW 01 Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi	0266-210426/ 085624258223
100	Uup Supena	Jl. Raya Mundu Pesisir Gn. Glindingan II Rw.06 / 02	
101	Venti Rokhmulyenti, S.Pi	Jl. Jambu Raya No.1 Blok 7 Bantar Kemang Bogor	081563271030
102	Agus Samsul Nahar	Jl. Karang Tengah No. 699 Rt. 04 / 04 Cibadak – Sukabumi	

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
103	Andriani Saputra, S.Pi	Desa Wanasigra No. 45 Rt. 04 / 02 Cikoneng – Ciamis	0265774695 08154664274
104	Ir. M. Husen	Komp. Griya Cempaka Arum Blok D No. Bandung	
105	Hendrawan, S. Sos	Kp. Cipaku Ujung genteng, Rt.08/06, Desa Gunung Batu, Kec. Ciracap	0856 2439 8288
106	Agung Takbir Suryono	Gunung Jaya rt.07-02, No. 474, Cisaat-Sukabumi	0266 216 823
107	Rizky Firmansyah	Jl. Palabuan II, KM 5, kab. Sukabumi	0266-230371 / 0812 9560721
108	Setiawan, S.Pi	Kp. Cihanja, Desa Pasiripis, Kec. Surade	081572399950
109	Lilis, S.Sos	Jl. KH. A. Sanusi, Gang Poka, No. 67 Rt. 50/21, Desa Sukaresmi-Sukabumi, 43151	0266210380 / 08134203284
110	Ismanto	Kp. Cipatra, Desa Sukamaju, Kec. Cikakak, Kab. Sukabumi	081563566594
111	M. Muzayin Arifin Darussalam	Jl. Taman Pendidikan No. 26, Kp. Bojong Mesjid, Rt. 01/04, Cibadak	08154631735
112	Asep Ramdan	Kp. Cibeber Girang, Desa Tenjoayu, Cicurug-kab. Sukabumi	0266-731175
113	Dani Desa Permana	Jl. Raya Sukaraja, No. 272, Rt.03/10, Kec. Sukaraja	0266-228073 / 0813 1876 9819
114	Reni Kurniyasari	Jl. Salabintana KM.3.5 Rt.11/03, No. 411, Desa Warnasari, Kec. Sukabumi	-
115	Nanus	Kabandungan Rt.02/10, Panungseah-Sukabumi	0812 8167 870
116	Yudi Agustriadi	Kp. Cicurug, Desa Cikembang, Kec. Caringin , kab. Sukabumi	08565934343
117	Asep Syamsul Munawar	Kp. Cisitu rt.14/05, Desa Sukamulya, Kec. Caringin	0266-7078729/ 0815 6336 8448
118	Mustafa Azis, ST	Jl. Raya Bagbagan Km. 3, Rt.01/09, Desa Citarik, kec. Pelabuhan ratu	0815 8476 2599
119	Sri Mulyani	Jl. Surya kencana Rt.13/02, No. 406, nagrak, Cisaat	0266-219711 / 0856 5966 8204
120	Dicky Risandi	Jl. Embah Upin No. 15, rt. 03/03, Desa . Cisolok-Palabuhan ratu	0266-6441941 / 0856 2474 2249
121	Hanifah Rohaminah	Sindang rasa, Rt. 01/03, Citarik-sukabumi	0266-6442582 0815 1103 7693 0816 4631 412
122	Dini Handiani, S.Pd	Jl. Cibaraja, No. 40, Cisaat, Kab. Sukabumi	0266-216625 0813 8463 7475
123	Rini Suwardini	Jl. Cikiray Cisaat No. 620, Rt 04/02, desa Sukamanah Cisaat-Sukabumi 43152	0266-211858 / 0813 1828 5287
124	Irwan Hirawan Suhni, SE	Kp. Marinjung Rt.01/02, karangpapak-cisolok, Kab. Sukabumi	0266-431977
125	Ami Rusmiyadi	Jl. Citarik, Km. 8, Kp. Gadog, Rt.01/03, Desa Citarik, Palabuhan ratu	0266-431439 / 0856 2461 3233
126	Saeful Hidayat	Kp. Neglasari I Rt. 03/20, Kec./Kel. Pelabuhan ratu	0266-433570
127	Gunawan	Kp. Cihurang 03/06, Desa Cihadap, Kec. Simpenan	HP. 0815 6368 1400
128	Erwan Hendrawan	Kp. Pintu Rt.07/07, Desa Gunung batu , Kec. Ciracap	0856 5950 0750
129	Rika Rismawati	Babakan Gumelar rt.04/23 No. 155, kec. /desa Pelabuhan ratu	0813 8415 8782
130	M. Tepi Ramdhan	Kp. Padaringan Rt. 03/04, Kec. Purabaya, kab. Sukabumi	0856 2435 4121
131	Nurhasanah Yusuf	Kp. Babakan Gumelar Rt.04/23, Kec/kel. Palabuhan Ratu, Kab. Sukabumi	0815 635 28431
132	Hikmat Ginanjar, S.St.Pi	Kp. Cibeber Girang Rt.02/03, Kel. Tenjoayu, kec. Cicurug	0812 827 0384
133	Rahmat Taufik,S.Pi	Jl. Surya kencana rt.16/02, Desa Nagrak,Kab. Cisaat, Kab. Sukabumi	0266 – 246716 0852 1898 4068
134	Ika Nurani Rahayu	Kp. Marinjung Hulu rt.05/03, Desa Cisolok Pelabuhan Ratu	0266 –434859 /0856 5950 734

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
JAWA TENGAH			
1	Basuki Adhi Sapoetro, SE, MM	Jl. Kapas Timur VIII/G 1069 Perumahan Genuk Indah Semarang	(024) 6580434 / 0882.1530.0768
2	Drs. Ulung K, MM	Jl. Manggis III/20 Perumahan Wonorejo Kr. Anyar – Solo	(021) 855353 / 0856.4731.0823
3	Drs. Untung Usmanto, MA	Jl. Lingkar Utara Km ½ Ds. Menduran – Kec. Brati Kab. Grobogan – Jateng	(0292) 421084 / 081 56510579
4	H.M Bening Dwiono	Jl. Griya Bhakti Praja K 8 Mangunjiwan Demak	(0291) 081818 / 0888 6577245
5	Supriyanto, S.Hut	Sidowayah RT 06/RW III Jelatan Stadion KRIDA Rembang	0852.2731.0255 / 0819.0462.1126
6	Sidiq Pramono, S.Pi	Jl. Proyongan Selatan RT 03 – RW 02 Batang	(0285) 423993 / 081 542048242
7	Bibin Bagas Birawanto	Perum KORPRI Bangetayu Wetan Jl. Prasetyo Utara RT 04 – RW 03 Semarang	0888.2578.857
8	Daryono, SH, MM	Jl. Agung No. 11 Sukoharjo – Solo	(021) 592 147 / 0815.7843.5454
9	Hj. Nanik Kusmiati, S.Ag	Jl. Pati – Tayu Km 7 Bumi Ayu – Kec. Wedarijaksa Pati	0812.2874.8811
10	Edi Suhardi, SE	Gg. Madukoro No.320 Pati	0812.2572.106
12	Sri Sunarti, S.Kom	cilacap	0813.9146.8057
13	Tukiyo, BBA	Jl. Mengapahti Kesugihan RT 01 – RW 01 Cilacap	081 327485598
14	Arief Budiono, SE	Tambak Mulyo RT04 RW 03 Semarang	0857.1310.2221
15	Ir. Kartika Pramanasari	DKP Pati	0821 36707242
16	Sapto Tanoyo P	Inkubator Bisnis Demak	-
17	Hadha Seno Utomo, S.Pi	Inkubator Bisnis DKP kota Semarang	-
18	Ir. Djati Pramono		0819.1148.9712
19	Eko Supriyati	Jl. Galungan III/I/97 Perumahan Krapyak Semarang	0812.2548.1871
20	Hj. Umi Hanik, S.Ag	Jl. Ratu Kalinyamat Tayu – Pati	(085) 452716 / 085 868425273
21	Muhammad Almas	Perum Gama Permai II, Jl. Kartanegara No. 18 RT 002 RW 002	-
22	Tias Prabowo, Dewi Kartika	Jl. Muda Km 2 RT 06/03 Kel Sidowayah	085227310255
23	Seto	Kp. Suroyudon no. 55	081325367727
24	Meta Nora Budiana	Jl. S. Parman no. 35C RT.03/ RW.01 Paren, Kel Sidomulyo Kab. Semarang	081575224144
25	Dodi Nofandy, S.Pi	Jl. Baruna 205 Desa Sawojajar Wanasari Brebes	085226444411
26	Eni Nurlaila, A.Md	RT 01/RW 03 Kauman Kecamatan Kaloran Kab. Temanggung	085292313511
27	Dodi Getmi Dwirianto, SE	Jl. Sumbawa VIII No. 338 Gedang Anak - Ungaran	(024) 769 11762 / 081 228 11076
28	Ahmad Lukman Arif, S.Pd	Jepara	08122851015
29	Akhmad Khairun Jawadi, S.Kom	Jl. Cimanggeng II Penulisan Barat Dayeoh Luhur Cilacap	087 826278870 081 313997639
30	Dyah Retnowati	Ds. Bumi Ayu RT 04 / 01 Weleri, Kendal	081326804950
31	Wellyanto, SE	Semarang	081575131916
32	Wahyu Budi, SE	semarang	08122841971
33	Ny. Darmono	semarang	-
34	diah retnowati	semarang	-
35	nanik kusmiati, S.Ag	pati	-
36	A Lukman Arif,S.Pd	Jl. Proliman RT 04 – RW I Pekalongan Bata alit Jepara	08122514201
37	Ratna Dini Anggara	Jl. Lingkar Timur Rt 05/II Mengantı Kisik Kesugihan Cilacap Jawa Tengah	081327176300
38	Wiwin Puspita Ningrum	Perum Rineggo Asri Blok A 6 No.33 Rt 008/018 Cilacap Jawa Tengah	085724407100
39	Citra Novashelvia	Jl. Lingkar Teluk Penyu Rt 003/05 Tegalkamulyan Perum Cilacap Selatan	085227439908
40	Indah Mustikawati	Rumdin PPSC Blok A No.2 Rt 001/01 Cilacap Selatan Jawa Tengah	081548868578
41	Nur Inayah	Sidasari Kulon Rt 001/01 Kubangkangkung Kawunganten Cilacap Jawa Tengah	081391181811
42	Sri Sunarti	Jl. Raya Slarang Rt 001/13 Dusun Kebon Manis Slarang Kesugihan Cilacap	081391468057
43	Ernawati	Jl. Karang Kamulyan Rt 002/03 Tegal Kamulyan Cilacap Selatan Jawa Tengah	08561464990
44	Ise Kosando	Jl. Sentolo Kawat Rt I/I Cilacap Selatan Jawa Tengah	08164280311
45	Kecon, S.St	Jl. Palalangon Rt 003/03 Dayeuh Luhur Cilacap Jawa Tengah	081912811964
46	Bimo Sriyono	Jl. Laut No.100 THR Teluk Penyu Rt 004/XVPandanarang Cilacap Jawa Tengah	081391294944
47	Ir. Sugiyanto	Cukang Leuleus Rt 003/08 Adimulya Wanaraja Cilacap Jawa Tengah	085227123460
48	Akhmad Khairem Jayadi, S.Kom	Cimenggeng II Pemulian Barat Rt 002/04 Dayeuh Luhur Cilacap Jawa Tengah	087826278870
49	Didik Trianto Nugroho	Jl. Lunjar No. 48 Rt 002/12 Menganti Kesugihan Cilacap Jawa Tengah	-
50	Anggah Kurniawan	Jl. Baruna Timur V No. 178 Rt 007/16 Cilacap Selatan Jawa Tengah	081391200919
51	Rato, A.Md	Jl. Nusa Puring No. 24 Rt 003/005 Kutawaru Cilacap Tengah Jawa Tengah	081542611173
52	Wahyudi	Jl. Satria I Rt 001/10 Kreong Tritih Kulon Cilacap Selatan jawa Tengah	08548889508
53	Yuli Wantana	Jl. Lingkar Timur No.61 A Rt 005/ XI Kebo Kepala Kesugihan Cilacap Jawa Tengah	08122725635 - 085643618797
54	Sudarto	Jl. Sukarno-Hatta No.267 A Rt 004/02 Desa Menganti Kesugihan Cilacap Jawa Tengah	081548846468
55	Nugroho Adisatoto	Jl. Rajawali No.61 Rt 003/03 Tegalreja Cilacap Selatan Jawa Tengah	08524189456
56	Taufik Hidayat	Jl. Gatot Subroto Rt 006/009 Sidanegara Cilacap Tengah Jawa Tengah	085291480148
57	Norma Dini Qesiana	Bina Griya Blok B1 No.28 RT/RW 04/02 Tegal Rejo -Pekalongan 51111 - Jawa Tengah	085742786386 / 0285-426915
58	Rizky Amelia	Jl. Kopi No.702 Blok A Bina Griya RT/RW 009/07 Pekalongan - Jawa Tengah 51111	085727689767 / (0285) 427697
59	Yohan Saputra, SE	Jl. Kusuma Bangsa No. 41 RT/ RW 02/013 Panjang Wetan, Pekalongan	08156572220 / (0285) 424286
60	Kurniyawati	Pantai Sari RT/RW 01/10 Panjang Baru, Pekalongan - Jawa Tengah	081909495345
61	Sri Hartuti W	Perumahan Medono Bina Griya Blok V No.203 RT 02/08 Pekalongan Kajen, Pekalongan	087830939179
62	Diyah Mubarokah A, S.Pi, M.Pi	Jl. Pesona Raya No 511 Bina Griya Indah RT/RW 02/09 Tegal Rejo-Pekalongan	(0285) 410989 / 08156925512
63	Sri Hartoni	Bina Griya BV No 203 Medono RT/ RW 02/VIII Pekalongan-Jateng 51111	081914174311
64	Prasetyo Angger Rachmat Nugroho	Jl. Kruing Raya B2 Slamaran RT 03 RW X Pekalongan-Jateng 51149	(0285) 426402 / 085727449595
65	Ghani Afrikawati	Jl. Kunthi Utara RT/RW 02/08 Cangkring, Pekalongan-Jateng 51123	(0285) 4418240 / 085728146840
66	Andrian Widi Pratomo	Jl. Tunas II No. 6 Bendan, Pekalongan Barat, Jateng 51111	081326620010

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
67	Wahyudi Subiyantoro, S.Pi	Jl. Lamprang Krapyak Kidul 993 No. 14 RT/RW 2/4 Pekalongan utara - Jateng	081228141473
68	Rahendra Syariefudin, A.Md	Perum Pisma Griya Permai 2 Blok AA No.29 Desa Kemplong , Wiradesa Pekalongan,	085226853498
69	Indah Setiawati, S.Pi	Jl. KHM. Mansyur Bendan 5/26 Pekalongan RT 003/Rw 004 Bendan, Pekalongan	085865721998
70	Azizi, S.Pi	Jl. Ki Hajar Dewantoro, Landung Sari XXII RT 04 RW VII No. 55 Pekalongan	085640311307 / 087830904491
71	Dany Risnandar, S.Pi	Komp. PT. TRM A.3 Jl. WR Supratman RT 01 RW 15 Panjang Wetan Pekalongan	08386185401
72	Gunawan, S.St.Pi	Jl. Gembong Beringin III RT 03 RW XI No 41 Kedungwuni Barat, Pekalongan	085640896137
73	R. Rifky Tifany Herson	Jl. WR Supratman Gg. Tongkol No. 15 RT/RW 05/11 Panjang Wetan-Pekalongan	085691847057
74	Riski Firmansyah	Jl. Selat Karimata RT 03/05 Bandengan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	085659202363-0285412943
75	Daulat Putra	Perumahan Dinas PT. Perikanan Nusantara Jl. WR. Supratman Rt 001/013 Pekalongan Utara	081559967946
76	Fasikhah	Jl. Salam Manis Rt 07/06 Kandang Panjang Pekalongan, Jawa Tengah 51114	085740273111
77	Alfian Nor	JL. WR Supratman RT 05 RW 013 Pekalongan-Jateng 51141	085640376501
78	Ahmad Ghozali, SH	Jln. Purwa No. 1 Suradadi Tegal	-
79	Chalimah, MM	Kemplong 330 Wiradesa Pekalongan	-
80	Dani Nurcahyani, A.Md	Jln. Raya Pucang Km 3 Rt. 01 Rw IX Pucang Ba'ra	-
81	Epar Kurnianto, SE	Jln. Citarum No. 34 Kebondalem Pemalang	-
82	Indah Suwantiningsih, A.Md	Jln. WR Supratman I No. 29 A Pekalongan	-
83	Indra Purnomoaji, SP	Jln. Mayjen Sutoyo No. 1 Purworejo	-
84	Maryanto, S.Si	Danggan 02 / 08 Ngrajek Mungkid Magelang	-
85	Neti Herawati, A.Md	Jln. Jepara – Mulyoharjo Km 2 Jepara	-
86	Nunuk Listiyowati, S.Pi	Jln. Singosari XII No. 8 Semarang 50241	-
87	Rini Nurwahyu .J, S.Pi	Jln. Genuk Krajan V / 3 Semarang 50251	-
88	S. Gurawan Permadi, SE	Jln. Nanas No. 5 Siswodipuran Boyolali	-
89	Sri Purwaningsih, A.Md	Ds. Pakuran Rt. 01 / Rw. 01 Kec. Sruweng Kab. Kebumen	-
90	Teguh Prasojo, SE	Kedungwuluh Rt 05 / 01 Kalimanah Purbalingga	-
91	Wahib, A.Md	Rt. 01 / I Sidasarikulon KB. Kangkung Kec. Kawunganten Kab. Cilacap	-
92	Wahyu Nugroho	Desa Kalicilik Rt. 01 Rw. 01 No. 07 Demak	-
93	Zaenal Arifin, A.Md	Jln. Pahlawan II Rt. 01 / 01 Sijeruk Kendal	-
94	Edy Sumaryono, SE	Ds. Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati	-
95	Mohamad Isnaeni	Randusanga Wetan Rt. 02 / 02 Brebes	-
96	Suliyo,SE	Mancasan RT.01/Rw.07 baki, Sukoharjo	-
97	Widyastuti Nur Hayati,SE	Griya Gumpang Baru III, Jl. Sejahtera No.4, Kartasura	-
98	Agustinus Mulyanto,SH	Perum Poko Pondasi Blok.I, No.1. Ngalian, Semarang	-
99	Agustina Lestari E.W	Jl. Ksatria Raya H-240, Semarang	-

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
100	Sri Harsini,B.Sc	Toyo,Rt.01/04, bangsri, Karang pandan, Karang anyar	-
101	Widodo,SE	Ngarjosari, Rt.02/02, Popongan, karanganyar	-
102	Herdiyan Wahyu Fajar,SE	Cepiring Rt.11/01 Cepiring, Kendal, Jl. Stonen Selatan III, No.6, Semarang	-
103	Welyanto,SE	Jl. Peterongan tengah 375, Semarang	-
104	Lastiyani Nataria Sosiwati,SP	Jl. Suparto 37B Purwosari, Baturaden	-
105	Drs. Johanes Budiyanto, A.Kt	Jl. Samodra Pasai 6, Combong, Kadipiro, Solo	-
106	Nining Sutrisnaningsih	Jl. Rengas IV/113, banyumanik, Smrg	-
107	Listya Puspitasari	Jl. Kendeng Barat 30, Sampangan, Semarang	-
108	Iskandar,S.Ag,M.Si	Jl. Tanggulrejo 1, Salatiga	-
109	Budi Prasetyo,SE	Reksosari Rt.01/01, Kecamatan Sunuh, kab. Semarang	-
110	Benny Benyamin	Jl. Bulu Stalan IIIA/256B, Semarang	-
111	Adiyoga,A.Md	Perum Bumi Danurejo Asri C-2, Sapunan , magelang	-
112	Moh. Fatchuri,A.Md,PT	Jl. Citarum No.40B, kebondalem, pemalang	-
113	Wahyu Budi Purwoko, SE	Jl. Sapta Prasetya Utara 1, No.25, Semarang	-
114	Sugito,S.Sos	Kasihan Rt.02/IV, Puntukrejo, Ngargo Yoso	-
115	Adi Susilo,SE	Jl. Galungan III/I/92, Semarang	-
116	Viki Balsa A.R	Jl. Kemuning 7, Smrg	-
117	Nugroho Imam P, ST	Jatisari Asabri Blok C6/12B, Semarang	-
118	Wiwit Sulistyo	Sidorejo Rt.01/2, Purworejo	-
119	Arif Subagyo,SE	Danggan , Ngrajen, Kec. Mungkid, kab. magelang	-
120	Nguran panji Mertha AD	Perum Trangkil B82-83, Semarang 50221	-
121	Stefanus	Jl. Jatisari No. 131.Rt.04/4, jatingaleh-candisari, semarang	-
122	Imam Dimyati	Jl. KH. Yakup, No. 57, Surodadi, tegal	-
123	Hermawan,SE	Jl. Seto Rt.3/17, Gumilir, Semarang	-
124	Agung Tri Sugiharto	Dk. Ngembang Rt.VII/5, gabusan, kec. Jatri, keb. Blora	-
125	Rujito	Jl. Pandawangi tengah II/B-12, Semarang	-
126	Susilo Adiwibowo,SE	Jl. Sentana 179 01/014, mangunsari. Semarang	-
127	Agus Wismadi	Jl. GN. Kumbang No. 20-A, perum Kaligangsa, brebes	-
128	Ir. H. Ashadi	Pedurungan tengah II Rt.06/1, Smrg	-
129	Iwan Setiawan, S.Sos	Jl. Seruni I/47 A, Bukit Sendang Mulyo, Semarang	-
130	Denny Marten Purwanto, SE	Jl. KH Samanhudi , No. 142, Surakarta	-
131	M. Trihudiyatmanto,SE	Jl. Banyumas Km. 4, No.223, Wonosobo (dpn SMK Wiratama)	-
132	M. Agus Tri Romadhoni,SE	Jl. Semangka No. 455, Rt.03/8, kel. Tambakreja, Cilacap, Cilacap Selatan, Cilacap,53213	-
133	Hari Indriatmoko	Jl. Bima 12BV, grogol Baru, Salatiga	-
134	Tanto, B.sc	Desa Brekat Rt.06/02, tarub, tegal, SMP PGRI Kramat, kab. Tegal	-
135	Kurniawan hapsoro, SE	Jl. Kol. Ahmad Yani Selatan VIII/01, Pucanggading, Smrg	-
136	Drs. Achmad Barkah	Jl. Tembalang baru V/64, pedurungan, Semarang	-

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
137	Sutopo	Jl. Wologito Tengah No.5, Semarang	-
138	Tatang Kurniawan	Jl. Lempongsari II/535, Semarang, Griya Payung Asri kav. 96, Pudak payung, Semarang	-
139	Basuki Adisapoetro,SE	Jl. Kapas Timur VIII/G/1069, Semarang	-
140	Evi Wardhani	Rt.1/2, Tirto Mulyo, Plantungan, Kendal	-
141	Eko Supriyati	Galungan 3, gang 1. no. 97, Perum Krapyak , Semarang	-
142	Abdul Azis RM. S.Ag	Jl. Sya'roni, No.83, Jatibarang, Brebes, Jateng	-
143	Bibien bagas B.	Jl. Banget Pratyo Gg.VI/202, Banget Tayu	-
144	Pata Hindra Aryanto	Jl. R. E. Martadinata 327, Solo	-
145	Usep Setiawan, S.Tp	Perum Bejen Asri Rt.5/XI, karang anyar	-
146	Suharto,Amd	Jl. Flanboyan III M 22 Perum Wiku II RT 05 RW V Demak	(029) 6904346 / 081 7059 1343
147	Hadha Seno Utomo, S.Pi	Kp. Suroyudan No. 55 RT 8 RW II Bangunharjo – Semarang	(024) 3543803 / 081 2251 0115
148	Rihaldi Alfan, Amd	Jl. Udowo Barat I/7 RT 05 RW 9 Bulu Lor Semarang	(024) 7046447 / 085 6407 54040
149	Syami'an, SH, MH	Jl. Kapas Tengah II F / 722 Perum. Genuk Indah Semarang	(024) 6583415 / 081 5679 86124
150	Satriadi W.N, ST.MM	Jl. Gayamsari I/I No.8 Semarang	(024) 7037375 / 081 5843 64600
151	Satria Megantara, S.Pi	Jl. Sanggung Raya II No. 51 Candisari Semarang	-(024) 8502014 / 082 1233 83850
152	Susmianto	Rembang	085227310255
153	Tukiyo, BBA	Jl. Sukarno Hatta No. II Kec. Kesugihan – Cilacap	0813274 85598
154	Firdiansyah R, S.Pi	- Jl. Kalimas No.22 RT 05 – RW 04 Danan – Cilacap	087 7751 16523
155	Twining Nugroho H.W, Amd	- Ds. Penusupan RT 01 - RW II Pangkah – Cilacap	0857422018160
156	Dian Novitasari, S.Pi	- Ds. Kebumen RT 05 – RW 1 Sukorejo – Kendal	081 8050 50965
157	Isabella Arista D, S.Pi	- Jl. Bledak Kantil I No.8 RT II – RW II Tlogosari Semarang	085 2259 86633
158	Erwin Harnanto Aji, S.Pi	- Jl. Cakalang No. 1 Tegal	(0283) 359877 / 085 7277 50308
159	Novianti Dwi Nurliana, SE	- Petaunan RT 03 RW 1 Kebongede – Pemalang	085 6476 18666
160	Linggarjati, S.Pi	- Permata Ngaliyan No.230 RT 10 – RW 3 – Semarang	(024) 7519108 / 081 3261 27923
161	Sugitu, S.Pi	- Jl. Monggokusunan 49 Kuwu RT 01-RW 03 Kradenan Grobogan	(0292) 7620138 085 727474348
162	Visia Ega Avianti , SE	- Jl. Brigjen Katanso 53 Tegalsari – Sragen	085 6421 66165
163	Dhanur Dhara, Amd	- Ds. Babak Tulang RT 02 RW 04 Kec. Sarang – Rembang	085 2250 29673
164	Teguh Wisnu, W.S.Pi	- Ds. Garung Lor Kav. 4 RT 02 RW VI – Kaliwungu Kudus	(0291) 432832 / 085 2932 47478
165	Taufiq Rokhan, S.Pi	- Puri RT 04 – RW 07 Puri – Pati	(0295) 384484 / 085 8767 38578
166	Wijoyo Santoso, S.Kel	- Jl. Arwana 11 No. 434 Griya Sugihwaras Pemalang	(0284) 322088 / 081 3251 42325
167	Abdul Jamil, S.Pi	- Jl. Manijah Raya Blok Dasar RT 12 – RW 04 Kec. Wonosari Berbes	081329488194
168	Suparman, STP	- Ngumbul RT 02 RW 02 Kemasan – Sawit Boyolali	081393529192
169	Agung Sukaryadi, SE	- Khadran RT 02 – RW 01 Khadran Colomadu Solo	(0271) 740692 / 087 8350 57011
170	edi muchamad berkah	pemalang	08122777709
171	teguh juwono	tegal	085879826863
172	prapti	kebumen	08526408652
173	yunita triana	sukoharjo	085641401911
174	tujino	banjarnegara	085291491333
175	Nurwadi	Tegal	085865125400
176	adi nugroho	klaten	-
177	jahari	banyumas	081328763145
178	Darmanto	Kendal	081915235075
179	Kemuningamin	Purworejo	-
180	Kasmadi	batang	085812130097
181	sugiyanto	magelang	-
182	yuli cahya	klaten	-
183	sidik pramono	pekalongan	-
184	mahmud	temanggung	081325658853
JOGJA			
1	Anang F., A. Md	Simo I, Genjahan, Ponjong, Gunung Kidul	0852228136622
2	Sutriyono, A. Md	Simo I Rt 02/07, Genjahan, Ponjong, Gunung Kidul	0274-7489957, HP.0816 681019
3	Drs. D., S. Geografi	Kaliurang, Sumber Agung, Moyudan Sleman, Yogyakarta	0274-7476351
4	Teguh Prasetya Eko Nugraha, SP	Jl. PPPG Matematika No. 11, Depok Sleman	0815 8952943
5	Tripurnama Setiawan, SP	Karangsari Rt 04 Rw 32 Wedomartani, Ngemplak, Sleman	0274-7497405, 0815 7904159
6	Syamsuhadi, SE. Ak	Kembangsari 1/24, Srimartani, Piyangan, Bantul – 55792	0274-380323, 081802637073
7	Susanto Dwi A., SE. Ak	Glagah Sari UH IV/594	-
8	Isti Retnaningsih, SE	Bokesan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman	0813 28077372
9	Rochmadiyatno, SE, M.gt	Pengasih, Rt 04/01 Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta – 55652	0818 02729251
10	Rina Putra Limawan-toro, SE, M.gt	Bantenga, DK V, Brosot, Galur, Kulon Progo, Yogyakarta – 55661	0274-565564, 0816 683512
11	Ir. Erawati	Jl. Suryatmajan 43	0815 78087290
12	Basuki Harjono, S.Sos	Jambidan Kidul Jambidan Banguntapan Bantul 55195	0274-7130908, 0815 84136260
13	Agustinus Wahyu Hermawan, A. Md	Rt 03, Kadisoro, Gilangharjo, Pandak Bantul	0815 78098563
14	Mujiono, A. Md	Klewonan, Rt 022/0009 Triharjo, Wates, Kulon Progo	-
15	Hastoro, SE, M.gt	Gamping Tengah Rt 01/ Rw 14 Ambarketawang, Gamping, Sleman	0274-7452001
16	Ruhan Maskuri, A. Md	Plumbon No. 303 Rt 12 Rw 15, Banguntapan, Bantul	0274-7495862, 081578749828
17	Prasetyowati Meindayani, A. Md	Berenan Rt 37/ Rw 16, Bendungan KP	081328065459
18	Agus Susila, SE	Bintaran, Jambi dan Banguntapan, Bantul	-
19	Hanna Meilani Salno, SE	Perum Candi Indah C-12 Wedomartani, Sleman	-
JAWA TIMUR			
1	Drs. Ach. Faisal Ibrahim	Kab. Pamekasan	-
2	Siti Rohma, SE	Kota Pasuruan	081331526075
3	Slamet Riyadi	Kab. Sumenep	-
4	Nurman Riyadi, S.Pi	Kab. Lumajang	081336736442
5	Saiful Mujab	Kab. Blitar	081334777284
6	Lukman Hakim, ST	Kota Probolinggo	08124981449
7	Abdi Baihaqi, SE	Kab. Pasuruan	08123457753
8	Mudzakir Ikrom, Sag	Kab. Lamongan	-
9	Drs. Mulyani	Kab. Trenggalek	-
10	Ir. Sugeng Utomo	Kab. Pacitan	0357-883609
11	Drs. Muani	Kota Kediri	081331056053
12	Khoirul Sholeh, SH	Kota Surabaya	031-72098712
13	Yayuk Sri Rahayu, SP	Kab. Jombang	08155036337
14	Silvia Dwi Putriani, ST	Kab. Kediri	08125224431
15	Eny Hadiyati, SE	Kab. Bondowoso	-
16	Dra. Suci Nurlaila	Kab. Sidoarjo	081330005239

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
17	Imam Supriyanto, SE	Kab. Situbondo	-
18	Acep Saefudin, SE	Kab. Banyuwangi	-
19	Muzaroddin, SE	Kab. Gresik	-
20	Bondan Kuncahyo, SH	Kab. Madiun	08123542053
21	Denny Rachman, SH	Kota Probolinggo	081334698202
22	Suwignyo W, SE, MM	Kab. Jember	081249454040
23	Drs. Achmad Muchlis	Kab. Probolinggo	081336558810
24	Dwi Suharjoyo, SE	Kab. Tuban	081330792215
25	Iking Eduan Saputra	Kab. Nganjuk	085649749239
26	Suharto, BSc	Kab. Ngawi	0351-7602922
27	Sugeng Wiyono, Spi	Kab. Magetan	-
28	Himawan Agung I, SE	Kab. Bojonegoro	-
29	Agus Sugianto, SE	Kab. Blitar	081334057257
30	Drs. R. Husein T	Kab. Sumenep	-
31	Iskandar, Spi	Kab. Pamekasan	-
32	Drs. In Winarno	Kab. Pacitan	081359428442
33	Drs. Ali Huda	Kab. Pasuruan	-
34	Drs. Achmad Mashuri	Kab. Tulungagung	-
35	Joko Kristanto, SE	Kab. Mojokerto	-
36	Tri Joko Suyadi, BBA	Kab. Malang	08125212880
37	Ir. Sumantri Rahardjo	Kota Malang	08125240032
38	Retno Ikrar Sari, SE	Kab. Jember	-
39	Muh. Agus Yahya, SE	Kab. Ponorogo	08123244010
40	Sunaryo, SE	Kab. Trenggalek	08123394508
41	Indra Loka STP	Kab. Tuban	081335444389
42	Supriyanti S, Spi	Kab. Sidoarjo	031-72778229
43	Nisa Ayunda, S.Kel.	Kota Probolinggo	08179523372
44	Arlis Dwi Oxyta, Spi	Kab. Jombang	-
45	Ach. Fachri S.Ag	Kab. Gresik	031-70707384
46	Drh. Imam Ghozali	Kab. Lamongan	085646529749
47	Fatimah Hammi, Spi	Kota Batu	081334269252
48	M. Chaidir Arif, SE	Kab. Bangkalan	08563005510
49	Agus Hafidin, ST	Kota Surabaya	031-3810326
50	Drs. Effan Sholeh W	Kab. Lumajang	-
51	Teguh Widodo, SH	Kota Pasuruan	-
52	Dawan Hariri, SH	Kab. Sampang	-
53	Drs. Ec. Catur Setio S	Kab. Situbondo	-
54	Wiro Nur Wiranda, S.Pi	Kab. Malang	0341-9046914
55	Ajib Kumala Sari, S.Pi	Kota Batu	085 - 63000850
56	Rike Lurin H, S.Pi	Kab. Blitar	085 - 23493659
57	Agung Darma S, SSt.Pi	Kab. Jombang	081331990023
58	Achmad Muttaqin, SE	Kab. Jember	0813585158872
59	Choirul Azhar, ST	kota probolinggo	085-234444295
60	Wahyulia Cahyanti, S.Pi	kab. Magetan	085-855378703
61	Amylia Pratama S, S.Pi	kab. Sidoarjo	081-331651451
62	Indrimastuti, SP	Kab. Ponorogo	081-23440837
63	Puji Harsoyo, SP	kota malang	0341-5401450
64	Iin Mayasari, A.Md	Kab. Tuban	081-357293548
65	Ata Wahyudin Shohif	Kab. Nganjuk	081-336722428
66	Nur Wachid	Kab. Lamongan	081-331944845
67	Candra Ambar B, SE	Kab. Bondowoso	085-236213500
68	Tri Wahyurini	Kab. Nganjuk	081-331276641
69	Yuli Rachmanudin, S.Pi	Kab. Ngawi	081-325513988
70	Olan Maulana A F, A.Md	Kab. Gresik	081-553201197
71	Marjuni Baihaqi, A.Md	Kab. Mojokerto	081-929669927
72	Hardiyanto, S.Pi	Kab. Trenggalek	081-325771980

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
73	Mashuri Ali	Kab. Sumenep	081-231297076
74	Ainal Muttaqin, S.PI	Kab. Lumajang	085-736310891
75	Daiman, SE	Kab. Sampang	081-75122838
76	Riki Kusmana, SSt Pi	Kab. Probolinggo	081-383623682
77	Kurnia Asdin M, S.Ap	Kota Pasuruan	085-856531768
78	Tirto Budi Utomo, A.Md	Kab. Tuban	081-949755100
79	Achmad Zaini	Kota Kediri	085-850327567
80	Bayu Wijarnako, A.Md	Kab. Kediri	081-335305665
81	Catur Agung Prabaowo	Kab. Bojonegoro	081-335511101
82	Hulma, A.Md	Kab. Banyuwangi	081-357187897.
83	Eko Hariwanti, S.Pi	Kab. Tulungagung	085-645982786
84	Lailiyatul Musdalifah	Kab. Lamongan	081-331013000
85	Abdul asis, S Kel	Kab. Pamekasan	081-331999585
86	Adityo Nugroho	Kab. Ponorogo	081-332454858
87	Sunandar, S.Pi	Kab. Trenggalek	081-333407997
88	Heru Priyosasmito, S.IP	Kab. Jember	081-358855885
89	Wahyu Setiawan, S.Pi	Kab. Pacitan	081-392040302
90	Elya Mardika Sari, A.Md	Kab. Probolinggo	085-259211699
91	Kahfi Irwanto	Kab. Mojokerto	085-63235984
92	Ardhiana, D.A, S.Pi	Kab. Madiun	0351-7817700
93	Devi Rica H, S.Pi	Kab. Madiun	085-235771483
94	Metachul Kusna, S.Pi	Kab. Blitar	081-220399288
95	Aeliyah Rief'aeni, S.Pi	Kab. Pasuruan	081-7389796
96	Aisiyah, S.Pi	Kab. Pacitan	081-359203668
97	Drs. Antok Afianto	Kota Pasuruan	081-615671798
98	M.Ridwan, S.Ag	Kota Surabaya	081-803109308
99	Agus Debiantoro	Kab. Madiun	081-359008008
100	Kisbul Waton, SH	Kab. Lamongan	085-648275797
101	Abdullah, SE	Kab. Bangkalan	081-803005584
102	Iswanto	Kota Blitar	085-234780040
103	Suparman, SE	Kab. Situbondo	081-615163650
104	M. Indra Setiawan	Kab. Trenggalek	085755551565
105	Eko Yulianto	Kab. Trenggalek	0355-551118 / 081234316444
106	Titis Yuli Ekawati	Kab. Trenggalek	081331780392
107	Slamet Riyadi	Kab. Trenggalek	081234444855 / 0355-551342/
108	Wowo Tribawa S.Pi, SE	Kab. Trenggalek	0813316823
109	Imam Safi H. S.Pi, Msi	Kab. Trenggalek	081335511779
110	Tri Laksono	Kab. Trenggalek	-
111	Anton Kristianto	Kab. Trenggalek	0852226458808
112	Sri Eidaryani, S.Pd	Kab. Trenggalek	085642329955
113	Prawoto	Kab. Trenggalek	08113314770
114	Rezy Cossalina	Kab. Trenggalek	085325082066
115	Denti Rahayu A S	Kab. Trenggalek	085234265586
116	Liswan M.P	Kab. Trenggalek	085655506539
117	Erwanto Husada	Kab. Trenggalek	085232191609 / 0355-552113/
118	Arif Suhada, SE	Kab. Trenggalek	081259424999 / 0355-551255/
119	Eko Wahyu Prasetiyo	Kab. Trenggalek	085240198366
120	Fatkhurrohman Azis	Kab. Trenggalek	085655507466
121	Gari Pranoto S.Pi	Kab. Trenggalek	081615664417 / 0355-551255/
122	Rochmad	Kab. Trenggalek	-
123	Slamet Arifin	Kab. Trenggalek	081335759728
124	[illegible]	Kab. Lamongan	081332703602
125	[illegible]	Kab. Lamongan	0322-661913
126	[illegible]	Kab. Lamongan	081334354991

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
127	Suhadi	Kab. Lamongan	-
128	Kristina R, Amd	Kab. Lamongan	081330446042
129	Suryono, SE, M.Hum	Kab. Lamongan	0322-661274 / 08123354319
130	Roch. Amanan, SE	Kab. Lamongan	081330758943
131	Katmirah, S.Pi	Kab. Lamongan	0322-663718 / 081332889543
132	Sudarno, S.Pi	Kab. Lamongan	081332703102
133	Amrullah Sigit	Kab. Lamongan	0322-663105
134	Sukardono, SH	Kab. Lamongan	0322-663105
135	Agus Mulyono	Kab. Lamongan	081230335458
136	Ardiansyah	Kab. Lamongan	081334443113
137	Drs. Parsuwito	Kab. Lamongan	0322-661421
138	Wasudi	Kab. Lamongan	08563047003
139	Majid Apriadi	Kab. Lamongan	081334401488
140	Amik A., A.Pi, M.Si	Kab. Lamongan	08123278296
141	Dodik Buntoro, A.Pi	Kab. Lamongan	0811372761
142	Sudarlin	Kab. Lamongan	081330002054 / 085733142227
143	Amir Rohim	Kab. Lamongan	081231302958
144	Irwan Yuni Saputra	Kab. Bojonegoro	081386663405
145	Maya Unisma S, A.Md	Kab. Lamongan	081332479511
146	Mugiyanto, A.Md	Kab. Trenggalek	085236929679
147	Yudho Wahyu Cahyono	Kab. Pacitan	081234236490
148	Dwi Wahyu Wardhani	Kab. Bondowoso	085646855163
149	Zulfa Dewi Kurnia	kab. Magetan	085235771483
KALBAR			
1	Melda Daniati, SE	Dsn. Pangkalan Betung Desa Pipiteja Rt 2 Rw 5, Kec. Teluk Keramat, Kab. Sambas	0852.4563.3631
2	Pitriani, A.Md	Jl. Purnama, Gg. Purnama Karya No 7	(0561) 761452 / 0813.4511.1534
3	Muhammad Khozali, SE	Jl. Raya Sungai Kakap, Dsn. Nirwana Rt/Rw. 12/05 Kec. Sui Kakap, Kab. Pontianak	0816.2249.90
4	Endi Kurniawan, SE	Jl. Raya Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Kec. Tangaran, Kab. Sambas	0852.4574.5706
5	Andrigo	Dusun Jeruju Desa Sebubus, Kec. Paloh, Kab. Sambas	0813.4579.9044
6	Tommy Prasetya	Jl. Kelurahan No. 53, Sanggau Kapuas	(0564) 21837 / 081345332290
7	D Lia Lidayana, S.St.Pi	Jl. Siaga No. 8 Rt/Rw. 004/01 Roban, Singkawang Tengah, Kota Singkawang	
8	Mardanie Bollang, SE	Jl. Gst. M. Taupik No. 307, Mempawah	Telp. (0561) 692 867
9	Marwan HY	Jl. Antasari No, 21 Putussibau	0856.5457.3318
10	Rabiatul Adawiyah, S.Pi	Jl. Rahadi Ismail Desa Sui- Jawi, Ketapang	0852.4590.2345
11	Uray Gusslina Rokha-ini, SE	Jl. Nelayan No. 63 RT 01/ RW IX Desa Renjajap, Pemangakat – Kab Sambas	0812.5690.095
12	Syarif Alwi	Jl. Lintas Pelatar Kadamin Hilir, Putussibau- Kapuas Hulu	(0567) 21920
13	Rr. Amaliah Fitri, A.Md	Jl. Tanjung Raya I, Komp. SDN 05	0812.5672.315
14	Subhan Thaha A, ST	Jl. Lintas Selatan Kadamin Hilir, Kec. Kedamin	0856.5036.834
15	M. Ridwan S.Pi	Jl. Tanjung Raya II, Gg. Kurnia Jaya No. 16, Pontianak	0813.5204.3352
16	Machmud, M.SP	Jl. P. Pematang No.5 RT/RW. 07/04 Padang Tikar II	-
17	Abdul Razak, A.Md	Rasau Jaya Umum, Jl. Paku Alam Gg. Keluarga Rt 06 Rw 02	0815.2255.7205
18	Efdi Ibrahim	Jl. Nusa Baru No. 18 Kel. Tengah, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang	-

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
19	Imam Karnain	Desa Karang intan 25 A, Kel. Sedau Singkawang Selatan	Hp. 081352048845
20	Sukiran MS, BE	Jl. Jend. Sudirman No. 61 Kota Singkawang	0813.4541.5662
21	Mazlan, SP	Jl. Yos Sudarso RT/RW 5/3 Kel. Kuala, Kec. Singkawang Barat, kota Singkawang	0813.5207.9265
22	Eliyas, SE	Mantibar, Kec. Paloh, Kab. Sambas	0813 4545 3239
23	M. Ridha	Jl. GM Taufik No. 10, Kec. Mem-pawah Hilir, Kabupaten Pontianak	0812.5614,470
24	Novianne SA, S.St.Pi	Jl. Uray Bawadi, Gg. Mardi Rahayu, No. 44, Pontianak,	0813 4503 9894
25	supandi, S.Pi	Ketapang	0852.4593.4617
26	Eko Priyo Nugroho, SH	Kayong Utara	0815.2239.702
27	Irawan, S.St.Pi	Kubu Raya	0813.9840.2111
28	Ibnu Hajar, S.Pi	Sanggau	0852.4825.3109
29	Abdul Ghokir,	Bengkhayang	0812.5682.3738
30	Karmiji, A.md	Pontianak	0823.5121.8925
31	M. Jemali	Kapuas Hulu	0813.4591.8929
32	Ismail, S.St.Pi	Sambas	0852.4500.9921
33	Pramita Lestari Lubis, SSt.Pi	Pontianak	0821.5146.2242
34	Imanuddin, S.Pi	Singkawang	0813.4545.7281
KALTENG			
1	Ir. Untung Torang	Palangkaraya	0813.5281.0949
2	Frinando Tulus, S.Pi	Palangkaraya	0811.5207.12
3	Surtiana, SE	Palangkaraya	0536.3230.051
4	Mariuana, SE	Palangkaraya	0536.3239.950
5	Abantitoni, A.Md	Komp.Kehutanan F/1,Palangkaraya	0813.4803.9773
6	Cebyanto, S.Pi	Palangkaraya	0852.5273.7330
7	Yuliana Trimurti, A.Md	Palangkaraya	0813.4845.2928
8	Marwin Simprianto	Katingan	0536.4041.1029
9	Darmanto Dawid	Katingan	0852.4950.9076
10	Mulyadi, A.Md	Kotawaringin Timur	0852.5291.7225
11	Akhmad R, SE	Kotawaringin Timur	0852.4951.4779
12	M. Aswin Sidik, A.Md	Seruyan	0856.1594.27
13	M. Fahruraji, S.Pi	Seruyan	0815.2811.226
14	Suhartini, S.Pi	Kotawaringin Barat	0813.4920.5420
15	Achmad Husaidi Rachmi, S.Pi	Jl. H.M. Sanusi No. 18 Kab. Pulang Pisau	0852.4840.6219
16	Intan, S.Sos	pulang pisau	0856.5117.2800
17	Bambang Irwan, S.ST.Pi	pulang pisau	-
18	Ami Mayasari, ST	pulang pisau	0813.4956.7923
19	Tulus Bujur, S.Pi	Kapuas	0813.4913.8610
20	Gusti Ray N, S.Pi	Kapuas	0812.5084.9871
21	H. Moh. Munir, SP	kuala kapuas	-
22	Agus Salim	Palangkaraya	081349046873
23	Daryoko	muara tewe	081229899975
24	jhon	pangkalan bun	-
KALSEL			
1	M. Nurullah	Jl. Kayutangi II Rt. 16 No.6 Jalur 1 Baniarmasin	Hp. 0811514505
2	Juniansyah W	Kotabaru	-
3	Rozi candra	Barito Kuala	-
4	Nurul Huda, S.S.Pt	Jl. Norsehat,Rt.IV,No.40, Pelaihari	0812 5065 939
5	Sri Saabanny U, SP	Barito Kuala	-
6	Abdul Karim Amrullah	Tanjung	-
7	Dedy Rahnony	Jl. Basuki Rahmat Rt. XI Gg Kasturi No. 70 Tanjung Tabalong	-
8	GT. Riduan, S.Sos	Kandangan	-

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
9	Lasriyanto, S.Pi	Desa Benua Tengah Rt. 13 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut	-
10	Nurul Huda	Pelaihari	-
11	Ahmad Rijani, S.Pi	Jl. Gusti Ubi No. 50 Margasari Ilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin	-
12	Hilmi Abdullah	Banjarmasin	-
13	Juli Mahmud	Jl. A Yani Km 37 Ujung Baru, Rt. 04 / 02 No. 54 Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut	(0512) 26095
14	Susi Anggraeni, S.Pi	Kota Baru	Penyuluh
15	Syahruddin, S.Pi	Kota Baru	Penyuluh
16	Isnainiah, S.Pi	Tanah Bumbu	Penyuluh
17	Salam Kardoyo	Tanah Bumbu	Penyuluh
18	Eni Marlia, S.Pi	Banjar	Penyuluh
19	Hendera F.N, S.Pi	Banjar	Penyuluh
20	Inayah Rahmani, S.Pi	Banjar	Penyuluh
21	Sumadi	Banjar	Penyuluh
22	Sudarto	Banjar	Penyuluh
23	Yuliyarabihati	Banjarbaru	Penyuluh
24	Rusmaliyanti, SE	Barjarmasin	Dinas
25	Maiyo Gunnadi	Hulu Sungai Utara	Dinas
26	Dedy Supriatna, S.Pi	Hulu Sungai Utara	Penyuluh
27	Riza Riswandi, S.Pi	Hulu Sungai Selatan	Penyuluh
28	Rendra Fahlovie, S.Pi	Tapin	Penyuluh
29	Diny Eka Puspitasari	Banjar	Pendamping PUMP
30	Juni Hasan	Tanah Laut	-
31	Abdul Hafiz	Tapin	081348179058
32	Rifki Wahadi	Hulu Sungai Tengah	-
33	Rahmadi	Balangan	-
34	zulkarnain	Tanah Bumbu	-
35	ali nafiah	Hulu Sungai Utara	08125028119
36	gunawan	batola	-
SULSEL			
1	Syahrir B, ST	Jl. Sungai Kelaka No. 34 Kel. Binamu Kab. Jeneponto	(0419) 22681
2	Tajuddin Mandja	Bumi Maros Indah blok C/89 Kel. Adatongeng Kec.Turikale, Marros	(0411) 3882399 / 0811443339
3	Anwardin Arjunaid	Jl. Ahmad Yani Pinrang Bumi Permata Sudianq Blok G1/14	hp. 081342293364
4	Wahyuddin Djamar	Jl. Islamic Center 99 Cakke Kab. Enrekang	(0420) 2311109 / 081342989552
5	Sampara Syarif	Pulau Kodingareng, Makassar	(0411) 8111696 / 081242424265
6	Saenal Abidin, SE	Makassar	-
7	Sutamin Tayeb	Jl. HA. Mappanyuki No.3 Bone	-
8	M. Nursalam	Desa Bentang Galesong Selatan	-
9	Abdul Gani Muin, BA	Jl. Anggrek No. 35 Balangnipa Sinjai	(0482) 21317 / 081342090594
10	Indra Cahyono	Desa Bontoloe, Galesong Selatan, Takalar	(0418) 2326681 / 081343993313
11	Mail Manessa	Jl. Jend. Sudirman km 5,5 Songka Kota Palopo	-
12	Ir. Muh. Usman, MM	Jl. Gusung Jihad No.114 A	-
13	Andi Pangerang, B,Sc	Makassar	-
14	M. Abduh, S.Pi	Makassar	08114104203
15	Drs. Abid Dachil, M.Si	Jl. A. Mappatola I No.8 Pare-pare	-
16	Ikhlas, S.Kel	Komp. SPAT Pertanian Kec. Bone, Bone-Luwu Utara	-
17	Khain Deyong Danda	Toraja	-
18	Harnawati, SE	Kaluku Desa Lauwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo	-

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
19	Marwa Edy, S.Pi	Jl. H. Lanca No.7 Kab. Barru	-
20	Ilham Saleh	Desa Bajo Kec. Bajo Kab. Luwu BTN Minasa Upa Blok D II / 19 Makassar	-
21	Ir. Muh. Ridwan Akhas	Jl. A. Mappanyuki No. 121 ntepao, Tator	081342604053
22	Syahruny M Ilyas	Gowa	-
23	Matahari Nurdin, SE	Pangkep	-
24	Ratnawati	Bone	-
25	Andi Pangerang, B.Sc	BTN Minasa Upa Blok D5 No.19	-
26	Nur Alam Muhammad, S.Ag	Jl. A. Latanratu Kec. Polewali Kab. Pol mas	-
27	Ir. Salmiah Azis	Jl. K.H. Muh. Saleh No.7 Majene	-
28	Dibyo Suryono	Jl. Urip Sumoharjo Mamuju	-
29	A. Rahman	P. Kalu-kalukuang	08194143786
30	Andi Muh. Abduh R., S.Pi	Jl. Korban 40.000 No. 107	-
31	Nur Alam Mappinawang	Jl. S. Pareman LR. 4 No. 13 C Palopo	-
32	Tajuddin Mandja	Bumi Maros Indah Blok C / 89 Maros	-
	nur islamia	Pangkep	-
	haerani	barru	-
	a. israhuddin	selayar	-
	suarni	bantaeng	-
	indrajaya	soppeng	-
SULBAR			
1	Rusdy S. Spi	Jl. Teuku Cut Di Tiro No. 18, Mamuju,	0426-21485
2	Andi Muh. Ichsan, SE	Jl. Lettu Ahmad Kirang no. 15 mamuju,	081342200155, 0426-21560
3	Hasbudi, A.Md	Jl. Jend. Soedirman No. 5 Mamuju, Karema selatan, kel. Simboro Kepulauan, mamuju,	085656294247 0426-22667
4	Ir. Muhammad Ridha A	Jl. H.Andi Depu No. 01 , Gang .2001 Lantora, Kec. Polewali, kab. Polmas,	08124152363, 0428-21430
5	Daud Sesa , SE	Jl. SLT. Hassanuddi, Puncak Mamuju,Jl. Kelapa No. 2 mamuju, Kel. Binanga, mamuju	085242986737
6	M. Ayyub Y, SPt	Jl. Abdul syakur, No. 78 kab, mamuju	08152535582
7	Maksum Syamsudin	Jl. Poros Mamasa Kel. Darma polman,	081941470709, 0428-22022
Sulteng			
1	Muhammad Auliya Alwy, S.Pi	Jl. Tinumbu 2 No.36	085241302126
2	Altar Nggoede, ST	Jl. Tarundungi Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali	081245049171
3	Rusdin, S.Pi	Jl. Kel. Nalu Kec. Baolan Toli-toli	081341485369
4	Yunus Thalib, SP	Jl. BTN Palupi Permai Blok A 16 Palu	085256911479
5	Martinus Willy Tris.R, S.Pi	Jl. Basuki Rahmat No. 150 H Palu	
6	Mansur Haruna	Jl. Ds. Torue	085241175756
7	Sodikin, S.Pi	Jl. Luwuk	081354355584
8	Tonny Hasbi, SP	Jl. Yos Sudarso II No.9 Palu	082194422038
9	Titik Susi;owati, S.Pi	Jl. BTN Palupi Permai Blok A 16 Palu	081341229576
10	Muhammad Nur	Jl. Guru Tua No.110 Kec. Biromaru Kab. Sigi	085394003189
11	Edy Nashry Abubakar, S.Pi	Jl. Desa Bongganan Kec. Ti-nangkung Kab. Banggai	085696004514
12	Burhan Badrudin,S.Pi	Jl. Pangi Lobutong	085241069272
13	Nunadji, S.Pi	Jl. Dewi Sartika II No.81	081341464844

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
14	Jayadi Sofyan, S.Pi	Jl. Uwe Salura RT 02/RW 01 Kec. Tondo Palu Timur	081341251068
15	Dian Krismasari, S.Pi	Jl. Jati No.82 Palu	085241025480
16	Munawar, S.Pi	Jl. Lemo Kec. Ampibabo Kab. Parimo	081341238911
17	Neneng A Tarungku	Jl. Anggur I No. 10	081341129268
18	Made Suwetja	Jl. Parigi Moutong/Kec.Torue	085241375104
19	Abd. Muis Adam, SE	Jl. BTN Palupi Blok D No.39 Palu	085241354539
20	Abd Manab, S.Pi	Jl. Parigi I No.98 Silae Palu	-
21	Ahmad Yahya	R. Jln. KH. Wahid Hasyim No. 50 B Luwuk	0461 - 22773
22	Afanti, S.Pi	R. Jln. Trans Bantaya Parigi Moutong	081341182288
23	Era Soanita, S.Pi	R. Jln. Moh. Thamrin No. 29 Palu	0451 –422161, 081325112312
24	Darlina, S.Pi	R. Jln. Kelapa Gading No. 14	081341033274
25	Lisyani, S.Pi	R. Jln. S. Alaudin Kalukubula	0451 –4708232, 081341098612
26	Jonny Nitoy	R. Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali	0465 – 21397
27	Mohammad Takbir, SH	R. Jl. Burung Mas KEl. Tn. Bo-nunungan Kec. Bangkep	Telp. 0462 – 21279, HP. 085242255151
28	Muh. Saleh S.Kel	R. Jl. Danau Lindu No. 170 Luwuk	-
29	Minayani Amin, S.Pi	R. Jl. Malonda Silae	085240364650
30	Mukaddas HB, S.Pi	R. Jl. Hayam Wuruk No. 66 Palu	081341208
31	Rismiliyanti, SE	R. Jl. Cik Ditiro 305 Parigi	0450- 21048
32	Nur Aisyah Aziz	R. Jl. Anoa No. 19 Tuweley	081342144975
33	Rusli H. Usman, S.Pi	R. Jl. Hi. Hamid No. 13 Toli toli	
34	Ridwan, S.Pi	R. Jl. Jend. Sudirman	0452 –23591, 085241019779
35	Yukie Okto Pratama, S.St.Pi	R. Jl. Abd. Rahman Saleh No. 104 Palu	0815970668, 0451 – 481972
36	Moh. Kachfi M, S.Pi	R. Jl. Raya Kali Momunu No. 350	085240330057
Sulut			
1	Movrie Mamesah	Minahasa Selatan	-
2	James koagow	Minahasa	-
3	Heni Rotty	Kotamobagu	-
4	Supriadi Agantu	Kotamobagu	-
5	Ninie Kaunang	Bitung	-
6	Fanny Sambiran	Minahasa Utara	-
7	Berny Pongajouw	Bolaang mongondow Utara	-
8	Oprianto Mangasapu	Manado	-
9	Gino Ango	Minahasa Tenggara	-
10	Estty Pelleng	Tomohon	-
11	Anita Soegimin	Minahasa Utara	-
12	Edy Toha	Minahasa	-
13	Daniel M., S.Pi	Kotamobagu	-
14	Doni K	Minahasa	-
15	Saiful Umur	Minahasa Tenggara	-
16	Pingkan Rompas, S.Pi	DKP Provinsi	-
17	Angeliq Lumenon, ST	DKP Provinsi	-
18	Andry Rondonuwu, S.kel	DKP Provinsi	-
19	Christian Sampok	DKP Provinsi	-
20	Frits Kaihatu	DKP Provinsi	-
21	Verdinand T. Gedoan	Pakowa lingkungan III, Manado.95118	-
22	Oktavius R. Pinedendi, S.Pi	Kel. Beo Lingkungan III, Kab. Kepulauan Talaud	
23	Ir. Noldy Jan Sualang	Kel. Kekenturan I, Lingkungan II Kota-Bitung	-

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
24	Bernard Sampow, S.Pi	Matani Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon	-
25	Deni gosal	Tataaran I / Tondano, Kab. Minahasa Induk	-
26	Hengki Rantung, S.IK	Kel. Tuutu Lingkunagn IV, Kec. Tondano Barat	-
27	Neforius Handrianto Pagora, SE	Winenet Lingkungan I, Kodya Bitung	-
28	Drs. Umar B. Parawira	Jl. Ponosakan 2 Belang Minsel	-
29	Jany H. H. A. Sumam-pouw, S.Pi	Maumbi kecamatan Kalawat, JG. III Kab. Minahasa Utara	-
30	Madjna Halim, S.Pdl	Nain, Kec. Wori Kab. Minahasa	-
31	Marlon Eduard E A, SE	Jl. Sion No. 8 Sario Utara Manado	-
32	Chorneles Mataputung, BA	Kel.Sumompo Kec. Tuminting	-
33	Walintukan Judha, SE	Lingkungan II Tikala Aresa	-
34	Ir. Rihard Salindeho	Kel. Makawidey Lingkungan III Bitung Timur	-
35	Noldy Semuel Law-rence Loho	Jaga IV Matungkas Kecamatan Dimembe Mianahasa Utara, Sulawesi Utara	
36	Supriadi Agantu, S.IK	Desa Kopendakan I Kec. Lolayan Kabupaten Boloang Mongondow, Sulawesi Utara	-
37	Youla Feibe Mandagi, S.Pi	Maliku Kec. Tombasian Minahasa Selatan	-
38	Arther Rawuaten, SE	Kel. Tona Lingkungan I	-
39	Novita Fitry N. Bakrie, SE	Jl. Baari I No. 145 Paal Dua Manado	-
40	Ir. Ronald N.B. Tambeo	Teling Atas Lingk. I Wanen	-
SULTRA			
1	Muhammad Katsir	Kendari	081245808265
2	Abdul Rakhfid, SE	Jl. Teuku Umar No. 6 Raha, Kel. Watonea, Kec. Katubo Muna	0403 22328/ 0813 41502379
3	Maulida, S.Pi	Kendari	081341511612
4	Ir. Budiyanti	Jl. Erlangga No. 219 bau-bau(rmh) Jl. Yos Sudarso No.43 Bau-bau	(0402) 24087/ 21327
5	La Ode Faisi	Jl. Perumnas I No. 152, Kompleks Perumnas Blok A, Kel. Lalombaa, Kab. Kolaka,	08124255653
6	H Unang A, A.Pi	kendari	-
7	Citra Gandi	Kendari	-
8	Ir. Muhammad Ali	Kendari	085298466131
9	Haswati, S.Pi	Wakatobi	-
10	Laode Sairuddin	Jl. Annoa No.3 Raha, Kel. Raha III 93613,	(0403) 21674, 0813 41511087
11	Arni Wahab, S.Pi	Kendari	-
12	Maharuddin	Kendari	-
13	Husnawati, S.Pi	Kendari	-
14	Subiyati, S.Pi	Lasolo	-
15	Irfan Muhammad T,S.TP	Kendari	-
16	Hasni, S.Pi	Lainena	-
17	Fiente Namora Siregar	Kendari	-
18	Sultan, SE	Kendari	-
19	Mujiarto, S.Pi	Wakatobi	-
20	Sarimudin	Buton Utara	-
21	Hartono, S.Pi	Kendari	-
22	Tahiruddin, S.St.Pi	Bau Bau	-
23	Mauluddin, S.Pi	Kolaka Utara	-
24	Nuryamin Anisi, A.Pi	Bau Bau	-
25	Sudirman, A.Md		-
26	Muhammad Hafiluddin		-
27	Budiamin, S.Pi		-
28	Lamuhidi, SE		081341747814

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
29	Budiono	Jl. Inpres No. 90, Kel. Mandati II, Kec. Wangi-wangi Selatan, kab. Wakatobi	0815 24739917
30	Muhammad Askari, S.Sos	Jl. Bahagia No.50 RT/RW 002/002, Kel. Lapulu, Kec Abeli, Kota Kendari	081341504210
31	La Bea, S.Pi	Jl. Gersamata No. 62, Kel Andonouhu Kota Kendari	0401 392691
32	Ando Baso Madjid, SE	Jl. Nusantara No. 1. Pomalaa	0405 310081
33	Razudin	Jl.Jl. Yos Sudarso No. 42 Mawasangka Kab. Buton	0813 64420609/ 0868 12115528
34	Muslim Zakir	Jl. Abadi No. 133 Kel. Kolaakasi, Kab. Kolaka	0405 22033
35	Asmun, S.Pi	Jl. K.H. ABD No. 133 kel. Kolaakasi, Kab. Kolaka	0402 26307/ 0815 24739756
36	LD. Syafaruddin, M, S.Pi	Jl. Sultan Hasanuddin, No. 41 Kota Bau-bau Kec. Wolio, Kel. Batulo	0402 21349/ 0813 41540355
37	Sarfin, S.Pi	Jl. Kelapa No. 6D, Kel. Wangka Napi, Bau-bau, Buton	0852 42261699
38	Irawan Hasimuna, A.Md	Jl.Imam Bonjol No. 11 Bau-bau	0402 22160
39	La Badi, S.Pd	Jl. Poros Tiworo, Kel. Waumere, Kec. Tikep, Muna	0811 405617
40	Hetty Kusnadi Said	Jl. Balai Kota III Permai NO. 7, Kel Kadia, Kec. Baruga 93117	0401 327545/ 0813 41521677
41	Fajar Zulham Nur Syamsu, S.St.Pi	Jl. Bunga Duri No.28 Kemaraya, Kendari	
42	La Ode Sairuddin, S.Pi	Jl. Lumba-lumba No.6 Raha, Kel. Laiworu Kab. Muna	(0402) 21349
43	La Ode Syafaruddin Maswar, SE	Jl. Sultan Hasanudin No.41 Kota Bau-bau	(0402) 21349
44	Muh. Faried Syahrani Samad, S.St,Pi	Jl. Ratulangi No. 164 Wartel Zahra (Depan RSU Prop) Kendari	
45	Razuddin, SP	Komplek Pasar Baru Kel. Watolo Kec. Mawasangka Kab. Buton	(0868)12115528
46	Siti Ansyaria, S.Pi	Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian Dalam No.84 Kendari	081341511721
47	siti aisyah, SE		082195155173
48	masui lamuhaya, SP		085289493417
GORONTALO			
1	Abdillah M Manna SE	Gorontalo	
2	Saparudin	Gorontalo	
3	Ahmad Hulopi, SE	Gorontalo	
4	Dion Sitompul, SE	Pohuwato	
5	Anung Nidiyanto	Pohuwato	
6	Didi sumaga	Kemandang, Gorantalo Utara,	(0442) 320286, 081523916611
7	Hamka Toma	Gorontalo	
8	Merlina J Koem	Jl. Tehnik No. 5, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo	(0435) 880802, (0435) 838045 0852403338378
9	Yusri U Hake	Kel. Tomula Butao "Perum Ersa Permai Blok C, No.1, Gorontalo	(0435) 834153, 0852165 12812
10	Kadir U Menu	Jl. Kiambang No. 59, Kel. Bochiuanggga, Kec. Limboto,	(0435) 881912, 08124433529, 0435 8707402
11	Jumra Baginda, SE	Jl. Husni Thamrin No. 18 Lt. III Trans Sulawesi, Gorontalo,	(0435) 823123
12	Rahman. S. S, Pi	Jl. Imam Bonjol No. 105, Gorontalo	(0435) 823123, 043587181799
13	Dwi Evriyenni I C, SE	Gorontalo	-
14	Hamid R Djala, A.Md	Jl. Ahmad Hippy, Kel Hunggaluwa, Kec. Limboto	085255707003 /085240023775
15	Bambang T S, S.Pi	Libuo Lingk III,Kec. Paguat Pohuwato	085340447337
16	Sivianita Panigoro, A.Md	Jl. Dewi Sartika, 09, Kel Limba U1, Gorontalo /	0812.1371.6999 / 0435-823592
17	Lucky S Simon, S.Pi	Jl. Beringin, Graha Permai G/9, Tamulabutao, Gorontalo	0813.5695.2999
18	Fahrit Lukum, A.Md	Desa Popaya, Kec. Dengilo Pohuwato	0852.4009.2685

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
19	Sutrisno Pakaya, A.Md	Jl. Pasar jumat 14 T4 W2, Tumbihe, Kabila Bonbol	0852.8020.8030
20	Novita Y Puluhulawa, A.Md	Jl. Pelabuhan, Katialada, Kwandang, Gorontalo Utara	0852.4070.0654
21	Nurdin H P S.Kel	Jl. Jambu T3 W8, Libuo, Dungini, Gorontalo	0813.5912.5448
22	Roslina Linggunu, S.Pi	Jl. Hubulo, No.395, Kayubulan, Kec Limboto	0852.4028.7804
23	Rahmat B. U Sangid, S.Pi	Jl. Rajawali, 229, Hunggaluwa, Kec. Limboto	0852.4028.7804
24	Iskandar M Salandra, SE	Jl. Taman pendidikan 3, Moodu (depan Akper) Gorontalo	0853.4061.2626
25	Sonya Yahya	/ Jl. Jeruk, Belle Moyoto Indah, B5, Wumialto, gorontalo	0813.5652.1071 / 0435-8781971
26	Mohammad Saripi	Jl. Bengsol Desa Tenilo Aayula Kec. Bolango Selatan	0852.9882.6773
27	Selvi Mukdin	Jl. Belimbing, Libuo kota, Gorontalo	0813.5625.7725
BALI			
1	I Gede Yudana, S.Pi	Jl. Kesatrian Gg. Palapa B1 No. 4 Karangasem.	08123647886
2	Drs. I Kayan Medan	Jl. Pulau Seribu Kel. Dauh Waru Kec. Negara, Kab. Jembrana	081558151740
3	I Made Antara, A.Md	Buahan Kintamani Bangli	081338691659
4	I Wayan Ardita, S.Pi	Br. Wongaya Bendul, Ds. Wongaya Gede, Penebet, Tabenan	081338705443
5	Ir. I Wayan Biantara	Br. Medahan, Ds. Mendahan, Kec. Blahbatuh, Gianyar	-
6	I Wayan Westra, SP	Jl. Tukad Ngenjung No. 19 Serangan, Dps, Bali	08123673255
7	I Wayan Windra, SE	Ds./ Br. Bungaya Desa Akah Kec./ Kab. Klungkung.	08123678290
8	I Nyoman Sudarta, S.Sos	Jl. Tukad Badung Gg. Drupadt No.5	08123910983
9	Wayan Astrawan, S.Pd	Dusun Labak, Desa Anturan, Kec. Buleleng.	081338701012
10	Ni Wayan Chilandari,SE	Jl. Pratama Gg.4000, No.3 Nusa Dua,	0819 1625 8300, 0361-772464
11	Ni Kadek Juliarini,S.Pi	Jl.Batuyang Gg. Rajawali II No.4, Batubulan, Gianyar	0852 3819 2289, 0361-295451
12	I Wayan Sucita	Dusun Penida Kaya , Tembuku Bangli	0813 3804 4664
13	I Putu Surya Gamen-tra,SE	Jl. Segara Werdi No.2	081805565362
14	I Made Yudiatha,SE	Br. Tengah Serangan	0813 3807 4120, 0361-7909024
15	Ramelan Arifin,A.Md	Jl. Gunung Semeru Gang.VIII A,No.11, Negara	0852 3701 3545
16	I Wayan Tambun,A.Md	Br. Dukuh Serangan Dep-sel	0813 3781 2469
17	Ida Bagus Putu Oka Suarbawa,S.Ag	Jl. Nusantara No.122 Bangli	0813 3757 2844, 0366-91390
18	Didik Bagus S,A.Md	Jl. Pakiraji III/22 Denpasar	0361-247821
19	I Wayan Siteng,SP	Lingkungan Pekandilan Kel. Abi-anbase, Kec.Gianyar, Kab. Gianyar	0816 296526
20	A.A Goe Putra Adi Parwatna,SE	Br. Bayulumbang, desa Bedulu, Blangbatuh, Gianyar	0813 38703026, 0361 -942343
21	I Nyoman Juwita,SE	Br. Buruan kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar	0852 3826 2001
22	I Made Bayu Mei Harta,A.Md	Jl. Sudirman Gg.III No. 16, Singaraja	0818 055579824, 036226536
23	I Ketut Dharmasan-tosa,SP	Jl. A.Yani Gg. Pidada No. 10, kel. Banyu Asri – Singaraja	0813 37820004
24	Drh. Gusti Ayu Eka Marianthi,SKH	Jl. Astina Selatan Gg. Astina Permai No. 3, Gianyar Bali	0813 3850 9043, 0361-943590
25	Suyono,SP	Jl. Ngurai Rai No.61 Amlapura	0813 3738 3227
26	Fahrur Razi,S.St,Pi	[illegible] negara,82217	085237393533,
27	ni [illegible] rastini	dinas kelautan dan perikanan provinsi bali	081236292572
NTB			

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
1	Multazah Ismail	Mataram	-
2	Manggala	Mataram	-
3	M. Khairul Pujianto	Mataram	-
4	Nanang Alfian	Lombok Barat	-
5	Abdul Azis	Lombok Barat	-
6	Mega Minami	Lombok Tengah	-
7	Ir. Lalu Narsiah	Jln. Bung Karno Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	
8	A. Rundi	Lombok Tengah	-
9	L. Hirmans	Lombok Tengah	-
10	Juki Satriyadi, S.Pi	Lombok Timur	-
11	L. Rizal Ihwandi	Lombok Timur	-
12	Wariadi, S.Pi	Tanak Maik Desa Mas Bagik Utara Lombok Timur	(0376) 631152
13	Herman Adi	Sumbawa	-
14	Zulkaranain	Sumbawa	-
15	Syahrul	Dompu	-
16	Zulkipli	Bima	-
17	Yudin Camdra	Bima	-
18	M Taufik Ismail	Kota Bima	-
19	Ir. Sulaeman	Kota Bima	
20	Hermanto Muis, S.Pi	BTN Olat Rarang Blok G No. 09 Sumbawa Besar	-
21	Drs. M Taufik, S.Ip	Dompu	-
22	Rumli, S.St	Mataram	-
23	Eko Setiono Purnomo	Mataram	-
24	Wiwik Susanti, S.Pi	Mataram	-
25	Sutarno, A.Md	Lombok Barat	-
26	I Nyoman Wijaya	Lombok Barat	-
27	Sudino, S.Pi	Lombok Tengah	-
28	I Gede Karwita, S.Pi	Lombok Tengah	-
29	Ahmad Subhan, SP	Lombok Timur	-
30	Asyriatun, S.Pi	Lombok Timur	-
31	Ismasti Supriyanto	Lombok Utara	-
32	Arzianingsih	Sumbawa Barat	-
33	Windustan, SP	Sumbawa Barat	-
34	Yanwar Saladin Chaidir, SP	Dompu	-
35	Sri Handayani, S.Pi	Bima	-
36	Nurwahyuni Widias-tuti, S.Pi	Bima	-
37	Adi Cawarman	Jln. Catur Warga No. 23 Mataram	
38	Baiq Yanti Budiastuti, S.Pi	Jl. Purbaya No. 15 Kopang Lombok Tengah	-
39	Heny Kamsiany, SE	Gg. Perkutut No. 78 Rt. 10 Rw. 04, Kel. Brang Bara, Sumbawa Besar	(0371) 24139
40	Kurniati, S.Sos	Jln. Gajah Mada Salam Na'E, Kec. RasanaE Barat – Kota Bima	-
41	Lalu Rizal Ihwandi, SE	Jln. Prof. M. Yamin No. 89 A Selong Kab. Lombok Timur	-
42	Lalu Zohri, SE	Kr. Baru Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang Lombok Barat	641052 08123700424
43	Nasaruddin, SE	Jln. Rajawali No. 1 Kel. Kandai Dua Kec. Wosa Kab. Dompu	-
44	Ni Ketut Swasthi, SP	Jln. Cempaka No. 9 Mataram	(0370) 638931
45	Drs. M. Taufik	Jln. Manuru Bata No. 5 Kel. Potu, Kab. Dompu	(0373) 623546
46	Multazam Ismail, S.Pi	Jln. Ade Irma Suryani Gg. Panda I No. 28 Monjok	-
47	Suharniatik, A.Md	Jln. Dr. Sutomo No. 55 Kr. Baru Mataram	(0370) 646476
48	Yuddin Chandra Nan Arif	Jln. Anggrek No. 02 Ranggo Na'E Kec. RasanaE Barat – Kota Bima	-
NTT			
1	Yohanes Nahak B, S.Sos	Desa Fahiluka Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu	-
2	Stefanus Suban K, SH	Flores Timur	-
3	Luliana Kleden	Kelurahan Lewo Lere, Kec Larantuka	-
4	Wenceslaus M. Parera	Sikka	-
5	Paulus Rhera, S.Pi	Ende	-
6	Martinus Pi Andja, S.Pi	Kel.Nangaroro Kec. Nangaroro Kab.Ngada	-
7	Irmawati,SE	Depan Pos & Giro Labuan Bajo, Flobar Manggarai Barat	-
8	Abdul Halim ST	Alor	-
9	Christina Say, SE	Kupang	-
10	Devi Meriyanti, SE	Asrama TNI-AD Kuanino, Kupang	-
11	Anna S Thei	Kab Kupang	
12	Marthen Mola, S.Pi	Kota Kupang	-
13	Rei Melelak	Kab Kupang	-
14	marten j mola	Kota Kupang	-
15	marianus a s nussa	ende	-
16	Frans Manafe	Belu	-
17	Frits	Alor	-
18	Diana GR Ndaparoka	Sumba Barat Daya	-
19	Nurwat, ST	Manggarai Barat	-
20	Amanda D. Kapitan, SE	Jl. Seroja Kefa Utara Kota Kefamenan	-
21	Ria Mariana Esterina Pellokila, SP	Jl. Supul II No. 30 Perumnas Kupanq	-
22	Maya Irawati Bokotei, S.Pi	Busalanggan Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao	-
23	Chrisanto Enggong, S.Pi	Rowang, Kel. Waso, Kec. Langke Rembonq, Kab Manggarai	-
24	Yohanes Ledo, SE	Lewoleba Kabupaten Lembata	-
25	Paulus Rhera	Nangaba-Rukuramba	-
26	Mery Nokas, A.Md	Jl. Raya Niki-niki, Soe No. 71 (Samp. Kanan Pos & Giro) Niki-niki, TTS	-
27	Christina Say, SE	Rt / RW 020 / 005 Kel.Liliba, Kec. Oebobo Kupanq	-
28	Hendrikus Yosafat, A.Md	Lela Kab. Sikka	-
29	Elisabeth Rumbu Padu Tayi, A.Md	Desa Manu Wolu Kec. Mamboro Sumbar	-
30	Chresna Marcel S. Panie, S.Sos	Jl. Soverdi No.4 Kupang	
31	Mahmud Amidin Hasan, A.Md	Jl. Ikan Kombong Rt. 19/ Rw. 06 Namosain Kupanq	-
32	Connie Francis, S.Pi	Jl. Sejahtera No.1 Kupang	-
33	Un Badul Halim, ST	Samping mesjid Babul Rahim Desa Bulolong	-
34	Yakob Pekuali, S.Pi	Jl. Palapa No. 30 Waingapu	-
MALUKU			
1	Muh. Zia Ulhaq P, S.Pi	Ds Rumah Tiga Teluk, Kota Ambon	085210647774
2	Lely Mara Katipana	Jl. Cendrawasih 99 Virgo No.21, Kota Ambon	081343047075
3	Nafry Loppies	Jl. Namalatu Rt.001/Rw. 01 Desa Seilale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon	081343046565
4	Emnie Wattihelu, S.Pi	Kab. Seram Bagian Timur	081247149349
5	Agustina E Tokndekut, S.Pi	Halong Rt.003/015, Jl. Wolter Monginsidi, Kota Ambon	08524358 316
6	Irene Gasperz	Wayame, Kota Ambon	085 243161107
7	Mona F.L. Rupilele	Kota Ambon	09113881273
8	Rahma Yanti Romonem	Jl. Kesatriaan Asmil Batu Merah Perumnas Waiheru Rt.017/007 Leo Wattimena, Kota Ambon	085211794303
9	Syardi, S.Pi	Harapan Jaya Rt.20/002 Desa Batu Merah Jl. Namalatu Rt 001/ Rw 01 Desa Seilale Kota Ambon	081240054768

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
10	Jerian D.V. Sitanala, S.Pi	Suli Bawah Rt. 002/01 Kec. Salahulu, Kota Ambon	085243598073
11	Nuraini Baadila	Perumnas Waiheru Rt. 017/007 Leo Wattimena	081343493 627
12	Una Selfi Tuapatty	Jl. Sultan Hasanuddin Kota Ambon	085243052090
13	Liska Bennedijk, S.Pi	Wayame Blok 1. No.66 Ambon	085243584316
14	Aminah N Hutueli, S.Pi	Waiheru, Leo Wattimena, Ambon	0852430610328
15	Yannes Pattinama	Benteng, Jl. Dr. Kayaodoe, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon	085243598073
16	Peter Abrahams	Desa Latuhalat Rt.004/01, Kec.Nusaniwe, Kota Ambon	085243474537
17	Joseph W Latubessy, S.Pi	Batu Meja Kec.Sarimau Kota Ambon	081343116288
18	M. Mochtar Tan	Kota Ambon	085243061660
19	John Suanthe Laipeny	Jl. Hatiari Omputty Rt. 001/11 Negeri Latuhalat, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon	085243580800
20	Moh Subhan Mardan	Jl. Sultan Baabullah Gg. Silale No.6 Ambon	081343008863
21	Ferdinand Matitaputty	Jl. Rijali No.19 A Kompleks Gedung Dekranas Kota Ambon	081343167555
22	J.K. Koedubun, S.Pi	Kab. Maluku tenggara	081244866691
23	Sien Siahaya, S.Pi	Kab. Kepulauan Aru	081343317816
24	Drs. Abdul H Loilatu	Kab. Buru Selatan	085243513 643
25	Liska Bennendijk, S.Pi	Wayame Blok 1, No.66	085243927833
26	Ilham Tamarele, S.Pi	BTN Manusela Blok G No.2-3	-
27	Isti Latar, S.Pi	Kota Tual	08528090 039
28	Fegy Bennedijk, S.Pi	Kab. Maluku Tengah	085243363311
MALUKU UTARA			
1	Boy F Andreas,SE	Kota Ternate	081356289599
2	Masri A Tuara, SE	Kota Ternate	-
3	Jamal Yusuf, SE	Kota Ternate	-
4	Idhar Abbas, SE	Ternate-Bacan	0813 4019 0760
5	Mohtar Basrah, SE	Ternate-Bacan	0812 6476 9742
6	Nurmala Amir, SE	Ternate-Bacan	-
7	M. Irfan, S.Pd	Tobelo-Halut	0821 9497 1911
8	Fadri, S.Pi	Tobelo-Halut	0821 9523 8822
9	Fadri, ST	Jailolo-Halbar	0813 4207 5069
10	Kadarin Poda, SE	Buli - Haltim	0813 4016 2410
11	Surdi M Taher, SE	Daruba-Morotai	0852 4061 3127
12	Asrul Hayatuddin	Soasio-Tikep	-
13	Farid Yahya		-
14	Sumarni Sangaji		-
15	Astuti Hi Gani, S.Pi		-
16	Muhammad Haykal, SE		-
17	Jailan Sapsuha		-
18	Budiman S, SE		-
19	Agus Triyono, SP		-
20	Nurdin T Madi, SE		-
21	Ismail achmad, S.Pi		-
PAPUA BARAT			
1	Tumpak Kristanto H S		085244200101
2	tengko karubaba		-
3	lahada		-
4	mahammad ali pical		-
5	omri tabibiati		-
6	demitrius orisu		-
7	yati suryati		-
8	welmina buiney		-
9	ahmad amir		-
10	H. rajab		-

NO	NAMA	KAB/KOTA	TELEPON
11	Rahman		-
12	Marten Krey		-
13	Eli Mensen		-
14	Alri Lepar		-
15	Tineke Tomasoa		-
Papua			
1	Edy Mambessy, S.Pi	YAYASAN SILOAM PUSAT PAPUA d/a. Jl. H. Sasuitubun Argapura Resimen	-
2	Yuni Siriwa, SE	YAYASAN SULUH RAKYAT PAPUA d/a. Jl. Sulawesi No. 6-8 Dok VII Jayapura	(0967) 542154 (0967) 542155
3	Maria Yarangga	YAYASAN KIPRA d/a. Jl. Yoka No. 1 Waena	
4	Aleks Bernadus Yarangga, SE	KOPERASI SERBA USAHA d/a. Jl. Yoka No. 1 Waena	
5	Adrianus Triyanto, S.Hut	YAYASAN ALMAMATER d/a. Jl. Brawijaya No. 13 Merauke Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke d/a. Jl.Perikanan Kelapa Lima Merauke	(0971) 324 346 - (0971) 325 249
6	Max Leleulja, S.Pi	KKW PAPUA d/a. Jl. Raya Sentani No. 64 Abepura	
7	Bernard Kriswin B,A.pi	YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP PAPUA d/a. PT. Pilar Pusaka Inti Komplek BTN Skyline Indah	
8	Catur Eni Hartanti	YAYASAN SULUH RAKYAT / DKP Provinsi Papua d/a. Jl. Sulawesi No. 6-8 Dok VII – Jayapura	(0967) 542 154 (0967) 542 155
9	Charles Yanggeroserai	KUB. MITRA BINAAN DKP KABU-PATEN JAYAPURA d/a. Jl. Sulawesi No. 6-8 Dok VII – Jayapura	(0967) 533423
10	Offersin Otto Yarangga, A.Md	KUB. MITRA BINAAN DKP KABU-PATEN JAYAPURA d/a. Jl. Sulawesi No. 6-8 Dok VII Jayapura	(0967) 533423
11	Edwin Maikel Jitmau	BDS TUNAS PAPUA JAYAPURA d/a. Jl. MT. Haryono No. 18 Entrop	(0967) 584109
12	Jemi Deda, A.md.Pi	KUB. MITRA BINAAN DKP KOTA JAYAPURA	
13	R. Muridno	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MIMIKA d/a. Jl. Mambruk No. 35 Timika – Mimika	(0901) 321 031 (0901) 321 031
14	HM. Nainggolan	YAYASAN SOSIAL PENGEMBAN-GAN KAWASAN TIMUR (FAK-FAK) d/a. Jl. MT. Haryono Dinas Peri-kanan dan Kelautan Kab. Fak-Fak Jl. Ekspo Wagon	(0956) 22423 - (0956) 24684
15	Ahmad Yani, S.Pi	YAYASAN SOSIAL PENGEMBAN-GAN KAWASAN TIMUR d/a. APSOR, Jl. Kapitan Pattimura	
16	Zan Fransisko Ayomi, SE	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Waropen d/a. Frans Kasiepo Serui	(0983) 31093 - (0983) 31714
17	Baharuddin	BKKBN Provinsi Papua	HP.0812480233
18	Ir. Murdijono	YAYASAN ALMAMATER MERAUKE d/a. Jl. Brawijaya No. 13 Merauke	(0971) 321334 - (0971) 325853
19	Marjayanti	Koperasi Tunas Harapan Koya Jl. Abe I Koya Barat	085244334833
20	Muryanto	Koperasi Tunas Harapan Koya Jl. Bendungan Kali Tami Koya Barat Muara Tami	085244334833
21	Mikhael Kareth, SE	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Jl. RSJ Abepura	081344318
22	Markus Asmuruf, SE	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua	-
23	SALOMI NOYA S.PI	JL. Angkasa Trikora Biak	08524498446
24	CHARLES ONDOAFO	Kampung Senamai Distrik Yokari Merauke	-
25	GUSTAV DAIDSON MAY	Jl Nuri Barta No.86 PIR II Distrik Arso, Kab.Keroom	-
26	MATILDA SUEBU SPi	Jl.Sentani Kemiri Jayapura	-
27	ERNA WIDYANINGSIH	Koya Barat Kota Jayapura	-
28	LUKKY WOKA S.Pi	Dkp Kab.Mimika	-
29	BERNARD	PPL Kab jayawijaya	0814929011

Lampiran 4 : Website

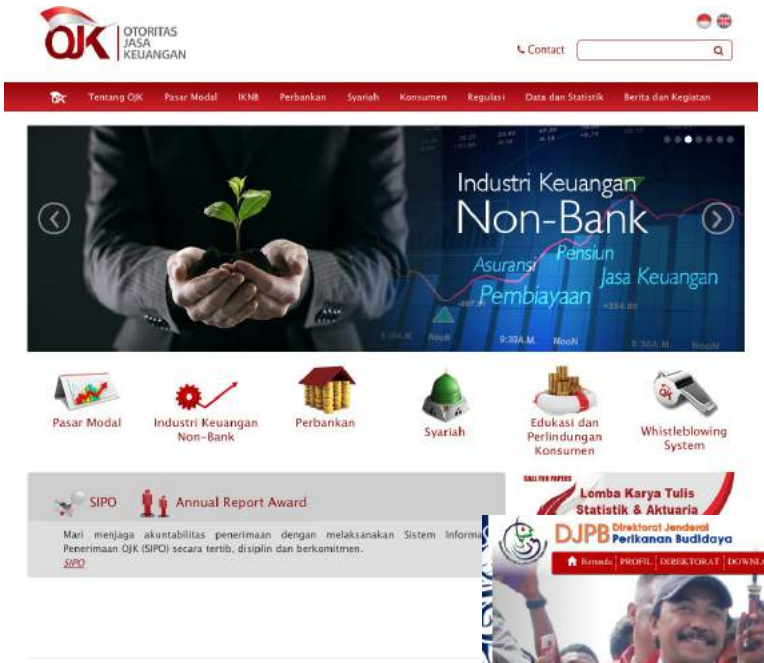

http://www.ojk.go.id/

http://www.djpb.kkp.go.id/